

Penandatanganan tersebut dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda dilaksanakan di Istana Kerajaan Protestan Belanda, dihadiri oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Wilem Drees, Menteri Seberang Lautan, Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Drs. Mohammad Hatta.

Di Indonesia, dilaksanakan di Jakarta, antara Sri Sultan Hamengkoe Boeana IX dengan Wakil Tinggi Mahkota, A.H.J. Lovink.

Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.<sup>82</sup>

Sehari setelah adanya penanda tanganan pengakuan kedaulatan Indonesia, 27 Desember 1948 maka Presiden Soekarno pada 28 Desember 1949 kembali ke Jakarta. Rakyat dengan antusias menyambut kehadiran Presiden seperti pertama kali Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden RI, sehari sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Rakyat tidak membedakan antara Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia - RI atau sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat - RIS. Walaupun sudah adanya pemisahan antara kedua jabatan tersebut. Mr. Assaat sebagai Presiden RI, dan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Pemisahan ini belum dipahami benar oleh rakyat. Mereka hanya mengerti bahwa Boeng Karno adalah Presiden.

Partai Politik bagi rakyat awam sebagai tempat berjamaah dan menambah ilmu tentang kenegaraan dan pemerintahan. Sekaligus sebagai media rakyat menunjukkan baktinya pada negara dan bangsa. Apalagi, mengenai arti bahasa perundingan, rakyat awam tidak banyak memahami bahasa perundingan yang banyak makna dan tafsirnya.

Bagi rakyat awam, tertanam pemahaman tindak melawan peraturan pemerintah dan agama, sebagai tindakan melawan hukum kodrat. Oleh karena itu, kesetiaan, penghormatan serta kebaktian kepada pemimpin sebagai dasar kemuliaan jiwa yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya.

Sikap rakyat terhadap para pemimpin juru runding Konferensi Medja Bundar, tidak diperhatikan kekurangan dan kesalahannya. Bagi rakyat yang penting dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri karena perjuangan para pemimpin sipil dan militer, serdadu penjajah Belanda meninggalkan Indonesia. Kecuali Irian Barat. Rakyat dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan, mereka menyambut kehadiran kembali Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama menterimenterinya sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan yang berhasil melepaskan rakyat dari penindasan penjajah.

82 Periksa, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949*.

Rakyat menyadari dengan tidak dilepaskannya Irian Barat atau Papua oleh Kerajaan Protestan Belanda, berarti perjuangan mengakhiri penjajahan di Nusantara Indonesia belum berakhir. Apalagi, perjuangan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, seperti yang menjadi tekad bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 masih memerlukan perjuangan panjang dalam membangun kesatuan dan persatuan seluruh bangsa-bangsa yang terjajah. Penjajah di manapun selalu memperbodoh bangsa-bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad para Ulama bagaimana membangun pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364.

## Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam

Dengan adanya kepindahan pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, 4 Januari 1946 maka Sekolah Tinggi Islam yang didirikan pada 27 Rajab 1364, Ahad Legi, 8 Juli 1945, ketika masih di bawah pendudukan Jepang, ikut pula pindah ke Yogyakarta. Perpindahan ini berdampak terjadinya perubahan status Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia -UII. Rektor pertama adalah K.H. Kahar Moezakkir. Ketua Dewan Kuratornya adalah Drs. Mohammad Hatta.

Drs. Mohammad Hatta dalam pidato pembukaan Sekolah Tinggi Islam -STI menyatakan:

Agama adalah salah satoe tiang dari pada keboedajaan bangsa. Bagi rakyat Indonesia jang lebih koerang sembilan poeloeh persen memeloek agama Islam. Menjemparkan pendidikan agama adalah satoe soal jang maha penting oentoek memperkokoh kedoedoekan masjarakat.

Negara Indonesia Merdeka menghendaki soesoenan masjarakat jang koeat. Masjarakat jang berdasarkan tjipta2 persaudaraan dan tolong menolong. Oentoek mentijapai masjarakat jang sematjam itoe, perloelah disempoernakan pendidikan Agama Islam.

Agama Islam adalah pelito jang sebaik-baiknya oentoek menjeloehi jalan rakyat kedalam masjarakat persaudaraan kedalam masjarakat persaudaraan dan tolong menolong. Oentoek menjemparkan pendidikan Agama Islam perloe sekali pendidikan tinggi.



## **PROF. K.H. ANWAR MUSADDAD**

Masa mudanya Santri Pesantren Cipari Wanaraja Garut, dan Madrasah Al-Ikhlas Jakarta, serta Madrasah Indonesia di Makkah. Mukim di Makkah selama 11 Tahun. Merupakan murid HOS Tjokroaminoto, dalam Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I, sekaligus Pimpinan Lasjkar Hizbullah di Uarut bersama K.H. Moestafa Kamil P.S.I.I

Imam Besar Masjid Syuhada di Ibu kota perjuangan RI Yogyakarta dan bersama Prof Kahar Muzakkir mendirikan PTAIN Yogyakarta. Pendiri dan Rektor pertama IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pembangun Pesantren Musadaddiyah di Garut.

Menolak Ordonasi Perkawinan 1973 di DPR dengan melakukan walk out

Menjalin kerjasama dakwah dengan Orang Kaya Digadong Seri Raja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohammad Taha dari Brunei Menghabiskan hayatnya berjuang dan berdakwah untuk mencerdaskan bangsa.

Dari pesan Drs. Mohammad Hatta ini, pendirian Sekolah Tinggi Islam sebagai tuntutan zaman yang tidak dapat ditolak. Suatu keharusan kelengkapan sarana perjuangan umat Islam yang harus dimulai dalam upaya meningkatkan mutu dan tempat studi lanjut pendidikan pesantren. Dari Universitas Islam Indonesia diharapkan akan lahir pemimpin bangsa yang siap melanjutkan perjuangan Ulama.

Apalagi tuntutan tersebut meningkat dengan adanya zaman peralihan antara pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan Republik Indonesia, terbukti yang menduduki pimpinan bangsa, baik yang duduk dalam KNIP, Kementerian, Partai Politik umumnya yang berlatar belakang pendidikan SLA atau Perguruan Tinggi dari pendidikan Barat.

Dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, yang duduk dalam Kementerian, Kepamongprajaan, KNIP, umumnya yang memiliki latar belakang pendidikan Barat. Misalnya Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmto, Sjamsjoeridjal.

K.H. Wachid Hasjim sendiri sebagai Menteri Agama menginginkan adanya pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Bukan hanya akan melahirkan santri yang hanya memahami ajaran agama Islam semata. Lebih sempit lagi hanya memahami masalah fiqh. Melainkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dari berbagai cabang ilmu yang diperlukan masyarakat. Tidak hanya pelayanan keberagaman macam pendidikannya, tetapi juga harus memiliki sistem penjenjang atau strata pendidikan: dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Fungsi pesantren di bawah penjajah pemerintah kolonial Belanda, beda sekali dengan fungsi pesantren di alam kemerdekaan karena setelah pengakuan kedaulatan maka peranan pegawai negeri sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Terjadilah proses rehabilitasi dan reorganisasi sistem pemerintahan, dampaknya menuntut pula pembaharuan sistem pendidikan. Keseluruhan upaya ini terletak di atas pundak pegawai negeri.

K.H. Wachid Hasjim sangat menyadari setelah memimpin Departemen Agama, sejak pendudukan Jepang, menemui kesulitan memperoleh human resources yang berlatar belakang pesantren dan mampu memimpin administrasi Departemen Agama dengan Kantor Agama. Pada masa penjajahan, Pesantren tidak mengenal kantor. Dengan kata lain, pesantren tidak menyiapkan tenaga siap pakai dalam perkantoran di bawah Departemen Agama di tengah pembaharuan tata pemerintahan.



K.H. Wachid Hasjim terbangkitkan perlunya pembaharuan sistem pendidikan agama, setelah dibukanya Universiteit Gadjah Mada - UGM di Yogyakarta, 3 Maret 1946, yang berstatus negeri. Apalagi, isi pidato Presiden UGM Prof. Sardjito menyatakan bahwa:

Letak Universiteit Gadjah Mada di antara Tjandi Prambanan dan Borobudur maka Universiteit Gadjah Mada haruslah kelak mendjelmakan reinkarnasi Prambanan dan Borobudur.

Mendengar pidato Prof. Sardjito ini, K.H. Wachid Hasjim menyatakan, secara demokrasi dan zaman modern, isi pidato dan sistem mengeluarkan pendapatnya adalah bebas. Diingatkan pada zaman modern masih ada penganut Djawanisme yang masih mengharapkan Universiteit Gadjah Mada menjadi reinkarnasi candi Prambanan dan Borobudur.<sup>83</sup> Lalu, apa yang harus dikerjakan oleh seorang K.H. Wachid Hasjim dengan Departemen Agama yang dipimpinnya?

Departemen Agama terpacu untuk segera membuka sistem pendidikan yang berjenjang dan berstatus negeri, serta berkantor yang terkait dalam kehidupan masyarakat beragama dan bernegara. Oleh karena itu, dibukalah: Pendidikan Guru Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Penerangan Agama. Di samping itu, Departemen Agama memiliki aktivitas yang terkait dengan luar negeri, yakni masalah Haji dan Umrah untuk Islam. Termasuk pengiriman siswa atau mahasiswa yang ingin studi di Timur Tengah atau tempat lain.

83 Panitia. 1958. *Cp. Cit. hlm. 783-786* K.H. Wachid Hasjim menuliskan namanya dengan nama samaran Ma'mun Bingun, 22 Desember 1951, 23 Rabul Awwal 1371, dengan judul "*Ummat Islam Ind nesia Menunggu Adjuhnya Tetapi I emimpin2 Nju tidak Tahu*".

## DARI PTAIN, IAIN HINGGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pelopor pembangunan Perguruan Tinggi Islam pada masa Pendudukan Belanda lalu Dijepang adalah Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir dengan Sekolah Tinggi Islam - STI di Jakarta. Kepindahannya ke Yogyakarta berubah menjadi Universitas Islam Indonesia - UIN berstatus Swasta.

Akibat adanya perda pembukaan Prof. Sardjito pada saat pembukaan Universitas Negeri Gadjah Mada - UGM ketika letak kampus UGM di antara candi Prambanan dan candi Borobudur, dan ingin menjadikan alumninya sebagai pelanjut ajaran Hindu dan ajaran Buddha, membanggikannya K.H.

Ditintilah melalui Departemen Agama yang membuka Akademi Dinas Ilmu Agama - ADA. Kolonjannya berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam - PTAIN. Langkah penyempurnaan dilakukan menjadi Institut Agama Islam Negeri - IAIN. Diawali masa Presiden Dr. Abdurrahman Wahid ditandaikan bidang studinya tidak hanya sebatas studi Agama, tetapi juga aman dengan bidang studi seperti yang disenggarakan oleh Diknas hingga berubah menjadi Universitas Islam Negeri - UIN.

Tampak pada gambar di atas Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber: Wivianto Samadi



Dengan demikian, Departemen Agama memiliki banyak urusan. Apabila menggunakan istilah departemen maka dalam Departemen Agama terdapat banyak departemen: Departemen Pendidikan dari Pendidikan Rendah, hingga Pendidikan Tinggi, Departemen Pengadilan, Departemen Penerangan, Departemen Urusan Agama, dan Departemen Luar Negeri bidang Haji dan Umrah.

Pembaharuan pendidikan menuntut pembukaan banyak sekolah pada setiap kabupaten, keresidenan dan provinsi. Tuntutan ini membutuhkan tenaga guru. Oleh karena itu, Depatemen Agama membuka sistem pendidikan berjenjang: Ibtidaiyah - SD, Tsanawiyah - SMP, Aliyah - SMA, Pendidikan Guru Agama - PGA, Sekolah Guru Hukum Agama - SGHA. Dibuka pula Akademi Dinas Ilmu Agama - ADIA, selanjutnya untuk strata satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri - PTAIN. Kemudian, berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri - IAIN.<sup>84</sup>

Dengan adanya pembaharuan pendidikan ini, tidaklah berarti sistem pendidikan Pesantren dimatikan, tetapi terus diberdayakan dengan kurikulum yang lebih dinamik disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Nahlatoel Oelama, Persyarikatan Moehammadiyah, Persatoean Islam di P. Jawa masih mempertahankan adanya Pesantren. Dengan pertimbangan semakin semaraknya pembaharuan pendidikan hanya ditujukan untuk dipersiapkan menjadi pegawai negeri. Bagaimana kalau kantornya sangat terbatas penerimaan pegawainya?

Pesantren melayani pembinaan terciptanya insan cerdas dan berkarakter Muslim dan mampu mandiri serta siap menjadi pemimpin umat dan bangsa. Untuk tujuan ini, timbulah sistem pesantren terpadu. Di dalamnya, terdapat sistem penjenjangan dari dasar hingga pesantren luhur.

Ulama melihat realitas ketertinggalan dalam menciptakan sarana pendidikan. Beda dengan kalangan Missi dan Zending, telah memiliki gedung sekolah yang representatif warisan masa pemerintahan kolonial. Dana pendidikan dari yayasan pendidikan Islam, terlalu minim yang dimilikinya. Namun, tidak putus asa dalam menjalankan tugas ibadah pendidikannya. Ulama berjuang terus memajukan pendidikan dari pelosok desa hingga kota-kota besar dengan dana swadaya umat Islam.

---

<sup>84</sup> Sesudah Reformasi, 1997 M, terjadi pembaharuan sistem pendidikan. IKIP berubah menjadi Universitas. Pengaruhnya IAIN juga meluaskan bidang kajiannya. Tidak hanya sebagai Institut yang membatasi studi Agama. Diluaskan sama dengan Universitas yang berada di bawah Dikbud. Oleh karena itu, diubah menjadi Universitas Islam Negeri - UIN. Gelar Sarjana UIN tidak lagi seperti IAIN - S.Ag, M.Ag lagi, berubah disesuaikan dengan ilmu yang studinya sama dengan gelar Sarjana pada umumnya di Indonesia.



BANDUNG — SENIN KLIWON, 18 NOVEMBER 1968

Amanat Panglima Dharsono Pada Peresmian Satu-satu RS di Djabar :

# Rumah Sakit Islam

## Amal Njata Jang Paling Djarang Dalam Kalangan Ummat Islam



MAJDEN HR. DRARSONO

Pecegasan Panglima Dharsono itu dikemukakan Minggu kemarin dalam amanat terulis yang diajukan oleh Kediaman VI/Silwan bagi Brigjend Dr Agusci pada peresmian Rumah Sakit Islam pertama di Bandung, bahanan di Djabar jang diselenggarakan oleh M Iman madijah. Dikemukakan, bahwa bagaimana Islam terpaku harus kita akui, yang njata dalam masa raket tidak tidak seluruhnya angara anduran berbentuk amal kebadikan dengan kegiatan membuktikan amal kebadikan itu sejara njata. Tidak heran, kalau dimajara kita yang telah ketid kala laju dan berjaya: "Apakah adziran dan Islam dapat menjawab janangan2 kelelahan zaman modern ini?

Paru diketahui dengan direksikan Rumah Sakit Islam per jang yang dibangun oleh Muham-

madijah, di Djl. Benteng 41 Bandung, dalam Kodya Bandung mendapat tambahan satu Rumah Sakit lagi menjadi 2 Rumah Sakit. Rangkaian Satu Jang telah ada: oby RS Hasan Syarifuddin (Pemerintah), RS Wlaia Atiqah (AUR), RS Chandra Kirana (Pindad), RS Kebondjati (Gajasan Kebondjati), RS Borromius (Kotlik), RS Santo Yosef (Kotlik), RS Immanuel (Kristen), RS Adven (Advert Kot) dirambah RS Islam Muham mazijah (Muhammadin)

Sahang Sekui.

Sejelas menjampulkan terima kasih kepada Muhammadiyah jang sedjik 1912 lebh menulis beratkan kegiatan dakwahnya pada amal kebadikan dan usaha2 sosi al. Panglima Dharsono dalam amanatnya mengemukakan, bahwa asjeng sekali usaha2 Muhammadiyah kurang medapati perhatian dan dukungan dari umma, Islam sendiri. Sajang sekali demikian Panglima, karena pergerakan antara golongan Islam saat sejauh ini diperhebat dengan celsu dan kampanye politik serta karena kejadian2 ummat jang ibar, telah ber-kos2 itu maka apa jang baik jari golongan lain tidak akan dikuat, apalagi dibantu. Tidak jarang terjadi maksum dan usa na jang baik disebolir dengan ber majam2 para dan djalas, ai dengan fitnah jang kali. Akhirnya demikian Panglima, umma ber agama mesudah kaum Komunis berbusa doa dengan tista tuduhan menghasilkan cogak marjam djasan, dan memang demikian pendapat orang Komunis, tapi agar orang Islam berkerja untuk saling mendukuh, banjir tak berhenti dengan jatah kaum Komunis, dengan unsur Muslim, ha surau anal sadja tuduhan mereka terjawab.

BANDUNG, 18-11 (PR). —

PANGDAM VI/Silwan Majjen HR Dharsono Minggu kemarin me ngakakan, bahwa suatu pembangunan amal shalih jang njata sebagai fakta, paling djarang terjadi dalam kalangan ummat Islam. Mungkin bagi ummat jang lalu soal mendirikan Rumah Sakit adalah suatu soal biasa, soal routine se-akuan2 menang sebutusna demikian, jaitu berbijara (entang amal shalih diukur bukti njata).

Bisa Kurang Kepergajinan Berhingga tentang usaha meningkatkan keadilan2 umat masyarakat dan spirtujiut masyarakat Indonesia, Panglima memegukan, bahwa (elah moudjaz) rahasa umum djumlah Rafiq, jang mendefinisikan pengajian dijoga, termasuk jang mengaku beragama Islam, besar sekali. Kalau tetu menensu dijarkan, penerangan agama mengenai kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan dalam keraja an, jang hidup orang beragama, manusia hancur maknai neraca, bukanlah inti di dalamnya. Untuk kekurangan kepergajinan (terkecuali Allah, terhadap Agama dasar terbaik kesemihan bagi golongan jang anti Agama maupun non Tu han) untuk memperbaiki mereka. Oleh karena itu, demikian Pang

lima, dengan dijirkannya Rumah Sakit Islam menunjukkan baki, bahwa orang Islam bukan suda ponda2 menjari2 kesalihun golong an agama liya dengan alasan men dasar, banjir "idak wadjar dari luar negeri, iapi ummat Islam dia ga dapat bekerja dan akhir perlu berlombong setjata sporif. Di ingatkan, bahwa siap melemparkan kesalihun terhadap pendidik, PKI dan Orba dengan tidak berburu sesorang apa, adalah merupakan dosa. Demikian Panglima Dharsono.

Sumber: Pikiran Rakyat, 18 Nopember 1968



NURIANA

Satu-satunya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang menciptakan Al-Qur'an Mushaf Sundawi, kebijakannya dalam bidang Agama menjadikan Jawa Barat tumbuh sejauh Majid, Pesantren, dan Pesantren Al-Qur'an, seperti Pesantren Al-Qur'an Babussalam Cibubur Dago Bandung (Pimpinan Drs. H. Muchtar Adam) dan Pesantren Al-Falah Cicalengka Sumedang (Pimpinan Drs. K.H.Q. Ahmad Syahid, Ph.D.). Mengordinkasikan pula lahirnya Tafsir Al-Qur'an Nur Hidayah dalam bentuk Tembang Sunda Cianjur dan Raya Hidayah dalam lingkungan seni tembang Cianjur, Universitas Padjadjaran Bandung, dan mendorong lahirnya lingkungan seni tembang Cianjur, antara lain Lingkungan Seni Tembang Cianjur Diah Praloka.

Sumber: Penyebarluasan PETIA di Cilacapa Pangalengan

## H.M. UKMAN SUTARYAN

Satu-satunya Wakil Gubernur Jawa Barat menjadi Ketua ICMI Orwil Jawa Barat. Bersama Dr. Ir. Hidayat Salim - Pengaruh Islam Muhammadiyah, Drs. H. Shiddiq Anis, MBA - Pengaruh Islam, K.H. Haji Rabib - Nalebitul Ulama, K.H. Drs. Syamam Shiddiq - Syarikat Islam, dan Prof. Dr. Djunaidi Dahlan, Dr. H. Rahman Mass Sp.R., dan Prof. H. Wahab Aliji, Dr. H. Nuroni Hidayat - Direktur RSU Alisjahar membangun Rumah Sakit Islam Alisjahar di Bale Endah Bandung.

H.M. Ukman Sutarmi menerima Medali dan Presepsi pada 1994, dan Salayalencana Karya Senja Kelas I pada 1992, Salayalencana Biddang Koperasi pada 1994, dan Salayalencana Pembangunan Biddang Pertanian pada 1996.

Raden Rt. Sumaryati adalah dinasti dari Keraton Yogyakarta, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, satu-satunya istri Wakil Gubernur Jawa Barat 22 kalif ke Makkah, di antaranya 10 kali ibadah Hajj, baik melalui ONH biasa atau Plus.

Sumber: Doc. Prihati

**TEMBANG SUNDA CIANJURAN**  
Media dakwah yang berkembang pula di masa Orde Baru



Sumber: R.Ace Hasan Su'eb, Wawasan Tembang Sunda

Revolusi pembaharuan pendidikan ini belum secara tuntas dilaksanakan, Menteri Agama K.H. Wachid Hasjim menemui kecelakaan mobil di Cimindi, Cimahi, Bandung, 19 April 1953, Ahad Pon, 4 Sya'ban 1372 H.

Pada saat kecelakaan terjadi, oleh Ahsien dari pimpinan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, K.H. Wachid Hasjim yang telah wafat dibawa ke Rumah Sakit Santo Boromeus. Melihat Menteri Agama pada saat wafatnya dipulasara di Rumah Sakit Katolik, secara Katolik, mengilhami Badan Kerjasama Wanita Islam - BKSWI Bandung, terbetik niat membangun Rumah Sakit Islam dan juga berfungsi sebagai Teaching Hospital.

Niat ini terkabul, dirintis oleh Hj. Hadijah Salim, Hj. Rogajah, serta Hj. Saribanon, dari Badan Kerjasama Sama Wanita Indonesia - BKSWI dan anggota DPRD Jawa Barat, bekerja sama dengan Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, dan Gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi, berdirilah Rumah Sakit Al-Islam Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, 9 Muhamarram 1411, Rabu Legi, 1 Agustus 1990.

Berdirilah tahap awal Rumah Sakit Al-Islam yang disponsori oleh BKSWI Jawa Barat yang terdiri dari: Aisyiyah, Persatuan Islam Istri - Persistri, Muslimat Nahdlatul Ulama, Wanita Sjarikat Islam, dan Wanita Persatuan Umat Islam - PUI.<sup>85</sup>

Proses pembangunan Rumah Sakit Al-Islam diawali dari dana yang diperjuangkan oleh Hj. Hadijah Salim, mendapat dari Kerajaan Saudi Arabia hanya sejumlah Rp 28.000.000,00. Untunglah disusul dengan Presiden Soeharto membantu dana, Bantuan Presiden, lebih besar dari Saudi Arabia, Rp 200.000.000,00. Ditambah dengan partisipasi Dai Sejuta Ummat, K.H. Zainuddin MZ sejumlah Rp 9.000.000,00. Dari ketiga sumber dana itu dan dana umat Islam lainnya, Badan Kerjasama Wanita Islam - BKSWI berhasil membangun Rumah Sakit Al-Islam.

Sebagai catatan tambahan, di Bandung terdapat tiga Rumah Sakit Islam:

Pertama, Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan Banteng atau K.H. Ahmad Dahlan Bandung, dipimpin oleh Dr. Sjachron Fadjar mendapat dana bantuan dari Presiden Soekarno.

Kedua, Rumah Sakit Al-Ihsan<sup>86</sup> di Bale Endah Bandung, dirintis oleh Drs H.M. Ukman Sutaryan Wakil Gubernur Jawa Barat dari dana zakat masyarakat Islam Jawa Barat.<sup>87</sup>

85 Periksa, Tim Penyusun. 2001. *Catatan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit Al-Islam Bandung*.

86 Hasan Syukur, 1426H/2005 M. *Birokrat Mencari Keadilan. Perjuangan H.M. Ukman Sutaryan Melawan Kezaliman*. Baitul Hikmah. Bandung, hlm. 67- 104

87 Ulama mulai menyadari pentingnya meningkatkan keschatan umat, ditantang untuk mendirikan



HJ. HADIYAH SALIM

Dua Wanita Islam Penggagas dan Pendiri

Rumah Sakit Al-Islam di Jalan Sukarno Hatta Bandung.

Terilihnya melihat **K.H. Wahid Hasjim**, Menteri Agama wafat karena keselakan mobil yang ditumpanginya di Cimindi, Cimahi, kemudian dipulasara secara tidak Islami di Rumah Sakit Katolik Santo Borromeus Bandung.



HJ. ROGAYAH BUCHORIE

Sumber: Doc. Prihadi

Dari jawaban para Ulama dan BKSWI terhadap tantangan zamannya ini, perkembangan masyarakat Islam, memerlukan adanya tenaga medis. Bagaimana, dari mana dan di mana dididiknya. Universitas Islam Bandung dirintis oleh Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, H. Achmad Tirtosudiro akhirnya Rektor Prof. Dr. Endang Saefullah SH. MH dibukalah Fakultas Kedokteran, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Al-Ihsan, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Muhammadiyah.

Gambaran di atas hanya sebagai salah satu contoh, tahapan jawaban Ulama terhadap tuntutan perubahan zaman, dalam upayanya pemenuhan kebutuhan pendidikan meluas meliputi segala bidang. Apabila Pesantren pada masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M, telah membuktikan melahirkan alumni yang mampu memimpin Perang Gerilya maka setelah perang selesai, Ulama kembali disibukkan membina Pesanten, Sekolah, Sekolah Tinggi dan Universitas, dengan gaya baru guna membangun umat, mencetak Santri Kader pemimpin bangsa dan negara.

Para Ulama pejuang, seperti K.H. R. Abdoellah bin Noeh, K.H. Noer Ali, K.H. Soetalaksana, K.H. Pardjaman, K.H Sholeh Iskandar, K.H. Rusad Nurdin, K.H. Sjam'oen, K.H. Ahmad Chatib, K.H. Joesoef Hasjim dan masih banyak lagi, selesai perang tanpa menuntut tanda jasa, kembali berjuang membina pesantrennya atau lembaga pendidikan lainnya.

Misalnya, K.H. Sjam'oen sebagai Komandan Divisi Tirtajasa Banten, kembali membina Pesantren Al-Chorijah Citangkil Cilegon Banten. K.H. R. Abdoellah bin Noeh, Danyon Peta Batalyon I Jampang Kulon, Tentara Keamanan Rakjat -TKR, KNIP Jogjakarta, kembali membina Majlis Al-Ghazali di Bogor. Melalui Pesantren yang dipimpinnya, dibentuklah *character and national building* masyarakat dan alumninya menjadi *Insan Kamil* yang kreatif, berguna dan mandiri.

K.H. R. Abdoellah bin Noeh tidak hanya aktif sebagai pembina Pesantren di Bogor, tetapi juga menjadi Dosen Senior Lektor Kepala di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab Universitas Indonesia Jakarta. Diangkat sebagai Sesepuh dari Majlis Al-Ghazali dan Majlis Al-Ihja.

---

Rumah Sakit Islam dan Fakultas Kedokteran. Penulis kira belum pernah diterbitkan secara khusus Sejarah Pendirian dan Perkembangan Rumah Sakit Islam dan Fakultas Kedokteran di Indonesia. Perlu diteliti di mana dan bilamana serta siapa atau organisasi apa yang mendirikan. Misalnya Rumah Sakit Islam Surakarta di pimpin oleh Dr. Mohammad Djufri, lebih dahulu mana dengan Rumah Sakit Islam Jakarta - didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam pimpinan Prof. Dr. Jurnalis di Cempaka Putih Jakarta, dllnya.



## **DR. K.H. E.Z. MUTTAQIEN**

Bersama A.H. Nasution dan Dr.Ibnu Sutowo  
menasionalisasi perusahaan Belanda

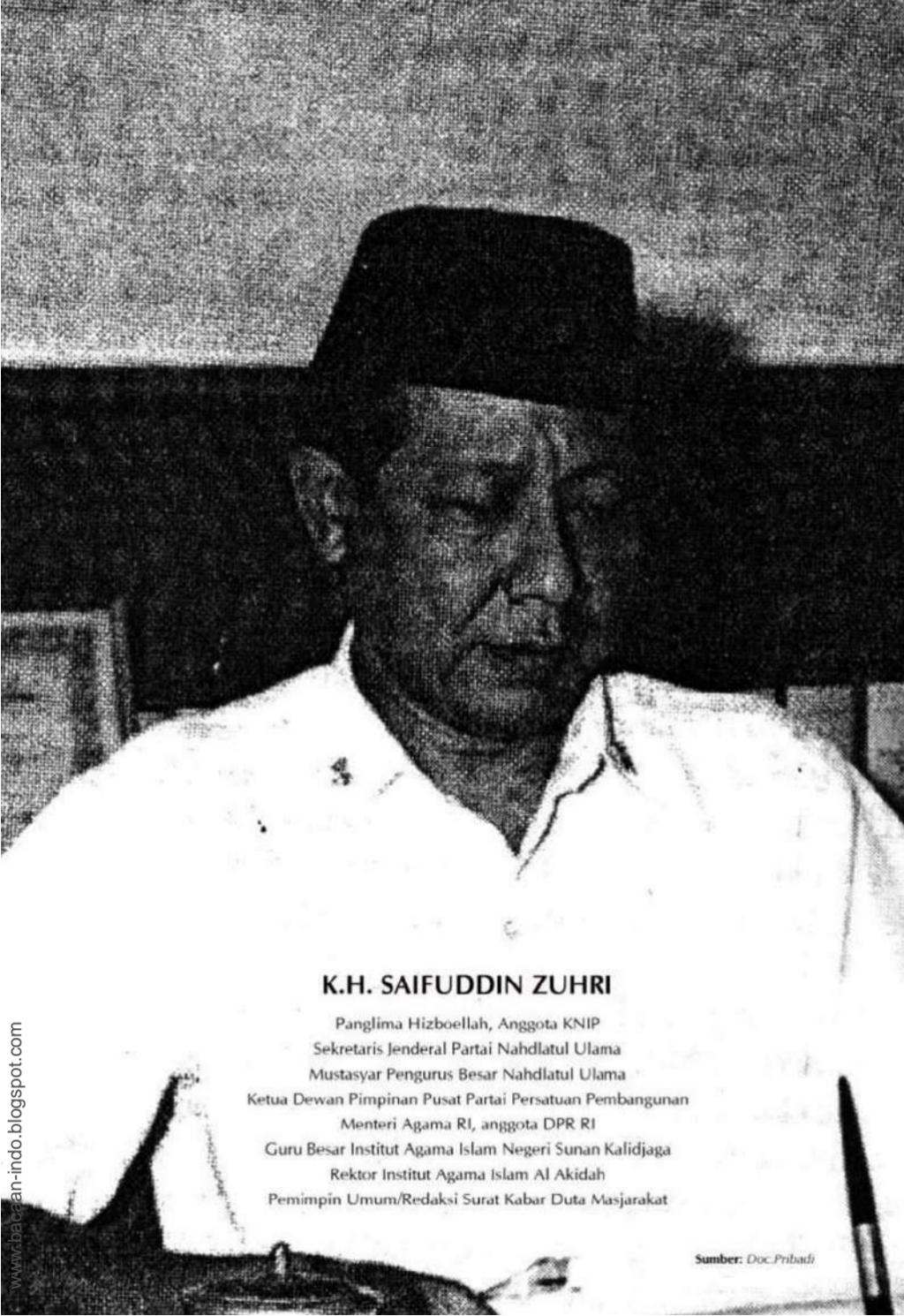
Ketua DPRD Jawa Barat

Pendiri Sekolah Dasar Pertjobaan Islam di Bandung  
Ketua GPII ikut dipenjara di RTM Madiun karena anti komunis

Ketua Madjelis Ulama Indonesia Jawa Barat

Rector ke-3 Universitas Islam Bandung  
Pendiri Lembaga Sejarah Universitas Islam Bandung

Pendiri Badan Amal Muslimin Pancasila  
Pendukung gerakan Keluarga Berencana di Jawa Barat  
Pendiri Rumah Sakit Al Islam Sukarno Hatta Bandung



## K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Panglima Hizboellah, Anggota KNIP  
Sekretaris Jenderal Partai Nahdlatul Ulama  
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Menteri Agama RI, anggota DPR RI  
Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Rektor Institut Agama Islam Al Akidah  
Pemimpin Umum/Redaksi Surat Kabar Duta Masjarakat

K.H. Soleh Iskandar setelah meninggalkan Tentara Peta, aktif dalam Perang Gerilya dari Lasjkar Hizboellah. Aktif pula dalam Partai Islam Indonesia Masjumi. Pada masa Orde Baru, aktif membangun Darul Falah Pesantren Pertanian dan Peternakan satu satunya pesantren di Indonesia, tidak hanya diajari masalah agama, melainkan juga diajari memelihara ternak dan masalah pertanian. Di samping itu, juga ikut serta membina Universitas Ibn Khaldun di Bogor. Pada 21 Mei 1980, menjadi pendiri Yayasan Lembaga Sejarah Islam.

Prof. Dr. Buya Hamka, selain ikut aktif dalam pembinaan Persyarikatan Muhammadiyah, membina Majalah Panji Masyarakat, serta Universitas Muhammadiyah tetapi juga membangun Yayasan Lembaga Sejarah Islam.<sup>88</sup> Diresakan perlu pula para Ulama menuliskan Sejarah Umat Islam Indonesia dari sisi analisis Ulama. Tidak kalah pentingnya, di bidang politik, Prof. Dr. Buya Hamka menjadi anggota Konstituante 1955-1959 M. Tidak lupa menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia di masa Orde Baru.

Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan IKIP juga ditantang untuk membuka Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Malang. Selain Fakultas Sastra, Teknik, juga dibuka Fakultas Ekonomi. Dari sini, diharapkan bangkit kembali kesadaran ekonomi dan perlunya umat Islam menguasai kembali kekuasaan pasar yang pernah dialihkan oleh pemerintah kolonial Belanda penguasaan pasar pada Vreemde Oosterlingan.

K.H. Rusad Nurdin sebagai pimpinan Lasjkar Hizboellah, kembali aktif sebagai anggota Konstituante dari Masjumi, di masa Orde Baru, Ketua Parmusi Jawa Barat, Yayasan Dana Al-Falah, Ketua Parmusi Jawa Barat, Dewan Dakwah Islam Indonesia - DIIJ Jawa Barat, dan Yayasan Istiqamah Bandung. Di samping itu, juga aktif memberikan kuliah Pendidikan Agama di ITB, IKIP dan Unpad serta Ketua Yayasan Pendidikan Islam Universitas Islam Bandung. Pada Orde Reformasi menjadi Sesepuh Partai Bulan Bintang.

Di Bandung, Idham Chalid meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama -UNU dengan dua Fakultas Hukum dan Ekonomi. Berikutnya, namanya berubah menjadi Universitas Islam Nusantara-UNINUS di Jalan Sukarno-Hatta sebagai pemindahan kompusnya dari jalan Galunggung Bandung. Bersamaan waktunya dengan Idham Chalid tersebut, I.J. Kasimo membuka Universitas Katolik Parahiyangan - UNPAR dengan dua Fakultas Hukum dan Ekonomi di Jalan Merdeka Bandung.

<sup>88</sup> Yayasan Lembaga Sejarah Islam, didirikan pada 21 Mei 1980, Rabu Pahing, 6 Rajab 1400, oleh H. Imron Rosjadi SH., Prof. Drs. H. Amura, Ali Audah, K.H. Soleh Iskandar, Ir. Ahmad Mas'eed Lutfi, Prof. Dr. Hamka, K.H. Hasan Basri, K.H. Achmad Sjaichu, H.S. Prodjokusumo, Prof. Drs. Ahmad Sadeli, K.H. Amiruddin Siregar, M.C. Ibrahim, Drs. Nurul Huda, Ir. H.M. Sanusi, Ahmad Mansur Suryanegara, dihadapan Notaris Ali Harsojo, Jalan Sukabumi 4 Jakarta.

Saat didirikannya Universitas Islam Indonesia - UII di Ibukota Perjuangan Yogyakarta, iklim politik sedang dikuasai oleh kalangan Sosialis Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Perlombaan upaya memperkuat posisi, tidak hanya berusaha memiliki organisasi kesenjataan semata. Namun, kelompok Sosialis juga berupaya melemahkan organisasi kesenjataan, organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam melalui berbagai departemen pemerintahan dan militer yang dikuasainya.

Kalangan Sosialis dan Komunis tidak hanya mengusur pimpinan lembaga kenegaraan: KNIP dan Kementerian dari pimpinan yang pernah kerjasama dengan Balatentara Djepang. Namun juga, menguasai Departemen Dalam Negeri dan Luar Negeri dari tingkat Dirjen, serta pimpinan golongan menengahnya. Tindakan ini menjadikan Ulama terkejut karena di tengah suasana kebersamaan, departemen tersebut dimanfaatkan tidak untuk memperkuat perlawanannya terhadap penjajah Belanda. Melainkan lebih digunakan untuk melemahkan peranan Ulama di bidang eksekutif dan legislatif serta yudikatif, melalui kekuasaan yang dipercayakan kepadaanya. Apalagi setelah kembalinya Darsono, pendiri PKI di Semarang dari Unisoviet, menduduki jabatan di Departemen Dalam Negeri. Dimanfaatkan untuk mendudukkan orang-orangnya pada struktur kepamong prajaan.

Pengusuran pimpinan pro Jepang digantikan dengan pimpinan pro penjajah Belanda atau Sekutu, dan berideologi Sosialis atau Komunis, berproses sangat cepat. Terbaca terjadi pendudukan institusi pemerintahan kembali dikuasai oleh elit priyayi yang berpandangan kebatinan, sekuler dan anti Islam serta orang-orang sosialis komunis. Dengan mudah terbaca targetnya menghambat perkembangan Islam sebagai kekuatan politik.

Alumni dari sekolah yang diatur oleh Departemen Agama, tidak dapat belajar di jenjang di atasnya pada sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Demikian pula pembatasan lapangan kerja alumni sekolah-sekolah atau perguruan yang dibina oleh Departemen Agama tidak dapat bekerja pada Departemen RI lainnya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Di bawah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi reformasi sistem pendidikan yang luar biasa demokratinya. Lahirnya penghargaan yang sama terhadap alumni dari Sekolah atau Perguruan Tinggi antar Departemen. Dihilangkannya pagar-pagar pembatas atau diskriminasi alumni pendidikan antar Departemen dengan Departemen lainnya. Artinya alumni Sekolah, Madrasah atau Perguruan Tinggi di bawah Departemen Agama, terbuka untuk menjadi pegawai atau melanjutkan studinya pada sekolah-sekolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kecuali pembinaan Kadet AMN Departemen Hankam ABRI dan Kepolisian.



Sumber: Doc.Pribadi

## MOHAMMAD NATSIR dan ANWAR HARJONO

Mohammad Natsir Ketua Partai Masjoemi, Menteri Penerangan dan Perdana Menteri NKRI

Anwar Harjono Pendiri Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - GPII

3 Oktober 1945, Rabu Pon, 26 Syawwal 1364

dituduh oleh PKI DN Aidit, Anti Pantjasila dan akan mengkanangkan Revolusi Indonesia  
dipenjarakan di RTM Madiun

Kebangkitan Gerakan Pemoeda Islam Indonesia GPII Anwar Harjono,

3 Oktober 1945 di Jakarta diimbangi oleh Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo Wikana

10 November 1945 di Yogyakarta yang merupakan pendukung Kudeta PKI , 12 Februari 1946,  
di Cirebon, pimpinan Mohammad Joesoep, Kudeta Komunis Nasional , 3 Juli 1946, di Yogyakarta  
pimpinan Ibrahim Datuk Tan Malaka, dan Kudeta PKI di Madiun , 19 September 1948. pimpinan

Amir Sjarifuddin dan Muso.

## Kebangkitan Gerakan Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam

Tantangan ini, dampaknya di luar jalur struktural ke pemerintahan, menurut Feith melahirkan *mass leader* - pemimpin massa di kalangan umat Islam. Sejak awal Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, umat Islam memelopori membangkitkan organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, diawali pula dengan kesadaran dan semangat bela negara.

Menurut Prof. Abubakar Atjeh, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, Anwar Harjono, mengambil inisiatif mendirikan gerakan pemuda. Pada 3 Oktober 1945, Rabu Pon, 26 Syawwal 1364 H, terbentuklah Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I di Balai Moeslimin Indonesia, Jalan Kramat Raya 19 Jakarta. Dengan Ketua Umum Harsono Tjokroaminoto, dan Sekretaris Umum Anwar Harjono. Tidak dapat disangkal, kelahiran G.P.I.I segera dikonter oleh Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo yang lahir sebulan kemudian, pada 10 November 1945.

Dengan adanya Makloemat X 3 November 1945, para Ulama berhasil merespon secara cepat, mendirikan Partai Islam Indonesia Masjoemi, empat hari kemudian, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364, Disertai dengan terbentuknya Barisan Sabillah yang dipimpin oleh K.H. Maskoer sebagai Barisan Istimewa Tentara Keamanan Rakjat. Sedangkan di kalangan pemuda, membentuk organisasi kesenjataan Lasjkar Hizboellah dipimpin oleh Zainoel Arifin. Kemudian antara Barisan Sabillah, Lasjkar Hizboellah, dan Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I, membentuk Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia D.M.P.I.I, 26 Oktober 1946, Sabtu Legi, 29 Dzulqaidah 1365, di Malang Jawa Timur.

Di Jawa Barat, Agustus 1947, di bawah Soetoko<sup>90</sup> dibentuklah Dewan Mobilisasi Oemmat Islam Indonesia dengan anggotanya terdiri dari Masjoemi, G.P.I.I, Hizboellah, dan Sabillah. Menurut Holk H. Dengel, pembentukan ini ditolak oleh S.M. Kartosoewirjo yang menilai sebagai taktik baru dari golongan sayap kiri dalam membatasi kemandirian organisasi Islam karena Soetoko dari Pemoeda Sosialis Indonesia –Pesindo atau golongan kiri.

Dari fakta sejarah ini, memberikan gambaran bahwa Ulama dengan Pesantrennya sebagai tempat persamaan lahirnya generasi patriot bangsa. Organisasi sosial politik, kepemudaan, pelajar berwawasan nasional dan meniadakan etnis orientasinya, bermula dari Pesantren. Misalnya, Anwar Harjono sebelum kuliah di Sekolah Tinggi Islam, berawal sebagai Santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur.

---

90 Mashudi, dalam *Memandu Sepanjang Masa*, menjelaskan bahwa Soetoko dari Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo. Latar belakang inilah yang menjadikan S.M. Kartosoewirjo tidak dapat menerima eksistensi Dewan Mobilisasi Oemmat Islam Indonesia - DMOII karena dewan ini dipimpin oleh Soetoko dari Pesindo, Agustus 1947.

Dengan adanya kepindahan Sekolah Tinggi Islam dari Djakarta ke Djogjakarta, atas inisiatif mahasiswa Lafran Pane, didirikan Himpoenan Mahasiswa Islam - HMI, 2 Febroeari 1947, Kamis Kliwon, 5 Rabioel Achir 1366.

Tiga bulan kemudian, 4 Mei 1947, di Kantor G.P.I.I, Djalan Margomoeljo 8, Djogjakarta, atas inisiatif Yoesli Ghozali, 4 Mei 1947, Ahad Legi, 12 Djoemodil Achir 1366, pukul 10.00 pagi, didirikanlah Peladjar Islam Indonesia - P.I.I di Djogjakarta.

Dengan demikian sampai saat itu, 1366 H/1947 M, Ulama, Politisi, Pemuda, dan Mahasiswa, serta Pelajar, memiliki satu-satunya Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi. Untuk gerakan pemuda, Gerakan Pemoeda Islam Indonesia-G.P.I.I. Untuk mahasiswa, Himpoenan Mahasiswa Islam-H.M.I. dan pelajar, Peladjar Islam Indonesia-P.I.I. Sedangkan Nahdlatoe Oelama dan Partai Sjarikat Islam Indonesia belum berdiri sendiri sebagai partai politik, dan masih bergabung dalam Partai Islam Indonesia, Masjoemi.

Organisasi ini semuanya terlahir sebagai jawaban terhadap tantangan upaya kembalinya penjajah Belanda yang dibantu oleh Sekoetoe. Kemudian muncul tantangan baru, kelompok Sosialis Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Keduanya menurut M.C. Ricklefs, dalam Sejarah Indonesia Modern, berasal dari sama-sama Sumatra, melancarkan pengusuran pimpinan politik Islam dan Ulama.

Menurut Deliar Noer, Amir Sjarifoeddin berhasil mendesak Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Makloemat X 3 November 1945, yang berdampak lahirnya multipartai politik dengan berbagai ideologinya. Guna mengubah sistem satu partai produk Komite Nasinal Indonesia Poesat - KNIP, 22 Agustus 1945, dan ideologi Pantjasila yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364.

Di bawah tekanan tantangan zaman itu, tidak hanya dirasakan oleh para Ulama dan pimpinan politik, tetapi juga dirasakan oleh para pimpinan organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam. Dampaknya membentuk karakter organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam menjadi peka terhadap masalah politik:

Pertama, menyadari betapa tegarnya sikap para pejuang Islam, dalam diplomasi dan gerilya dalam menjawab upaya kembalinya penjajah Belanda yang mendapat dukungan dari Tentara Sekoetoe Inggris. Sikap ini menyadarkan ketiga organisasi Islam tersebut bahwa imperialism Barat tidak mendulikan Atlantic Charter 15 Agustus 1941 buatan Inggris dan Amerika Serikat yang tidak memberlakukan adanya upaya imperialism yang menghalangi-halangi hak bangsa-bangsa yang akan menentukan kemerdekaannya sendiri.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## INTERNASIONAL ISLAMIC COLLOQUIUM – IIC DI LAHORE

Pertemuan Pakar Islam Internasional – International Islamic Colloquium

Di Lahore, Pakistan, 1377 - 1378 H/1957 - 1958 M.

Delegasi Indonesia berfoto bersama di depan Hotel Fallatis Lahore.

Dari kiri ke kanan: Mohammad Moein, Sekretaris II KBRI. Prof. Anwar Moesaddad. Prof. Hasbi Ash Shiddiqi. Prof.Dr. Buya Hamka. Mr. Azes Butt Panitia IIC dan Amura.

Umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia dan sebagai sumber kekuatan pembela Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh imperialis Barat tidak diakui eksistensinya. Tersiar berita, kepemimpinan juru runding dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda akan diterima oleh pihak imperialis Barat bila juru rundingnya bukan dari pimpinan organisasi Islam dan bukan pula pimpinan organisasi yang pernah berkolaborasi dengan Balatentara Djepang. Melainkan pimpinan kelompok sosialis dan komunis yang pernah bekerja sama dengan Sekoetoe atau Belanda pada masa Perang Dunia II.

Menyesuaikan dengan berita itu tersebut, terpilihlah juru runding dari kubu Sosialis Soetan Sjahrir dalam Peroendangan Linggadjati dan dari kubu Komunis Amir Sjarifuddin dalam Peroendangan Renville. Keduanya pernah bekerjasama dengan Sekoetoe dan van Mook. Akibatnya, hasil perundingan yang dipimpin keduaanya sangat merugikan Republik Proklamasi. Dampaknya bagi rakyat dan Ulama jadi korban Kudeta PKI Amir Moeso di Madiun, 19 September 1948.

Kedua, ketiga organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam melihat adanya benturan kepentingan antar kubu Sosialis Amir dengan Sosialis Soetan Sjahrir. Kemudian, Sosialis Amir berubah menjadi PKI Amir Moeso. PKI ini juga

berbenturan kepentingannya dengan Komunis Nasionalis Partai Moerba pimpinan Tan Malaka. Semula diperkirakan kubu Sosialis dan Komunis sangat solid tidak mengalami keretakan di dalamnya. Kenyataannya, kubu Sosialis pecah dan kubu Komunis pun pecah. Walaupun demikian, masing-masing dari mereka tetap menjadikan organisasi Islam sebagai lawananya.

Ketiga, kalangan parpol netral agama melalui jalur birokrasi pendidikan dan kepemudaan, berupaya secara sistemik melemahkan eksistensi ketiga organisasi Islam tersebut. Oleh karena itu, disadari oleh pimpinan organisasi pemuda, mahasiswa, dan pelajar Islam untuk menegakkan ajaran Islam selalu akan bertemu dengan lawan-lawan yang licik. Walaupun demikian, para pimpinan organisasi Islam tidak terkejut karena Al-Quran mengingatkan untuk tidak menjadi terpesona oleh kekuatan materi lawan dan jumlah pengikut lawan karena dengan kekuatan materi dan jumlah lawan tersebut, Allah Swt akan mengujinya di dunia dan mereka akan mati dalam kekafiran (QS. 9: 55 dan 85).

Menghadapi ketiga tantangan itu, terbaca pilihan jawaban dari pimpinan organisasi Islam, selalu bersikap tenang dan terus berkarya dan membangun. Ketiga organisasi Islam tersebut, tetap berupaya meluaskan wawasannya dan kerjasamanya dengan Ulama dan Santri serta organisasi lainnya yang sejalan dan sama tujuan kepentingannya.

Dengan penuh keuletan, mencoba melahirkan kader-kader pelanjut cita-cita perjuangannya. Di kalangan Nahdlatoe Oelama, pada 14 Desember 1949, Rabu Legi, 22 Sapar 1369, tiga belas hari sebelum pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiul Awwal 1369, Chamid Widjaja mengaktifkan kembali Gerakan Pemoeda Ansor - G.P. Ansor yang pernah dibangun pada 1350 H/1931 M.

Terbaca pula sikap jawabannya dalam menghadapi tantangan yang memusuhinya, organisasi Islam tersebut ibarat engkang-engkang yang selalu bergerak goyang-goyang dengan kaki-kaki lemahnya, di atas arus deras yang akan menghantarkan. Kadang terlihat justru karena gerakannya yang kontinyu menjadikan mampu terbang pindah sejenak, menghindarkan diri dari benturan benda yang hanyut di atas permukaan arus.

Dengan adanya tantangan yang membentur dirinya, menyadarkan ketiga organisasi Islam tersebut bahwa lawannya, Komunis Amir Moeso, sangat besar kekuatan dan senjata serta massanya. Merasa kekuatan dan senjata serta massanya besar, PKI tidak hanya melawan Ulama dan Santri, tetapi juga melawan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Target utamanya adalah melawan TNI beserta Badan Perjuangan lainnya. Memang itulah sasaran kekuatan yang dikudeta.



Sumber: Dok. Pribadi

## IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH - IMM

Umat Islam sedang dihadapkan tantangan arogansi kredit aksi PKI dan organisasi bawahannya, menuntut secara sistemik satu persatu pembubaran organisasi kemahasiswaan Islam. Di bawah kondisi tantangan ini, pimpinan Wilayah Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat segera menjawabnya dengan membangkitkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah -IMM.

Dengan Pembina Ibu Negara Fatmawati Soekarno dan Jenderal Prof.Dr. Moestopo.

Acara Ramah Tamah

Duduk Kiri gambar: Pengawal Ibu Fatmawati, A. Mansur Suryaregara Sekretaris Umum, Ahmad Riskawa Sekretaris I, Djenderal Prof.Dr. Mostopo - Pembina. Tengah: Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Duduk kanan: Mursalin Dahlan Ketua Umum DPHD IMM Jabar, Pengawal Cakrabirawa, Ibu Hadijah Salim. Berdiri: Mahasiswa IMM dan Ibu Ibu Aisyah dan Nasiyatul Aisyiyah.

Menghadapi kenyataan tantangan ini, dipilihlah jawaban pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, diwujudkan dalam bentuk meningkatkan aktivitas gerakan organisasinya. Diibaratkan aktivitas organisasinya seperti engkang-engkang yang selalu bergerak. Sekalipun organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, berada di atas terjangan arus deras lawan yang tak pernah berhenti. Walaupun kaki tumpuan pijaknya sangat lemah, tetapi karena pimpinannya selalu menciptakan gerakan yang *istiqamah* maka berdampak pada organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam menjadi selamat. Terutama karena tidak menjauhkan diri dari Ulama (QS Al-Kahfi 18: 28). Dengan pengertian Ulama termasuk para cendekiawan Muslim.

Misalnya, dua kali peristiwa Kudeta PKI Amir Moeso di Madiun pada 19 September 1948 dan Kudeta G-30-S/PKI pada 30 September 1965 di Jakarta, menjadikan ketiga organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam sebagai lawan PKI yang ditargetkan akan dilumpuhkan.

## IMM Bangkit

Di tengah situasi ketegangan nasional yang sedang jor-joran antarpertai politik, atas inisiatif Djajusman Al-Kindi, Sudibjo Markus, Rosad Sholeh, Amien Rais, Mohammad Musa, Mursalin Dahlan, Ahmad Mansur Suryanegara, dan kawan lainnya dari Surakarta dan Jember, membangkitkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - IMM di Yogyakarta, 29 Syawwal 1384, Sabtu Kliwon, 14 Maret 1964 M.

Tujuan didirikan IMM pada awalnya secara sederhana, yaitu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antarmahasiswa dari keluarga Muhammadiyah. Oleh karena itu, saat penerimaan anggota baru disebut Masa Kasih Sayang.

Tidaklah dapat dipungkiri kalau IMM dibangkitkan bertujuan menghimpun, mengerakan, membina potensi mahasiswa untuk menumbuhkan kesadarannya dan tanggung jawabnya sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa. Kader yang berfastabiqul khairat dalam meningkatkan pemilikan ilmu untuk dijadikan dasar amaliah. Sekaligus sebagai kader yang beramal ilmiah.

Di bawah situasi ini, DPHD IMM Jawa Barat, Ketua Mursalin Dahlan dan Sekretaris Umum Ahmad Mansur Suryanegara, didirikan 13 Desember 1964, dalam memperkuat eksistensi IMM Jawa Barat dengan mengangkat Pelindung dan Penasehat Ibu Fatmawati dan Prof. Dr. Moestopo.

Selain itu, dengan mudah dapat dibaca, dengan mendirikan IMM minimal menambah jumlah organisasi mahasiswa Islam dan memperkuat eksistensi organisasi kemahasiswaan Islam yang secara bergilir akan dibubarkan pula: HMI, SEMMI, PMII dan IMM.

Bagaimanapun besar dan aktifnya upaya lawan Islam akan membubarkan dan secara sistemik akan meniadakan segenap organisasi Islam: niaga, pendidikan, sosial budaya, dan politik, ujung sejarahnya untuk di Indonesia, Islamlah yang berjaya. Terbukti seperti yang dialami oleh penjajah Barat dan Timur akhirnya angkat kaki dari Nusantara Indonesia.

Politik devide et impera yang dilakukan oleh penjajah Barat, dengan rencana akan menegakkan negara pulau-pulau, justru oleh Ulama ditandingi dengan menegakkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



# GERBANG KED E L A P A N

PERAN ULAMA  
DALAM MENEGAKKAN  
DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

**R**AHMAT Allah Yang Mahakuasa terlimpah kembali kepada bangsa dan negara Indonesia. Di tengah upaya penjajah Kerajaan Protestan Belanda dibantu oleh Kerajaan Protestan Anglikan Inggris akan merobohkan Republik Indonesia Serikat dengan menghidupkan gerakan separatis, dijawab oleh Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dengan membangkitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benarkah Kerajaan Protestan Belanda berkeinginan tegaknya RIS dan berkinginan pula membangun kerja sama Uni Indonesia-Belanda. Fakta sejarah berbicara, Peroendingan Linggadjati dilanggar dengan Agresi Militer Belanda Pertama 21 Juli 1947. Peroendingan Renville dilanggar dengan Agresi Militer Belanda Kedua 19 Desember 1948, dan sesudah Konferensi Medja Bundar 2 November 1949 dapat dipastikan terjadi lagi pelanggaran dari pihak penjajah Belanda.

Sesudah terjadi kesepakatan antara Indonesia-Belanda Roem-Royen Statements pada 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Radjab 1368, menyusul Konferensi Medja Bundar pada 23 Agustus 1949, Selasa Pon, 27 Syawwal 1368, dan baru ditandatangani bersama pada 2 November 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369, diikuti dengan penandatanganan Pengakuan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiuul Awwal 1369, melahirkan pemerintahan Republik Indonesia Serikat - RIS yang baru berumur selama tiga minggu, 27 Desember 1949-23 Januari 1950 telah dilanggar oleh imperialis Belanda dengan melancarkan Agresi APRA Westerling di Bandung, dan dari Bandung mencoba melancarkan kudeta terhadap pemerintah RIS di Jakarta.

Padahal dari lahirnya *Roem Royen Statements*, 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Radjab 1368 hingga penandatanganan Konferensi Medja Bundar, 2 November 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369, memakan waktu sekitar 180 hari atau enam bulan. Ditambah dengan waktu penandatanganan Pengakuan Kedaulatan, 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiul Awwal 1369, berproses selama sekitar 235 hari.

## Kudeta APRA, Andi Azis, dan RMS

Hasil perundingan demikian panjang memakan waktu dan energi, selama 235 hari, tetapi dirusak oleh tiga peristiwa:

Pertama, belum sampai satu bulan, 27 Desember 1949-23 Januari 1950, pecah gerakan Angkatan Perang Ratu Adil - APRA yang terdiri sekitar 800 serdadu KNIL, dipimpin oleh Westerling melancarkan Kudeta pada 23 Januari 1950 di Bandung.<sup>1</sup> Untuk diteruskan ke Jakarta.

Diawali dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap TNI di Bandung yang dijumainya. Sedangkan pihak TNI saat itu sesudah KMB, menaati perintah peletakan senjata. Tidak mengira akan terjadi penyerangan dari serdadu KNIL yang melakukan penembakan terhadap personil TNI di mana saja yang dijumainya. Akibat serangan mendadak ini, dari pihak TNI 79 prajurit gugur. Di antaranya adalah Letnan Kolonel Lembong yang beragama Kristen Protestan seperti umumnya KNIL.

Gerakan Kudeta APRA ini diotaki oleh Soeltan Hamid II dari Pontianak dan dari beberapa orang dari pimpinan Negara Pasoendan. Tujuannya mempertahankan bentuk pemerintahan Federalis dan menolak Unitaris. Mempertahankan adanya Negara Boneka bikinan van Mook, sebagai Negara Bagian dan menolak Menteri-Menteri Kabinet RIS walaupun beragama Protestan yang berjiwa Republikan. Misalnya Kolonel T.B. Simatoepang.

Dari Bandung, gerombolan serdadu APRA meneruskan rencana kudeta terhadap Pemerintahan RIS di Jakarta. Dengan sasaran akan membunuh Menteri Pertahanan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Mr. A. Boediardjo dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatoepang.

---

1 Penamaan dengan *Angkatan Perang Ratu Adil* bertujuan memanfaatkan kepercayaan sebagian orang-orang Pribumi, bersumber dari *Ramalan Djojobojo* bahwa di tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang tertindas oleh penjajah Belanda akan datang *Ratu Adil* dengan nama *Herouetjokro*. Dengan nama *Ratu Adil* berharap mendapat dukungan rakyat. Namun, bila nama pimpinan *Angkatan Perang Ratu Adil* namanya bukan *Herouetjokro*, melainkan *Westerling* dan bukan Pribumi tetapi *Walanda* atau *Belanda*, serta menembaki *TNI*, dan melakukan perampokan di kota-kota yang dilalui, bagaimana mungkin dihormati oleh rakyat sebagai *Ratu Adil*?

Jauh sebelum sampai ke Jakarta, baru masuk daerah Pacet Cianjur pada 24 Januari 1950, TNI berhasil menghancurkan sisa gerombolan serdadu APRA. Sedangkan Westerling dengan bantuan Angkatan Laut Belanda, berhasil lolos keluar negeri dengan menumpang pesawat Catalina. Demikian menurut penuturan dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964.

Pada saat terjadinya penyerbuan serdadu APRA ke Bandung, Presiden Soekarno bersama Iboe Fatmawati sedang mengadakan perjalanan muhibah ke India, untuk bertemu dengan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian diteruskan berkunjung ke Pakistan. Di sini, hanya di sambut oleh Gubernur Jenderal Pakistan, Khwaja Naramuddin. Selanjutnya, kunjungan muhibah dilanjutkan ke Burma atau Myanmar, setibanya di Rangoon, disambut secara kenegaraan seperti di India, oleh Presiden Sao Shwe Thaik.

Perjalanan ini segera dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS, bersama Iboe Fatmawati, karena negara-negara yang dikunjunginya, pada saat Republik Indonesia sedang dalam kesulitan, memberikan bantuan dukungan politik yang sangat besar. Jadi, pada saat terjadi gerakan Kudeta APRA di Bandung, 23 Januari 1950, Presiden Soekarno bersama Iboe Fatmawati sedang melakukan kunjungan muhibah.

Kedua, pelanggaran oleh pihak Belanda, terjadi sesudah Konferensi Tingkat Menteri Dalam Rangka Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda, di Jakarta, diselenggarakan pada 24 Maret 1950. Dalam konferensi ini, dibahas masalah hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, perekonomian, dan kebudayaan setelah terbentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Demikian pula, dalam konferensi ini dibicarakan masalah Irian Barat.

Dengan diselenggarakannya konferensi ini, tergambar betapa mulianya sikap para Menteri Republik Indonesia Serikat tetap menghargai keputusan bersama Konferensi Medja Bundar, tentang Uni Indonesia-Belanda. Walaupun pihak Belanda dua bulan sebelumnya, dengan menggunakan mantan serdadu KNIL dengan bantuan Angkatan Laut Belanda, menamakan dirinya sebagai APRA pada 23 Januari 1950 melakukan Kudeta di Bandung.

Hasil pembicaraan konferensi ini, juga hanya berlangsung sekitar 13 hari karena dinodai dengan Peristiwa Andi Azis di Makassar pada 5 April 1950. Andi Azis bersama sejumlah mantan serdadu KNIL menuntut agar APRIS KNIL saja yang bertanggung jawab keamanan di Negara Indonesia Timur - NIT. Menolak masuknya APRIS TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang dari Pulau Jawa.

Andi Azis memulai gerakan sepratisnya dengan menangkap Letkol Achmad Joenoes Mokoginta sebagai Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur bersama staf. Dengan cara itu, Andi Azis tetap mempertahankan negara boneka bikinan van Mook, Negara Indonesia Timur, setelah Negara Pasoendan dan Kalimantan Barat dengan keterlibatannya dengan APRA dibubarkan.

Pelaksanaan ekspedisi penyerangan APRIS ke Makassar dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Didahului oleh pendaratan Batalyon Worang yang mendarat di Jeneponto, pada 18 April 1950. Serangan APRIS TNI pada 26 April 1950 berhasil menduduki Makassar, menjadikan Andi Azis tertangkap dan menyerah.<sup>2</sup> Namun, sisanya serdadu KNIL masih melanjutkan perlawanan hingga bulan Agustus 1950.

Pada 5 Agustus 1950, serdadu KNIL melakukan pengepungan Markas Staf Brigade 10 Garuda dengan menggunakan Lapis Baja. Serangan ini dapat dipukul mundur dan minta berundung. Permintaan ini ditolak oleh Letnan Kolonel Soeharto, kemudian serdadu KNIL diizinkan meninggalkan Makassar melalui pelabuhan, dengan menyerahkan senjatanya. Makassar mulai aman dari gangguan pengacau keamanan yang ditimbulkan oleh serdadu KNIL.

Dengan keberhasilan operasi penumpasan gerakan separatis Andi Azis, rakyat melancarkan demonstrasi menuntut agar Negara Indonesia Timur bikinan van Mook dibubarkan. Rakyat menuntut untuk segera dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pelanggaran Konferensi Medja Bundar oleh Belanda, melalui gerakan separatis Republik Maluku Selatan - RMS yang dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Secara manifes tampak pada 25 April 1950 diproklamasikannya RMS.<sup>3</sup> Namun, gerakan separatis ini sudah ada sejak 1946 oleh van Mook dengan nama Negara Indonesia Timur dan Soekawati sebagai Presidennya. Dari sini, van Mook mencoba menandingi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia, ditandingi dengan Presiden Soekawati dari Negara Indonesia Timoer. Mistik politik van Mook, Presiden (S)oekarno kontra Presiden (S)oekawati.

Maluku merupakan wilayah rempah-rempah yang diperebutkan oleh VOC dengan Portoegis. Semula Kerajaan Katolik Portoegis mengizinkan pedagang Belanda untuk mengambil rempah-rempah dari pelabuhan Lisbon, untuk dipasarkan

- 
- 2 Pada 30 April 1950 Kahar Moezakkar sebagai putra daerah Makassar, menolak pelantikan Korps Cadangan Nasional dengan kedudukan di bawah Letnan Kolonel Warrow sebagai putra daerah Manado.
- 3 Pemilihan waktu 25 April 1950, yang sebenarnya pada 19 April 1950. Selain itu, pada saat bersamaan mulai rontoknya Andi Azis di Makassar, juga terkait erat dengan 19 April 1529 sebagai Hari jadi Protestan Martin Luther. Diharapkan mendapatkan simpati dari Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 19 April 1775, oleh Crane Brinton disebut sebagai Protestant Revolution.

di Eropa belahan utara. Kelanjutannya, pedagang Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari Maluku. Di abad ke-17 M, keinginannya berhasil sampai ke Maluku.

Awalnya VOC didirikan dari modal penguasaan Ambon Maluku. Suatu pemilihan wilayah yang diperhitungkan tidak hanya penguasaan daerah sentral produsen rempah-rempah sebagai komoditas yang diperlukan oleh pasar Eropa. Namun, sekaligus letak Maluku sebagai wilayah yang sangat strategis berfungsi sebagai mata baji yang membelah posisi kedua jajahan Kerajaan Katolik Spanjol di Filipina dan jajahan Kerajaan Katolik Portoegis di Timor Timur.

Kedatangan VOC pada abad ke-17, tidak hanya sekadar untuk memperoleh rempah-rempah. Namun juga, memindahkan Perang Agama antara Kontra Reformasi Katolik dengan Reformasi Protestan dari Eropa ke wilayah jajahan di Asia Afrika. Indonesia dijadikan ajang Perang Agama ini. Tidakkah saat itu, waktu kedatangan VOC Belanda sebagai pengaruh Protestant masih berperang, Perang 80 Tahun melawan Kerajaan Katolik Spanjol. Mereka baru merdeka pada 1648 M.

Oleh karena itu, Kerajaan Protestan Belanda berupaya menjadikan Maluku sebagai mata baji yang memisahkan antara kedua wilayah jajahan Kerajaan Katolik Spanjol dan Kerajaan Katolik Portoegis yang berposisi berseberangan mengapit Kepulauan Maluku.

van Mook sebagai Goberneur Djenderal, tentu juga belajar dari pengalaman Thomas Stamford Raffles hanya dengan menguasai sebuah pulau, Singapura pada abad ke-19 M menjadikan Kerajaan Anglikan Protestan Inggris mampu berkuasa hingga abad ke-20 M. Oleh karena itu, orang-orang van Mook, yakni Dr. Ch. R. Soumokil dan yang lainnya, membantu pelaksanaan pemikiran van Mook menjadikan Maluku Selatan sebagai modal membangun negara Republik Maluku Selatan yang berpihak kepada Kerajaan Protestan Belanda.

Menurut M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, di Ambon orang yang beragama Serani atau Protestan yang pro Belanda menentang upaya Unitarisme atau Negara Kesatuan. Mereka diprovokasi bahwa Republik sebagai negara yang dikuasai oleh orang Jawa, Muslim, dan tokoh-tokoh yang berhaluan kiri.

Politik divide and rule dari penjajah Belanda selalu menggunakan isu suku dan agama mudah menyentuh rasa dan mudah menular. Akibatnya, meletuslah benturan antarsuku atau antaragama. Terutama setelah Negara Indonesia Timur - NIT tidak

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

mampu bertahan maka Dr. Ch. R. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, dengan mengambil waktu sehari sebelum pendaratan APRIS/TNI di Makassar, 25 April 1950.

Demi untuk menyadarkan Dr. Ch. R. Soumokil maka dikirimkanlah Dr. Leimena. Dengan tujuan menjelaskan bahwa Republik Indonesia bukan negara yang dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim dan kiri. Dr. Leimena sendiri sebagai orang Maluku dan beragama Kristen. Diangkat sebagai Menteri Kesehatan dan ikut pula sebagai salah seorang dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Medja Bundar. Sebelumnya, Dr. Leimena bersama Mohammad Natsir, menjadi penjemput Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Ketua PDRI di Sumatra Barat. Namun, usaha damai oleh Dr. Leimena ini tidak membawa hasil.

Dr. Ch. R. Soumokil RMS merasa kuat dengan bergabungnya serdadu KNIL dari Makassar ke Ambon. Ditolaknya tawaran jalan damai dalam menyelesaikan masalah gerakan separatis yang dipimpinnya maka tiga bulan kemudian, dilaksanakanlah operasi militer pada 14 Juli 1950 dengan didaratkannya APRIS/TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dari Manado dan beragama Protestan. Operasi militer ini berhasil menduduki Laha P. Buru. Menyusul pendudukan atas P. Tanimbar, Kei, dan Aru. Akhirnya, ke P. Seram, terjadi perlawanan yang berat.

Penyerbuan pada November 1950, berhasil membebaskan benteng Nieuw Victoria, di Ambon dari RMS. Pada saat perebutan benteng tersebut, gugurlah Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang beragama Katolik. Fakta gugurnya Letnan Kolonel Slamet Rijadi, memberikan jawaban terhadap kebohongan propaganda gerakan separatis RMS, bahwa Republik Indonesia dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim, serta beraliran kiri.

Para pelaku RMS ditangkap dan diadili di Jogjakarta. Pada 2 Desember 1963 Dr. Ch. R. Soumokil ditangkap di P. Seram. Diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa - Mahmilub di Jakarta, pada 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa serdadu KNIL yang lari ke Belanda, nantinya kembali repatria ke Maluku. Timbulah kembali gerakan separatis RMS. Demikianlah penuturan dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*.

Semestinya Dr. Ch. R. Soumokil tidak hanya menduga-duga apabila berkeyakinan bahwa Republik Indonesia adalah Republik Islam dan Republik orang Jawa saja dan Republik Kiri. Apabila Dr. Ch. R. Soumokil benar-benar meneliti dugaannya dengan membandingkan pada kenyataan fakta di lapangan, akan sadar bahwa dugaannya salah karena:

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

mampu bertahan maka Dr. Ch. R. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, dengan mengambil waktu sehari sebelum pendaratan APRIS/TNI di Makassar, 25 April 1950.

Demi untuk menyadarkan Dr. Ch. R. Soumokil maka dikirimkanlah Dr. Leimena. Dengan tujuan menjelaskan bahwa Republik Indonesia bukan negara yang dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim dan kiri. Dr. Leimena sendiri sebagai orang Maluku dan beragama Kristen. Diangkat sebagai Menteri Kesehatan dan ikut pula sebagai salah seorang dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Medja Bundar. Sebelumnya, Dr. Leimena bersama Mohammad Natsir, menjadi penjemput Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Ketua PDRI di Sumatra Barat. Namun, usaha damai oleh Dr. Leimena ini tidak membawa hasil.

Dr. Ch. R. Soumokil RMS merasa kuat dengan bergabungnya serdadu KNIL dari Makassar ke Ambon. Ditolaknya tawaran jalan damai dalam menyelesaikan masalah gerakan separatis yang dipimpinnya maka tiga bulan kemudian, dilaksanakanlah operasi militer pada 14 Juli 1950 dengan didaratkannya APRIS/TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dari Manado dan beragama Protestan. Operasi militer ini berhasil menduduki Laha P. Buru. Menyusul pendudukan atas P. Tanimbar, Kei, dan Aru. Akhirnya, ke P. Seram, terjadi perlawanan yang berat.

Penyerbuan pada November 1950, berhasil membebaskan benteng Nieuw Victoria, di Ambon dari RMS. Pada saat perebutan benteng tersebut, gugurlah Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang beragama Katolik. Fakta gugurnya Letnan Kolonel Slamet Rijadi, memberikan jawaban terhadap kebohongan propaganda gerakan separatis RMS, bahwa Republik Indonesia dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim, serta beraliran kiri.

Para pelaku RMS ditangkap dan diadili di Jogjakarta. Pada 2 Desember 1963 Dr. Ch. R. Soumokil ditangkap di P. Seram. Diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa - Mahmilub di Jakarta, pada 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa serdadu KNIL yang lari ke Belanda, nantinya kembali repatria ke Maluku. Timbulah kembali gerakan separatis RMS. Demikianlah penuturan dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*.

Semestinya Dr. Ch. R. Soumokil tidak hanya menduga-duga apabila berkeyakinan bahwa Republik Indonesia adalah Republik Islam dan Republik orang Jawa saja dan Republik Kiri. Apabila Dr. Ch. R. Soumokil benar-benar meneliti dugaannya dengan membandingkan pada kenyataan fakta di lapangan, akan sadar bahwa dugaannya salah karena:

## API SEJARAH 2

Apabila dugaan Dr. R. Ch. Soumokil benar, tentunya dapat mempertanyakan mengapa S.M. Kartosoewirjo sebagai orang Jawa, memproklamasikan Negara Islam Indonesia - NII pada 7 Agustus 1949, menentang Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno orang Jawa?

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Islam, dapat dipastikan S.M. Kartosoewirjo akan mencabut kembali proklamasi Negara Islam Indonesia-nya.

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Jawa, mengapa Kahar Moezakkar sebagai orang Makassar, pada 30 April 1950 memberontak kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno orang Jawa, tetapi mengapa Kahar Moezakkar sebagai putera daerah Makassar bersedia menjadi Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo orang Jawa?

Apabila benar dugaan Dr. Ch. R. Soumokil bahwa yang memerintah Republik Indonesia hanya orang Jawa saja, tetapi mengapa timbul pemberontakan orang-orang Jawa: di Brebes, Tegal, Pekalongan, dipimpin oleh Jenderal Mayor TII Amir Fatah? Diikuti oleh Kiai Sumolang atau disebutnya juga sebagai Romo Pusat atau Kiai Mohammad Mahfud Abdurrahman dari Kebumen Jawa Tengah.

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Islam, mengapa Tengkoe Daoed Boeeree-eh dari Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh – POSA, memberontak dan bergabung dengan S.M. Kartosoewirjo orang Jawa sebagai Imam Negara Islam Indonesia?

Gerakan separatis RMS di bawah Dr. Ch. R. Soumokil korban provokasi penjajah Belanda yang memperalat RMS menjadi tameng terhadap Irian Barat yang dipertahankan sebagai sisa wilayah jajahan Belanda. Barangkali Dr. Ch. R. Soumokil menemui kesukaran membedakan antara Negara Islam Indonesia - NII diproklamasikan di Jawa Barat, dengan Ibu Kota Republik Indonesia Serikat - RIS di Jakarta. Sedangkan DKI dekat dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hikmah adanya gerakan separatis di Indonesia Timur, menjadikan TNI memiliki pengalaman yang sangat berharga, bagaimana sistem menumpas Gerakan Pengacau Keamanan - GPK yang terjadi di luar P. Jawa. Apalagi posisi wilayah Maluku yang berdampingan dengan Irian Barat. Memudahkan langkah pemerintah Republik Indonesia dan TNI bila harus melakukan operasi membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

## NKRI dan Perdana Menteri Mohammad Natsir

Tiga peristiwa Kudeta APRA 23 Januari 1950 yang gagal, dipimpin oleh Westerling, disusul dengan gerakan separatis di Makassar dipimpin oleh Kapten Andi Aziz pada 5 April 1950, diikuti oleh gerakan separatis Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil, 19 April 1950, merupakan bom waktu yang ditinggalkan oleh van Mook dalam upaya menggagalkan terbentuknya negara Indonesia Merdeka yang berdaulat. Sebaliknya, ketiga peristiwa tersebut memotivasi para pejuang Unitaris meningkatkan tuntutannya agar segera dibubarkannya seluruh negara boneka bikinan van Mook dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Realitasnya, negara boneka tinggal Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dengan adanya tuntutan rakyat di wilayah negara-negara boneka tersebut, dan adanya Undang-Undang Darurat yang memberikan peluang penggabungan antarnegara bila dikehendaki oleh rakyatnya maka diadakan pendekatan pemerintah RIS dengan negara-negara yang bersangkutan.

Selain itu, ide dari Mohammad Natsir yang dikenal dengan istilah Mosi Integral menjadi embrio lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi Integral sebuah mosi berisikan kesediaan seluruh Negara Bagian RIS dan Negara Boneka bikinan van Mook serta Negara RI bersama-sama membubarkan diri dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno.

Dalam proses persiapan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mohammad Natsir mengutus Toean A. Hassan pimpinan Persis, untuk menemui S.M. Kartosoewirjo Imam Negara Islam Indonesia - NII yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Dengan tujuan menyampaikan Mosi Integral mengajaknya agar bersedia membubarkan NII bersama-sama dengan Negara Bagian RIS termasuk Negara RI serta Negara Boneka lainnya dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indnesia - NKRI. Namun, usaha ini tidak mendapat sambutan positif dari S.M. Kartosoewirjo sehingga NII berada di luar NKRI. Sejak penolakan penggabungan ke NKRI, pemerintah konfrontatif dengan NII. Diperlakukan sama dengan pemberontak lainnya.

Kembali ke masalah persiapan berdirinya NKRI dan upaya penyusunan UUD Sementara. Akhirnya, dicapailah kesepakatan bersama melalui Parlemen dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950, disahkannya Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## MOHAMMAD NATSIR

Perdana Menteri Pertama NKRI

Aktivis Jong Islamieten Bond - JIB Bandung, Persatuan Islam - Persis Bandung, Partai Islam Indonesia - PII, Ketua Partai Islam Indonesia Masjumi. Tiga kali menjadi Menteri Penerangan RI. Arsitek keberhasilan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI melalui Mosi Integral.

Dengan cara saling membubarkan diri antar negara-negara bagian bikinan van Mook dan Republik Indonesia, kemudian mengakhiri negara Republik Indonesia Serikat - RIS, dan sama-sama mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Natsir arsitek lahirnya NKRI sebagai Perdana Menteri.



Sumber: Doc. Prabu

## PRESIDEN SOEKARNO

Melanjutkan Perdamaian Menteri Mohammad Natsir Sebagai Perdana Menteri Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya menyambut Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada 15 Agustus 1950 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Acting Presiden RI, Mr. Asaat. Pada waktu yang sama di Jakarta, diadakan penyerahan mandat sebagai Perdana Menteri dari Drs. Mohammad Hatta kepada Presiden Ir. Soekarno. Selanjutnya memangku kembali jabatan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diikuti pula pelantikan DPR NKRI pada 16 Agustus 1950.

Tepat pada Ulang Tahun Ke-5 Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan, di Istana Merdeka, Presiden Ir. Soekarno secara terbuka di hadapan rakyat memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369. Dengan demikian, tamatlah sejarah Republik Indonesia Serikat secara resmi, 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

Bila kita renungkan kembali, Proklamasi 17 Agustus 1945, dibacakan pada hari Jumat Legi, sebagai Rajanya Hari bagi umat Islam. Bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 termasuk dalam Puluhan Pertama Ramadhan. Puluhan Pertama yang diimani oleh umat Islam sebagai Puluhan Rahmat Allah. Pengaruhnya, kemerdekaan Indonesia dirumuskan sebagai berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dalam Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan pada saat Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, bertepatan masuk 2 Dzulhijjah 1364. Dzulhijjah dalam keimanan umat Islam, diyakini sebagai Bulan Suci Idul Qurban - bulan pendekatan kepada Allah Maha Kuasa. Dzulhijjah selain diimani sebagai salah satu di antara 4 bulan suci: Muhamarram, Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah, di dalamnya juga terdapat 10 Dzulhijjah yang diimani sebagai Idul Adha - Hari Raya Agung. Tentunya, hal ini bukan secara kebetulan, melainkan sebagai kepastian dari Allah Yang Maha Kuasa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah yang agung bagi bangsa dan negara Indonesia.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden bersama Menteri kembali dari Bangka masuk Yogyakarta, terjadi pada 6 Juli 1949, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1368. Mempunyai kesamaan tanggal Komariyahnya, 9 Ramadhan 1368 sama dengan 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Disusul masuknya Panglima Besar Jenderal Soedirman ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949, Ahad Wage, 13 Ramadhan 1368.

Bulan Ramadhan dalam perkembangan peristiwa sejarah di Indonesia, merupakan *the great time - titik waktu yang mustari dalam perubahan sejarah yang besar*. Bagi sebagian orang menilai sebagai peristiwa yang kebetulan. Namun, bagi Allah Yang Maha Membalikkan Waktu, siang dan malam, tidak menilai merupakan kebetulan, melainkan setiap peristiwa kehidupan manusia dan perubahan sejarahnya, terjadi sebagai suatu kepastian yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz.

Kembali ke situasi nasional saat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369, menjelang Idul Adha, terasa kembali seperti pada awal Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, menjelang Idul Fitri.

Ternyata, dalam Sejarah Indonesia, Hari Besar Islam memberi suasana perubahan totalan pemerintahan Indonesia. Nampaknya, pengaruh dari situasi ini maka Mohammad Natsir<sup>4</sup> dari Partai Islam Indonesia Masjumi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri yang pertama dari NKRI.

Pengangkatan Mohammad Natsir untuk menjadi orang pertama yang menduduki posisi Perdana Menteri NKRI, tentu mempertimbangkan pula latar belakang partai politiknya pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia. Mohammad Natsir aktif dalam Partai Islam Indonesia - PII yang didirikan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo, bersama Wali Al-Fatah, K.H. M. Mansoer. Dalam kongresnya 11 April 1940, Kamis Pahing, 2 Rabiul Awwal 1359, Partai Islam Indonesia - PII memutuskan Program Perjuangannya antara lain:

1. Membangun Negara Kesatuan - eenheidsstaat Indonesia yang diperintah oleh Pemerintah Pusat
2. Dasar pemerintahan bersifat demokratis
3. Parlemen yang dipilih oleh rakyat secara umum dan langsung
4. Meng-indonesia-kan jabatan negeri
5. Pemerintah memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan
6. Menghapuskan hak monopoli dan digantikan oleh perusahaan pemerintah

---

<sup>4</sup> Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908. Pendidikan HIS Padang, 1923; MULO, 1927; AMS di Bandung, 1930; Kursus Guru, 1932; studi agama di Persatoean Islam Bandung dari Toean A. Hassan. Ketua Jong Islamieten Bond – JIB di Bandung, 1928-1932. Direktur Perguruan Pendidikan Islam, 1932-1942. Terpilih menjadi Wakil P.B. Persatoean Islam, 1937. Anggota Dewan Kaboepaten Bandoeng, 1940-1942. Kepala Biro Pendidikan Kota Bandoeng -Shiyakuso (1942-1945). Anggota BP KNIP, 1945-1946. Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi, 1949-1958. Menteri Penerangan Kabinet Sjahrir III, 1946-1947, dan Kabinet Hatta, 1948-1949.



Pordana menteri Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Muslimin

dan para menteri foto bersama seketika pelantikan dengan  
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

Sumber: 10 Tahun Indonesia Merdeka

Hanya sebagian Program Perjuangan Partai Islam Indonesia - PII di atas yang pernah diperjuangkan oleh Mohammad Natsir pada masa Pergerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional sangat relevan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh NKRI. Terutama Program PII membangun Negara Kesatuan dan Berpemerintah Pusat yang demokratis. Apalagi, Mohammad Natsir juga berangkat dari Persatuan Islam, sejalan dengan cita-cita kesatuannya.

## Kabinet Natsir

Oleh karena itu, Mohammad Natsir sebagai Ulama dan intelektual Muslim yang layak menjadi orang yang pertama sebagai Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu, Mohammad Natsir dalam menyusun kabinetnya sangat memerhatikan tuntutan politik Indonesia saat itu. Adapun Kabinet Natsir, 9 September 1950-20 Maret 1951, sebagai berikut:<sup>5</sup>

Perdana Menteri	Mohammad Natsir	Masjumi
Wakil P M	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX	Non Partai
Dalam Negeri	Aasaat	Non Partai
Luar Negeri	Mohamad Roem	Masjumi
Pertahanan	Abdul Halim <sup>6</sup>	Non Partai
Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
Keuangan	Sjafrudin Prawiranegara	Masjumi
Perdagangan dan Industri	Soemitro	PSI
Pertanian	Tandiono Manu	PSI
Perhubungan & Transportasi	Djuanda	Non Partai
Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non Partai
Pekerjaan Umum	Johannes	PIR
Kesehatan	J. Leimena	Parkindo
Perburuhan	P. Saroso	Parindra
Sosial	F.S. Harjadi	Katolik
Agama	K.H. Wachid Hasjim	Masjumi
Penerangan	M.A. Pellaupesy	Demokrat
Negara	Harsono Tjokroaminoto <sup>7</sup>	PSII

5 George McTurnan Kahin. 1970. *Op.Cit.*, h 468

6 Abdoel Halim tidak berlanjut karena sakit keras, diambil alih oleh Mohammad Natsir dan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX.

7 Mengundurkan diri karena PSII sebagai partai oposisi terhadap Kabinet Natsir, 18-12-1950.



Sumber: Doc. Pribadi

## PERTEMUAN PENULIS DENGAN MOHAMMAD NATSIR

Pada pertemuan Dana Al Falah di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta, Mohammad Natsir memberikan informasi tentang bagaimana proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Mosi Integral kepada penulis

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kabinet Natsir ini adalah kabinet pertama pada periode NKRI dipimpin oleh Partai Islam Indonesia Masjumi. Pada masa Perang Kemerdekaan dan Diplomasi, 1945-1950 M, tidak pernah ada Kabinet yang dipimpin oleh Partai Islam Indonesia, Masjoemi.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus, Djoemat Legi, 9 Ramadhan 1964, diawali dengan Kabinet Presidential dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, 31 Agustus-14 November 1945, atau 75 hari. Disusul dengan kabinet yang dipimpin PSI Sjahrir hingga tiga kali: Kabinet Sjahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946. Terjadi Kudeta PKI dipimpin Mohammad Joesoef di Cirebon, 12 Februari 1946. Kabinet Sjahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946. Terjadi lagi Kudeta 3 Juli 1946, dari komunis nasional Tan Malaka di Djokjakarta. Kabinet Sjahrir III, 2 Oktober 1946-27 Juni 1947.

Diikuti oleh Kabinet Amir Sjarifoeddin, 3 Juli-11 November 1947. Digantikan oleh Kabinet Hatta, 11 November 1947-27 Desember 1949. Pecahlah Kudeta PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin bersama Moeso, 19 September 1948. Muncul pula gerakan Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949, oleh S.M. Kartosoewiro menentang Roem-Royen Statement yang berkelanjutan dengan Konferensi Medja Bundar melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda, dinilai bertentangan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada masa Republik Indonesia Serikat - RIS, 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Kabinet RIS dipimpin lagi oleh Drs. Mohammad Hatta. Terjadi Kudeta APRA di Bandung, 23 Januari 1950 dipimpin oleh Westerling. Diikuti oleh Pemberontakan KNIL Andi Azis di Makassar. 5 April 1950.

Dilanjutkan pecahnya gerakan separatis Republik Maluku Selatan, 19 April 1950, dipimpin oleh Dr. Soumokil.

Baru setelah terbentuknya NKRI, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memercayakan kepada Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi untuk memimpin Kabinet NKRI, 6 September 1950-20 Maret 1951.

Kalau kita perhatikan dari susunan kementerian dan menteri-menterinya, Mohammad Natsir memberikan pesan tersirat kepada generasi muda Islam yang mau belajar sejarah, dan sedang membina dirinya sebagai aktivis organisasi Islam, mengingatkan bahwa dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan partai dan pemerintahan di NKRI, memiliki seni tersendiri. Ditantang untuk mampu membangun kerja sama dengan menyeleksi tuntutan politik nasional dan kekuatan partai dalam DPR. Dalam mengaplikasikan wawasan politik luar negeri harus

mempertimbangkan peristiwa politik dunia yang sedang terjadi, dengan berwawasan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri harus lebih mampu memperlihatkan sikap politik yang berada di atas bhineka tunggal ika. Pertentangan masa penjajahan Kerajaan Protestan Belanda dengan Politik Kristenisasinya, dan masa penjajahan Fasisme Kekaisaran Djepang, dengan program perang dan romushanya dengan para kolaboratornya, untuk tidak dipertentangkan lagi antarsesama pemimpin bangsa Indonesia. Dibuktikan diangkatnya menteri-menteri dari kalangan Partai Kristen Indonesia - Parkindo dan Partai Katolik. Demikian pula mengendalikan sikap politik Partai Islam Indonesia Masjumi terhadap pimpinan kalangan Kedjawen.

Maksudnya, tidak mungkin menyusun kabinet, secara mutlak keseluruhannya terdiri dari partai Islam. Idealnya, memang demikian, tetapi cara itu tidak realistik aspirasinya karena dalam penyusunan kabinet harus menggambarkan kerja sama dan adanya pembagian kerja antarkementerian dengan partai lain atau perwakilan lainnya secara berimbang. Dalam menyusun Kabinet Parlementer, jumlah kursi pendukung yang ada dalam DPR harus dihitung. Mencoba tetap berdiri pada prinsip demokrasi. Demikian pula dalam mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif, untuk menghadapi pergolakan politik dunia yang sedang terjadi.

Dapat dibaca pada masa Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir, pos-pos kementerian yang penting dikuasai oleh Partai Sosialis. Dari masalah Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Pertahanan dikuasai oleh Partai Sosialis. Sedangkan kementerian lainnya ditawarkan kepada partai lainnya, sesuai dengan yang disetujuinya karena Kabinet Parlementer harus disusun berdasarkan kesamaan kepentingan daripada ideologi.

Misalnya Amir Sjarifoeddin walaupun berideologi Marxis dan beragama Kristen, tetapi ingin memperkuat kabinetnya di hadapan DPR, memerlukan adanya Menteri yang berasal dari Partai Sjarakat Islam Indonesia. Meskipun P.S.I.I pada masa pimpinan H.O.S.Tjokroaminoto menentang Komunisme dan Sosialisme sekuler.

Amir Sjarifoeddin menyadari ketidakmungkinan untuk mampu mengendalikan pemerintahan di tengah Perang Kemerdekaan apabila tanpa dukungan partai politik Islam. Apalagi Amir Sjarifoeddin dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri diperolehnya dengan menjatuhkan Soetan Sjahrir sama-sama Sosialis Marxist. Oleh karena itu, sangat mutlak perlunya mendapatkan dukungan dari P.S.I.I. yang telah melepaskan ikatannya dengan Masjumi karena Partai Islam Indonesia Masjumi menolaknya, 1948 M.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Mohammad Natsir juga membagi pos utamanya untuk dipegang oleh Masjumi. Dari 18 kementerian, Masjumi hanya menduduki 4 kementerian: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Keuangan, Agama. Selebihnya untuk partai politik yang lain atau non partai seperti terlihat dalam susunan Kabinet Natsir di atas.

Sebenarnya tidak mungkin Masjumi sebagai partai Islam, kemudian mau bekerja sama dengan Partai Sosialis Sjahrir. Namun apabila bersedia untuk diajak kerja sama, walaupun tidak sejalan dengan ajaran Islam ideologinya, dibukalah kursi kementeriannya sebagai partai pendukung.

Kabinet Natsir walaupun telah berkoalisi dengan PSI Sjahrir, ternyata hanya mampu bertahan selama 7 bulan. Apa sebab pendeknya usia kementerian Natsir. Menurut M.C. Ricklefs periode 1950-1956, Indonesia sedang belajar berdemokrasi.

Menurut pendapat penulis, situasi setelah berakhirknya Perang Kemerdekaan dan mulai tidak adanya lawan secara fisik penjajah Belanda di Indonesia, kecuali di wilayah Irian Barat, menjadikan hilangnya rasa pemilikan kesamaan musuh - *common enemy*.

Kemudian, akibat program kabinetnya tidak segera dialihkan atau difokuskan dengan menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan kembali kepada penjajah Belanda yang masih bercokol di Irian Barat, dampaknya permusuhan beralih ke dalam. Timbulah *internal conflict* dan terjadi pergantian secara cepat siapa yang dianggap lawan atau kawan? Bergantung kepada perbedaan dan persamaan kepentingannya.

Misalnya PNI sejalan atau bekerja sama dengan Masjumi dan Presiden Soekarno dalam menghadapi PKI Amir dan Moeso tahun 1948 M. Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris. Namun, setelah terbentuknya RIS dalam rangka menegakkan demokrasi, oleh Kabinet Hatta RIS maka PKI diberi hak untuk aktif kembali. Apalagi setelah terbentuknya RRC di bawah Mao Ze Dong, semakin kuat. Pada proses berikutnya memasuki 1960, pengaruhnya di Indonesia terjadi pembalikan kerja sama antar partai politik dan TNI serta Presiden.

Partai Masjumi mulai bekerja sama dengan PSI Sjahrir dalam melawan PKI Aidit. Memasuki 1960, kedua partai Masjumi dan PSI, mulai tersingkirkan. Presiden Soekarno pun beralih, hubungannya dengan pimpinan PNI, Masjumi, dan TNI mulai kurang akrab karena Presiden Soekarno dirangkul oleh PKI. Walaupun PKI sebenarnya oleh PNI disebut sebagai partai bermula dua ke Moskow, Beijing, dan ke Indonesia.

Sebelum peristiwa-peristiwa sejarah ini terjadi, dan dalam menghadapi kemajuan RRC, Korea Utara, dan Vietnam Utara dengan ideologi komunisnya, serta saat itu mereka belum mendapat pengakuan dari dunia maju, membuat kebijakan Mohammad Natsir cenderung mendekati Barat dalam kebijakan politik luar negerinya.

Dimulai dengan menjadikan Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 PBB, 27 September 1950, Rabu Pon, 14 Dzulhijjah 1369. Upaya ini dipimpin oleh Mohammad Roem sebagai Ketua dan A.N. Palar wakil Ketua delegasi Indonesia. Adapun tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB tidak sesederhana yang terlihat secara fisik. Sang Merah Putih dikibarkan di antara bendera nasional 59 negara-negara merdeka lainnya.

Hal itu, sebagai upaya menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa dan negara merdeka lainnya. Dengan kata lain, secara de jure diakui oleh dunia negara-negara merdeka, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Dari sini, menurut Mohammad Natsir, perjuangan membebaskan Irian Barat dari penjajahan Kerajaan Protestan Belanda, diharapkan akan mendapatkan dukungan dari PBB.

Ternyata langkah perjuangan yang ditempuh oleh Mohammad Natsir ini benar. Terbukti pada 15 Agustus 1962, Rabu Pon, 14 Rabiul Awwal 1382, diadakan Persetujuan New York Penyerahan Irian Barat oleh Kerajaan Protestan Belanda kepada Republik Indonesia dilakukan penandatanganannya di Markas Besar PBB.

Walaupun di bidang ekonomi saat itu mulai dirasakan ada kemajuan, tetapi hal ini belum menjadi kebanggaan bangsa karena baru saja merdeka, pemikiran masalah kekisruhan pemberontakan negara-negara boneka bikinan van Mook masih dominan. Apalagi, masalah APRIS menjadi APRI diikuti masalah tuntutan bekas gerilyawan, cukup berat dihadapi oleh Kabinet Natsir. Oleh karena itu, diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB, upaya Kabinet Natsir saat itu belum dinilai sebagai prestasi politik luar negeri yang patut dibanggakan rakyat.

Sekali lagi, Kabinet Natsir mendapatkan tugas yang sangat berat dalam penyelesaian masalah TNI dari Tentara Gerilya, untuk ditingkatkan sistem pengorganisasianya menjadi tentara reguler. Sebenarnya, hal ini sebagai kelanjutan tugas Re-Ra pada masa Kabinet Hatta pada masa RIS yang belum terselesaikan. Penertiban organisasi kesenjataan tidak hanya masalah pengaturan senjata. Tetapi, lebih menyangkut masalah personalia dan psikologi militer dari jiwa perang untuk diubah dalam kehidupan damai di tengah masyarakat. Termasuk tidak kurang musiklnya mantan

serdadu KNIL yang pernah bergabung dalam APRIS. Ditambah dengan masalah KNIL dari Andi Azis atau RMS yang ingin bergabung kembali dengan Kerajaan Protestan Belanda.

Dapat dilihat masalah Kahar Moezakkhar di Makassar, kekeliruan mengangkat pimpinan Korps Cadangan Tentara Nasional bukan dipimpin oleh Kahar Moezakkhar sebagai putra daerah, menimbulkan pecahnya pemberontakan. Disusul dengan pecahnya pemberontakan Ibnoe Hadjar, bekas Letnan Dua TNI, di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Berarti satu bulan setelah Kabinet Natsir diangkat.

Kelanjutannya Kahar Moezakkhar, 7 Agustus 1953, menyatakan Sulawesi Selatan sebagai Republik Islam Indonesia di bawah Imam S.M. Kartosoewirjo. Tindakan ini dipilihnya, menurut pelakunya sebagai upaya menyelamatkan Indonesia dari pengaruh komunisme. Upaya Kahar Muzakkhar baru dapat dihentikan oleh Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Brigjen Jusuf, 3 Februari 1965. Setelah S.M. Kartosoewirjo<sup>8</sup> ditangkap 4 Juni 1962. Berarti 15 tahun, 1950-1965 M lamanya waktu yang digunakan untuk menghentikan perlawan Kahar Muzakkhar.

Semuanya merupakan problem utama Angkatan Bersenjata bila perang telah usai. Menuntut kebijakan dengan memberikan penghargaan yang tepat dan memuaskan semua pihak. Terutama bagi yang pernah berjasa menjadi gerilyawan. Kahar Muzakkhar tidak hanya berjasa melindungi Presiden Soekarno di Lapangan Ikada Jakarta, 19 September 1945 dari Balatentara Djepang, dan bergerilya di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun juga, berjasa dalam melumpuhkan Pemberontakan Andi Azis, 9 April 1950 dan menyelesaikan tuntutan para Gerilyawan Sulawesi Selatan. Akan tetapi, upaya dan pejuangannya tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari Panglima Komando Tentara dan Teritorial Indonesia Timur - KTTIT, Kolonel Kawilarang.

Kekecewaan yang sama dialami oleh Daud Beureueh yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno setelah Perang Kemerdekaan selesai, Atjeh akan diberi kebebasan menjalankan Sjariah Islam. Kenyataannya setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk, justru Provinsi Atjeh ditiadakan digabung dalam Provinsi Sumatra Utara. Setelah terbentuknya NKRI, Gubernur Atjeh Daud Beureueh menuntut otonomi daerah yang berdiri sendiri, 1 September 1951 kepada Perdana Menteri Mohammad Natsir. Tuntutan ini terhalang oleh belum adanya Undang-Undang Otonomi Daerah.

---

8 Dalam Pengadilan S.M. Kartosoewirjo ditanya oleh Hakim, apakah Sdr S.M. Kartosoewirjo meminta grasi kepada Presiden Soekarno. Jawab S. Kartosoewirjo, Tuan Hakim haram hukumnya meminta grasi kepada manusia Presiden Soekarno. Makin cepat eksekusi dilaksanakan, makin cepat saya melihat hasil *ijithaj* saya. Terima kasih.

Berikutnya, rakyat Atjeh dikejutkan pidato Presiden Soekarno di Amuntai Kalimantan Selatan, 27 Januari 1953 agar rakyat menolak ajakan untuk membentuk Negara Islam. Dampaknya di Atjeh, Daud Beureueh, seperti yang dilakukan oleh Kahar Muzakkir, 7 Agustus 1953, justru menjadikan Atjeh sebagai Negara Islam Indonesia bergabung dengan S.M. Kartosoewirjo, 21 September 1953. Pemerintah Orde Lama, dengan adanya Pemberontakan PRRI/Permesta, Atjeh diubah menjadi Provinsi, 23 Mei 1959. Hal ini akan penulis bahas kembali pada sub bab Proklamasi Darul Islam Di Aceh.

Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi, sebagai Perdana Menteri, selain yang memiliki Mosi Integral yang berhasil membentuk NKRI, juga karena problem dalam negeri yang paling menyulitkan adalah adanya pemberontakan bersenjata dengan nama Islam.

Pemberontakan Andi Aziz bekas serdadu KNIL, mudah dipatahkan. Namun, RMS yang mengatasnamakan gerakannya agama Protestan, sukar untuk diatasi. Dari 19 April 1950, Dr. Ch. R. Soumokil mencetuskan RMS, baru tertangkap 2 Desember 1963 setelah Irian Barat atau Papua kembali ke pangkuhan Republik Indonesia. Peristiwa ini, menjadikan RMS tidak berdaya setelah ditinggalkan pendukungnya, penajah Belanda.

Untuk mengatasi masalah NII Jawa Barat, Mohammad Natsir meminta jasa dari A. Hassan Guru Utama dari Persatuan Islam untuk mengadakan pertemuan dengan S.M. Kartosoewirjo guna menyampaikan tujuan Mosi Integral dan pembentukan NKRI. Ternyata, usaha ini menemui kegagalan.

## Problema TII dan NII

Problema Tentara Islam Indonesia - TII bukan terlahir di masa Kabinet Natsir. Melainkan sebagai tindakan kontra politik terhadap hasil Peroendingan Renville yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin, 1948 M. Dengan perintahnya, pengosongan Jawa Barat dari Tentara Siliwangi dan segenap organisasi kesenjataan Lasjkar Hizboellah dan Sabillah, untuk diserahkan kepada penjajah Belanda. Selain itu, pembentukan Tentara Islam Indonesia, bertujuan menggagalkan Negara Posoendan bikinan van Mook.

Kemudian, setelah Roem-Royen Statements, 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Rajab 1368, muncullah Proklamasi Negara Islam Indonesia - NII yang diproklamasikan 7 Agustus 1949, Ahad Pahing, 11 Syawwal 1368 oleh S.M. Kartosoewirjo.

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai reaksi terhadap *Roem-Royen Statements* yang akan melahirkan Republik Indonesia Serikat di bawah Ratu Belanda. Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, pembentukan RI<sup>S</sup> itu statusnya sangat bertentangan dengan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Walaupun mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak, *Roem-Royen Statement*, 7 Mei 1949, ditindaklanjuti dengan Konferensi Medja Bundar - KMB dari pihak Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, 2 November 1949. Kemudian, hasil KMB, direalisasikan dengan terbentuknya Kabinet RI<sup>S</sup> di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta, 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.

Masalah DI/TII baru terselesaikan 13 tahun kemudian, pada 4 Juni 1962, Senin Legi, 1 Muharram 1382, S.M. Kartosoewirjo baru tertangkap karena dilancarkannya Operasi Pagar Betis Rakyat yang dipimpin oleh TNI Siliwangi di bawah Panglima Ibrahim Adjie.

Betapa beratnya tugas Perdana Menteri Mohammad Natsir dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI yang baru dibentuk pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369. Merupakan masa peralihan, berakhirknya negara-negara boneka bikinan van Mook, menjadi satu negara terdiri dari sejumlah provinsi, di bawah pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu, dihadapkan juga problem baru, dimulainya sistem Demokrasi Perlementer dengan multipartai, serta berakhirknya APRIS menjadi APRI.

Penataan pemerintahan, setiap departemen dan kantor, dihadapkan masalah sangat kurangnya, *administrative leader* - tenaga ahli pemerintahan yang benar-benar berjiwa patriotik, dari pusat hingga eselon terbawah di setiap daerah. Tambahan lagi, masalah keamanan masih sangat rawan. Di bawah kondisi pemerintahan serba kurang tenaga profesional, Mohammad Natsir sebagai pemimpin negara yang baru, mendapat tantangan banyaknya *mass leader* - pemimpin massa di lembaga legislatif yang lebih berpikir idealis daripada realitas.

Bagaimanapun beratnya pekerjaan sebagai perintis pertama pembangun NKRI, semua problem negara tetap dihadapi dengan bijaksana oleh Mohammad Natsir. Berjuang dengan tabah, membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara agar memahami realitas kebhinekaan, bukan untuk dipertengkar. Melainkan agar disadari bahwa keragaman hakikatnya adalah satu kesatuan. Pekerjaan dan perjuangan yang berat tidak mungkin berhasil secepat membalikkan telapak tangan atau secara instan dan segera jadi.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## KABINET SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO - SOEWIRJO

Koalisi Masjumi – PNI

April 1951 – Februari 1952

Foto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden

Timbu I gerakan DI Kahar Muzakkar di Makassar

Pemberontakan Batayon 426 – Amir Fatah dan Angkatan Umat Islam AUI – Kiai Mahfudz

Sistem Demokrasi Liberal menjadikan usia kerja Kabinet sangat pendek, dijatuhkan oleh mosi

tidak percaya DPR terhadap kebijakan politiknya.

Mutual Security Act – MSA dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi dan Persatuan Islam, sebagai arsitek pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai pemegang stock estafet yang pertama, berusaha agar dapat dilanjutkan oleh penerusnya. Dengan kata lain, Mohammad Natsir sebagai pembangun fondasi dasar NKRI, bekerja keras agar bangunan selanjutnya tidak bertentangan dengan fondasinya.

Kabinet Parlementer yang bergantung kepada dukungan Parlemen-DPR, dalam perkembangan Sejarah Kabinet di Indonesia, melahirkan masa pemerintahan

atau kabinet berumur sangat pendek. Akibat Parlemen-DPR dikuasai pimpinan partai politik, pada umumnya sebagai *mass leader* - pemimpin massa, dan sangat kurangnya *administrative leader* - pemimpin yang memahami masalah pemerintahan, menjadikan DPR dengan mudah memberikan evaluasi tidak percaya kepada kabinet dan terjadilah pergantian kabinet.



## LAMBANG NEGARA GARUDA PANCASILA

Masyarakat luas mengira Lambang Negara NKRI sebagai ciptaan Mohammad Yamin. Perkiraan yang demikian itu tidak benar. Sebenarnya, pencipta Lambang Negara adalah

**Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak Kalimantan Barat**

Ketika masih menjabat Menteri Negara RIS mendapat tugas dari Presiden Soekarno, Sultan Hamid II sebagai pencipta Lambang Negara menuturkan proses penciptaannya kepada sejarawan Solihin Salam.

### **Burung Garuda Pancasila**

Bukanlah sebagai Burung Garuda Airlangga dari Kediri, melainkan

**Burung Elang Rajawali Sayyidina Ali ra**

Bersayap kanan kiri masing-masing 17, ekor 8, dan bulu pada pangkal ekor 19  
dan pada leher 45 lambang Proklamasi 17-08-1945

**Perisai di dada Burung Garuda Pancasila,**

berwarna dasar kanan kiri Merah Putih di tengah berwarna Hitam  
berbentuk segi empat dan lengkung di bagian bawahnya sebagai lambang

**Ka'bah dan Hijir Ismail**

Pada Perisai Lambang Garuda Pancasila terdapat lambang lima sila

**Bintang Nur Cahaya**

warna dasar hitam, Bintang berwarna putih

**Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Rantai atau Kalung**

berwarna emas, warna dasar Merah,

**Lambang Kemanusiaan Yang Adil Beradab**

**Pohon Istana**

Warna daun hijau batang coklat, berwarna dasar Putih

**Lambang Persatuan Indonesia**

**Kepala Banteng**

warna hitam putih, warna dasar Merah

**Lambang Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan**

**Kapas dan Padi**

Kapas warna hijau putih, Padi berwarna emas, warna dasar Putih

**Lambang Keadilan Sosial**

Cara membaca lambang Bintang di tengah, turun ke Rantai, naik ke Pohon Istana,

Terus belok ke kanan Banteng, turun ke Kapas dan Padi disebut

**Thowaf seperti mengelilingi Ka'bah**

Di antara kelima lambang terdapat garis tebal hitam melintang

**Lambang Garis Khatulistiwa**

Kaki Garuda Pancasila menggenggam pita yang bertuliskan

**Bhinneka Tunggal Ika**

Pelukis pertama Lambang Garuda Pancasila adalah Dullah

Lambang Pancasila sebagai Lambang NKRI disahkan pertama kalinya oleh

**Perdana Menteri NKRI Dr.Soekiman Wirjosandjojo**

Partai Islam Indonesia Masjumi

**Periksa Lebih Lanjut di Museum Konferensi Asia Afrika**

## Kabinet Soekiman Wirjosandjojo

Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandjojo, April 1951-Februari 1952, koalisi PNI-Masjumi, menghadapi problem baru masalah TNI karena Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX tidak lagi duduk dalam Kabinet Soekiman. Dipersulit juga oleh tindakan Mohammad Yamin penganut Komunis Nasional Tan Malaka, sebagai Menteri Kehakiman yang tiba-tiba membebaskan 950 orang tahanan di antara 17.000 tahanan yang ditangkap oleh TNI dalam Kudeta PKI Madiun 19 September 1948, padahal belum diadili. Sebaliknya, tanpa koordinasi dengan TNI, melakukan razia penangkapan 15.000 PKI di Jakarta, Bogor, dan Medan. Akibatnya timbul kekacauan stabilitas sosial.

Muncul pertanyaan, siapa yang dilepas dan siapa pula yang ditangkap? Sayangnya, nama-namanya dan kedudukan kepartaiannya tidak diumumkan. Tidak pula terberitakan secara terbuka nama-namanya dalam media cetak saat itu. Setelah direhabilitasikan, mereka mendapatkan kedudukan apa dan di mana. Secara logika politik dapat diduga, yang dibebaskan oleh Mohammad Yamin, 950 tapol adalah dari komunis nasional Tan Malaka. Sedangkan yang ditangkap ulang 15.000 tapol adalah lawannya, yakni pengikut PKI Amir Sjarifoeddin. Benarkah, perlu penelitian ulang?

Adapun susunan Kabinet Soekiman Wirjosandjojo sebagai berikut:

Perdana Menteri	Dr. Soekiman Wirjosandjojo	Masjumi
Wakil Perdana Menteri	Soewirjo	PNI
Luar Negeri	Mr. Achmad Soebardjo	Masjumi
Dalam Negeri	Mr. Ishaq Tjokrodisoerjo	PNI
Pertahanan	Sewaka	PIR
Kehakiman	Mr. Mohammad Yamin	-
Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
Keuangan	Mr. Joesoef Wibisono	Masjumi
Pertanian	Ir. Soewarto	Katolik
Perburuhan, Perdagangan dan Perindustrian	Mr. Soejono Hadinoto	PNI
Perhubungan	Ir. Djuanda	-
Pekerjaan Umum	Ir. Ukar Bratakoesoemah	PNI
Perburuhan	Iskandar Tjedjasukmana	Buruh
Sosial	Dr. Sjamsoedin	Masjumi

Pendidikan, Pengajaran,		
Kebudayaan	Mr. Wongsonegoro	PIR
Agama	K.H. Wachid Hasjim	Masjumi
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Soal-Soal Umum	M.A. Pelaupessy	Demokrat
Kepgawaian Negeri	R.P. Soeroso	Parindra
Agraria	Gondokoesoemo	PIR

Menurut Deliar Noer dalam Partai Islam Di Pentas Nasional dijelaskan bahwa Sewaka pengganti Soemitro Kolopaking, diangkat pada 9 Mei 1951. Pelaupessy diangkat menjadi penjabat Menteri Kehakiman, 14 Juni 1951, pada saat Mohammad Yamin mengundurkan diri. Kemudian, Mohammad Nasrun, pada 20 November 1951 diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Mr. Soejono Hadinoto digantikan oleh Wilopo, 16 Juli 1951. Adapun yang dimaksudkan Dr. Samsudin bukan pimpinan Masjumi 1947-1949. Sedangkan Gondokoesoemo wafat 6 Maret 1962.

Dalam menghadapi Perang Dingin antar Blok Barat dan Timur, Kabinet Soekiman mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat, di bidang ekonomi, teknik dan militer atas dasar Mutual Security Act – MSA atau Undang-Undang Keamanan Bersama, 1951. Kebijakan Kabinet Soekiman ini dinilai bertentangan dengan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif. Akibatnya, Kabinet Soekiman, dituduh menjadikan Indonesia berpihak mutlak ke Blok Barat. Dampaknya Kabinet Soekiman hanya bertahan 10 bulan, walaupun telah bekerja menegakkan pemerintahan secara demokratis. Kabinetnya dibangun bersama antar parpol Masjumi, PNI, Katolik, Kristen, PIR, Demokrat, Buruh, dan Parindra.

Kedua Kabinet Natsir bekerja selama tujuh bulan, 9 September 1950-20 Maret 1951, dan Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandojo bekerja sebelas bulan, April 1951-Februari 1952 adalah dipimpin langsung oleh Partai Islam Indonesia Masjumi. Berikutnya oleh Presiden Soekarno pada 19 Maret 1951 diserahkan kepada Wilopo dari Partai Nasional Indonesia - PNI. Namun, sebelumnya telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno, sebagai formateur adalah Prawoto Mangkusasmoro Wakil Ketua I Partai Masjumi dan Sidik dari PNI. Namun, sampai dengan 18 Maret 1951, kedua formateur tersebut tidak berhasil menyusun kabinetnya dan menyerahkannya kembali mandatnya.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## KABINET WILOPO – PRAWOTO

Koalisi PNI – Masjumi

April 1952 – Juni 1953

Atas: Foto Pelantikan dan Sumpah Perdana Menteri

Bawah: Foto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden

Menghadapi Demo Pembubaran Parlemen, 17 Oktober 1952

Timbulah gerakan kedaerahan

Peristiwa Tanjung Morawa PKI

Kegagalan pembentuk kabinet tersebut akibat Joesoef Wibisono menolak Ishak sebagai Perdana Menteri dan A.K. Gani sebagai Menteri Perekonomian. Joesoef Wibisono menghendaki agar Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri.

K.H. Abdoel Wahab menuntut agar K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama. Bila menolak masih ada calonnya K.H. Maskoer, K.H. Fatoerrahman, H. Moestari Bupati Tuban, dan Mohammad Machien Bupati Kediri.

Di samping itu, K.H. Abdoel Wahab menempuh jalur sendiri artinya bukan usulan partai, mengusulkan pula Zainoel Arifin sebagai Menteri Pertahanan dan Aboe Hanifah sebagai Menteri Luar Negeri.

Sedangkan Muhammadiyah mengusulkan K.H. Fakih Oesman sebagai menteri agama karena Nahdlatul Ulama sudah dua kali menduduki Kementerian Agama. Demikian penjelasan Deliar Noer.

## Ulama dalam Kabinet Wilopo

Dengan melanjutkan hasil kerja Prawoto Mangkusasmoro dan Sidik, Wilopo dari PNI berhasil membentuk Kabinet Wilopo, April 1952-Juni 1953, koalisi PNI-Masjumi, terdiri dari:

Perdana Menteri	Mr. Wilopo	PNI
Wakil Perdana Menteri	Prawoto Mangkusasmoro	Masjumi
Luar Negeri	Moekarto Notowidagdo	PNI
Dalam Negeri	Mr. Mohamad Roem	Masjumi
Pertahanan	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX	-
Kehakiman	Mr. Loekman Wiradinata	PSI
Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
Keuangan	Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo	PSI
Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
Perekonomian	Mr. Soemanang	PNI
Perhubungan	Ir. Djuanda	-
Pekerjaan Umum	Ir. Soewarto	Katolik
Perburuhan	I.Tedjasoekmana	Buruh
Sosial	Anwar Tjokroaminoto	PSII
Pendidikan, Pengajaran		
Kebudayaan	Dr. Bahder Djohan	-

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Agama	K.H. Fakih Oesman	Masjumi
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Kepegawaian Negeri	R.P. Soeroso	Parindra

Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX berhenti pada 2 Juni 1953, Kementerian Pertahanan dijabat oleh Wakil Perdana Menteri, kemudian oleh Perdana Menteri. Anwar Tjokroaminoto mengundurkan diri, kemudian jabatan Menteri Sosial dipegang oleh R.P. Soeroso. Sementara itu, Kementerian Kepegawaian Negeri, mulai 11 Mei 1953 ditiadakan.

### Lahirnya Partai Nahdlatul Ulama

Dari susunan Kabinet Wilopo di atas, apa yang diusulkan oleh K.H. Abdoel Wahab tidak direalisasikan. Terutama sekali, tuntutan Nahdlatul Ulama tentang Menteri Agama, tidak seorang pun dari lima usulan: K.H. Wachid Hasjim, K.H. Maskoer, K.H. Fatoerrahman, H. Moestari, Mohamad Machien yang diangkat. Dan yang diangkat adalah K.H. Fakih Oesman dari Persyarikatan Moehammadiyah.

Dampaknya menurut Deliar Noer, Muktamar Nahdlatul Ulama di Palembang, 29 April 1952, mengubah Djamijah Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar ini, Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai Wakil Ketua I Pimpinan Pusat Masjumi hadir. Sebenarnya sebelum diadakan pemungutan suara, Dr. Soekiman Wirjosandjojo dipersilakan untuk berbicara. Namun ia menolaknya, alasannya Nahdlatoel Oelama sebagai organisasi yang berdaulat. Kemudian setelah terbentuk, Dr. Soekiman Wirjosandjojo mengajak untuk bekerja sama.

Dengan terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952 maka untuk kedua kalinya terjadi pemisahan Ulama secara fisik keorganisasian kepartaiannya dari Partai Islam Indonesia Masjumi. Pertama dipelopori oleh Sjarikat Islam, 1949 M. Kedua oleh Nahdlatul Ulama, 1952 M.

Semula para Ulama baik dari Persyarikatan Moehammadiyah, Persatoean Islam, Nahdlatoel Oelama, Matlaaoel Anwar, Persatoean Oemat Islam, Al-Waslijah, Sjarikat Islam duduk bersama-sama dalam Madjlis Sjoero dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, 1 Dzulhijjah 1364, Rabo Pon, 7 November 1945, di Djokjakarta.

Lambang Djamiah Nahdlatu Oelama



Sumber: Dsa. Prikaldi

Namun dengan berdirinya Partai Nahdlatul Ulama maka sejak 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952, dalam Madjlis Sjiuro Partai Islam Indonesia Masjumi, tidak ada lagi Ulama dari Nahdlatul Ulama, berarti menyusul Ulama dari Sjarikat Islam yang telah keluar sejak 1948 M karena menghidupkan kembali Partai Sjarikat Islam Indonesia ,1923 M.

## K.H. Wachid Hasjim Wafat

Upaya kerja sama yang diminta oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo terhambat karena K.H. Wachid Hasjim, 1331-1372 H/1913-1953 M wafat setelah mengalami kecelakaan lalu-lintas di Cimindi, Cimahi, Bandung, 4 Sja'ban 1372, Ahad Pon, 19 April 1953.

Tepat setahun setelah terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama, 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952/ awal Muktamar Nahdlatul Ulama di Palembang, 3 Sja'ban 1371, Senin Pahing, 28 April 1952.

K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama 1950-1952 memberikan keterangan dan jawaban tentang eksistensi Kementerian dan Departemen Agama di tengah bangsa dan negara Indonesia. Keterangannya untuk memberikan jawaban kepada sebagian orang yang berkeinginan menghapuskan Departemen Agama. Menurut Deliar Noer dicontohkan Nj. Rasoena Said pejuang wanita, pengikut Tan Malaka, di Sumatera pada masa penjajahan Belanda, Departemen Agama serta Departemen Penerangan dituntut untuk dihapuskan.

K.H. Wachid Hasjim menandaskan bahwa Pemerintah RI merasa berkewajiban melayani keperluan masyarakat tentang agama atas dasar Pancasila. Ditegaskan adanya upaya pemisahan agama dan negara hanya terdapat secara teori dan tidak pernah dipraktikkan sepenuhnya di negara mana pun, kecuali negara atheis.

Selanjutnya diingatkan, walaupun Departemen Agama dapat saja dihapuskan dan berbagai fungsi departemen itu dilaksanakan oleh berbagai departemen lain, K.H. Wachid Hasjim tegaskan bahwa penghapusannya akan menyenggung perasaan umat Islam Indonesia.

Mengenai tuduhan bahwa departemen memberikan perhatian lebih banyak pada Islam, Menteri K.H. Wachid Hasjim mengingatkan bahwa jumlah penganut Islam berlipat ganda dari yang bukan Islam sehingga kesan seperti yang dituduhkan

itu mungkin timbul. Namun, beban kerja untuk melayani umat Islam karena jumlahnya itu, tidak dapat disamakan dengan beban kerja bagi umat lainnya. Ini bukanlah bersetuju pada diskriminasi.

Pernyataan K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama itu karena pada zamannya terdapat upaya deislamisasi kabinet sebagai kelanjutan setelah berhasil menghapuskan tujuh kata pada Piagam Jakarta; Departemen Agama pun perlu ditiadakan.

Upaya pemisahan agama dan negara dari kalangan sekuler dan orang Islam sendiri seperti Nj. Rasoena Said, akan tetap selalu bangkit lagi pada setiap zaman. Peringatan yang ditinggalkan K.H. Wachid Hasjim perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang akan memahami realitas eksistensi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa Indonesia, serta partisipasi aktif perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Problema Batalyon 426 dan Partai NU

Kembali ke masalah kerja Kabinet Wilopo di bidang keamanan pada April 1952 operasi militer berhasil menumpas gerakan Batalyon 426 di Kudus dan Magelang, dan sisanya bergabung ke Darul Islam Jawa Barat. Operasi militer ini sebenarnya telah dilakukan sejak 1950, dipimpin oleh Kolonel Sarbini, digantikan oleh Letnan Kolonel M. Bahroem, kemudian dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, berhasil melumpuhkan Batalyon 426 tersebut.

Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor, menjelaskan bahwa Batalyon 426 adalah batalyon mantan Hizboellah. Sejak Kabinet Soekiman, April 1951- Februari 1952, tidak memerhatikan nasib Batalyon 426 yang diperlakukan oleh Batalyon TNI AD yang lain di Jawa Tengah secara kurang layak sehingga terjadi benturan antara Batalyon 426 dengan Batalyon TNI AD lainnya.

Akibatnya terjadilah fitnah, banyak pemuda mantan Lasjkar Hizboellah, ditangkap dan dipenjarakan. Tidak heran karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil, sisanya yang tidak tertangkap, mengambil sikap lebih baik bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat.

Oleh karena itu, menurut Nahdlatul Ulama saat itu, tindakan Kabinet Natsir dan Kabinet Soekiman Wirjosandojo di bidang keamanan, dengan hancurnya Batalyon 426 mantan Lasjkar Hizboellah, kebijakannya sangat merugikan Islam. Koreksi dari Nahdlatul Ulama ini, tidak didengar dan tidak diperhatikan oleh pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi.

Akibatnya, Muktamar Ke-18 Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 30 April-3 Mei 1950, Ahad Pon-Rabu Legi, 11-14 Rajab 1369, memutuskan keluar dari Partai Islam Indonesia, Masjumi. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut ditangguhkan hingga Muktamar Ke-19 Nahdlatul Ulama di Palembang yang diselenggarakan pada 28 April-1 Mei 1952, Senin Pahing-Kamis Kliwon, 3-6 Sya'ban 1371.

Dari keputusan Muktamar Ke-19 Nahdlatul Ulama ini, lahirlah Instruksi PBNNU No.1/Tanf/52 Tentang Pemisahan Diri NU Secara Organisatoris dari Masjumi dan Usul Memfederasikannya 1 Mei 1952/6 Sya'ban 1371. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang hingga Ranting NU se-Indonesia. Ditanda tangani Ketua dan Biro Politik K.H. Wachid Hasjim.

## Pembubaran DPRS dan Peristiwa Tanjung Morawa

Kemudian, Kabinet Wilopo diguncang oleh demonstrasi rakyat dan TNI AD dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution yang menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan DPRS, dan Kabinet Wilopo juga dituntut agar segera menyelenggarakan Pemilu.

Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Soekarno menolak tuntutan pembubaran DPR karena bukan diktator. Peristiwa ini dikenal nama Peristiwa 17 Oktober 1952.<sup>9</sup> Menurut Bung Tomo dalam *Bung Tomo Menggugat*, Partai Sosialis Indonesia - PSI Soetan Sjahrir menggunakan Angkatan Perang memenangkan tujuannya. Kelompok demonstran ini disebutnya 17 Oktoberisten. Dampaknya timbulah internal conflicts antarpertai politik dan internal conflict antarTNI AD. Antara Kelompok 17 Oktoberisten kontra Golongan Anti 17 Oktober.

9 Bandingkan dengan tindakan Presiden Soekarno dengan Dekrit Presiden 1959, berani membubarkan Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955. Di hadapan demonstran 17 Oktober 1952, tidak bersedia membubarkan DPR bukan hasil Pemilu karena Presiden Soekarno merasa bukan Diktator.

Kabinet Wilopo pada akhirnya tidak mampu menghadapi Peristiwa Tanjung Morawa, Medan Sumatra Utara. Peristiwa tentang upaya pembebasan tanah perkebunan asing, diduduki oleh emigran China asing dan Pribumi. Upaya pembebasan mendapat perlawan dan keributan dari penghuni China Asing dan Pribumi yang mendapat dukungan dari PKI dengan kamuflase membela petani dengan melalui Landreform. Akibat terjadi perlawan, korban tidak dapat dihindari. Kemudian, hal ini diperuncing oleh PKI di DPRS. Partai-partai non komunis pun tidak mampu menandingi manuver PKI di DPRS. Akibatnya, Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya.

Problem Tanjung Morawa dampaknya menjadikan PKI menjadi populer, berhasil menarik perhatian Mr. Ali Sastroamidjojo dan PKI dijadikan salah satu dari ketiga pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo PNI-PKI-NU, Juli 1953-Juli 1955. Sekalipun demikian, Mr Ali Sastroamidjojo sangat kritis dan taktis serba waspada terhadap upaya pemanfaatan kedudukan di kementerian yang akan dijadikan batu loncatan pengembangan PKI lebih lanjut. Oleh karena itu, tidak menempatkan pimpinan Polit Biro PKI, artinya bukan Aidit atau Njoto, melainkan Sadjarwo dari BTI dan S.M. Abidin dari Buruh, dalam kabinetnya.

## **Kabinet PNI, PKI, NU**

Selanjutnya dalam upaya pembentukan kabinet baru, tidak lupa Ali Sastroamidjojo mendekati NU sebagai partai baru yang bermassa besar. Diberikan porsi untuk Kementerian Agama kepada K.H. Maskoer. Sedangkan untuk Zainoel Arifin yang pernah memimpin Sabiliullah, tidak ditempatkan pada Kementerian Pertahanan sebagaimana yang diusulkan Partai NU. Tentu dengan pertimbangan, NU yang memiliki Barisan Sabiliullah dan Lasjkar Hizboellah, serta massa yang besar akan menjadi kuat bila menguasai Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, Zainoel Arifin ditawari sebagai Wakil Perdana Menteri II, dan Mohammad Hanafiah yang diusulkan oleh NU sebagai Menteri Luar Negeri ditempatkan sebagai Menteri Negara. Dengan demikian, NU sebagai partai baru, walaupun sangat kuat, hanya memperoleh tiga kursi.

Sementara itu, kementerian pertahanan dan keamanan diserahkan kepada Mr. Iwa Koesoemasoemantri sebagai pengikut Tan Malaka yang pernah ikut dalam Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta, dengan pertimbangan sebagai intelektual komunis nasionalis. Demikian pula Mohammad Yamin, pengikut Tan Malaka, keduanya sebagai pengikut setia Tan Malaka, komunis nasionalis untuk mengimbangi PKI. Menurut Arnold C. Brackman, keduanya secara fisik mengaku dari Progresif dan bukan dari partai politik.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dari penawaran dan pertimbangan itu, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan poros PNI-NU-PKI, susunannya adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Ali Sasroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Wongsonegoro	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Zainoel Arifin	NU
Luar Negeri	Mr. Soenario	PNI
Dalam Negeri	Mr. Dr. Hazairin	PIR
Pertahanan	Mr. Iwa Koesoemasoemantri	Progresif
Kehakiman	Mr. Djody Gondokusumo	PRN
Penerangan	Dr. F.L. Tobing	SKI
Keuangan	Dr. Ong Eng Die	PNI
Pertanian	Sadjarwo	BTI
Perekonomian	Mr. Ishaq Tjokroadisoerjo	PNI
Perhubungan	Abikoesno Tjokrosoejoso	PSII
Pekerjaan Umum	Ir. Rooseno	PIR
Perburuhan	S.M. Abidin	Buruh
Sosial	R.P. Soeroso	Parindra
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Mr. Mohammad Yamin	-
Agama	K.H. Maskoer	NU
Kesehatan	Dr. F.L. Tobing a.i.	SKI
Menteri Negara dengan Tanggung Jawab		
Soal-soal agraria	Mohammad Hanafiah	NU
Menteri Negara dengan Tanggung Jawab		
Kesejahteraan Negara	Soedibjo	PSII

Selanjutnya, Deliar Noer menjelaskan bahwa Mr. Wongsonegoro - PIR, Mr. Dr. Hazairin - PIR, dan Ir. Rooseno - PIR berhenti pada 23 Oktober 1954. Pada 6 November 1954 K.H. Siradjoeeddin Abbas dari Perti diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Negara. Ir. Rooseno - PIR menjadi Menteri Perekonomian. Mulai 19 November 1954 diangkat tiga menteri baru: Dr. A.K. Gani - PNI sebagai Menteri Perhubungan, Mr. Soenarjo - NU sebagai Menteri Dalam Negeri, dan I Gusti Gde - PRN sebagai Menteri Agraria.

Mr. Iwa Koesoemasoemantri berhenti pada 13 Juli 1955, kementeriannya dipegang oleh Perdana Menteri. Mr. Ishaq Tjokroadisoerjo digantikan oleh Ir. Rooseno pada 6 November 1954. Abikoesno Tjokrosoejoso dan Soedibjo berhenti pada 14 September 1953. Kementerian Perhubungan dipegang oleh Ir Rooseno dan Pekerjaan Umum digantikan oleh Mohammad Hasan - PSII. Dr. Lie Kiat Teng - PSII diangkat menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Dr. F.L. Tobing pada Oktober 1953.

## Proklamasi Darul Islam di Aceh

Program Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Juli 1953-Juli 1955, juga akan menyelesaikan masalah DI/TII. Tetapi hasilnya justru Daud Beureueh orang kuat Aceh dan Benteng RI pada masa Revolusi, pada Muhamarram 1373/September 1953 bergabung kepada S.M. Kartosoewirjo. Tidak percaya lagi terhadap ideologi Pancasila.

Walaupun Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai wakil Aceh ikut serta merumuskan ideologi Pantjasila dan Konstitusi Oendong-Oendong Dasar 1945, bersama K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Boeges Hadikoesomo, Drs. Mohammad Hatta sebelum sidang pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364.

Teungku Mohammad Daud Beureueh nampaknya bukan tidak memerhatikan siapa yang merumuskan Pantjasila pada sehari sesudah Proklamasi ini. Namun, akibat perilaku politik, penguasa tidak menjadikan Pantjasila sebagai pedoman pengambilan kebijakan politiknya lagi.

Alasan Daud Beureueh bersama Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh - POSA,<sup>10</sup> menentang Pemerintah Pusat Jakarta karena kesertaan PKI anti agama berada dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Selain itu, Proklamasi Teungku Mohammad Daud Beureueh itu, juga sebagai perkembangan lebih lanjut reaksi umat Islam terhadap pidato Presiden Soekarno di Amuntai Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Presiden Soekarno menganjurkan agar rakyat menolak usul atau ajakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara:

---

10 Bila terdapat tulisan dengan ejaan lama, Teoengkoe Mohammad Daoed Beoereoe-eh dibaca menjadi Teungku Mohammad Daud Beureueh dan Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh - POSA dibaca menjadi Persatuan Ulama Seluruh Aceh - PUSA.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bismillahir rahmanir rahim. Dengan  
nama Allah Yang Mahamurah dan  
Yang Maha Asih, Asyhadu alla ilaha  
illallahu wa asyhadu anna Muhammadi  
Rasulullah.

Kami Umat Islam Bangsa Indonesia  
MENYATAKAN berdirinya NEGARA  
ISLAM INDONESIA.

Maka hukum yang berlaku atas Negara  
Islam Indonesia itu,  
ialah: HUKUM ISLAM.

Allahu Akbar! Allahu Akbar!  
Allahu Akbar!

Atas nama Ummat Islam Bangsa  
Indonesia

Tertanda

S.M. Kartosoewirjo

Madinah Indonesia, 22 Syawal 1368/  
7 Agustus 1949.



S.M. KARTOSOEWIRJO



DAUD BEUREUEH



KAHAR MUZAKKAR

Sumber: Doc. Pribadi

Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Karena ini akan menyebabkan daerah-daerah seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia.

Apa maksud dari Pidato Presiden Soekarno itu? Dengan memerhatikan tempatnya di sebuah kota kecil Amuntai, di pedalaman Kalimantan Selatan, besar kemungkinan sasarannya adalah untuk membendung pengaruh gerakan Daroel Islam dan Kesatoean Rakjat Jang Tertindas - KRJT, pimpinan Ibnoe Hadjar dari Kalimantan Selatan.

Pandangan Presiden Soekarno ini, menurut Deliar Noer, diulang lagi dalam Ceramah Umum di Universitas Indonesia pada 7 Mei 1953.

Tidak heran bila hal tersebut membangkitkan reaksi Teungku Mohammad Daud Beureueh dengan mengingatkan kembali janji dan sumpah Presiden Soekarno saat berkunjung ke Aceh pada 1948. Dalam dialognya<sup>11</sup> dapat kita ikuti keterangan M. Nur El-Ibrahimy dalam Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai berikut:

Presiden: Saya minta bantuan Kakak Daud Beureueh agar rakyat Aceh turut mengambil bagian perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Daud Beureueh: Sdr. Presiden. Kami Rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa Perang Sabil atau Perang Fi Sabillah, perang untuk menegakkan Agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.

Presiden: Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Tjilik di Tiro, dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersempiany “Merdeka atau Syahid”.

11 M. Nur El-Ibrahimy. 1986. *Teungku Muhammad Daud Beureueh. Peranannya Dalam Fergolakan di Aceh*. Gunung Agung. Jakarta, h. 67–68. Dialog ini tidak dalam bentuk teks aslinya, hanya didasarkan keterangan lisan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh. Memang, Presiden Soekarno tidak menuliskan janjinya. M. Nur El-Ibrahimy menuliskan dialognya dalam bentuk EYD. Perlu penelitian lagi.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Daud Beureueh: Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya.

Presiden: Mengenai hal itu, Kakak tak usah khawatir. Sebab 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam.

Daud Beureueh: Maafkan saya Sdr Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr Presiden.

Presiden: Kalau demikian baiklah, saya menyetujui permintaan Kakak itu.

Daud Beureueh: Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.

Melihat permohonan Daud Beureueh itu, Presiden menangis terisak-isak. Dan berkata: Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya?

Daud Beureueh menjawab: Bukan kami tidak percaya Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda untuk berperang.

Presiden sambil menyeka air matanya berkata: Wallah, Billah, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan menggunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?

Mohammad Daud Beureueh: Saya tidak ragu-ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi, saya atas nama rakyat Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Sdr. Presiden.

Bertolak dari Janji dan Sumpah Presiden Soekarno di atas, dan sebagai reaksi terhadap pidato Presiden 27 Januari 1953 di Amuntai, serta dipicu oleh Peristiwa Berdarah 21 September 1953 di Aceh maka Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang Ulama besar, seorang pemimpin rakyat, mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, serta mantan Gubernur Aceh yang pertama, mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.



LETJEN IBRAHIM ADJIE dan S.M. KARTOSOEWIRJO

Sumber: M.L. Pakuan Rakyat.

## SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO

Wakil Partai Sjarikat Islam Indonesia dalam Kongres Pemoeda, 28 Oktober 1928, yang mengusulkan Bahasa Indonesia dijadikan Bahasa Persatoean dan menolak Bahasa usulan Tri Koro Dharmo atau Jong Java, walaupun dirinya orang Jawa.

Menolak permintaan Amir Sjarifoeddin untuk menjadi staf Menteri Pertahanan karena dinilai Amir Sjarifoeddin PKI. Terbukti adanya Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Pendiri Tentara Islam Indonesia - TII setelah Jawa Barat kosong, ditinggalkan Tentara Siliwangi yang Hijrah ke Jawa Tengah, memenuhi hasil Peroendingan Renville (1948 M). Tujuan pembentukan TII meneruskan bergerilya mempertahankan Jawa Barat sebagai wilayah RI, yang dijadikan sebagai Negara Pasoendan oleh van Mook penjajah Belanda.

Membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi, dan mendirikan Majelis Islam karena Mohamad Roem dari Masjumi yang memimpin *Roem-Roem Statements*, 7 Mei 1949, yang dijadikan dasar Perundingan KMB yang melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda.

Proklamasi Negara Islam Indonesia - NII, 7 Agustus 1949, sebagai manifestasi penolakan Perundingan Konferensi Medja Bundar - KMB yang dimulai 6 Agustus 1948 Drs. Mohammad Hatta ke Nederland, walaupun KMB baru akan diselenggarakan 23 Agustus s/d 2 November 1949. Hasilnya melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda, 27 Desember 1949. Hal ini dinilai bertentangan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kerja sama Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar, Daud Beureueuh dari NII, dengan Ahmad Husein dari PRRI, Samual dari Peresta, menentang Presiden Soekarno yang bekerja sama dengan PKI.

Setelah empat belas tahun kemudian, Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (1948-1962 M) baru tertangkap oleh kepungan Pagar Betis Rakyat, di belakangnya Tentara Siliwangi, di Gunung Geber dan memerintahkan agar anak buahnya turun dari gunung dan kembali ke pangkuhan RI.

Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie menjenguk Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Pos Komando Cipanas, Garut, sebelum dihadapkan ke Mahmilub. Melalui Harian Umum Pikiran Rakjat, rakyat Jawa Barat baru mengetahui Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ternyata sudah berusia lanjut.

Tawaran Grasi oleh Majelis Hakim Mahmilub ditolak oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dengan menyatakan: Haram hukumnya saya meminta grasi kepada manusia Presiden Soekarno.

Makin cepat eksekusi dilaksanakan, makin cepat saya melihat hasil ijтиhad saya di hadapan Mahkamah Allah.

Terima kasih.

## Konferensi Ulama di Cipanas Bogor

Dalam menanggapi semakin meluasnya pengaruh S.M. Kartosoewirjo diakui sebagai Imam oleh Kahar Moezakkhar, Teungku Muhammad Daud Beureueh, seperti Proklamasi 13 Muhamarram 1373 di atas, Kabinet Ali mengadakan upaya menandangi gelar S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam umat Islam Indonesia oleh kelompok Darul Islam, dengan mengadakan Konferensi Ulama pada 2-7 Maret 1954, Selasa Kliwon - Ahad Kliwon, 25 Jumadil Akhir - 1 Rajab 1373, di Cipanas Bogor Jawa Barat.

Dalam konferensi tersebut dengan kewenangan, para Ulama memutuskan untuk menetapkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Wali' al Amri Dharuri bi al Syaukah. Maksudnya Presiden sebagai Pelindung umat Islam Indonesia, secara darurat diberikan kekuasaan. Konferensi tersebut juga memutuskan bahwa rakyat Indonesia wajib mentaatinya.

Ditinjau dari segi waktu Konferensi Ulama, 2-7 Maret 1954, Selasa Kliwon-Ahad Kliwon, 25 Jumadil Akhir-1 Rajab 1373, dan diselenggarakan oleh Departemen Agama, Menteri Agama K.H. Maskoer dari Nahdlatul Ulama, di tengah suasana S.M. Kartosoewirjo bergelar Imam Negara Islam Indonesia - NII, 7 Agustus 1949, dan didukung oleh Kahar Muzakkhar, 7 Agustus 1953, dengan Republik Persatuan Islam - RPI, serta Daud Beureueh, Negara Islam Indonesia - NII, 21 September 1953, Kabinet Ali dalam upaya politis untuk melindungi umat Islam agar tidak berpihak kepada gerakan Negara Islam Indonesia, dengan melalui Konferensi Ulama di atas, memberikan gelar dan kewenangan kepada Presiden Soekarno sebagai Wali al Amri Dharuri bi al Syaukah

Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Menteri Agama K.H. Maskoer dan para Ulama dalam Konferensi Ulama di Cipanas pada 2-7 Maret 1954 tersirat sebagai manifestasi kecintaan dan loyalitas umat Islam kepada Presiden Soekarno karena bagaimanapun juga Presiden Soekarno mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat dan mulai didekati PKI sebelum Pemilu 1955.



K.H. MASJKOER

1318-1412 H/1900-1992 M

Anggota *Chuo Sangi Kai*, Anggota PPKI, Panglima Barisan Sabillallah - Barisan Istimewa TKR,  
Anggota Konstituante dari Masjumi, anggota DPR GR, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia -  
Sarbumusi, Ketua PB Nahdlatul Ulama, Menteri Agama, Wakil Ketua DPR RI, Anggota MPR.

Lebih dari keputusan Konferensi Ulama tersebut, Dr. Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Islam Indonesia, 1938 M, nantinya menjadi Ketua Partai Islam Indonesia Masjoevi, 7 November 1945, dan sebelumnya pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengusulkan agar Presiden Soekarno diangkat untuk waktu seumur hidup. Bukan untuk sementara sebatas Lima Tahun.

Akan tetapi, usulan ini tidak mendapat perhatian dari anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Usulan Dr. Soekiman Wirjosandjojo itu tidak pula dituliskan dalam Sejarah Indonesia. Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa keputusan Konferensi Ulama di atas dinilai terlalu menyimpang.

Kelanjutannya pada 18 Mei 1963 berdasarkan Tap MPRS RI Nomor III/MPRS/1963 ditetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.

Usulan yang mirip terulang kembali dalam Konferensi Islam Afrika Asia, 15 Maret 1965, Sabtu Kliwon, 11 Dzulhijjah 1384 di Bandung, yang dipimpin oleh Dr. K.H. Idham Chalid dan K.H. A. Sjaichu, Presiden Soekarno diangkat sebagai the Champion of Freedom and Islam - Pendekar Kemedekaan dan Islam.

Disusul oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, 3 Agustus 1965, 5 Rabiul Achir 1385, Promotor Prof. Dra. Baroroh Baried, dan Rektor Sutjipto SH, Brigadir Djenderal TNI, serta Sekretaris Senat Drs. H. Sadad Sisowidjojo memberikan anugerah gelar Doctor Honoris Causa, alam Falsafah Ilmu Tauhid, kepada Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Pahlawan Islam dan Kemerdekaan, Anggota Setia Muhammadiyah.

Pemberian gelar kepada Presiden Soekarno di atas, sebenarnya berangkat dari tinjauan politik. Tidak heran bila menimbulkan sikap pro dan kontra dari kalangan politisi dan Ulama, pimpinan Masjumi, Persatuan Islam, PSII, dan Muhammadiyah.

Secara politik, kebijakan mengimbangi tindakan lawan politik dengan cara yang sama tetapi beda, adalah memang karakter politisi. Kalau S.M. Kartosoewirjo diangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia, bagaimana kedudukan Presiden Soekarno dengan mayoritas rakyatnya adalah umat Islam Indonesia? Sementara Boeng Kamo sebagai Presiden Republik Indonesia yang bukan negara Islam.

Dengan mempertimbangkan kepentingan politik yang itu, para Ulama secara politik mencari sebutan gelar kedudukan yang bersifat sementara. Dengan tujuan untuk mengimbangi Imam Negara Islam Indonesia yang dinilai juga bersifat sementara keberadaannya, untuk Presiden Soekarno dipilihlah bukan gelar Khalifah, bukan Sultan, melainkan Wali al Amri Dharuri bi Al Syaukah.

## Konferensi Asia Afrika dan Dasa Sila Bandung

Kabinet Ali dengan operasi militernya belum berhasil dalam upayanya mengatasi masalah Darul Islam dan Republik Maluku Selatan dan belum tertangkapnya Dr. Ch. R. Soumokil RMS maka perhatian Kabinet Ali dipusatkan kepada masalah politik luar negeri yang lebih diarahkan kepada upaya menghapuskan penjajahan di atas dunia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>12</sup> Karena penjajahan Belanda di Indonesia masih bercokol di Irian Barat, Irian Jaya (Papua). Bertahannya penjajahan Belanda ini sebagai akibat mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Dampaknya masih bertahan gerakan RMS pimpinan Dr. Ch. Soumokil.

Untuk menjawab tantangan negara-negara Barat yang mempertahankan imperialisme di Indonesia maka Indonesia membangun kerja sama dengan India, Sri Langka, Pakistan, dan Burma, sebagai Negara-Negara Colombo, 1954 M menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955 di Bandung. Dihadiri pula oleh RRC, dan 28 negara Asia Afrika.

Pemimpin besar yang hadir antara lain: Nehru - India, Chou En Lai -RRC, Norodom Sihanouk - Kamboja, U Nu - Burma, Mohammad Ali -Pakistan, dan Gamal Abdel Nasser - Mesir. Dari Konferensi Asia Afrika ini, disepakati adanya Dasa Sila Bandung.

Konferensi Asia Afrika 24 April 1955 adalah prestasi politik luar negeri bangsa dan negara Indonesia yang sangat menakjubkan. Indonesia baru saja lepas dari Perang Kemerdekaan 1945-1950 M, dan baru berhasil membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 dengan membubarkan negara-negara boneka bikinan van Mook, dalam waktu lima tahun telah berhasil menghimpun kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melahirkan kesepakatan untuk mengakhiri imperialisme dan kapitalisme yang terumuskan dalam Dasa Sila Bandung sebagai realisasi tekad bangsa dan negara Indonesia, dalam upaya meniadakan penjajahan di atas dunia yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Padahal di antar 29 negara yang hadir, satu dengan yang lainnya, memiliki suatu problem besar yang sukar untuk mempertemukan pemecahannya. Namun, dalam Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955 di Bandung dapat diredakan dan bersedia mempertemukan kepentingan politiknya dalam suatu konsensus yang lebih mengutamakan mensukseskan tujuan Konferensi Asia Afrika, yakni meniadakan penjajahan di atas dunia yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perkeadilan.

---

12 Walaupun pada masa Kabinet Ali, masih berlaku UUDS 1950.

## Kabinet Ali dan PKI serta Kemelut TNI

Kesuksesan Kabinet Ali dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika menjadikan PNI merasa siap untuk menghadapi Pemilu yang dituntut oleh pihak TNI AD dan rakyat pada saat demonstrasi 17 Oktober 1952 dan tuntutan pembubaran DPRS. Pada 1952, PNI merasa belum siap untuk ikut serta dalam Pemilu karena merasa tertinggal popularitasnya dengan Partai Masjumi di tengah rakyat.

Di lain pihak, problem lama hidup kembali, dengan masuknya PKI dalam Kabinet Ali, aktivitas PKI di desa-desa berhasil menggusur pengaruh NU. Apalagi menurut M.C. Ricklefs, PKI memiliki dana besar dari komunitas China. Menurut Arnold C. Brackman, PKI memperoleh dana dari Rusia dan RRC.

Dampak aktivitas PKI di desa-desa, Ulama dan Santri mulai terancam eksistensinya. Sebenarnya, lawan PKI yang terkuat adalah TNI AD walaupun sedang dalam perpecahan setelah adanya Peristiwa 17 Oktober 1952.

Menghadapi perkembangan PKI itu, TNI AD berhasil mengatasi internal conflict dengan mengadakan Piagam Keutuhan setelah Rapat Collegial-RaCo, di Yogyakarta, 1 Mei 1955. Namun, Kabinet Ali mengambil kebijakan yang salah, pergantian KSAD dari Mayor Jenderal Bambang Soegeng kepada Bambang Oetojo pada 27 Juli 1955 yang tidak disetujui oleh Kolonel Zulkifli penjabat Kepala Staf Agkatan Darat, berdampak jatuhnya Kabinet Ali.

Kemelut TNI AD ini nantinya dapat diselesaikan oleh Kabinet Boerhanoeddin Horahap dari Partai Masjumi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD. Pelantikannya pun dilaksanakan pada 7 November 1955, sebagai Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Islam Indonesia, Masjumi.

Proses jatuhnya Kabinet Ali dipercepat dengan tuntutan Partai NU agar Kabinet Ali segera mengembalikan mandatnya. Partai NU merasa mulai terancam dengan perkembangan PKI. Partai NU cukup lama merasa tidak puas pula terhadap kebijakan Ali Sastroamidjojo mengenai kepegawaian, ekonomi, dan keamanan.

Pada 20 Juli 1955, Partai NU yang memperoleh 3 kursi pada Kabinet Ali, menuntut segera mengundurkan diri. Atas desakan NU tersebut dan tuntutan TNI AD, empat hari kemudian, 24 Juli 1955 Kabinet Ali gagal memperoleh dukungan dari DPR, dan menyerahkan mandat kepada Presiden.

Seminggu sebelum Kabinet Ali menyerahkan mandat 24 Juli 1955 kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta karena pada 18 Juli 1955, Senin Pon, 27 Dzulqaidah 1374, Presiden Soekarno menunaikan Rukun Islam Kelima, Naik Haji. Hal ini terkait dalam upaya pemenuhan kriteria sebagai seorang Presiden yang bergelar *Wali al-Amri Dhururi bi al-Syaukoh* yang diterima pada 7 Maret 1954, Ahad Kliwon, 1 Rajab 1373. Selain harus ada Masjid Baiturrahim di Istana Merdeka, Presiden Soekarno juga harus Naik Haji.

Di tengah ketegangan antarpertai politik dan juga terjadi konflik antar pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara, PKI memanfaatkannya untuk meningkatkan agitasi, mensolidkan sistem pengorganisasian guna memobilisasi massa. Sasarannya adalah meraih suara rakyat yang tidak berpartai. Itulah sebabnya, PKI dalam tanda gambar kampanyenya, menamakan PKI dan orang-orang yang tidak berpartai.

Kenyataan ini menjadikan umat Islam dan Ulama dihadapkan kepada tantangan ideologi. Hanya karena Indonesia lebih mengutamakan demokrasi, walaupun PKI yang tidak mengenal agama, atheist, menentang Pancasila, pernah melakukan Kudeta di Madiun, 19 September 1948, dan oleh Presiden Soekarno sendiri, PKI dicap sebagai teroris, tetapi dapat dibenarkan untuk aktif kembali dalam kehidupan politik nasional.



Sumber: Doc. Prabudi

Massa Kampanye Pemilu pertama dari Partai Islam Indonesia Masjumi di Lapangan Tegallega Bandung mendengarkan pesan-pesan politik dari Mohammad Natsir, K.H. Isa Anshary, K.H. M. Rusjad Nurdin, dan E.Z.Muttaqien.

Di bawah tantangan kehidupan politik nasional ini, para Ulama berupaya untuk mampu beradaptasi. Namun, tetap mempertahankan tujuan perjuangannya menegakkan ajaran Islam secara Parlementer atau Konstitusional. Dengan cara memperkuat kesadaran umat Islam agar tetap berafiliasi terhadap partai-partai Islam. Dengan tetap pula menghormati norma dan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpolitik, terutama dalam perjuangan memenangkan partai Islam dalam Pemilu.

## Perjuangan Ulama Mensukseskan Pemilu

Kelanjutannya, terbentuklah Kabinet Boerhanoedin Harahap dengan koalisi Masjumi-PSI-NU, 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Program utama Kabinet Boerhanoedin Harahap adalah mengembalikan wibawa moral pemerintah. Menumbuhkan kepercayaan TNI AD dan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, Kabinet Boerhanoedin Harahap lebih mengutamakan politik dalam negeri. Memfokuskan segera melaksanakan Pemilu:

- (1) untuk DPR, dilaksanakan pada 29 September 1955, Sabtu Legi, 12 Safar 1375
- (2) untuk Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955, Kamis Pon, 30 Rabiul Akhir 1375

Adapun komposisi Kabinet Boerhanoedin Harahap, 12 Agustus 1955-3 Maret 1956, adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Boerhanoedin Harahap	Masjumi
Wakil Perdana Menteri I	Danu Ismadi	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Harsono Tjokroaminoto	PSII
Dalam Negeri	Mr. Soenarjo	NU
Luar Negeri	Anak Agung Gde Agung	Demokrat
Perekonomian	I.J. Kasimo	Katolik
Keuangan	Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo	PSI
Pertahanan	Mr. Boerhanoedin Harahap	Masjumi
Kehakiman	Mr. Loekman Wiradinata	PSI
Pekerjaan Umum	R.P. Soeroso	Parindra
Perhubungan	Ir. H. Laoh	PNI
Menteri Muda Perhubungan	Asraroeddin	Buruh
Sosial	Soedibjo	PSII
Perburuhan	I. Tedjasoekmana	Buruh

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
Agraria	Mr. Goenawan	PRN
Agama	K.H. Iljas	NU
Penerangan	Sjamsudin St Makmur	PIR
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Prof. Ir. Suwandi	Katolik
Menteri Negara	Abdoel Hakim	Masjumi
	Soetomo	PRI
	Drs. Cumala Noor	PIR



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

Koalisi Masjumi - PNI

12 Agustus 1955 - Maret 1956

Pelantikan Kabinet ditandai dengan Sumpah Perdana Menteri

Berhasil menyelesaikan Peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD, pada 7 November 1955 dan berhasil pula mengembalikan wibawa pemerintah dan AD.

Sukses melaksanakan Pemilu untuk pertama kali semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk DPR, 29 September 1955, dan Konstituante, 15 Desember 1955.

Deliar Noer menambahkan keterangan Danu Ismadi adalah PIR Hazairin. Para menteri dari Partai NU dan PSII berhenti pada 19 Januari 1956 maka jabatan Wakil Perdana Menteri II ditiadakan. Kementerian Dalam Negeri dijabat oleh R.P. Soeroso. Kementerian Sosial dijabat oleh Soetomo. Kementerian Agama dijabat oleh Mohammad Sardjan, masing-masing tidak melepaskan kedudukan asalnya.

Kementerian Pekerjaan Umum, semula dipegang oleh Wakil Perdana Menteri I, Danu Ismadi. Kemudian pada 26 Agustus 1955 diserahkan kepada R.P. Soeroso.

Sehubungan Indonesia masih dalam taraf belajar berdemokrasi<sup>13</sup>, peserta Pemilu diizinkan terdiri dari: Partai Politik, Organisasi Massa, dan Perorangan pun, mencalonkan diri dalam Pemilu. Diharapkan dari hasil perolehan suara dalam Pemilu, para pimpinan parpol, ormas, dan perorangan akan memahami sejauh mana pengaruhnya di tengah rakyat se-Nusantara Indonesia.

Dampak kebebasan mendirikan parpol, melahirkan ratusan jumlah parpol dan ormas serta perorangan peserta Pemilu, hingga mencapai sekitar 155 gambar. Rakyat Pemilih akan menjadi selektor terhadap jumlah partai politik dan organisasi massa.

Menjelang Pemilu Indonesia dibagi dalam 16 Daerah Pemilihan, meliputi 208 Kabupaten, 2.139 Kecamatan, dan 43.249 Desa. Hasil Pemilu DPR, beranggotakan 272 wakil. Dengan perhitungan per wakil DPR mewakili 300.000 orang, sedangkan Konstituante mencapai 542 wakil. Kemudian diadakan pelantikan DPR pada tanggal 20 Maret 1956, Selasa Wage, 6 Sja'ban 1375, dan Konstituante pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1956, Sabtu Wage, 6 Rabiul Akhir 1375.

Menurut Deliar Noer, dalam menghadapi Pemilu antar Partai-partai Islam pada 15 Juni 1955, Rabu Kliwon, 23 Sjawal 1374, dikeluarkanlah pengumuman bersama mengimbau para pengikut dan simpatisan agar:

Perlama, menjaga sungguh-sungguh agar perbedaan paham di lapangan politik jangan sampai merusak Ukuwah Islamiyah.

Kedua, bersama-sama menciptakan suasana tidak saling menyerang dalam kegiatan {yang bersifat} menyarankan pendirian dan program masing-masing dalam menghadapi Pemilihan Umum.

Ketiga, bertindak sesuai dengan pernyataan antar partai-partai Islam.

13 Demokrasi berasal dari Athena. Dengan komposisi masyarakatnya 30.000 penduduk asli Athena dan budak belian berjumlah 100.000 orang yang tidak punya hak pilih. Amerika Serikat sebagai pendekar demokrasi, diproklamasikan pada 19 April 1775. Sampai dengan 1865 artinya seratus tahun kemudian, baru dihapuskan perbudakan setelah Perang Budak 1861-1865. Di Rusia disebut demokrasi rakyat tetapi di bawah Diktator Proletar, dan hak milik pribadi dihapuskan. Temanya dalam politik, demokrasi sangat beragam pemahaman dan aplikasinya.



Sumber: Doc Pribadi

## MOHAMMAD NATSIR DAN GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA

Mohammad Natsir memberikan penghormatan kepada Barisan Penghormatan Gerakan Pemuda Islam Indonesia - GPII Kota Besar Bandung, persiapan menuju Lapangan Tegallega Bandung, dalam rangka kampanye Pemilu untuk DPR dan Konstituante.

Gambar di halaman Markas Partai Islam Indonesia Majumi Jawa Barat

Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kota Besar Bandung

Kantor redaksi *Madjalah Boelan Aliran Islam*

Jalan Pungkur 73 Bandung.

Sekarang Kantor Dewan Dakwah Islamijah Indonesia - DDII

dan Partai Bulan Bintang - PBB Jawa Barat.

Dapat dibayangkan bagaimana rumitnya pelaksanaannya dalam wilayah yang terpencar dalam kepulauan yang ribuan jumlahnya dengan sistem transportasi yang masih tergolong sederhana dan daya dukung sistem komunikasi pemberitaan yang masih sederhana. Walaupun demikian, Pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, dijelaskan terbentuknya DPR hasil Pemilu terdiri dari 19 Fraksi sebagai berikut:<sup>14</sup>

14 Bandingkan antara keterangan M.C. Ricklef's. 1991. *Op.Cit*. hlm. 377 Parlemen berjumlah 257 wakil dengan keterangan *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. hlm. 89 DPR berjumlah 272 wakil.

## API SEJARAH 2

1. Fraksi Masyumi	60 anggota
2. PNI	58
3. NU	47
4. PKI	32
5. Nasional Progresif, yakni gabungan partai/organisasi: Baperki, Permai, Ascoma, Murba, PRN, Gerindo, PIR Wongso dan perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo	11
Pendukung Proklamasi: IPKI, Buruh, PRI, dan PRD	11
7. PSII	8
8. Parkindo	9
9. Katolik & Persatuan Daya	8
10. Pembangunan dicalonkan oleh PKI	7
11. PSI	5
12. Perti	2
13. Gerakan Pembela Pancasila	2
14. Persatuan Pegawai Polisi RI - P3 RI	2
15. Perorangan AKUI	1
16. Partai Persatuan Tharikat Islam-PPTI	1
17. PIR Hazairin	1
18. Persatuan mewakili Irian Barat	3
19. Tidak berfraksi	2
Jumlah	272 anggota

Jumlah angka kursi yang menjadikan Partai Islam Indonesia Masjumi memeroleh jumlah tertinggi dan memenangkan 14 Daerah Pemilihan dari 16 Daerah Pemilihan, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di Luar Jawa, merupakan pertanda umat Islam benar-benar merupakan mayoritas yang hidup dan sadar berpolitik. Demikian pula Partai Nahdlatul Ulama meraih suara pemilih yang besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta di Kalimantan Selatan, sebagai gambaran wilayah kerjanya dan pengaruh Nahdlatul Ulama. Angka-angka yang demikian besar menjadikan lawan politik Islam resah karenanya.



Sumber: *Pikiran Rakyat*

### K.H. SUDJAI KETUA SEMENTERA PERTAMA KONSTITUANTE

Ketua Sementera Konstituante, K.H.Sudjai dari Partai Islam Indonesia Masjumi, berumur 106

Tahun. Betapa mulianya semangat juang K.H. Sudjai di usia setinggi itu, masih berprestasi di bidang politik dan hukum, menjadi Ketua Sementera Konstituante. Untuk pertama kalinya dalam Sejarah Indonesia setelah Proklamasi, 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364,

Konstituante dari NKRI dipimpin oleh Ulama dari Partai Islam Indonesia Masjumi.

K.H.Sudjai, pelopor pendiri *Izharu Baati'l Muluk wal Umara* pada 1920, semacam MUI sekarang.

Menurut Deliar Noer, seluruh Partai Islam memperoleh 16.518.332 suara dan 115 kursi dalam DPR, termasuk PPTI yang memperoleh 85.131 suara dengan 1 kursi. Dalam Konstituante, Partai Islam memperoleh 16.464.008 suara dan 228 kursi terbagi atas:

Partai Islam Indonesia Masjumi	7. 789. 619 suara	-	112 kursi
Partai Nahdlatul Ulama	6. 989.333 suara	-	91 kursi
PSII	1. 059.922 suara	-	16 kursi
Perti	465.359 suara	-	7 kursi
PPTI	74.913 suara	-	1 kursi
	Jumlah		227 kursi

Menurut Harian ABADI, 17 Juli 1956, diberitakan PNI memperoleh 9.070.218 suara - 119 kursi, dan PKI 6.232. 512 suara - 80 kursi. Apabila dijumlah, perolehan kursi PNI dan PKI berjumlah  $199 + 80$  kursi = 279 kursi. Jumlah kursi dari Partai Islam di atas, apabila ditambah dengan Angkatan Kesatuan Ummat Islam - AKUI Jawa Timur memperoleh suara 84.862 suara - 1 kursi, menjadi  $227 + 1$  kursi = 228 kursi. Jadi, tidak begitu jauh dengan perolehan PNI dan PKI.

Hasil suara Partai Islam di atas, mendekati gambaran dari apa yang dipidatokan oleh Ir. Soekarno dalam B.P.U.P.K pada 1 Juni 1945, Hari Lahir Pantjasila, antara lain:

Ibaratnya Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanya 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Dengan sendirinya hoekoem-hoekoem jang keluar dari Badan Perwakilan Rakjat itu, hukum Islam poela. Malahan saja jakin, dijikalau hal jang demikian itoe njata terjadi, baroeloh boleh dikatakan bahwa Agama Islam benar-benar hidope di dalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Maka saja berkata, baroe dijikalau demikian, hidoeplah Islam Indonesia, dan boekan Islam jang hanja diatas bibir sadja.

Pidato di atas ini diperangati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sekaligus berisi petunjuk Ir. Soekarno bagaimana cara memenangkan Hukum Islam secara Parlementer.

Apabila dengan jumlah suara dan kursi yang diperoleh Partai Islam di atas, bersatu, sangat menakutkan pimpinan partai non Islam lainnya yang tidak menghendaki berlakunya Syariah Islam dimenangkan melalui sistem Parlemen atau Konstituante karena untuk memperoleh dua pertiga ditambah satu, dari jumlah anggota seluruhnya tinggal sedikit lagi tambahannya.

Perlu ditambahkan di sini sebagai bahan perbandingan fakta sejarah Pemilu 1955. Dari yang terdaftar 43.104.464 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 37.875.299 suara. Menurut Arnold C. Brackman, hasil Pemilu melahirkan Empat Besar dengan jumlah suara dan kursi serta persentasenya sebagai berikut:

Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi DPRS
PNI	8.434. 653	22. 3	57	42
Masjumi	7. 903. 886	20. 9	57	44
NU	6.955. 141	18. 4	45	8
PKI	6.176. 914	16. 4	39	17
Lain-lain	8.404. 705	22. 0	59	122

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sosialis	753. 191	2	5	14
Murba	199. 588	0. 5	2	4
IPKI	541. 306	1. 4	4	-

Dari Daerah Pemilih memberikan gambaran bahwa PNI-PKI-NU di wilayah yang berpenduduk dari etnis Jawa. Adapun suara yang diperoleh di Luar Jawa, di wilayah yang terdapat transmigran dari Jawa. Untuk NU, suara terbesar di daerah yang terdapat Pesantren atau Madrasah NU.

Sementara itu, Masjumi tersebar di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Untuk PKI di P. Jawa memperoleh suara terbesar di Jawa Timur 2.299.602 sekitar 23.2%, di Jawa Tengah 2.326.108 sekitar 25.8% dan Jawa Barat 755.634 sekitar 10.8%.

Pada 15 Desember 1955, sesudah Pemilu untuk DPR, diadakan lagi Pemilu untuk Konstituante. Menurut Arnold C. Brackman, hasilnya adalah sebagai berikut:

Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
PNI	9.070.218	119
Masjumi	7. 789.619	112
NU	6. 989.333	91
PKI	6.232.512	80
Lain-lain	11.627.544	66

Sehari sebelum Pemilu Konstituante, 14 Desember 1955, terjadi upaya penggagalan pelantikan Komodor Muda Udara Hoebertoes Soejono menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara di Pangkalan Cililitan atau Halim Perdanakusumah. Ketika akan diambil sumpahnya oleh Menteri Pertahanan Boerhanoedin Harahap, tiba-tiba terjadi teriakan pemojokot “Tidak Setuju, Tidak Setuju”, sambil meninggalkan barisan, dan dibawa pula panji-panji AURI. Akibatnya, pelantikan dibatalkan.

Perlu diperhatikan, Boerhanoedin Harahap sekalipun dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dalam menyusun kabinet, beberapa pos penting diserahkan kepada Partai Katolik. Misalnya Menteri Perekonomian diserahkan kepada I.J. Kasimo, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diserahkan kepada Prof. Ir. Soewandi. Demikian pula Wakil Kepala Staf AURI juga akan diserahkan kepada Komodor Udara Hoebertoes Soejono. Apakah hal ini sebagai jawaban terhadap masalah RMS yang dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil yang belum teratas?

Peristiwa TNI AD Bambang Soegeng masa Kabinet Ali I, dan TNI AU Hoebertoes Soejono masa Kabinet Boerhanoedin Harahap di atas memberikan pengertian bahwa pada saat Angkatan Darat dan Angkatan Udara, terjadi pula internal conflict yang cukup berat, sama halnya dengan kalangan pimpinan partai politik.

Padahal, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengingatkan agar TNI menjauahkan diri dari tindak perpecahan dalam kesatuan karena pengorbanan sudah cukup besar. Namun, Panglima Besar Jenderal Soedirman sudah tiada, 29 Januari 1950, Ahad Pahing, 10 Rabiul Akhir 1369 dalam usia 34 tahun maka internal conflict tidak dapat dihindarkan karena pimpinan angkatan, sama-sama usia - similar age. Akibatnya, krisis wibawa dalam pimpinan angkatan.

## Dampak Mimpi Presiden Pembubaran Partai

Setelah Pemilu berakhir, Kabinet Boerhanoedin Harahap, menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Kemudian Presiden Soekarno pada 24 Maret 1956 mengukuhkan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Kemenangan partai-partai Islam dalam Pemilu DPR ataupun Konstituante menjadikan Presiden Soekarno mimpi setuju jika seluruh partai politik di Indonesia dikubur saja. Hal ini terjadi setelah Presiden Soekarno pulang dari kunjungannya ke Austria, Yugoslavia, Cekoslovakia, Rusia, Mongolia Luar, dan China, pada 28 Oktober 1956. Karena sistem multipartai menimbulkan konflik yang berkepanjangan, pembangunan bangsa dan negara menjadi terhambat.

Presiden Soekarno menjelaskan Demokratisasi Indonesia sebagai produk dari pemikiran Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir yang berusaha membatalkan hasil keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 22 Agustus 1945, antara lain sistem satu partai, yakni hanya ada satu partai politik Partai Nasional Indonesia. Dibantalkan dengan dikeluarkannya Makloemat 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, berlakulah sistem multipartai.

Diingatkan pula oleh Presiden Soekarno, sebenarnya Makloemat 3 November 1945 ini lahir akibat Mohammad Hatta didesak oleh Amir Sjarifoeddin. Saat itu, Presiden Soekarno sedang tidak ada di Yogyakarta.

Bagaimana solusinya untuk mengatasi sistem multipartai yang sangat menganggu perkembangan bangsa dan negara Indonesia? Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno menjawab, saya setuju bila seluruh partai dibubarkan saja. Lebih lanjut, Presiden Soekarno menyatakan saya tidak senang dengan sistem demokrasi Barat. Saya sangat senang dengan Demokrasi Terpimpin seperti yang saya lihat di Republik Rakyat China.

---

15 Arnold C. Brackman, 1963. *Op. Cit.*, hlm. 227.

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Akibat contoh Demokrasi Terpimpin dari RRC, tidaklah heran bila Presiden Soekarno didekati oleh pimpinan komunis, baik dari golongan PKI, D.N. Aidit maupun Komunis Murba dari Tan Malaka.

Samaoen pendiri Perserikatan Kommunis di India, PKI di Semarang, 23 Mei 1920. Setelah Samaoen tinggal di Rusia selama 33 tahun, pada 12 Desember 1956, kembali ke Jakarta.

Samaoen yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Republik Soviet Tajikistan dan beristri wanita Rusia, diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Penasihat Demokrasi Terpimpin. Di samping itu, diangkat pula Wikana, Tjoa Siklen, sebagai kelompok inteligensia komunis, duduk sebagai Dewan Perencanaan Nasional - Depernas.

Tidak lupa Aidit, Nyoto, Soetomo Atomo, Siauw Giok Tjan, dari kelompok PKI, bersama dari kelompok komunis nasionalis Tan Malaka, Iwa Koesoemaentri, Mohammad Padang, Nj. Rasoena Said, sebagai Dewan Pertimbangan Agung - DPA.

Ulama melihat perubahan dratis politik Indonesia, dihadapkan tantangan yang cukup berat. D.N. Aidit yang setelah Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, dapat lolos keluar negeri. Kemudian pulang kembali ke Indonesia mengadakan konsolidasi, menghidupkan kembali PKI.

Secara kebetulan, situasi dunia sedang dilanda Perang Dingin, memungkinkan Blok Rusia dan RRC berlomba untuk berpengaruh di Asia Tenggara dan India, serta Timur Tengah. Sebaliknya, Blok Amerika Serikat masih mempertahankan sistem imperialisme dan kapitalismenya. Untuk Indonesia, Amerika Serikat tidak bersedia mengusir Kerajaan Protestan Belanda dari Irian Barat. Berarti Amerika Serikat tetap mempertahankan sisa-sisa imperialisme Barat di Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dulles, tetap menilai Belanda sebagai sahabatnya.

Sebaliknya, Rusia mencoba melaksanakan Testamen Politik Lenin, dalam upaya pengkomunisan dunia, Rusia harus membantu gerakan nasional di Asia Tenggara yang sedang berjuang ingin merdeka. Pun, membantu perjuangan rakyat India dan China yang tertindas oleh imperialis Barat.

Karena populasi India dan China merupakan dua pertiga jumlah penduduk dunia, dan China sudah menjadi negara komunis, Republik Rakyat China. Kerajaan Protestan Anglikan Inggris, memahami bahaya komunis di China. Segera India dimerdekan tetapi dibelah menjadi negara-negara agama: (1) Islam - Pakistan Timur dan Barat, (2) Hindu - India, (3) Buddha - Srilanka dan Burma. Pemberian kemerdekaan ini meniru pembelahan Eropa dan Inggris menjadi kerajaan-kerajaan agama Katolik dan Protestan.

## PRESIDEN SOEKARNO

### Pendiri Parpol Mimpi Ingin Membubarkan Parpol

Organisasi massa politik yang menggunakan nama Partai di Indonesia terjadi di abad ke-14 H/20 M di masa gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional, dipelopori oleh Central Sjariat Islam menjadi Partai Sjariat Islam, 1342 H/1923 M. Setahun kemudian, menyusul Perserikatan Komunis di India, 1920 M menjadi Partai Komunis di India, 1924 M. Berikutnya, muncul Perserikatan Nasional Indonesia, 1927 M, menjadi Partai Nasional Indonesia - PNI, 1928 M. Dilanjut oleh Partai Rakjat Indonesia - PRI, 1930, Partai Indonesia - Partindo, 1931 M, Partai Islam Indonesia Parii atau PII, 1932 M, dan Partai Indonesia Raja - Parindra, 1938 M.

Setelah Proklamasi, 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno sangat setuju terhadap keputusan PPKI, one system party, PNI. Namun, dengan adanya Maklumat X 3 November 1945, yang diketahui oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta atas dasarank Soetan Sjahrir, tumbuhlah ratusan parpol seperti jamur terkena hujan. Setelah Pemilu, 1955 M terjadilah proses seleksi parpol terpilih dan tidak dipilih oleh rakyat. Lahirlah Empat Besar: PNI, Masjumi, Partai NU, dan PKI.

Tiba-tiba di Bandung, 1956 M, Presiden menyatakan memimpinya ingin membubarkan seluruh Parpol. Menghidupkan kembali keputusan PPKI, one system party, sama seperti di RRC. Memimpinya semakin menjalani nyata setelah adanya Dekrit Presiden, 1959 M. Dilanjut dengan pembubaran Partai Islam Indonesia Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia - PSI, 1960 M.

Kelanjutannya, Kabinet yang dipimpinnya, menteri-menterinya bukan mewakili partai politiknya, tetapi diangkat berdasarkan kesadaran mereka Demokrasi Terpimpin yang dipimpinnya tanpa Oposisi. Presiden Soekarno gandrung dengan persatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, Presiden Soekarno juga, kebijakan politiknya dimotivasi oleh PKI untuk melancarkan Kuglet G30S/PKI di Jakarta, 1965 M.

Banyaknya multi system party tidak cocok bagi bangsa Indonesia karena berdampak gontol-gontolan. Atau akibat adanya Marxisme dengan conflict Theory-nya yang mendalamkan prahlada perpecahan bangsa.





Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

Kabinet Ali Roem Idham

24 Maret 1956 - 14 Maret 1957

Pelantikan dengan pembacaan Sumpah Perdana Menteri

Dengan formasi PNI 5, NU 5, Masjumi 4, PSII 1, Perti 1.

Pembatalan hasil Perundingan KMB, melaksanakan program Kabinet Burhanuddin Harahap.

Berdampak lanjut Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan Gubernur Sultan Tidore, Zainal Abidin Sjah  
dan ibu kotanya, Soa Siu.



Sumber: Doc. Priyadi

## K.H. ISA ANSHARY dan MOHAMMAD NATSIR

K.H. Isa Anshary adalah Ketua Front Anti Komunis yang menentang ideologi komunis yang diperjuangkan keponakannya sendiri, D.N. Aidit. Tampak dalam gambar, K.H. Isa Anshary (kiri) bersama Mohammad Natsir (kanan) di antara para pemuda anggota dan aktivis Gerakan Pemuda

Islam Indonesia - G.P.I.I di Lapang Tegallega Bandung.

Dengan cara ini, Barat berhasil menyelamatkan India dari pengaruh komunis. Demi mencegah pengaruh komunis dari China dan Indonesia, segera dibentuklah Federasi Malaysia merdeka meliputi Malaysia Barat dan Malaysia Timur Serawak, serta Sabah.

Perancis terlambat bertindak dalam menghadapi gerakan kemerdekaan di wilayah jajahannya Indo China atau India Belakang. Menurut Z.A. Maulani dalam Mengapa Barat Memfitnah Islam, menjelaskan Vietnam di bawah Ho Chi Minh berhasil meyakinkan rakyatnya hanya dengan ideologi komunis Vietnam akan merdeka. Apalagi dibantu Laurence Rockefeller Bankir Yahudi, dengan senjata dari Perang Pasifik, 1941-1945 M, benteng pertahanan Perancis dapat dirobokan oleh Vietnam Utara.

Ulama melihat negara-negara Timur Tengah sesudah Perang Dunia I, 1914-1919 M dan Perang Dunia II, 1939-1945 M usai, Turki menjadi Republik Sekuler Turki, 1923 M, maka Timur Tengah diperebutkan oleh negara-negara imperialis Barat. Sekaligus diupayakan akan dipadamkan semangat Islamnya. Ditegakkannya negara Israel, 15 Mei 1948, menjadi duri dalam daging penghambat kemajuan negara-negara Timur Tengah, dengan perang yang tidak pernah berkesudahan. Mesir kalangan militernya, Gamal Abdel Nasser, mencoba mengubah Mesir sebagai negara sosialis.

Sementara itu, Kerajaan Saudi Arabia, sudah berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Demikian pula situasi di Iran, tidak berbeda. Akibatnya, gerakan Islam Indonesia tidak ada lagi negara-negara Timur Tengah yang dapat dijadikan teman berjuang seperti zaman Sultan Turki. Dampaknya Ulama Indonesia harus lebih mengutamakan percaya kepada kekuatan kaki sendiri atau berdikari. Realitas perkembangan perjuangan Ulama Indonesia jauh berbeda dengan Ulama Timur Tengah. Ulama Indonesia memperjuangkan Indonesia sebagai Republik. Sebaliknya Ulama Timur Tengah membangun kerajaan dalam mengaplikasikan ajaran Islam di bidang politik.

## **Ulama dalam Kabinet Ali Roem Idham**

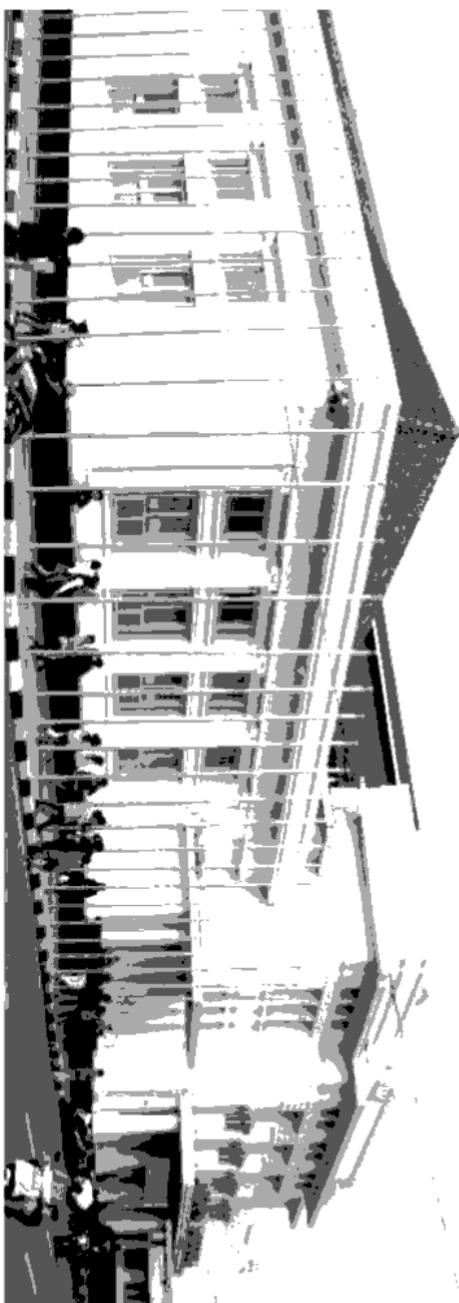
Di tengah situasi perubahan dunia tadi, sebelum pengangkatan pimpinan komunis nasionalis dan komunis internasional sebagai anggota DPA di atas, Presiden Soekarno menunjuk kembali Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan koalisi PNI-Masjumi-NU, 24 Maret 1956-14 Maret 1957.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ali Sastroamidjojo tampaknya untuk sementara tidak memperlihatkan PKI sebagai sumber kekuatan pendukungnya. PNI mulai merasa tersaingi oleh PKI yang dapat berkembang sangat cepat walaupun PKI sudah dihancurkan dalam Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948. Hanya dalam waktu tujuh tahun, PKI menyusul PNI kepopulerannya di tengah rakyat.

Mangunsarkoro mengingatkan bahaya PKI terhadap kemerdekaan Indonesia karena PKI berorientasi ke Rusia atau China. Oleh karena itu, dibentuklah Kabinet Ali Santroamidjojo II dengan koalisi PNI-Masjumi-NU, disebut pula sebagai Kabinet Ali-Roem - Idham. Deliar Noer menjelaskan komposisi Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Mohamad Roem	Masjumi
Wakil Perdana Menteri II	K.H. Idham Chalid	NU
Menteri Pertahanan	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Dalam Negeri	Mr. Soenarjo	NU
Luar Negeri	Roeslan Abdulgani	PNI
Keuangan	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
Perekonomian	Mr. Boerhanoedin	NU
Wakil Perekonomian	F.F. Umbas	Parkindo
Kehakiman	Mr. Muljatno	Masjumi
Wakil Kehakiman	A.B.L. de Rozario	Katolik
Pekerjaan Umum	Ir. P. Mohammad Noer	Masjumi
Sosial	K.H. Fatah Jasirin	NU
Perburuhan	Sabilal Rasjad	PNI
Pertanian	Eni Karim	PNI
Wakil Pertanian	Sjech Marhaban	PSII
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Sarino Mangoenpoesito	PNI
Agama	K.H. Iljas	NU
Agraria	Ir. Soehardi	Katolik
Penerangan	Soedibjo	PSII
Urusan Veteran	Dahlan Ibrahim	IPKI
Perencanaan	Ir. Djuanda	-
Negara	H. Roesli A. Wahid	Perti



## **GEDUNG CONCORDIA atau GEDUNG MERDEKA**

Gedung Concordia dijadikan sebagai arena National Congress Central Sjantiak Islam, 16-24 Juni 1916. Di bawah pimpinan H.O.S Tjokroanji noto, Abdjal Moeis, Hartaji Agoes Salim, CSI memperdengarkan menuju Indonesia Merdeka atau Zelf Bestuur dan Indonesia Berparlementen sendirai Indie Weitbaar – Perbaikanan Indonesia dengan tujuan melahirkan generasi muda agar terlahir dalam organisasi militer modern.

Diluhbah menjadi Gedung Merdeka ketika dijadikan arena Konferensi Asia Afrika - KAA, 24 April 1955. Suatu konferensi yang bertujuan menghapuskkan bersama-sama sejumlah negara presiden KAA bersekutu penjajahan atau imperialisme di atas dunia sebagaimana yang terdiklaskan dalam Pembukaan UUD 1945. KAA melahirkan Dasar Sila Bandung atau Bandung Spirit.

Pada 15 Maret 1965, di Gedung Merdeka ini pulna diselenggarakan Konferensi Islam Afrika Asia – KIAA yang mengangkat Presiden Sukarno sebagai The Champion Freedom and Islam – Pendekar Kenyerte kean dan Islam.

Seterah Pemilu Pertama 1957 Gedung Konstituante, Dan kemudian menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Serengetata – MPR/S setelah Dekrit Presidron 1959, Konstituante dan DPR diulaharkan. Kembali ke UUD 1945 dan Pugam Jakarta menjawab UUD 1945.

Solanjurnya pada masa Mr. Muntar Kusuma Atmaja, Menteri Luar Negeri dan Rektor Universitas Padjadjanan Bandung, ditetapkan Gedung Merdeka menjadi Museum Asia Afrika.

Deliar Noer menjelaskan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia - IPKI didirikan pada 1955 oleh Veteran. Umumnya dari Divisi Siliwangi Jawa Barat dengan bantuan pihak tentara. Kolonel Nasution aktif dalam mendirikan IPKI tersebut.<sup>16</sup>

Kabinet Ali Sastroamidjojo II walaupun PKI termasuk Empat Besar dalam Pemilu, tidak disertakan dalam kabinetnya. Lebih memberi peluang untuk Partai Nahdlatul Ulama memperoleh lima kursi dan Partai Islam Indonesia Masjumi, empat kursi.

Kabinet Ali berupaya membatalkan hubungan Indonesia - Belanda berdasarkan Perjanjian Konferensi Medja Bundar secara sepikah oleh Indonesia, dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1956 pada 3 Mei 1956. Selanjutnya, hubungan kedua negara berlangsung sebagaimana hubungan yang lazim antar negara-negara yang berdaulat.

Pembatalan masalah Konferensi Medja Bundar, berangkat dari program Kabinet Boerhanoeddin Harahap yang telah berhasil menyusun RUU tentang pembatalan secara sepikah hasil perjanjian KMB, mengenai Uni Indonesia Belanda, yang menempatkan Republik Indonesia di bawah Ratu Belanda. Namun, Presiden Soekarno karena tidak menyukai Boerhanoeddin Harahap dari Masjumi, tidak mau menandatanganinya. Menunggu terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI, baru mau menandatanganinya RUU menjadi UU Pembatalan Perdjandian KMB. Walaupun sebenarnya hal tersebut hasil dari Kabinet Boehanoeddin Harahap. Demikian penjelasan Sutomo atau Bung Tomo dalam *Bung Tomo Menggugat*. Dijelaskan lebih lanjut tentang sikap egoisnya Presiden Soekarno yang selalu bersaha memenangkan partainya sendiri, PNI.

Dapatlah dipahami apabila Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang memimpin perjanjian KMB tersebut, dengan adanya pembatalan secara sepikah oleh Indonesia, meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, pada 1 Desember 1956. Walaupun DPR membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ahem Erningpradja, tidak berhasil mengembalikan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta.

16 Dari susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, siapa yang menjadi Menteri Kesehatan? Deliar Noer, dalam *Partai Islam di Pentas Nasional*, pada hal 267-268 dalam susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 1956-1957, tidak terdapat Menteri Kesehatan. Demikian pula dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, hanya terdapat gambar kolektif pelantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, bersama Presiden dan Wakil Presiden, tanpa menyertakan nama-nama menteriannya. Benarkah Kabinet Ali - Roem - Idham tanpa Menteri Kesehatan? Padahal dalam setiap pergantian kabinet selalu dipimpin oleh Dr.J. Leimena - Parkindo.

Pelaksanaan pembebasan Irian Barat belum berhasil masuk ke pangkuan Republik Indonesia. Namun, baru dalam tahap pembentukan Provinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956. Dengan memerhatikan Sejarah Irian Barat merupakan wilayah Kesultanan Tidore, Gubernur Provinsi Irian Barat yang diangkat adalah Sultan Tidore, Zainal Abidin Sjah dan Ibukota Provinsi Irian Barat adalah Soa Siu.

Kabinet Ali II hanya mampu berumur kurang dari setahun. Selain akibat kegagalan merealisasikan programnya di bidang keamanan, berbalik di daerah timbul pergolakan yang dipimpin oleh TNI AD. Untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia pun gagal. Hanya berhasil membentuk Provinsi Irian Barat seperti di atas.

Situasi nasional yang semakin keruh akibat timbulnya reaksi yang menolak Konsepsi Presiden Soekarno tentang Kabinet Kaki Empat terdiri dari PNI, Masjumi, NU dan PKI, disampaikan di Istana Merdeka pada 21 Februari 1957. Kemudian, Presiden Soekarno berkeinginan membentuk Dewan Nasional terdiri dari golongan fungsional di masyarakat. Berfungsi sebagai Penasihat Presiden.

Konsepsi Presiden ternyata menimbulkan ketegangan horizontal di masyarakat daerah. Akibatnya, gerakan Dewan-Dewan di daerah semakin kuat pengaruhnya. Dampaknya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu melanjutkan kerjanya, dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, pada 14 Maret 1957.

Kemudian, diikuti dengan pernyataan Presiden Soekarno bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk perairan teritorialnya, dinyatakan dalam keadaan darurat perang pada 17 Desember 1957.

## **Ulama di Tengah DPRS Waroeng Kopi**

Ulama dihadapkan kepada peningkatan tantangan, setelah terbentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369 H, kehidupan demokrasi kepartaihan di masa damai. Kendatipun partai-partai pendukung dari Kabinet semula telah menyetujui programnya ketika menghadapi koreksi dari pihak oposisi di DPR, terbaca tidak lagi mau mendukung program kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berpihak kepada mayoritas opini DPR. Bahkan, ikut serta mendesak agar Perdana Menteri menyerahkan mandat. Terdapat beberapa menteri mengundurkan diri sebelum Perdana Menteri menyerahkan mandat.

Waktu itu, terdengar sindiran masyarakat bahwa DPR sebagai "Waroeng Kopi". Tempat ngerumpi, tidak dapat menemukan pemecahan masalah. Setiap program dari pihak lawan, bagaimanapun baiknya harus dipatahkan. DPR saat itu, tampaknya seperti warung distribusi kesempatan untuk orang-orang partai bergantian menjadi menteri. Oleh karena itu, tidak dilihat lagi ideologi dan program kabinetnya, yang penting harus jatuh dan terjadilah pergantian kesempatan untuk menjadi menteri.

Menurut Mohammad Hatta dalam *Demokrasi Kita*, para pelaku politik tidak memahami Pancasila sebagai Filsafat Negara, dan juga tidak mau mengindahkan. Demokrasi Indonesia sebenarnya demokrasi sosial atau kolektif. Demokrasi dalam sistem Pancasila bukan demokrasi-demokrasian. Demokrasi yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dijelaskan lebih lanjut suatu demokrasi yang melaksanakan prinsip *the right man in the right place*. Dengan pengertian tumbuhnya rasa percaya memercayai dan rasa toleransi yang sebesar-besarnya.

## Demokrasi Terpimpin

Setelah Pemilu, justru Indonesia sedang mengalami krisis wibawa pemerintahan - *crisis gezag*. Lalu, jawaban apa yang dipilihnya dari problem ini? Ulama dihadapkan pada munculnya tantangan baru dalam berdemokrasi. Konsepsi Presiden yang dikemukakan Presiden Soekarno di Istana Negara di hadapan pimpinan partai politik. Konsepsi Presiden dengan Demokrasi Terpimpin, pada 21 Februari 1957.

Presiden dalam pembukaan DPR menginginkan Demokrasi Terpimpin yang dirasakannya lebih sesuai dengan Indonesia. Gagasan Demokrasi Terpimpin ini, menurut M.C. Ricklefs berasal dari gagasan Ki Hadjar Dewantara yang dipraktikkan dalam kehidupan bersama di Taman Siswa.

Untuk mempratikkan Konsepsi Presiden, Kabinet Kaki Empat ditunjuklah Soewirjo untuk menjadi formatur. Soewirjo diberi kesempatan dua kali, tetapi gagal. Menurut Deliar Noer, kegagalan Soewirjo diakibatkan Partai Nahdlatul Ulama menolak rencana Soewirjo bila kabinetnya tanpa Partai Islam Indonesia Masjumi. Sebaliknya, Masjumi menolak duduk dalam kabinet Soewirjo apabila di dalamnya terdapat PKI. Dengan demikian, Soewirjo tidak berhasil menyusun Kabinet Kaki Empat.

Justus M. van der Kroef dalam Indonesia Since Sukarno, menuturkan bahwa Ketua Ansor Imron Rosjadi, SH. menolak Demokrasi Terpimpin. Dengan alasan umat Islam tidak mungkin berkolaborasi dengan PKI. Dampak dari sikapnya yang keras, menjadikan Imron Rosjadi SH ditangkap dan dipenjarakan seperti halnya pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Sikap Imron Rosjadi SH itu bertentangan dengan Dr. K.H. Idham Chalid, Ketua Partai Nahdlatul Ulama yang menjadi pendukung Demokrasi Terpimpin.

## **Ulama dalam Kabinet Karya**

Akibatnya, Presiden Soekarno menunjuk warga negara Ir. Soekarno sebagai formateur. Terbentuklah Kabinet Karya pada 9 April 1957. Penunjukkan Presiden Soekarno atas dirinya sendiri ini tidak dinilai sebagai tindak inkonstitusional. Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Kabinet Karya, sebagai kabinet non partai. Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda dari organisasi Perserikatan Muhammadiyah sebagai Perdana Menteri. Disertai Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardi - warga PNI, dan Wakil Perdana Menteri II, Dr. K.H. Idham Chalid - warga Nahdliyin. Dengan demikian, disebut pula menjadi Kabinet Djuanda - Hardi - Idham .

Dengan adanya ketiga Perdana Menteri ini, Presiden Soekarno, belum lagi menjadi Perdana Menteri. Baru sesudah Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, terbentuklah kembali Presidential Kabinet.

Dengan adanya penggunaan istilah Kabinet Karya sebagai kabinet non partai, dan menterinya walaupun dari orang partai, tetapi tidak mengatasnamakan partainya, berarti betapa tidak mungkinnya menyusun kabinet berdasarkan Konsepsi Presiden, Kabinet Kaki Empat, walaupun oleh Presiden Soekarno sendiri yang punya konsepinya.

Ulama menyaksikan proses pembubaran partai politik yang diimpikan oleh Presiden Soekarno, dipraktikkan dengan cara memisahkan pimpinan partai yang diangkat menjadi menteri, tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan partainya. Dengan cara ini, wibawa pemimpin Partai Politik dikebiri. Namun, keberadaannya tetap dipertahankan hanya sebagai pajangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

**Program Kabinet Karya disebut Pancakarya:**

1. Membentuk Dewan Nasional;
2. Normalisasi Keadaan Republik Indonesia;
3. Melanjutkan pembatalan KMB;
4. Memperjuangkan Irian Barat;
5. Mempercepat Pembangunan.

Program ini sebagai jawaban situasi nasional yang sedang dilanda *internal conflict* atau perpecahan di kalangan partai politik dan militer. Jelaslah Presiden Soekarno berupaya sungguh-sungguh pengalihan *internal conflict* ke arah tumbuhnya kesadaran bahwa lawan sebenarnya adalah imperialis Belanda. Dengan cara membangkitkan kesadaran kembali kebencian terhadap penjajah Belanda, bangkitlah semangat kebersamaan membebaskan Irian Barat.

Gerakan kebangkitan anti penjajah Belanda diawali dengan mengadakan Rapat Umum Pembebasan Irian Barat di Jakarta pada 18 November 1957. Pada hari yang sama digerakkan pemogokan buruh dan sekaligus menasionalisasikan perusahaan Belanda. Diikuti pula dengan mlarang semua terbitan dan film berbahasa Belanda. KLM dilarang mendarat di seluruh bandara di Indonesia.

Pengaruh berikutnya, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran yang dipimpin oleh Drs. R. Mohammad Ali dibubarkan oleh Dekan karena mempertahankan adanya Mata Kuliah Bahasa Belanda sebagai Bahasa Sumber Sejarah. Diubah menjadi Jurusan Antropologi, dengan mahasiswanya dari Tingkat Satu Jurusan Sejarah. Sedangkan mahasiswa Tingkat Dua dan Tiga, tetap bertahan tidak mau digabungkan menjadi mahasiswa Antropologi. Atas tuntutan Himpunan Mahasiswa Sejarah - HIMSE, Jurusan Sejarah dibuka kembali setelah Prof. Harsojo diangkat menjadi Dekan karena memahami arti Bahasa Belanda sebagai Mata Kuliah yang dinilai sebagai Bahasa Sumber.

## **Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno**

Kebijakan nasionalisme milik Belanda yang dilaksanakan di tengah konflik dalam tubuh ABRI di daerah luar Jawa berdampak pada terancamnya keselamatan Presiden Soekarno bersama keluarganya. Dalam waktu dua belas hari kemudian, terjadilah upaya percobaan Pembunuhan Presiden Soekarno, 30 November 1957, Sabtu Wage, 8 Jumadil Awwal 1377 dengan cara digranat dari lima jurusan. Terjadi pada saat Presiden Soekarno menghadiri pesta sekolah putra putrinya di SD Cikini.

Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Cikini. Hanya karena Rahmat Allah Yang Maha Kuasa terlimbah, Presiden Soekarno dan putra putrinya dapat selamat, walaupun berada di tengah ledakan granat yang dilemparkan dari lima penjuru oleh para pelaku pembunuhan tersebut.

Siapa pelakunya dan siapa yang mengendalikannya? Ternyata Jusuf Ismail, Saadon, dan Tasrif sebagai pelaksana yang tidak mengetahui satu dengan lainnya. Masing-masing hanya melemparkan satu granat, tetapi mengapa ledakannya menjadi lima ledakan? Siapa yang ikut melemparkan granat tidak diketahui oleh ketiga pelaku yang tertangkap.

Mereka bertiga Jusuf Ismail, Saadon, dan Tasrif tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi "dalangnya". Hanya waktunya terjadi pada 12 hari sesudah gerakan anti Belanda dan pembebasan Irian Barat, disertai dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

## Gerakan Militer Daerah

Perpecahan antarpertai politik dan perpecahan di kalangan militer, berdampak di daerah, timbul Gerakan Militer Daerah melawan Pemerintah Pusat atau Kabinet Djuanda yang dibentuk mulai 9 April 1957, Selasa Wage, 8 Ramadhan 1376. Gerakan Militer Daerah dipimpin oleh tentara:

Dewan Banteng, di Sumatra Barat, dipimpin Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium - TT I

Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin Kolonel M. Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I

Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dipimpin Letnan Kolonel Berlion, Panglima Tentara dan Teritorium II

Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin Letnan Kolonel Samual, Panglima Tentara dan Teritorium VII

Untuk mengatasi secara damai, diadakan Konferensi Panglima Tentara dan Teritorium, termasuk Panglima dari Daerah yang bergolak pada Maret 1957. Namun, tidak membubahkan hasil seperti yang diharapkan. Daerah tetap bergolak.



## IR. H. DJUANDA

Guru Sekolah Muhammadiyah  
Menteri Perhubungan  
Menteri Pertama Republik Indonesia

Dikenal dengan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957  
Penetapan batas perairan Indonesia berdasarkan Archipelago Principle  
menjadikan NKRI memiliki laut terluas di dunia  
sekitar 3.200.000 km<sup>2</sup>

Kemudian, disusul dengan Musyawarah Nasional - Munas, 10-14 September 1957, dihadiri tokoh-tokoh pusat dan daerah, termasuk mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hasil dari Munas ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Di tengah keretakan nasional, 13 Desember 1957, Jumat Pahing, 21 Jumadil Awal 1377, pemerintah Indonesia berhasil menetapkan wilayah perairan negara Republik Indonesia. Ketetapan Pemerintah Indonesia dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Penetapan tentang batas perairan nasional didasarkan pada Archipelago Principle atau Wawasan Nusantara. Ditetapkan semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya sebagai satu kesatuan yang bulat. Adapun batas lautan territorial lebar 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Deklarasi Djuanda ini menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki luas laut terluas di antara negara-negara di dunia. Hal ini merupakan perubahan atas Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2.000.000 km<sup>2</sup> daratan, menjadi lebih kurang 5.200.000 km<sup>2</sup> darat dan laut. Jadi, terjadi penambahan wilayah berupa perairan nasional atau laut, seluas 3.200.000 km<sup>2</sup>.

Ketetapan batas laut territorial ini merupakan satu upaya politik dalam negeri, untuk menumbuhkan kesadaran kesatuan wilayah. Sekaligus untuk mengingkatkan batas laut territorial Indonesia bagi negara-negara lain pengguna laut Nusantara Indonesia. Deklarasi Djuanda tentunya menantang semboyan rule the wave rule Britain. Dampaknya, lahirlah Federasi Malaysia, yang didalangi Barat yang takut terhadap kemajuan NKRI.

## Pemberontakan PRRI-PERMESTA

Namun sayangnya, belum terbina satu wawasan nasional di antara pimpinan militer dan partai politik. Akibatnya, pecahlah pemberontakan, mendirikan Pemerintah Revolucioner Republik Indonesia - PRRI di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Husein pada 15 Februari 1958 di Padang. Dua hari kemudian, 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, mendukung sepenuhnya PRRI, dan mendirikan Gerakan Piagam Perjuangan Semesta - Permesta.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menjawab pemberontakan PRRI, Dewan Menteri, 11 Februari 1958, mengambil keputusan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, Kolonel Simbolon, yang mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, 9 Januari 1958.

Dari pihak Ketua Umum Masjumi, Prawoto Mangkusasmito, dalam *Alam Pikiran dan Djedjak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*, sebagai Ketua menyatakan keberadaan pimpinan Masjumi di PRRI, bukan atas nama partai, melainkan sebagai inisiatif individu. Penjelasan ini dapat dibaca dalam *Risalah DPR*, 28 Februari 1958. Isinya Partai Islam Indonesia Masjumi menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Revolucioner Republik Indonesia - PRRI adalah inkonstitusional. Namun, penjelasan ini tidak didengar oleh Fraksi PKI yang tetap mendiskreditkan Masjumi.

Dr. Anwar Harjono, 1993, dalam *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan* juga menjelaskan bahwa statemen pimpinan Partai Masjumi, 17 Februari 1958, No. 1130/Sek.PP/1/M.VIII/58 melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masjumi memberikan bantuan kepada pemberontak, serta menyalahkan seluruh pemberontakan di Tapanuli, Sumatra Barat, Riau Daratan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tengah. Ditambahkan bahwa Partai Masjumi tidak ada rencana merobohkan negara.

Di samping itu, tersiar berita bahwa kehadiran Mohammad Natsir di Sumatra Barat bertujuan mengingatkan kembali Letnan Kolonel Ahmad Husein, dalam upayanya memberikan koreksi terhadap kesalahan Presiden Soekarno, mengapa membuat pemerintahan tandingan dengan mendirikan PRRI secara inkonstitusional.

Mohammad Natsir sebagai arsitek terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI datang ke Sumatra Barat berusaha keras untuk menyadarkan kesalahan langkah Letnan Kolonel Ahmad Husein. Namun, kehadiran beberapa orang-orang Masjumi dijadikan alasan Presiden Soekarno menurunkan Kepres No. 200/1960 pada 17 Agustus 1960 memerintahkan sebulan kemudian agar Partai Islam Indonesia Masjumi membubarkan diri. Jika tidak, dikategorikan sebagai partai terlarang.

Perintah pembubaran ini menjadikan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi mencari dan menuntut keadilan karena PKI yang jelas melakukan Kudeta di Madiun 19 September 1948 terhadap pemerintah Republik Indonesia, justru diberi hak hidup kembali. Pada saat PKI melakukan kudeta di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris. Apalagi ajaran *Marxisme* yang dianut PKI bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun, mengapa justru pimpinan PKI diberi kesempatan menduduki beberapa pos eksekutif, legislatif, dan militer?

Peristiwa sejarah ini membuat para Ulama dan Santri dihadapkan pada pembalikan sikap Presiden Soekarno dengan kebijakan politiknya terhadap partai politik Islam dan TNI, jauh berbeda dengan masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M. Setelah Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, para Ulama dan Santri disadarkan bagaimana caranya Presiden Soekarno mempertahankan kekuasaannya dengan bungkus bahasa persatuan dan gotong royong.

Seluruh kekuatan bangsa harus menghilangkan idealisme dirinya, melebur menjadi satu kekuatan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ulama dan Santri menyaksikan bagaimana cara Presiden Soekarno merealisasikan mimpiinya, pembubaran seluruh partai politik di tahun 1956 M. Di bawah Demokrasi Terpimpin secara de facto, partai politik pendukung konsepnya, diberi hak hidup. Sebaliknya, partai oposisi ditiadakan.

Para Ulama dan Santri serta pimpinan politik Islam, melihat praktik pembalikan kepentingan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan politik. Pada masa Perang Kemerdekaan dan Masa Diplomasi, 1945-1950 M, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, bekerja sama dengan Masjumi dan PNI melawan PKI Amir Moeso, 1948 M. PKI dinyatakan sebagai teroris, ditangkap dan dipenjaraikan.

Pada saat terjadinya Kudeta 3 Juli 1946, Tan Malaka dan kawan-kawannya ditangkap, diadili, dan dipenjaraikan. Dalam menghadapi Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, kelompok Tan Malaka dan Partai Murba sebagai penganut komunis nasionalis, dibebaskan dan diajak kerjasama dalam perlawanannya terhadap Kudeta PKI di Madiun.

Realitas sejarah yang berbalik, Presiden Soekarno tanpa Wakil Presiden Mohammad Hatta, 1956 M dengan dasar Demokrasi Terpimpin membangun kerja sama dengan PKI Aidit dan PNI Ali Soerachman kontra Masjumi Prawoto Mangkusasmito, 1960 M. Partai Islam Indonesia Masjumi dinilai sebagai kontra revolusi, dibubarkan dan pimpinannya serta Ulamanya dipenjaraikan.

Kembali ke masalah PRRI/Permesta. Dewan Menteri merasa perlu untuk segera menuntaskan pemberontakan dewan militer daerah tersebut, dengan melancarkan operasi militer. Untuk Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Yani. Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Djenderal Djatikoesoemo. Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Dr. Ibnoe Soetowo. Untuk menghadapi Permesta, operasi penumpasan dipimpin Letnan Kolonel Roekminto Hendraningrat.

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Di tengah operasi penumpasan PRRI dan Permesta pada 6 Maret 1960, seorang perwira AURI, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar, dengan menggunakan pesawat MIG 17 melakukan penembakan atas Istana Merdeka, Istana Bogor dan Kompleks BPM di Tanjung Priok. Dengan cara ini, Maukar mencoba melakukan pembunuhan secara langsung terhadap Presiden Soekarno. Tetapi gagal, dan mendaratkan pesawatnya di pesawahan Kadungora, Leles, Garut.

Lima tahun kemudian, sejarah berulang Laksamana Udara Umar Dani, secara tidak langsung melancarkan rencana pembunuhan Presiden Soekarno, tetapi dengan mencatut namanya dalam Kudeta G-30-S/PKI. Kegagalan kudetanya meruntuhkan nama baik Presiden Soekarno di mata rakyat.

Kembali ke masalah upaya percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh Maukar. Saat itu, di Bandung timbul gerakan kedaerahan, dan beberapa anggota Pusat Kavaleri, yang dipimpin oleh Kolonel Bratamenggala, 27 Maret 1960, memaksa Kabinet Djuanda agar mengadakan perundingan dengan PRRI/Permesta.

Pemberontakan yang dipimpin oleh kalangan militer dengan cepat dapat diselesaikan. Ternyata, Letnan Kolonel Ahmad Husien hanya mampu bertahan sekitar dua tahun setengah, 9 Januari 1958-29 Mei 1961, kemudian menyerah. Disusul Permesta menyerah pada pertengahan 1961. Hal ini selanjutnya mempercepat penyelesaian masalah RMS, DI III, dan Irian Barat.

Sebenarnya PRRI Permesta mendapat bantuan militer asing. Misalnya, dengan Pesawat B26 yang dikemudikan oleh Allan Lawrence Pope, dapat membantu melakukan pembunuhan rakyat Ambon. Serangan udara ini dapat menggugurkan moril rakyat yang diserangnya. Namun, akibat Allan L. Pope menilai rendah kemampuan TNI AL dan AU, akhirnya dapat dirontokkan oleh anak buah KRI Sawega dan penerbang Mustang AURI Kapten Udara Penerbang I Dewata pada Juli 1958 di Teluk Ambon Pulau Tiga.

Pelaku pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini 30 November 1957, Peristiwa Maukar 9 Maret 1960, dan pelaku pemboman di Ambon, Allan Lawrence Pope 18 Mei 1958, dijatuhi hukuman mati seluruhnya oleh pengadilan.

Kecuali Allan Pope, tidak dilakukan eksekusi hukuman mati karena mendapat amnesti dari Presiden Soekarno. Menurut Manai Sophiaan dalam *Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno tidak Terlibat G-30-S/PKI*, istri Allan Pope mantan

pramugari PAN American Airways datang ke Presiden Soekarno dan diterimanya. Dia bersama Ibu Allan Pope dan saudaranya, sambil menangis memohon ampunan untuk suaminya. Atas kemurahan hati Presiden Republik Indonesia, Pope diampuni secara diam-diam.

Sebenarnya Allan Pope agen CIA, dan dalam melakukan pemboman di Ambon, jatuh korban dari rakyat sejumlah 700 orang. Namun, dalam kepentingan politik menghadapi Amerika Serikat, Allan Pope diberi amnesti. Allan Pope bersama keluarga di Amerika Serikat hanya diminta untuk tidak membuat berita sensasi, agar menyembunyikan diri dan melupakan semua peristiwa pembunuhan atas rakyat yang pernah dilakukannya di Indonesia.

Dengan amnesti, Presiden Soekarno menunjukkan sikap bersahabat dengan bangsa Amerika Serikat. Tetapi, balasannya adalah justru sebaliknya, Amerika Serikat melakukan subversi, berusaha menjatuhkan Presiden Soekarno.<sup>17</sup>

Gerakan Militer Daerah yang mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, menjadikan Presiden Soekarno dan TNI dalam upayanya membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, melalui operasi militer, terpaksa belanja persenjataannya dari negara-negara Blok Timur.

## DN Aidit PKI Merangkul Presiden Soekarno

Ulama dan Santri menyaksikan PKI yang memanfaatkan kesempatan terjadinya Perang Saudara, ataupun pada saat Perang Kemerdekaan melawan Imperialis Belanda, digunakan untuk melancarkan kudeta. Apalagi dengan adanya Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimanfaatkan oleh D.N. Aidit merangkul Presiden Soekarno untuk memperkuat PKI. Kelanjutannya dimanfaatkan mempercepat pelaksanaan Kudeta G-30-S/PKI. Mengapa PKI selalu melancarkan Kudeta pada saat situasi nasional sedang menghadapi perang kemerdekaan atau konfrontasi senjata?

Tidak lain berangkat dari doktrin perang komunis Steffan T. Possny, dalam *A Century of Conflict, Communist Techniques of World Revolution*, menyatakan war is the road to communist revolution - perang sebagai jalan raya bagi revolusi komunis. And to the world dictatorship of the communist party - dan juga jalan terbentuknya kediktatoran partai komunis dunia. Dari doktrin ini, komunis selalu memanfaatkan vultural strategy - mengail di air keruh.

17 Manai Sophiaan, 1994. *Kehormatan Eagi yang Eerhak, Eung Karn, Tidak Terlihat G-30-S/PKI*. Yayasan Mencerahkan Kehidupan Bangsa. Jakarta, hlm. 188-191.



Sumber: Mohammad Roem 70 Tahun. Pejuang Perunding. Bulan Bintang. Jakarta. 1978.

## PIMPINAN MASJUMI DAN GPII DI RTM WILIS MADIUN

Fitnah PKI terhadap Masjumi dan GPII  
anti Pancasila dan akan mengkanangkan revolusi,  
menjadikan Presiden Soekarno membubarkannya  
dan memenjarakan pimpinannya di Rumah Tahanan Militer - RTM  
atau Wisma Wilis Madiun.

Dari kiri ke kanan antara lain:

M. Yunan Nasution, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmoro,  
K.H. M. Isa Anshary, Muchtar Ghazali, dan E.Z. Muttaqien - GPII

Surat perintah penangkapan untuk Mr. Mohammad Roem ditanda tangan oleh Jenderal TNI AD Nasution. Terjadi beberapa hari setelah Mr. Mohammad Roem sebagai Rektor Universitas Islam Sumatra Utara - UISU menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada Jenderal TNI AD Nasution. Melihat penanda tangan surat perintah penangkapan, dan setelah pemberian gelar, Mr. Mohammad Roem berkesimpulan untuk penangkapan politisi tidak perlu bertanya apa sebabnya.

Selain itu, dalam propaganda komunis, agresi komunis sebagai tindak self defence - bela diri. Dalam pandangan komunis, perang dilakukan oleh komunis sebagai revolution war - perang revolusi. Misalnya Chinese Revolution - Revolusi China melawan imperialist war - perang imperialis atau reactionary war - perang kaum reaksioner. Pokoknya, semua lawan komunis dikategorikan sebagai the counter revolution and exploitation - kontra revolusi dan eksplorasi.

Untuk mensukseskan revolusinya, D.N. Aidit memanfaatkan potensi organisasi kesenjataan yang resmi - the government army is the key to revolutionary success. Kaum revolucioner harus dibangun melalui organisasi kesenjataan - the revolutionaries must build a military organization. Hanya dengan melalui organisasi kesenjataan, revolusi komunis akan sukses - the revolutionary army is the key to revolutionary success.

Adapun yang dimaksud dengan revolutionary army - tentara revolusi dalam teori Lenin adalah tentara yang dibangun dari pelaku-pelaku organisasi buruh, petani, kader dan militer yang melakukan desensi memihak kepada ajaran komunis. Dari ajaran ini, D.N. Aidit bersama Njoto, Njono, Sakirman dan Sudisman, membangun SOBSI, BTI, Pemuda Rakjat, Gerwani, menuntut kepada Presiden Soekarno agar diizinkan mempersenjatai buruh tani untuk menyerbu langsung ke Irian Barat.

Bersamaan dengan tuntutan PKI mempersenjatai buruh dan tani, Uni Rusia mengirimkan Patung Pak Tani. Menggambarkan Petani bercaping, tidak memanggul cangkul, tetapi menyandang senjata, menjadikan petani dapat sungguhan makan dari rakyat. Disimbolkan patung seorang wanita yang mengantarkan makanan.

Diletakkan di bunderan Menteng yang menghadap ke arah Kantor Pusat Pelajar Islam Indonesia - PII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan Persyarikatan Muhammadiyah di Menteng Raya. Mengapa tidak menghadap ke Istana Negara seperti Patung Pangeran Diponegoro di depan Monas?

Bagi D.N. Aidit hanya dengan merangkul Presiden Soekarno dan Demokrasi Terpimpinnya, PKI akan memperoleh kemenangan dalam menghadapi kekuatan TNI AD. Bagi D.N. Aidit, Guided Democracy as antimilitary dictatorship of the individual and anti liberalism. Upaya merangkul Presiden diaktifkan setelah Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa - PBB, 1 Januari 1965, Jumat Pon, 27 Sya'ban 1384.

D.N. Aidit mulai menyiarkan adanya *Dewan Djenderal*. Bertolak dari *Dokumen Gillchrist* yang ditemukan di rumah Bill Palmer, importir Film Amerika, saat didemo oleh Pemuda Rakjat. Ditiupkan kabar, dari bulan Mei-September 1965, bahwa Dewan Jenderal sebagai kelompok Djenderal Angkatan Darat yang tidak setia kepada Pemimpin Besar Revolusi. Dewan Djenderal akan melakukan kudeta. Dengan strategi ini, perhatian Presiden Soekarno akan tercurah kepada PKI sebagai partai yang setia tanpa reserve.

Untuk mencapai tujuannya ini, dalam mengaplikasikan ajaran komunisme, D.N. Aidit dan kawan-kawannya hanya memerlukan waktu lima tahun, 1960-1965 M. Dengan bantuan Presiden Soekarno dan RRC, PKI semakin maju. Lawan-lawannya, yakni Partai Masjumi, PSI, 17 Agustus 1960, dan Partai Murba, 21 September 1965 berhasil dilumpuhkan. Terbukalah jalan revolusi untuk melancarkan Kudeta G-30-S/PKI, 30 September 1965. Semuanya terjadi setelah strategi PKI diarahkan memanfaatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

## **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Situasi daerah luar Jawa, kalangan militer berupaya membuat pemerintahan tandingan, PRRI dan Permesta, 15 dan 17 Februari 1958, dan mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat, di bawah Presiden Dwight Eisenhower, 1953-1961M. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Pusat Jakarta mencari jalan keluar dengan cara meningkatkan hubungan diplomasinya dengan negara-negara komunis. Apalagi, Barat mencoba membuat pangkalan perangnya di Asia Tenggara, *South East Asia Treaty Organization - SEATO*. Amerika Serikat masih menempatkan pangkalan militernya di Filipina.

Dengan mempraktikkan *Rimland Theory* - Teori Penguasaan Daerah Pinggir dari N. Spykman, Amerika Serikat membangun pakta pertahanannya mengepung negara-negara komunis. Asia Tenggara dijadikan basis pertahanan Amerika Serikat dan negara penjajah Barat lainnya. *South East Treaty Organization - SEATO* juga bertujuan untuk melumpuhkan kembali Republik Indonesia.

Dengan adanya Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955, eksistensi *South East Asia Treaty Organization - SEATO*, 1954 M, walaupun didukung oleh Filipina, Thailand, Pakistan, bersama Amerika Serikat, Inggris, New Zeland, dan Australia, tetapi dapat digagalkan. Dampaknya, timbulah gejolak di daerah militer yang berposisi sebagai daerah pinggir dari pemerintah pusat Indonesia. Dipelopori dengan pemberontakan

militer dari Sumatera Barat dan Sulawesi, yakni PRRI/Permesta, 1958 M. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila operasi militernya gagal.

Pembebasan Irian Barat tidak mungkin mendapatkan bantuan dari negara-negara Blok Barat dan Timur Tengah yang di dalamnya terdapat Republik Sekuler Turki, sebagai anggota Nato. Realitas sejarah telah berubah seratus delapan puluh derajat. Perjuangan Ulama masa lalu mendapat dukungan dari Kesultanan Turki. Sejak 1923 M, Turki sudah berubah menjadi negara sekuler yang berpihak ke Barat. Demikian pula Saudi Arabia yang dimanfaatkan energi minyaknya oleh Barat. Akibatnya, lebih menghadap ke Barat daripada ke Asia Afrika.

Timur Tengah dipecah belah oleh Barat. Nasionalisme Aljazair melahirkan konflik tak berkesudahan. Mesir membebaskan dirinya dari Arabia atau Turki. Iran dan Irak pernah di bawah Muawiyah dan Abasiyah. Keduanya melepaskan diri dari pengaruh Arabia dan Turki, menjadi dua negara yang tidak mungkin bersatu. Kedua negara tersebut, dibangkitkan kesadaran nasionalisme Persiaanya.

Nasionalisme Pakistan dibelahnya dengan Bangladesh. Afganistan bekas negara penjanga - buffer state, sedang terpuruk. Kesultanan Mongol di India, sudah tiada. Siria, Jordania, Palestina, digoncang terus oleh Israel dengan perang. Di bawah kondisi ini, apa yang dapat diharapkan oleh NKRI apabila mengizinkan bantuan dari Timur Tengah untuk membebaskan Irian Barat?

Tantangan Barat bersama Sekoetoenya yang mempertahankan penjajahan di Irian Barat, menurut Presiden Soekarno perlu dijawab dengan terlebih dahulu menyatukan wawasan bangsa yang sedang mempertentangkan masalah ideologi di dalam Konstituante. Di samping itu, dilancarkan pula operasi militer menindak gerakan kedaerahan yang dipimpin oleh kalangan militer.

Hanya dengan menumbuhkan kesadaran pemikiran Revolusi Indonesia yang tetap bertekad menghapuskan penjajahan di atas dunia, akan dapat disatukan gerak juangnya dalam menyempurnakan batas wilayah dan memerdekaan seluruh tanah air Indonesia dari penjajahan. Para pimpinan partai politik dan militer perlu menyadari, Indonesia tanpa Irian Barat, bukan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364. Tanpa tumbuhnya kesadaran ini, akan tumbuh kesadaran lawannya bukan imperialis Belanda dan imperialis Barat. Melainkan lawannya berbalik bangsa sendiri dan berubah menjadi internal conflict.

Untuk mengakhiri *internal conflict* di kalangan partai politik yang berkepanjangan dan menyatu-bahasakan kembali pemikiran para pimpinan dan anggota Konstituante, diperlukan tumbuhnya kesadaran sejarah bahwa:

Piagam Djakarta, 22 Juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364 yang telah menjadi dasar *Gentlement Agreement* adalah produk kesepakatan para Ulama bersama segenap pemikir kemerdekaan bangsa dan negara, termasuk Mr. M.A. Maramis wakil dari Kristen.

Akibat adanya distorsi penulisan Sejarah Indonesia, Piagam Djakarta seperti murni produk pimpinan Islam saja, tanpa ikut serta Mr. M.A. Maramis dari Protestan. Dikesangkan Piagam Djakarta identik dengan Negara Islam. Padahal secara historis, tujuh kata-kata, dengan mendjalankan *Sjariat Islam* bagi pemeloeck-pemeloecknya, disetujui 200% oleh Mr. M.A. Maramis dari Wakil Protestan atau golongan Nasrani saat itu.

Menyetujui dengan pengertian dan penafsiran bahwa *Sjariat Islam* hanya berlaku untuk umat Islam. Tidak dikenakan kepada umat non-Islam, menjadikan Mr. A. Maramis menyetujui 200%. Dengan demikian, sebenarnya Piagam Djakarta, 22 juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364, produk semua pihak, benar-benar sebagai *Gentlement Agreement* menurut Dr. Soekiman Wirjosandjojo, kecuali PKI tidak ikut serta di dalamnya.

Ideologi Pantjasila serta konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, secara politis disetujui oleh para Ulama dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apakah mungkin terjadi perumusan ideologi Pantjasila dan Oendang-Oendang Dasar 1945, apabila tidak ada persetujuan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Mr. Kasman Singodimedjo dari Persyarikatan Moehammadijah, Wachid Hasjim dari Nahdlatoel Oelama bersama Mr. Teuku Mohammad Hasan dari perwakilan Aceh? Hasil perumusannya kemudian baru diserahkan kepada Drs. Mohammad Hatta dari Sumatra Barat. Atas dasar dan perumusan kelima pimpinan nasional inilah, menjadikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkannya pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364 H.

Untuk mengembalikan kesadaran sejarah ini, Presiden Soekarno dan pemerintah pada 25 April 1959, menganjurkan pimpinan dan anggota Konstituante agar memutuskan untuk kembali ke ideologi Pantjasila dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945.

Menurut Deliar Noer, Joesoef Wibisono dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan internasional, perlu segera dicari jalan keluar dari perbedaan pendapat antara kelompok Islam yang menginginkan kembali Piagam Djakarta sebagai landasan dasar perumusan Konstitusi, dengan kelompok luar Islam yang menginginkan Pantjasila dan Piagam Djakarta hanya sebagai dokumen historis.

Pada saat itu juga, ketika dalam Konstituante dari pihak Masjumi menyetujui Demokrasi Terpimpin, tetapi dengan pengertian dipimpin oleh kaidah-kaidah hukum. Hukum berlaku untuk seluruh isi negara, berlaku pula untuk pemegang pemerintahan Presiden. Masjumi tidak setuju apabila Demokrasi Terpimpin diartikan dipimpin oleh Maha Pemimpin siapa pun orangnya, yang menempatkan dirinya di atas segala hukum. Demikian penjelasan Prawoto Mangkusasmito. Dalam pelaksanaan setelah Dekrit Presiden, Demokrasi Terpimpin menjadi demokrasi tanpa oposisi seperti pernyataan Mohammad Natsir.

### **Mohammad Natsir, Pancasila dan Islam**

Menurut Mohammad Natsir dalam Capita Selecta, Djilid 2, sebagai mantan Menteri Penerangan dan Perdana Menteri pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan Pancasila, pada Ramadhan 1373/Mei 1954 menyatakan:

Pantjasila memang mengandung tudjuhan2 Islam, tetapi Pantjasila itu bukanlah berarti Islam. Kita berkejakinan jang tak akan kundjung kering, bahwa diatas tanah dan dalam iklim Islamlah, Pantjasila akan hidup subur. Sebab Iman kepentjajaan kepada Tuhan Jong Maha Esa itu tidak dapat ditumbuhkan dengan se-mata2 hanja mentjantumkan kata2 dan istilah "Ketuhanan Jang Maha Esa" itu sadja didalam perumusan Pantjasila itu.

Berlainan soalnja, apabila sila Ketuhanan Jang Esa itu hanja sekadar buah bibir, bagi orang2 jang diwanja sebenarnya sceptis dan penuh ironi terhadap agama: bagi orang ini dalam ajungan langkahnja jang pertama ini sadja Pantjasila itu sudah lumpuh.

Apabila sila pertama ini, jang hakikatnja urat-tunggal bagi silo2 berikutnja, sudah tumbang, maka seluruhnya akan hampa, dan amorph, tidak mempunyai bentuk jang tentu. Jang tinggal adalah kerangka Pantjasila jang mudah sekali dipergunakan untuk penutup tiap2 langkah perbuatan jang tanpa sila, tidak berkesusaian sama sekali.



### LAMBANG PERSATUAN ISLAM

Jadi, secara historis dapat dibaca kembali peristiwa sejarahnya yang sebenarnya terjadi. Kedua-duanya terlahir karena Ulama ikut berpartisipasi aktif sebagai pembuat keputusan sejarahnya. Tidak mungkin keduanya terjadi tanpa persetujuan Ulama. Hanya sayangnya, penulisan sejarahnya atau Sejarah Sebagai Tulisan, dihapuskan di dalamnya Ulama sebagai peran utamanya.

### Pemungutan Suara di Konstituante

Perbedaan kepentingan antarpimpinan partai politik dalam Konstituante telah berlangsung selama sekitar 4 tahun, 1955-1959 M, terjadi sebagai dampak kehilangan pengertian sejarah yang sebenarnya. Apabila saling mengetahui proses sejarah awal kelahiran kedua hal yang dipertentangkannya, ideologi Pantjasila dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, dapat dipastikan akan menemukan solusi atau jalan keluarnya tanpa berlarut-larut makan waktu yang panjang.

Anjuran Presiden Soekarno dan pemerintah, pada 25 April 1959, diperdebatkan oleh anggota dan pimpinan Konstituante, dan diambil keputusan dengan mengadakan pemungutan suara. Berdasarkan dokumentasi 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, dapat dibaca hasil pemungutan suara antara anggota dan pimpinan Konstituante dalam tiga kali sidangnya:

Pemungutan suara pertama, 30 Mei 1959, menghasilkan: setuju 269 suara, dan tidak setuju 199 suara.

Disusul dengan pemungutan suara kedua, 1 Juni 1959, menghasilkan: setuju 263 suara, dan tidak setuju 203 suara.

Kemudian diikuti dengan pemungutan suara ketiga, 2 Juni 1959, menghasilkan: setuju 264 suara, dan tidak setuju 204 suara.

Melalui sistem pemungutan suara di atas, ternyata gagal mengambil keputusan menjadikan Oendang-Oendang Dasar 1945 sebagai Undang Undang Dasar Republik Indonesia dan Pantjasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ditetapkan pemungutan suara sah, bila mencapai dua pertiga dari jumlah suara yang masuk.

Dampak dari kegagalan dari hasil pemungutan suara tersebut adalah semakin meruncingnya internal conflict. Penguasa Perang, KSAD Abdul Haris Nasution, melarang aktivitas politik dan Konstituante reses.

Pada 5 Juli 1959, dari Istana Merdeka ditetapkanlah Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut maka tidak berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera dibentuk Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara - MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - DPAS. Kelanjutannya, Konstituante hasil Pemilu dibubarkan.

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa Presiden Soekarno sebagai tokoh yang sangat kuat pengaruhnya. Demi memberikan jawaban terhadap pimpinan Gerakan Militer Daerah, tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa hanya orang Jawa yang diangkat sebagai pimpinan militer. Terbukti untuk KSAD diangkatlah Djenderal Abdul Haris Nasution dari Batak. Kerja sama keduanya menjadikan Dekrit

Presiden dapat berlangsung dengan baik. Seluruh pimpinan partai politik tidak dapat berbuat apapun terhadap pembubaran Konstituante dan DPR hasil Pemilu.

Presiden Soekarno di hadapan demonstran 17 Oktober 1952, atau kalangan militer Oktoberisme, tidak mau membubarkan DPR karena dirinya bukan pemimpin diktator. Namun, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang didukung oleh Penguasa Perang KSAD Djenderal A.H. Nasution, dibekukanlah aktivitas Konstituante dan dibubarkannya DPR sekalipun hasil Pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno.

Dengan peristiwa sejarah ini, pada saat itu, Ulama dan Santri, dipahamkan terhadap makna Kekuasaan Eksekutif dalam menciptakan Ketetapan Presiden, Peraturan Presiden, Dekrit Presiden, dan Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Pada saat itu pula, Ulama dan Santri menjadi sadar terhadap kemampuan kerja Partai Politik dalam menghadapi pelaksanaan Dekrit Presiden.

Dengan pengalaman sejarah politik yang dialaminya, para Ulama dan pimpinan partai politik Islam, memahami makna sebuah kekuasaan atau kekhilafahan setelah kemerdekaan tercapai. Dengan kekuasaan dapat merealisasikan programnya. Dan melalui pengalaman sejarah, dipahami pula makna Paradigma Lima-K dari Sjarikat Islam yang dipesankan oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Hanya dengan bertolak membangkitkan (1) kemauan akan terlahir (2) kekuatan. Dari terbentuknya kemauan dan kekuatan akan memperoleh (3) kemenangan. Dengan kemenangan akan mampu menduduki (4) kekuasaan, dan dengan menguasai kekuasaan akan memperoleh (5) kemerdekaan. Dengan kemerdekaan politik terbebasnya penjajahan, akan diciptakan kemerdekaan sejati dengan makna memelihara keadilan untuk menciptakan kemakmuran.

## Ulama di tengah Manopol Usdek

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pada 10 Juli 1959, Jumat Legi, 3 Muhamarram 1379, dibentuklah Kabinet Kerja Pertama, dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Didahului dengan Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden. Pada tanggal yang sama, 10 Juli 1959, Ir. H. Djuanda diangkat sebagai Menteri Pertama.

Program Kabinet Kerja Pertama dikenal dengan nama Tri Program: (1) Memenuhi kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan (2) Menegakkan keamanan untuk rakyat dan negara (3) Melanjutkan perjuangan melawan ekonomi imperialis dan imperialism politik di Irian Barat.

Selanjutnya, pada 15 Agustus 1959, di Istana Negara dilantik 46 anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara - DPAS, di dalamnya diangkatlah Aidit, Njoto, Soetomo Atomo, dan Siauw Giok Tjhan. Tidak lupa diangkat pula sebagai pengimbang, kelompok komunis nasionalis Tan Malakais, yakni Adam Malik, Iwa Koesoema soemantri, Mohammad Padang, Nj. Rasoena Said, Wikana, dan Tjoa Siklen sebagai Dewan Perancang Nasional-Depernas dan Mr. Mohammad Yamin sebagai Ketua, dan Sakirman dari PKI di angkat sebagai Wakil Ketua. Di samping itu, dibentuk pula, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, dengan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX sebagai Ketua.

Dari kenyataan sejarah ini terbaca hasil PKI merangkul Presiden Soekarno, memperoleh posisi politik seperti di atas. Sekaligus terbaca cara Presiden Soekarno menciptakan balance of power. Walaupun D.N. Aidit dan kawannya diangkat, diimbangi pula dengan kelompok komunis nasionalis Tan Malaka: Adam Malik, Mohammad Yamin Cs. Kedudukan Mohammad Yamin sebagai ketua, diimbangi dengan Sri Soeltan Hamengkoebœana IX sebagai Wakil Ketua.

## Manipol Usdek

Pada 17 Agustus 1959, Senin Wage, 10 Safar 1379, pada Hari Ulang Tahun Ke-14 Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraannya berjudul Menemukan Kembali Revolusi Kita atau disebut pula sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia.

DPAS, Roeslan Abdulgani, mengusulkan pidato tersebut dijadikan dasar Garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno di depan Kongres Pemuda di Bandung, Februari 1960, menjelaskan intisari Manifesto Politik Republik Indonesia – Manipol adalah:

- Pertama, Undang Undang Dasar 1945
  - Kedua, Sosialisme Indonesia
  - Ketiga, Demokrasi Terpimpin
  - Keempat, Ekonomi Terpimpin
  - Kelima, Kepribadian Indonesia
- Kelima hal tersebut disingkat menjadi USDEK.

# *Mohamad Roem*



## **Mr. MOHAMAD ROEM**

Pembela Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Protestan Belanda. Mohammad Roem tersingkirkan setelah PKI merangkul Presiden Soekarno. Perjuangan Orde Lama merebut Irian Barat diikuti dengan adanya Dekrit Presiden dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia serta PKI berupaya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat pemersatu. Disebarluaskan fitnah terhadap Masjumi, GPII, PSI dituduh anti Pancasila. Para pimpinan Masjumi, GPII dan PSI dipenjarakan di RTM Madiun. Dengan bantuan RRT terbukalah jalan Kudeta G30S/PKI yang berdampak jatuhnya Presiden Soekarno.

Presiden Soeharto memimpin pemerintahan Orde Baru. Parpol disederhanakan dan mantan pimpinan Masjumi dilarang memimpin parpol. Organisasi Islam sebagai gerakan agama dibenarkan, Islam sebagai parpol dikerdilkan. Mr. Mohammad Roem Mencari Kebenaran dan Keadilan, Dr. Anwar Harjono S.H. mencari Keadilan dan Persatuan, Dr. Mohammad Natsir mengajak mantan pimpinan parpol Berpolitik Melalui Jalur Dakwah DDI-Indonesia.

Selain itu, dibentuk pula Front Nasional pada 31 Desember 1959, Kamis Kliwon, 29 Jumadil Akhir 1389. Dengan tujuan: Pertama, menyelesaikan revolusi nasional. Kedua, melaksanakan pembangunan semesta nasional. Ketiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Namanya mirip sekali dengan Front Nasional sebagai pemerintahan baru yang didirikan dalam Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Oleh karena itu, menurut 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Front Nasional dikuasai oleh PKI dan simpatisannya digunakan untuk mencapai tujuan politiknya, Kudeta G-30-S/ PKI pada 30 September 1965 di Jakarta.

Mengapa menghidupkan kembali Front Nasional? Tidakkah hal tersebut berarti menghidupkan kembali Kudeta PKI di Madiun? Aidit sebagai pelaku Kudeta PKI di Madiun yang tidak tertangkap. Apakah hal ini, sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, memang disengaja menggunakan terminologi Marxisme: Manifesto Politik? Tidakkah istilah ini sama dengan Manifesto Komunis, 1848 M yang berisikan anjuran Karl Marx agar kaum buruh proletar berevolusi melawan kaum borjuis? Demikian pula istilah Sosialisme sebagai tahapan revolusi menuju Komunisme.

Kemajuan PKI semakin hari semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Menurut Arnold C. Brackman, D.N. Aidit mendukung konsep Khrushchev, if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way - bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan Khrushchev ini seperti bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin secara terbuka menyatakan komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. Istilah politik ini, perdamaian tidaklah sama dengan pengertian rakyat awam, damai artinya tiada peperangan. Tidaklah demikian maksudnya.

Dapat dilihat dari sikap Rusia dengan bahasa politik perdamaian, tetapi juga menyiapkan berbagai senjata pemusnah nuklir dalam menandingi Amerika Serikat. Seperti halnya istilah pacta pertahanan - pact of defence, artinya pakta, pacto, pact, memang perdamaian. Namun, mengapa disiapkan dengan kekuatan militer. Misalnya NATO - 1949 M, ANZUS - 1951 M, SEATO - 1954 M karena dunia Barat merumuskan perang untuk mengakhiri peperangan.

Selain itu, D.N. Aidit juga menyatakan karena PKI merangkul Presiden Soekarno, PKI akan bekerja sama dengan pimpinan partai politik lainnya yang sama-sama mendukung Konsepsi Presiden dengan Demokrasi Terpimpin walaupun PNI partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno -1927 M dan mendukung Demokrasi Terpimpin. Namun, pimpinan PNI menyerang PKI sebagai partai bermuka dua - double faced

party. Pikirannya separuh menghadap ke Moskow atau Beijing, dan sisanya baru diarahkan ke Indonesia.

## DPR Gotong Royong

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno, demi menciptakan iklim kerja sama antara legislatif dengan eksekutif secara gotong royong maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong pada 24 Juni 1960. DPR hasil Pemilu dibubarkan. DPRGR dibentuk sebagai perwakilan dari partai politik, golongan karya, dan wakil dari Irian Barat. Status ketua dan wakil ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Soekarno. Demikian pula pembentukan MPRS pada 15 Agustus 1960.

Demi menciptakan pemerintahan tanpa oposisi, setelah berhasil dibubarkannya Konstituante tanpa terjadi gejolak politik maka pada 17 Agustus 1960, berdasarkan Keputusan Presiden, No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, pemerintah membubarkan Partai Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia - PSI maka terjadilah seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Natsir, Demokrasi Terpimpin adalah *democracy without opposition* - demokrasi tanpa oposisi.

Pada saat pidato pembubaran ini, Presiden Soekarno didampingi oleh Staf Pengusa Perang Tertinggi, *Djenderal Abdul Haris Nasution* di hadapan pimpinan PSI Soetan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo dan Moerad. Dari Partai Masjumi hadir pula Junan Nasution dan Prawoto Mangkusasmito.

Melihat adegan atau fakta luar itu, secara sepintas pihak pimpinan militer Angkatan Darat, tidak sejalan dengan pemikiran pimpinan Partai Politik Islam Indonesia Masjumi dan umat Islam umumnya. Lebih mendukung keinginan Presiden Soekarno dan PKI, membiarkan kedua partai politik tersebut tumbang.

Kenyataan sejarah berikutnya, bicara sangat berbeda. PKI sesudah Pemilu mencapai puncak keberhasilannya. Hanya memerlukan waktu sepuluh tahun sesudah Pemilu 1955, PKI berani mengulang kudeta di Madiun, 19 September 1948, di Jakarta 30 September 1965, dikenal dengan nama G-30-S/PKI dan pimpinan Angkatan Darat dijadikan target korban pembunuhan dalam kudetanya.



## PRESIDEN Dr.Ir. H. SOEKARNO

Satu-satunya Presiden Indonesia yang mengenakan lambang  
Matahari Muhammadiyah di dada atas sebelah kanan

Presiden Dr. Ir. H. Soekarno  
memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dalam Falsafah Ilmu Tauhid  
dari Universitas Muhammadiyah  
5 Rabiul Akhir 1385/3 Agustus 1965 di Jakarta.



Sumber: Kalender Muhammadiyah

## PRESIDEN SOEKARNO DAN MU'TAMAR MUHAMMADIYAH

Mu'tamar Setengah Abad, Jakarta, 21-25 November 1962

Presiden Soekarno setelah membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi

Lebih mendekati Perserikatan Muhammadiyah

Presiden Soekarno menyatakan, Makin Lama Makin Tjinta Muhammadiyah.

Dan berpesan apabila wafat, agar kain kafannya ada lambang Perserikatan Muhammadiyah.

Hanya dalam waktu relatif singkat lima tahun setelah lawan politiknya Partai Islam Indonesia Masjumi pimpinan Prawoto Mangkusasmito, Gerakan Pemuda Islam Indonesia pimpinan E.Z. Muttaqien, dan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Soetan Sjahrir, 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Sembilan hari setelah Partai Murba dibubarkan pada 21 September 1965, PKI merasa aman dari partai politik lawannya, kemudian berani melancarkan Kudeta G-30-S di Jakarta diarahkan menumbangkan pimpinan Angkatan Darat. Siapa - *who*, mengapa - *why*, apa - *what*, kapan - *when*, dan bagaimana - *how*?

## Trikora

Setelah adanya kunjungan Khrushchev ke Indonesia, Januari 1960, dan memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS, diikuti dengan kunjungan Jenderal Nasution ke Moskow memperoleh pinjaman sebesar 450 juta dolar AS untuk pembelian senjata maka pada 4 Maret 1961 dilangsungkan penandatanganan pembelian senjata dari Uni Soviet. Antara lain, Pesawat Pembom TU-16, Kapal Selam, dan Kapal Penjelajah.

Tujuannya adalah mempersiapkan dengan kekuatan militer guna merebut Irian Barat. Mengapa Presiden Soekarno membeli senjata dari Rusia? Sebagai balance of power untuk mengimbangi PKI yang bekerja sama dengan RRC, dengan tidak membeli senjata dari RRC. Dengan cara pembelian senjata dari Rusia, Indonesia berharap akan mendapat perlindungan dari Rusia apabila terjadi tindak penyimpangan PKI dengan RRC.

Andaikata Amerika Serikat benar-benar Pendekar Demokrasi dan berpihak kepada perjuangan rakyat yang terajah, pasti Amerika Serikat segera memaksa Kerajaan Protestan Belanda mengakhiri penjajahannya di Irian Barat. Seperti Amerika Serikat sendiri bersegera memerdekaan Filipina. Dampaknya, Republik Indonesia tidak perlu membeli senjata dari Unisoviet dan tidak perlu membesarkan kembali PKI. Namun sayangnya, Amerika Serikat memilih sikap masih mentoleransi penjajahan Kerajaan Protestan Belanda di Irian Barat.

Akibatnya, Komando Pembebasan Irian Barat, mulai dilaksanakan dengan nama Tri Komando Rakyat - Trikora disampaikan oleh Presiden Soekarno pada rapat raksasa di Yogyakarta, 19 Desember 1961. Tanggal ini dipilih untuk mengenang kembali Agresi Militer Belanda Kedua, 19 Desember 1948, yang berhasil menangkap Presiden dan Wakil Presiden bersama beberapa Menteri. Kemudian, diasingkan ke P. Bangka dan terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Ketua, Sjafrudin Prawiranegara.

Adapun isi dari Trikora tersebut adalah:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat;
3. Bersiaplah mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Untuk pelaksanaan operasi militer, dibentuklah Komando Mandala Pembelaan Irian Barat pada 2 Januari 1962, dipimpin oleh Major Djenderal Soeharto. Wakil I Panglima Kolonel Laut Soebono, Wakil II Panglima Kolonel Udara Leo Wattimena, dan Kepala Staf Gabungan Kolonel Achmad Tahir.<sup>18</sup>

Sepuluh hari kemudian, 12 Januari 1962, dilaksanakanlah patroli rutin di Laut Arafuru, menggunakan Motor Torpedo Boat - MTB yang tergabung dalam Kesatuan Patroli Tjepat - KPT terdiri tiga buah: RI Macan Tutul, RI Harimau, dan RI Macan Kumbang. Komandan Satuan MTB adalah Kapten Wiratno dan juga sebagai Komandan RI Macan Tutul. Dalam patroli ini, ikut serta para penjabat tinggi MBAL: Komodor Yos Soedarso - Deputy KSAL, Kolonel Soedomo - Kepala Direktorat Operasi MBAL, dan Kolonel Moersid - Asisten II KSAD. Tujuan patroli meninjau dari dekat perbatasan Trikora, untuk menyusun rencana operasi selanjutnya.

Patroli ini pada 15 Januari 1962, jam 21.15 zone time, dihadang oleh kapal-kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran laut ini, gugurlah Yos Soedarso yang beragama Katolik bersama Kapten Wiratno bersama seluruh anak buahnya.

Dengan gugurnya Komodor Yos Soedarso, dunia mengetahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara, bukan sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang RMS bahwa Republik Indonesia negara yang dipimpin oleh orang Jawa yang Islam saja, tidak ada non-Islam sebagai pemimpinnya.

## Penyerahan Irian Barat

Setelah Komando Mandala Pembelaan Irian Barat melancarkan infiltrasi melalui udara, darat, dan laut, ternyata hanya memakan waktu delapan bulan kemudian, dari 2 Januari 1962, Kerajaan Protestan Belanda pada 15 Agustus 1962 mengadakan penyerahan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia di Markas Besar PBB.

Kemudian diikuti dengan pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan dari *United Nations Temporary Executive Authority – UNTEA* dari PBB di Kota Baru Irian Barat

---

18 Pembentukan Komando Mandala Pembelaan Irian Barat di atas, 1962 M. sangat tepat waktu. Bersamaan waktunya dengan adanya masalah Krisis Kuba. Adanya pengiriman senjata missile Rusia ke Kuba (1962 M). Presiden Kennedy AS memerintahkan segenap militernya untuk siaga. P.M. Khrushchev agar memerintahkan kapal Rusia yang membawa senjata pemusnah agar meninggalkan perairan Kuba. Bagi Amerika Serikat, secara geografis posisi Kuba sebagai musuh di halaman belakang. Situasi Krisis Kuba menjadikan posisi Amerika Serikat di Vietnam Utara, baik pasukan darat dan udara di seluruh sektor, menemui kegagalan dan banyak yang tewas.

kepada Indonesia, pada 1 Mei 1963. Pada hari yang sama, Komando Mandala dibubarkan.

Dengan adanya penyerahan tersebut, sejak 1 Mei 1963, secara de jure lengkaplah luas wilayah Republik Indonesia dari barat, Sabang hingga timur Merauke. Batas utara Kepulauan Talaud dan selatan Pulau Rote. Dengan batas luas laut sebagaimana yang tertera dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Jumat Pahing, 21 Jumadil Awwal 1377, Republik Indonesia menjadikan negara pemilik batas luas laut yang terluas di dunia.

Kenyataan luas wilayah darat, laut dan udara Indonesia ini, menjadikan Kerajaan Protestan Anglikan Inggris, merasa terganggu. Tidakkah Inggris menyatakan rule the wave rule Britain - menguasai lautan berarti menguasai Inggris? Oleh karena itu, untuk mengimbangi Republik Indonesia yang memiliki batas laut terluas di dunia, dibentuklah negara Federasi Malaysia pada 16 September 1963, Senin Kliwon, 27 Rabiul Akhir 1383.

Dampaknya di sisi lain, dengan adanya Persetujuan Penyerahan Irian Barat dari Kerajaan Protestan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, 15 Agustus 1962, dan diikuti dengan Penyerahan Kekuasaan dari United Nations Temporary Executive Authority - UNTEA dari PBB ke Indonesia, pada 1 Mei 1963, menjadikan Dr. Ch. R. Soumokil menjadi gembong RMS 19 April 1950, tidak mampu bertahan lagi, akibat tidak lagi menerima bantuan dari imperialis Belanda. Berhasil ditangkap, 2 Desember 1963, dan kemudian dijatuhi hukuman mati pada 21 April 1964.

Dengan demikian, segenap gangguan keamanan berhasil diselesaikan. Diawali dengan APRA dan Andi Azis, 1950 M. Menyusul PRRI/Pemesta, 1961 M. Darul Islam Jawa Barat, 1962 M, dan Pembebasan Irian Barat berhasil masuk pangkuan RI, gagallah separatis OPM, Mei 1963 M, serta RMS, 2 Desember 1963 M.

Prestasi ini semuanya dapat terjadi, dengan terbentuknya kesatuan dan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Terutama TNI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M hingga Pembebasan Irian Barat, 1963 M, ABRI sebagai anak kandung rakyat, kelanjutan Tentara Peta produk Ulama menunjukkan prestasi juang yang gemilang dalam bela bangsa dan negara. Lalu, apa yang akan terjadi apabila perang-perang telah berhenti. Dapat dipastikan akan timbul internal conflict.

Tiba-tiba, Barat setelah Amerika Serikat menemui kekalahan di Vietnam Utara, dan berkembangnya pengaruh komunis di Laos, Kamboja, Filipina, dan PKI di

Indonesia, melancarkan politik *devide and rule* bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dengan mengangkat Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Tentu hal ini mendorong Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965.

## Konfrontasi Indonesia - Malaysia

Kerajaan Protestan Anglikan Inggris menciptakan politik keseimbangan baru di Asia Tenggara. Dengan mengalirnya senjata dari Rusia ke Indonesia, besarnya pengaruh RRC terhadap PKI maka dibentuklah Federasi Malaysia, direncanakan 31 Agustus 1963. Namun, baru dilaksanakan 16 September 1963, Senin Kliwon, 27 Rabiul Akhir 1383. Di bawah kondisi ini, Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia, 17 September 1963.

Menyusul ketegangan baru, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, di tengah situasi dalam negeri sedang terjadi *jor-joran* antara PKI dengan TNI dan segenap organisasi non komunis. Pendekatan Presiden Soekarno terhadap negara Blok Timur Komunis, dalam upaya mensukseskan Pembebasan Irian Barat, berdampak menyuburkan PKI.

*Balance of Power* dari Presiden Soekarno atas pertumbuhan partai politik dalam negeri, lebih cenderung kepada PKI. Walaupun sebenarnya terbaca, PNI agar menyatu dengan PKI, dinyatakan Marhenisme PNI adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. PKI diimbangi dengan komunis nasional, Partai Murba.

Sementara itu, parpol agama, Partai Nahdlatul Ulama diimbangi dengan Partai Kristen dan Katolik. Antarorganisasi sosial keagamaan Islam Nahdlatul Ulama, Perti, Matlaul Anwar, Jami'atul Al-Wasliyah, PUI, Nahdlatul Wathan dari kelompok Ahli Sunnah Wal Jamaah, diimbangi dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsjad dari kelompok Wahabi.

Tidak luput dalam ABRI, terbaca *balance of power* - politik keseimbangan Presiden Soekarno. Setelah Djenderal Soeharto berhasil melaksanakan Trikora, dalam melaksanakan operasi Dwikora menghadapi Konfrontasi Malaysia, dibentuklah Komando Siaga - KOGA, 2 September 1964. Kemudian, konsolidasi berikutnya, 28 Februari 1965, KOGA diubah menjadi Komando Mandala Siaga - KOLAGA dengan Panglima, Laksamana (U) Omar Dhani, Wakil Panglima I Djenderal (AD) Soeharto, dan Wakil Panglima II Laksamana (L) Muljadi, Kepala Staf Komodor (U) Leo Watimena.

Di bawah situasi ini, timbul pertanyaan, apa dan bagaimana Presiden Soekarno dalam menciptakan *balance of power* antara partai politik dengan ABRI, dan antara Angkatan dengan Angkatan dalam ABRI sendiri?

Partai Nahdlatul Ulama memang bermassa besar, tetapi tidak memiliki pendukung

negara luar yang bersedia menyumbangkan senjata. Negara-negara Timur Tengah di bawah pengaruh Barat Amerika dan Inggris. Barat tidak bersedia menyumbangkan produksi senjatanya dengan cuma-cuma. Kecuali Partai Nahdlatul Ulama bersedia membelinya. Hal itu tidak diperlukan lagi oleh Partai Nahdlatul Ulama yang sudah dekat hubungannya dengan TNI Angkatan Darat. Dikuatkan dengan adanya Badan Kerja sama Ulama dan Militer.

Partai Kristen dan Katolik walaupun mempunyai pendukung negara Barat yang memiliki senjata, tidak memiliki massa rakyat yang besar. Tidak mungkin dapat dijadikan pengimbang kekuatan ABRI.

PKI sebagai parpol yang memiliki pendukung RRC yang bersedia menyumbangkan sejumlah senjata, dan bersedia membangun Angkatan ke-5 untuk menandingi ABRI dengan Empat Angkatannya. Demi kepentingan ini, Laksamana (U) Omar Dhani, sebagai pimpinan KOLAGA, didekati oleh D.N. Aidit. Bantuan Omar Dhani terhadap PKI dapat dilihat pada saat Ulang Tahun ke-45 PKI di Jakarta, 23 Mei 1920-1965. Jakarta berubah seperti "ibu kota komunis". Dipenuhi dengan bendera PKI dan gambar-gambar Karl Marx, Lenin, D.N. Aidit, dan kawan-kawannya.

Presiden Soekarno menjadi kurang waspada terhadap rencana terselubung Kudeta PKI yang akan membusukkan namanya. Bahkan, Presiden Soekarno menganjurkan agar segenap bangsa Indonesia, dan juga terhadap PNI agar tidak takut kepada komunis atau communisto phobia. Walaupun realitasnya PNI terkalahkan pengaruhnya oleh PKI.

## **Ulama di Tengah Upaya Peniadaan Communista Phobia**

Ulama dihadapkan pada problematika politik yang sangat rumit. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pidato Menemukan Kembali Revolusi Kita, 17 Agustus 1959, disahkan oleh DPAS menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia. Dari saat ini, mulailah dikembangkan istilah-istilah Marxisme Leninisme. Seperti istilah Manifesto Komunis Karl Marx, 1848 M, dipinjam untuk nama lain dari Menemukan Revolusi Kita. Ada apa dengan PKI?

Pengertian revolusi oleh Presiden Soekarno didefinisikan, reject yesterday and built tomorrow - meniadakan yang kemarin, membangun yang hari esok. Sebagai hasil revolusi, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Timbul pertanyaan, bagaimana cara Presiden Soekarno agar Pancasila dapat

diterima oleh PKI yang tidak mengenal Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama? Apabila pengertian revolusi menolak yang kemarin - *reject yesterday*, Pancasila sebagai hasil revolusi ideologi harus diperbaharui pengertian lamanya dengan diperas menjadi Tri Sila. Kemudian, diperas lagi menjadi Eka Sila yakni Gotong Royong. Dengan demikian tidak terbaca lagi pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa secara tersurat.

Pemerasan Pancasila itu, menjadikan PKI D.N. Aidit tidak hanya dapat menerima Sang Merah Putih sebagai bendera negara dan bangsa Indonesia. PKI tidak lagi menyatakan bahwa Pancasila digunakan oleh PNI untuk membunuh pimpinan PKI di Madiun, 1948 M. Akan tetapi, D.N. Aidit mengubah pernyataannya tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Hanya alat, bukan filosofi dan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. PKI tetap tidak berubah, mempertahankan Marxisme Leninisme Maoisme sebagai landasan falsafahnya.

Oleh karena itu, D.N. Aidit sebagai Sekjen Central Comite PKI, di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi, 1964 M, menegaskan bahwa jika sosialisme sudah tercapai di Indonesia, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai alat pemersatu. Demikian penafsiran D.N. Aidit PKI terhadap Manipol Usdek dengan Pancasilanya.

Para Ulama diajak untuk menerima Manipol Usdek dan Nasakom. Bagi yang tidak dapat menerima ketiganya, dinyatakan sebagai kaum reaksioner atau agen Nekolim - Neo Kolonialisme dan Imperialisme. Diajak kembali ke tahun 1926 M adanya konsep pemikiran Ir. Soekarno tentang Nasakom. Jadi, beralih ke masa bangsa Indonesia sebelum mempunyai Pancasila 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945.

## ABRI Menolak Nasakomisasi ABRI

Dalam upaya pengembangan Nasakomisasi di kalangan TNI, desakan PKI tidak hanya mengartikan Nasakom sebagai ideologi. Melainkan dengan pengertian masuknya ketiga pimpinan Nasakom, terutama pimpinan PKI, menduduki pimpinan ABRI. Tentu, gagasan ini ditolak oleh pimpinan ABRI karena ABRI bukan parpol. Apalagi ABRI organisasi kesenjataan sebagai organisasi kerahasiaan.

Adanya upaya penolakan ABRI terhadap Manipol, Usdek, Nasakom menurut

pengertian PKI di atas, dan menurut D.N. Aidit pemikiran penolakannya adalah produk dari pengaruh Masjumi, PSI, PRRI, Darul Islam, dan Jenderal Nasution yang pura-pura setuju terhadap Manipol Usdek dan Nasakom. Rakyat diracuni oleh pikiran mereka ini semua, sebagai kaum reaksioner.

Presiden Soekarno mengingatkan kepada pimpinan PNI dan Partindo sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, menjadi mundur pengaruhnya diakibatkan kejangkitan penyakit Communista Phobia - Takut Komunis. Diingatkan, oleh Presiden Soekarno:

Saya tidak takut PKI. Saya tidak punya rasa takut kiri - leftist phobia. Saya dan PKI memang mempunyai banyak perbedaan, tetapi juga punya kesamaan pandangannya. Terutama dalam hal anti kolonialisme, anti imperialisme, dan kesamaan yang lainnya adalah perhatian terhadap nasib kaum buruh dan tani serta perjuangan membebaskan Irian Barat.

Pada kesempatan lain, dalam Kongres X PNI, 28 Agustus - 1 September 1963 di Purwokerto, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, yang intinya adalah Sosialisme Indonesia. Marhenisme macam inilah yang akan dijadikan dasar perjuangan.<sup>19</sup>

Pernyataan bahwa PKI anti imperialisme dan anti kolonialisme, sebenarnya Presiden Soekarno dengan sengaja melupakan fakta sejarah. Walaupun pidatonya menyebutkan Jasmerah – Jangan Sekali-kali melupakan sejarah. Tidakkah PKI Sibar pimpinan Sardjono dari Australia, bekerja sama dengan penjajah Kerajaan Protestan Belanda dan Sekoetoe? Dari Australia, PKI Sibar mencaci maki Soekarno Hatta sebagai kolaborator Fasisme Djepang.

Pada saat Proklamasi, PKI Sibar pimpinan Sardjono tidak membenarkan Indonesia Merdeka tanpa kerja sama dengan Kerajaan Protestan Belanda. Sekaligus Presiden Soekarno lupa pernyataannya sendiri pada saat PKI Amir Moeso melakukan Kudeta di Madiun, 19 September 1948, bahwa PKI teroris, dan Kudeta PKI sebagai tindakan menikam Republik Indonesia dari belakang yang sedang melawan Agresi Militer Belanda.

Demi melupakan sejarah, pimpinan PKI melalui Front Nasional mengadakan

---

19 Apabila menurut Presiden Soekarno, Marhenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, besar kemungkinannya Marhenisme merupakan akronim dari Mar-Marxis, He-Hegel, En-Engel dan isme. Perlu penelitian.

aksi pemberian gelar kepada Presiden. Presiden Soekarno memasuki 1961 Menerima gelar serba agung. Pada 1 Januari 1961, memperoleh gelar Pemimpin Besar Revolusi, selain sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Pada 20 Januari 1961, diangkat pula sebagai Pemimpin Agung Front Nasional. Selain itu, Presiden Soekarno juga memperoleh *Lenin Peace Prize*, dinilai sebagai salah seorang tokoh pemimpin kemerdekaan Asia dan pejuang keras dalam menegakkan kemerdekaan serta memperkuat perdamaian dunia, untuk mengakhiri kekuatan imperialisme dan kapalisme Barat.

## Pemanfaatan Kekuatan Barat dan Timur

Presiden Soekarno tidak hanya ingin dekat dengan PKI tetapi juga ingin dekat dengan negara-negara komunis. Dibukalah hubungan diplomatik dengan RRC, Rusia, Vietnam, Yugoslavia dan Kuba. Namun, dalam hubungan diplomatik ini, di satu pihak Presiden Soekarno seperti menampakkan dekat dengan Blok Timur: RRC, Rusia, dan Vietnam. Di lain pihak, Presiden Soekarno berjuang menciptakan Indonesia sebagai pengambil inisiatif lahirnya Negara-negara Non Blok.

Ketika Presiden Soekarno membangun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Soekarno-Hatta pernah disebut oleh Unisoviet Rusia dan PKI, sebagai *the agents of American imperialism - agen imperialis Amerika Serikat dan Parasites of the People - benalu rakyat*.

Presiden Soekarno juga berusaha mengenalkan ideologi Pancasila di negara-negara komunis. Di China, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila, Tri Silanya berasal San Min Chu I dari Sun Yat Sen. Pidato Presiden Soekarno di RRC ini bertujuan agar terjadi kesinambungan hubungan diplomatik yang harmonis antara Indonesia-RRC.

Presiden Soekarno memahami bahwa China di bidang ekonomi pemimpinan di Indonesia sangat dominan. Demi untuk membatasi pengaruhnya, dikeluarkanlah PP 10/1959, pengusaha China di Indonesia tidak diperkenankan memiliki hak milik tanah dan wilayah usahanya hanya diperkenankan di ibu kota Provinsi. Tidak diperkenankan pula adanya koran atau media cetak lainnya yang menggunakan Huruf China dan Bahasa Mandarin.

Kemudian, pedagang China dari Kecamatan hingga Kabupaten dan Keresidenan,

dialihkan ke Provinsi. Di samping itu, dibenahi juga ketentuan hak dan kewajiban orang China yang memiliki Dwi Kewarganegaraan pada saat kedatangan Deputi Perdana Menteri Ch'en Yi.

Di sisi lain, Presiden Soekarno dalam upayanya menciptakan pembauran antara etnis China dengan Pribumi, melahirkan kebijakan yang bertujuan mengurangi perasaan one Chinese forever Chinese - sekali Chinatetap China, milarang penggunaan huruf China untuk penulisan penamaan toko, tempat usaha niaga lainnya.

Presiden Soekarno juga memahami adanya ketidaksamaan strategi pengembangan komunis di dunia antara Khrushchev atau Chrustjov dengan Mao Ze Dong atau Mao Che Tung. Guna memperlilhatkan Politik Bebas Aktif dalam menghadapi negara-negara komunis maka dipilih pembelian senjata dari Rusia dan Cheko. Kemudian, Khrushchev diundang pula datang ke Indonesia, Februari 1960. Sementara itu, untuk Duta Indonesia di Rusia, bukan dari pimpinan PKI, melainkan diangkat Adam Malik dari kelompok komunis nasional Tan Malaka atau Partai Murba.

Presiden Soekarno memahami bahwa Ho Chi Minh dari Vietnam berpihak pada Unisoviet Rusia. Oleh karena itu, diundang ke Indonesia. Pada saat kedatangan Ho Chi Minh, D.N.Audit pergi ke RRC karena pro China.

Di tengah konflik antarnegara komunis China dengan Rusia, dan Blok Barat Kapitalis Amerika Serikat dengan Blok Timur Komunis Rusia dalam Perang Dingin, Indonesia mengambil inisiatif mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Non Blok. Dari konferensi Beogard, Yugoslavia, 6 September 1961 yang dihadiri oleh: Afghanistan, India, Indonesia, Republik Arab Persatuan Mesir, dan Yugoslavia, diputuskan dalam menghadapi Perang Dingin, negara-negara berkembang tidak terseret dalam kedua blok: baik Blok Barat ataupun Blok Timur. Di samping itu, juga diputuskan agar tetap bersatu, dan agar berpengaruh dalam percaturan politik dunia.

Dalam kenyataan sejarah, negara-negara komunis juga terlibat dalam Perang Dingin, antarsesama komunis. Tidak mengira Khrushchev menghendaki pengembangan komunis dengan cara kerja sama dalam suasana perdamaian. Pandangan Khrushchev itu, ditentang oleh Mao Ze Dong menginginkan pengembangan komunisme dengan perang.

Agar pandangan Khrushchev berjalan di Rusia maka dibangkitkan gerakan meniadakan ajaran Stalin tentang pengembangan komunisme melalui perang. Gerakan tersebut disebut pula sebagai Destalinisasi. Dari fakta perjalanan sejarah ini, suatu ajaran ideologi tidak pernah sunyi dari perbedaan penafsirannya dan akhirnya mendatangkan perpecahan antarsesama penganut ajaran komunisme. Unisoviet Rusia, Vietnam, Kuba dengan RRC dan Korea Utara.

Demikian besarnya perhatian Presiden Soekarno terhadap negara-negara komunis. Namun, kurang waspada terhadap PKI D.N. Aidit dengan segenap sanjungan dan gelar yang diberikan kepada Presiden Soekarno. Ketika setiap organisasi dalam upayanya mendekatkan diri kepada Presiden Soekarno dengan memberikan gelar keagungannya, Presiden Soekarno mengingatkan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak luput dari tindakan yang salah.



Sumber: Sinar Pelangi

Letnan Djenderal Achmad Jani, Menteri/Panglima AD/ Ka Staf Koti Presiden, PBR, Panglima Tertinggi Soekarno, Pangdam VI Siliwangi, Major Djenderal Ibrahim Adjie Langkah kesatuan sejarahnya terpisahkan akibat G 30 S/PKI.

Disebutnya beberapa nama pemimpin dunia yang juga tidak dapat melepaskan dirinya dari kesalahan. Kecuali Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin dunia akhirat yang dimaksim dari kesalahan. Diingatkan pula, Pancasila bukan agama. Pancasila hanya ideologi bangsa dan negara. Pemakluman Presiden Soekarno tentang dirinya dan Pancasila itu karena ada sebagian kelompok organisasi, mencoba akan mengangkat Presiden Soekarno sebagai "Nabi agama Pancasila".

Sebaliknya, terdapat pula upaya pemberian gelar pemujaan dan keagungan, bertujuan pula "pembusukan nama baik Presiden Soekarno". Siapa perancangnya dan apa targetnya?

Target terselubung, PKI akan memproklamasikan dirinya sebagai the vanguard of Indonesia's democratic forces in the struggle for liberties and representative government - garda kekuatan demokrasi di dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan dan penegak pemerintahan yang representatif. Caranya dengan kudeta.

Kedekatan PKI terhadap Presiden Soekarno melahirkan pernyataan Presiden Soekarno agar segenap pimpinan partai politik tidak dihinggapi penyakit Communismophobia. Para Ulama memberikan tafsiran berbeda, memang Ulama tidak takut kepada PKI. Para Ulama dan Santri siap menjawab segenap tantangan PKI dan organisasi bawahannya. Dibahasakan dengan Fastabiqul Khairat - berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menegakkan ajaran agama dan bela negara.

## **Kegagalan Konsep Kabinet Kaki Empat**

Seumla, Presiden Soekarno ingin menciptakan Kabinet Kaki Empat, PNI, Masjumi, NU dan PKI seperti Empat Besar yang memperoleh kemenangan dalam Pemilu 1955. Namun, Konsepsi Presiden itu gagal, akibat ditolak oleh Masjumi. Dalam kelanjutan sejarah, Konsepsi Presiden melahirkan Demokrasi Terpimpin sebagai demokrasi tanpa oposisi, dan di dalamnya terdapat empat kekuatan yang saling beda kepentingan dan wawasannya: ABRI, NU, PKI, dan Murba.

Dari empat kekuatan tersebut, terbaca penciptaan sistem balance of power antara dua kekuatan, antara kekuatan bersenjata ABRI diimbangi dengan kekuatan partai politik, NU, PKI, dan Murba. Antara kekuatan partai politik terbagi dalam dua kekuatan agama NU dan komunis PKI, Partai Murba. Demikian pula antar kekuatan komunis sendiri terimbangi, antara komunis internasional PKI dengan komunis nasional Partai Murba.

Di kalangan Nahdliyin, timbul dua pendapat pro dan kontra menjelang dibentuknya DPR GR, 24 Juni 1960, dan MPRS, 15 Agustus 1960. Menurut Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor dari kalangan Nahdliyin yang kontra adalah K.H. Bishri Sjamsoeri, K.H. M. Dachlan, Mr. Imron Rosjadi dan K.H. Achmad Siddik.

Sebaliknya, yang pro adalah K.H. Wahab Chasboellah, K.H. Maskoer, K.H. Idham Cholid, Zainoel Arifin, Saifoeddin Zoehri, dan K.H. Sjaichoe, alasannya kalau berada di luar justru tidak bisa melakukan kontrol dan amar ma'ruf nahi munkar. Apa alasan berikutnya?

Dijelaskan lebih lanjut, oposisi di luar lembaga, jelas tidak mungkin, dan dicap reaksioner dan dibubarkan. Lebih baik masuk dulu, lalu memanggil Dewan Partai bersidang. Kalau Dewan Partai memutuskan setuju masuk, Nahdlatul Ulama sudah di dalam. Namun sebaliknya, jika Dewan Partai tidak setuju, apa susahnya menarik keluar?

Gerakan Partai NU dalam mengimbangi gerakan *jor-joran* PKI, dijelaskan oleh K.H. Saifoeddin Zohri tidak melupakan korban terbesar dampak dari Kudeta PKI di Madiun pada 19 September 1948 adalah para Ulama, Kiai, dan Santri dari warga Nahdliyin.

Oleh karena itu, digariskan perjuangan perlawan NU terhadap PKI dilancarkan di semua lini. Apabila PKI menggerakkan massanya, NU membangkitkan Ansor dan Bansernya. Apabila PKI menggerakkan Lekra, NU menjawab dengan Lesbuminya. Apabila PKI menyanyikan Lagu Genjer-genjer, NU mengobarkan Salawat Badar kecuali jika PKI ingin kudeta. Ulama tetap mempertahankan NKRI.

## Konsep PKI Setan Desa dan Setan Kota

Untuk mempersiapkan kudeta, PKI melancarkan taktik *scapegoating* - pengkambing hitaman terhadap *the establishment* - golongan mapan. Mereka sebut sebagai kelompok setan desa dan setan kota. Para kiai dan haji serta Ulama yang memiliki sawah dan ladang merekajadikan sasaran untuk melaksanakan *land reform*.

Para Kiai dan Ulama desa dijadikan sarana *scapegoating* oleh BTI. Dengan cara itu, menumbuhkan *sense of community* - rasa kebersamaannya di antara organisasi-organisasi di bawah PKI karena apabila kelompok dalam - *in group* sudah dihinggapi rasa *dislike* - tidak menyukai kelompok luarnya - *out group* maka mereka akan dengan mudah mengadakan *rumor* - kerusuhan terhadap lawannya.

Di bawah kondisi konflik dan kerusuhan ini, menurut Gottschalk akan menumbuhkan *mutual awareness* - kesadaran bersama dan dijadikan sebagai *symbols of inclusiveness* - simbol kelompok senasib. Di antara sesama pengurus organisasi di bawah PKI dalam menumbuhkan rasa senasib - *inclusiveness*, selalu memanggilkan sesamanya dengan panggilan *comrade* - kawan.

Dari sini dikembangkan tumbuhnya *solidified public opinion* - solidaritas pendapat umum di antara kelompok organisasi di bawah PKI. Berangkat dari *feeling of belonging* - rasa saling memiliki, ditumbuhkan rasa *feeling of cohesion* - rasa keterpaduan dan *group worthiness* - rasa saling menghargai sesama kelompok dalam

- in group. Rasa ini akan terbentuk apabila seluruh organisasi mantel PKI, memiliki kesamaan lawan - common enemy.

Kemudian, dibenturkan dengan kelompok luar dengan aksi sepihak. Dengan cara BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, memberanikan diri mengklaim tanah milik Perusahaan Perkebunan Negara - PPN di Kediri, 1961 M, untuk dibagi di antara mereka. Aksi sepihak ini disebut sebagai Peristiwa Jengkol, November 1961.



Sumber: Doc. Pribadi

## PERTEMUAN PERSIAPAN AFRIKA ASIA ISLAMIC CONFERENCE 6-14 Juni 1964 JAKARTA

Terlihat di sebelah kiri tertulis Pantjasila

Di sebelah kanan teks dan penandatangan Piagam Djakarta

Mengapa nama konferensinya tidak Asia Africa Conference  
melainkan AFRICA ASIA CONFERENCE? Sangat berbeda dengan  
17 Konferensi Asia Afrika lainnya? Apakah karena pengaruh komunis  
tidak ada di dalamnya?

Latihan melakukan tuntutan disertai dengan kekerasan - violence dalam conflict theory, memang dibuat dengan sengaja oleh pimpinan PKI sebagai perpetrator - dalam kerusuhan. Ditumbuhkan self assertion - dalam mengekspresi tuntutan diyakini benar menurut pendapatnya.

Para santri Pesantren Lirboyo, Banser dan Ansor, melakukan perlawanan terhadap Aksi Sepihak BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani yang terdiri dari sekitar 3.000 orang. Pada waktu itu, umumnya tumbuh rasa takut dalam menghadapi demo kekuatan dari orang-orang PKI. Tidaklah demikian halnya dengan sikap Ulama dan Santri, dihadapinya dengan rasa tawakal dan dilawannya secara fisik. Banser, Ansor di bawah pimpinan Kiai, tidak ada rasa takut atau gentar terhadap BTI, Pemuda Rakyat atau PKI.

Akibat Aksi Sepihak PKI mendatangkan korban, menjadikan Komandan Resimen 16 Letnan Kolonel Soekartijo, membukukan PKI, BTI, Gerwani dan Pemuda Rakyat setempat. Kegagalan ini dieksplorasi untuk menumbuhkan rasa *discontent* - rasa ketidakpuasan. Dengan rasa ketidakpuasan, mereka akan lebih sadar jadi *different* - beda dengan kelompok luar - *out group*, yakni Islam dan TNI. Dari rasa ketidakpuasan dan merasa beda, akan diubahnya menjadi gerakan *anti Islam* dan *anti militerisme*.

## Infiltrasi dan Demoralisasi Militer

Menurut Stefan T. Possony, dalam *A Century of Conflict*, menjelaskan *anti militerisme* tidaklah sejalan artinya dengan gerakan *pasifism* - perdamaian yang dipropagandakan oleh komunis. Militer dalam pandangan komunis, dinilai sebagai *the army is the most powerful instrument of class oppression* - militer sebagai instrumen yang sangat kuat yang dimiliki oleh kelas penguasa.

Oleh karena itu, upaya kudeta komunis selalu gagal, apabila komunis belum berhasil melakukan *infiltrasi* dalam organisasi militer. Revolusi tidak akan menjadi gerakan massa apabila tanpa ada campur tangan militer di dalamnya. Untuk menarik tentara resmi bergabung kepada kelompok revolucioner komunis, di kalangan penjabat militer diciptakan kondisi *demoralization* - demoralisasi.

*Demoralization* dalam bahasa Jerman diistilahkan dengan *Zersetzung* artinya menjadikan organisasi militer pecah berantakan atau *dekomposisi*. Terbagi dalam dua cara: Pertama, *Zersetzung Aparat* - memecah belah aparat militer. Kedua, *Terror Apparat* - memecah belah dengan melalui teror. Kedua-duannya *Z* and *T* Apparat merupakan *powerful combination* - kombinasi yang sangat ampuh dalam upaya mengubah tentara resmi berpihak kepada gerakan revolusi komunis. Mengapa kudeta komunis perlu kesertaan tentara?

Dalam realitas sejarah, tidak ada suatu revolusi dari golongan manapun, tanpa dipimpin oleh kalangan *intelektual* dan *militer*. Hampir tidak ada pemberontakan petani atau gerakan revolusi di tingkat desa sekalipun, dipimpin oleh petani - *almost no peasant war or rural revolutionary movements have been led by peasants*.



Sumber: Doc. Pribadi

**PEMBUKAAN  
AFRICA ASIA ISLAMIC CONFERENCE  
6-15 Maret 1965  
BANDUNG**

Namanya tetap sama dengan AFRICA ASIA  
seperti dalam Persiapan Pertemuan AAIC 6-14 June 1964  
di Jakarta, bukan ASIA AFRICA  
Di sebelah kiri bertuliskan Pancasila di sebelah kanan Piagam Jakarta.

KIAA atau AAIC  
sebagai imbalan persiapan Ulang Tahun Dasa Warna 1955-1965 Konferensi Asia Afrika II  
yang akan diselenggarakan di Aljazair Afrika Utara Juni 1965

Dengan tujuan utamanya membangkitkan kesadaran umat Islam  
di benua Afrika agar mempunyai kesamaan kesadaran  
anti imperialisnya dengan umat Islam Asia.

Dengan kata lain, menurut Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel, pimpinan revolusi jarang sekali terlahir dari kelas terbawah - seldom emerge from the lowest classes. Gerakan revolusi munculnya higher classes - kelompok atas berpartisipasi di dalamnya. Misalnya Mao Ze Dong pernah mendapat pelatihan militer dan pelatihan pengorganisasian sebelum memimpin Revolusi China.

## Aksi Teror PKI terhadap Mental Training PII

Teori komunis itu diperlakukan oleh PKI dengan organisasi bawahnya Sobsi, Gerwani, BTI, dan Pemuda Rakyat. Gerakan anti militerisme diwujudkan dalam gerakan melawan personil tentaranya di Indramayu dan Bandar Betsi Sumatra Utara. Untuk membalas kekalahan dari Peristiwa Jengkol Kediri November 1961, dilanjut dengan melancarkan teror terhadap Pelajar Islam Indonesia - PII yang sedang menyelenggarakan Mental Training, di desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Menurut Djayadi Hanan dalam *Cerakan Pelajar Islam, Di Bawah Bayang-Bayang Negara, Peristiwa Kanigoro* ini terjadi pada waktu subuh 9 Ramadhan 1365, Rabu Kliwon, 13 Januari 1965, ribuan Pemuda Rakyat, BTI, memaksa PII bersama santri serta kiai, keluar dari masjid. Kemudian masjid dirusak dan Al-Quran diinjak-injak. Sambil kelompok teroris tersebut meneriakkan kata ancaman: "Bunuh! Ganyang! Hidup PKI! Ganyang Malaysia! Gorok Balas Madiun!" Selain itu juga diteriakkan, "Ganyang Sorban, Ganyang Santri, Ganyang Nekolim!" Dari teriakan ini memberikan gambaran siapa yang dikambinghitamkan – scapegoating oleh PKI. Dapat dipastikan targetnya adalah Ulama dan Santri.

Gerakan penyerangan ini, menurut Anis Abiyoso, digerakkan oleh Nyoto dari Central Committee PKI. Sekali lagi, tidak mungkin terjadi pemberontakan petani desa dipimpin oleh petani desa - *almost no peasants war or rural revolutionary have been led by peasants*. Selain itu, sehari sesudah Peristiwa Kanigoro, pada 14 Januari 1965, Central Committee PKI Ajit mengusulkan 15 Juta massa Tani dan Buruh Dipersenjatai kepada Presiden Soekarno di Istana Negara.

Diberitakan lebih lanjut, dengan dipersenjatainya BTI dan Sobsi akan dibentuk Angkatan Ke-5 dalam menandingi ABRI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi, yang memperoleh senjata pembelian dari Rusia. Adapun senjata untuk Angkatan Ke-5 diperoleh secara cuma-cuma dari Perdana Menteri RRC Chu En Lai, sebanyak 100.000 pucuk senjata. Menurut Soeharto, dalam *Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, menjelaskan bahwa seluruh Angkatan menolak pembentukan Angkatan Ke-5. Kecuali pimpinan AURI, Oemar Dhani menyetujuinya.

Menghadapi kenyataan ini, para Ulama dan Santri, tidak mungkin memperoleh senjata sebanyak yang dimiliki oleh PKI. Negara-negara Arab dan Timur Tengah yang sedang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris, tidak mungkin mau membantu mempersenjatai Ulama dan Santri, untuk menghadapi PKI yang akan dipersenjatai oleh RRC. Amerika Serikat khawatir targetnya berbalik untuk melawan Inggris dan kekuatan Nekolim lainnya.



Sumber: Doc. Pribadi

### K.H. ACHMAD SJAICHU

Sekretaris Organizing Committee  
Konferensi Islam Afrika Asia

### DR. K.H. IDHAM CHALID

Ketua Organizing Committee  
Konferensi Islam Afrika Asia

Menurut Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor, menghadapi gerakan teror Pemuda Rakyat dan BTI yang bersenjata, segera diturunkan delapan truk Pemuda Ansor dan Banser yang telah dilatih ilmu kekebalan untuk menyelamatkan Kiai dan Santri serta umat Islam pada umumnya. Cara yang dipilih oleh Ansor dan Banser dengan menumbuhkan self confidence - percaya diri melalui ilmu kekebalan, menjadikan BTI, Pemuda Rakyat, walaupun dikabarkan memiliki senjata dari RRC, benar-benar ketakutan.

Peristiwa Kanigoro dengan Aksi Teror dalam pandangan PKI sebagai Kredit Aksi dan proses mencapai tujuan puncaknya kudeta. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Presiden Soekarno ketika terjadi Kudeta PKI di Madiun bahwa PKI melancarkan aksi teror. Mengapa harus menempuh cara ini?

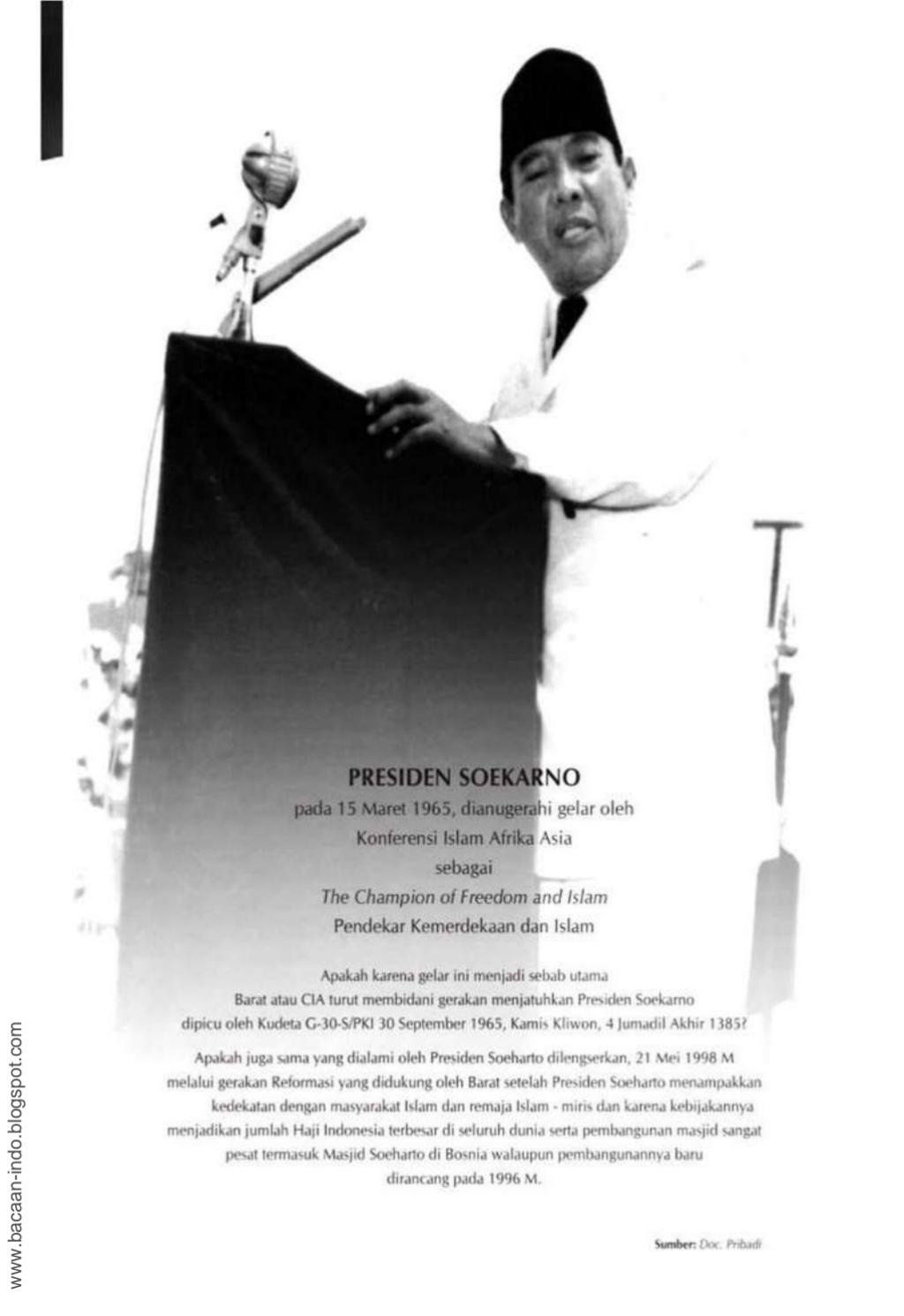
Menurut Kropotkin dampak dari Aksi Teror bila telah meluas akan menjadikan massa rakyat kehilangan orientasinya dan cemas - mass disorientatation and anxiety. Dari situasi rakyat yang dipenuhi rasa takut maka PKI akan tampil sebagai "pahlawan pembela buruh dan tani" atau rakyat pada umumnya.



**PJM Presiden SOEKARNO Dan Ibu Negara FATMAWATI**

Memasuki Gedung Merdeka KAA

Sumber: Tempo - Edisi Khusus HUT Ke 60 KAA



## PRESIDEN SOEKARNO

pada 15 Maret 1965, dianugerahi gelar oleh

Konferensi Islam Afrika Asia

sebagai

*The Champion of Freedom and Islam*

Pendekar Kemerdekaan dan Islam

Apakah karena gelar ini menjadi sebab utama

Barat atau CIA turut membidani gerakan menjatuhkan Presiden Soekarno

dipicu oleh Kudeta G-30-S/PKI 30 September 1965, Kamis Kliwon, 4 Jumadil Akhir 1385?

Apakah juga sama yang dialami oleh Presiden Soeharto dilengserkan, 21 Mei 1998 M melalui gerakan Reformasi yang didukung oleh Barat setelah Presiden Soeharto menampakkan

kedekatan dengan masyarakat Islam dan remaja Islam - miris dan karena kebijakannya menjadikan jumlah Haji Indonesia terbesar di seluruh dunia serta pembangunan masjid sangat pesat termasuk Masjid Soeharto di Bosnia walaupun pembangunannya baru dirancang pada 1996 M.

Mengapa Mental Training PII dijadikan target *political violence* dari PKI. Tidak lain, pada 23-25 Agustus 1963, PB PII dibawah pimpinan Ketua Umum, Ahmad Djauwaeni, mengadakan diskusi terbatas. Kesimpulannya rezim Demokrasi Terpimpin di bawah cengkeraman komunis. Untuk menghadapinya dibentuk Brigade PII dan kerja sama dengan perwira Angkatan Darat yang anti komunis.

## Konferensi Islam Afrika Asia

Dalam menanggapi semakin terbukanya aksi sepihak PKI dan semakin jelasnya dukungan Unisoviet dan RRC terhadap PKI, para Ulama mencoba menandinginya dengan mengadakan Konferensi Islam Afrika Asia, 4-11 Dzulqaiddah 1384/8-15 Maret 1965 di Bandung. Diharapkan timbulnya solidaritas Islam Afrika Asia agar Islam Indonesia terselamatkan dari bencana imperialisme dan penindasan komunisme.

Selain itu, melalui Konferensi Islam Afrika Asia, diangkatlah Presiden Soekarno sebagai *the Champion of Freedom and Islam* - Pendekar Kemerdekaan dan Islam. Dari kebijakan Presiden Soekarno, diadakannya Konferensi Islam Afrika Asia, bertujuan menggalang kesatuan Islam Afrika Asia dalam menghadapi imperialis Barat. Sekaligus dengan gelar tersebut, bertujuan secara politis untuk membantah tuduhan bahwa dirinya PKI. Melainkan sebagai Muslim.

Kemusliman Presiden Soekarno, juga diperlihatkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah, Sutjipto SH, Brigadir Djendral TNI, dan Sekretaris Senat, Drs. H. Sadad Sisowidjojo, menganugerahkan kepada Dr. Ir. Soekarno, gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Falsafah Ilmu Tauhid, pada 5 Rabi'ul Akhir 1385, 3 Agustus 1965, di Djakarta.

Perlu diperhatikan, mengapa ketika Konferensi Islam berubah menjadi Afrika Asia. Tidak seperti Konferensi Asia Afrika. Apakah hal ini diakibatkan kondisi negara-negara Timur Tengah di bawah pengaruh Amerika dan Inggris, tidak bersedia bergabung dalam Konferensi Islam Afrika Asia yang dituduh berhaluan kiri? Sementara benua Afrika yang telah banyak umat Islamnya, dan banyak negaranya yang belum merdeka, dengan penamaan Afrika Asia, dengan mengedepankan Afrika agar bersedia bergabung dalam gerakan negara-negara Asia. Oleh karena itu, lebih diutamakan menjadi Konferensi Islam Afrika Asia daripada Konferensi Islam Asia Afrika.



Menteri Agama RI Saifuddin Zuhri  
Menyambut Wakil Libanon



Peserta Konferensi Islam Afrika Asia

KONFERENSI ISLAM AFRIKA ASIA  
8 - 15 Maret 1965 di Gedung Merdeka, Bandung  
(Gedung Concordia, tempat National Congress Central Syarikat Islam, 15 - 24 Juni 1916)  
(Baca AP SEJARAH Jilid Kedua)

Secara politis, maksudnya Konferensi Islam Asia Afrika, tidak akan mendapat dukungan dari negara-negara komunis di Asia, terutama RRC karena Islam akan mengancam eksistensi ideologi komunisme. Menurut penulis, strategi dasar perubahan nama konferensi ini, Konferensi Islam Afrika Asia, agar KIAA menjadi pendukung dan pengimbang, rencana Ulang Tahun Ke-10 Konferensi Asia Afrika - KAA yang akan diselenggarakan di Aljazair, Afrika Utara.

## Selubung Politik Presiden Soekarno

Louis Fisher dalam *The Story of Indonesia* menuturkan tentang Presiden Soekarno digambarkan sebagai seorang pemain judi yang menekankan kartunya di dadanya sehingga lawan pemain judinya tidak mengetahui kartu apa yang dipegang oleh Presiden Soekarno. Dituturkan pula Presiden Soekarno sebagai "pawang politik", membiarkan binatang-binatang buas berada di dekatnya.

Maksud penggambaran itu, pikiran politik Presiden Soekarno tidak mudah untuk diduga. Dituduh pendukung Blok Timur Komunis, tetapi Presiden Soekarno membangun Non Blok dan Konferensi Islam Afrika Asia mengangkatnya sebagai *the Champion of Freedom and Islam* – Pendekar Kemerdekaan dan Islam.

Demikian pula Presiden Soekarno menampilkan dirinya dekat dengan D.N. Aidit padahal PKI selalu siap akan melancarkan kudeta menumbangkan dirinya. Presiden Soekarno seperti pawang politik yang dapat menjinakkan lawan politiknya. Kecuali lawannya yang bersikap terbuka dan jujur, Masjumi dan PSI, justru ditangkap dan dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer di Madiun.

Presiden Soekarno menyatakan dirinya semakin lama semakin cinta Muhammadiyah. Namun, Presiden Soekarno sangat dekat pula dengan Ulama Tasawuf serta Ulama dari Nahdlatul Ulama.

Presiden Soekarno dekat dengan Dr. Leimena dari Parkindo tetapi juga dekat dengan I.J. Kasimo dari Partai Katolik. Tidak dapat diragukan lagi, kedekatan Presiden Soekarno dengan Pedanda Hindu Bali.

Selain itu, Presiden Soekarno berani mengangkat pimpinan PKI menempati posisi yang strategis, Front Nasional dan pimpinan MPRS. Demikian pula Samaoen pendiri PKI, 23 Mei 1920 di Semarang, setelah kembali dari Rusia, 1956 M, diangkat sebagai Penasihat Demokrasi Terpimpin. Dengan cara ini, benarkah Presiden Soekarno berhasil menjinakkan pimpinan PKI di bawah payung Demokrasi Terpimpin apabila realitasnya melancarkan Kudeta G-30-S/PKI?

## Front Anti Komunis

Kembali ke masalah sikap umat Islam terhadap PKI. Jauh sebelum Konferensi Islam Afrika Asia - KIAA ini pada 12 September 1954, Ahad Wage, 14 Muharram 1374, sebelum Pemilu 1955, di Kantor DPD Masjumi Jawa Barat, Jalan Pungkur Bandung<sup>20</sup>, atas prakarsa K.H. M. Rusyad Nurdin, menuturkan kepada penulis, untuk menghadapi dihidupkannya kembali PKI setelah Kudeta PKI di Madiun, Partai Islam Indonesia Masjumi merasa perlu membentuk Front Anti Komunis - FAK.

Prakarsa K.H. M. Rusad Nurdin ini mendapat dukungan dari Ulama Madjelis Sjura Masjumi Jawa Barat dalam konferensinya 23-24 Oktober 1954, Sabtu Kliwon - Ahad Legi, 2526 Safar 1374, diputuskan Front Anti Komunis - FAK agar dikembangkan di seluruh Indonesia. Berikutnya, Front Anti Komunis pindah ke Jakarta yang dipimpin oleh K.H. M. Rusyad Nurdin, beralih dipimpin oleh K.H. M. Isa Anshary. Dalam hubungan keluarga, K.H. Isa Anshary sebagai paman D.N. Aidit.

Menurut Drs. Ii Baihaqi Mustafa, Ak. M.M. dalam K.H. M. Rusyad Nurdin, Ulama, Pejuang, Politikus, Pemimpin Demokrat, Pendidik, dan Pendakwah, menjelaskan tujuan pembentukan Front Anti Komunis sebagai jawaban Partai Islam Indonesia Masjumi terhadap PKI partai politik yang anti Tuhan dan anti agama, serta menentang Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan Front Anti Komunis – FAK sebenarnya sebagai peringatan bagi yang lupa, betapa bahayanya ajaran Marxism dan Leninisme terhadap demokrasi Indonesia, serta ideologi Pancasila dan UUD 1945. Namun, peringatan Partai Islam Indonesia Masjumi justru dijawab oleh Konsepsi Presiden Soekarno, 21 Februari 1957, Kabinet Kaki Empat. Setelah Dekrit Presiden memberikan kesempatan kepada PKI untuk menghidupkan Front Nasional, 31 Desember 1959, seperti yang pernah dibangun oleh PKI pada masa Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

---

20 Sebuah rumah wakaf dari Tn. Hamid sahabat dekat Tn. A. Hassan dan Mohammad Natsir. Rumah tersebut semula difungsikan sebagai Kantor DPD Masjumi dan GPII. Setelah Partai Islam Indonesia Masjumi dibubarkan menjadi Kantor DPD Parmusi. Setelah Parmusi ditiadakan, berubah menjadi Kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia - DDII. Setelah Reformasi menjadi Kantor DPD Partai Bulan Bintang. Ketika terdengar berita, rumah tersebut akan dijual dijadikan toko, terjadilah protes keras dari keluarga Tn. Hamid. Diingatkan diwakafkan untuk kepentingan sosial Islam, bukan kepentingan bisnis. Protes keras tersebut membatalkan niat penjualan.

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Setahun kemudian, setelah Dekrit Presiden, pada 17 Agustus 1960, Rabu Kliwon, 24 Safar 1380, Presiden Soekarno didampingi Pengusa Perang Tertinggi Djenderal Abdul Haris Nasution, membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia. Diikuti dengan penangkapan pimpinan Front Anti Komunis dan pimpinan utama kedua partai politik tersebut, serta pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, untuk dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer Malang dan Madiun.

Dampak penangkapan para Ulama itu hanya dalam waktu lima tahun, Djenderal Abdul Haris Nasution, menyaksikan secara langsung bahwa dirinya dijadikan target sasaran Kudeta Gerakan 30 September PKI dan TNI kehilangan perwira terbaiknya.



*Sumber: Doc. Pribadi*

### K.H. ISA ANSHARY dan MOHAMMAD NATSIR

K.H. Isa Anshary adalah Ketua Front Anti Komunis yang menentang ideologi komunis yang diperjuangkan keponakananya sendiri, D.N. Aidit. Tampak dalam gambar, K.H. Isa Anshary (kiri) bersama Mohammad Natsir (kanan) di antara para pemuda anggota dan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia - G.P.I.I di Lapang Tegallega Bandung.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## PRESIDEN SOEKARNO DAN D.N. AIDIT, KETUA PKI

Ir. Soekarno, menulis artikel, berhubungan dengan tulisan Ir. A. Baars, di Suluh Indonesia Muda, 1928 M, tentang peringatan Ir. A. Baars sebagai salah seorang kawan Sneevliet, penyebar benih Marxisme di Indonesia, yang berbalik menentang komunisme.

Dituliskan setelah Ir. A. Baars dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia lagi, Ir. A. Baars bekerja lama di Rusia. Tetapi berubahlah pandangannya terhadap komunisme, menjadi berbalik menentang komunisme. Sikap penentangan ini dituliskan dalam surat kabar, S.I.D. de Preangerbode dan Surabajaasch Handelsblad.

Diingatkan berkali-kali, antara lain,  
djanganhlah kita mendekati komunisme itu.

Apa jang dialaminja, di Rusia hanjalah kekalutan dan kesengsaraan sahaja.

Andaikata Presiden Soekarno membenarkan peringatan Ir. A. Baars di atas, mungkinkah Presiden Soekarno mau menerima rangkulian D.N. Aidit PKI yang akan menjatuhkannya dan membusukkan kebesaran namanya.

Apabila dijauhinya PKI, dan mendekati kembali Ulama sebagaimana sebelum dan sesudah Proklamasi, jalan sejarah Presiden Soekarno dan bangsa Indonesia akan selalu memperoleh rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

## Konfrontasi Indonesia Malaysia dan Kudeta PKI

Kelanjutan kedekatan Presiden Soekarno dengan Aidit PKI melahirkan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Mengapa, padahal masalah Irian Barat telah teratasi, kemudian membuka konfrontasi dengan saudara serumpun Melayu? Menurut program komunis, *war is the road to communist revolution* - perang adalah jalan menuju revolusi komunis. RRC juga tidak menyetujui pembentukan *Maphilindo* - Malaysia, Philipina, Indonesia yang dirasakan akan menghadang perkembangan RRC. Oleh karena itu, lebih setuju Konfrontasi dengan Malaysia dilanjutkan.

Menurut Stefan T. Possony dalam *A Century of Conflict*, menyatakan bahwa komunis mempunyai strategi yang disebut *vulture strategy* artinya strategi seperti *a person who seeks benefit or profit from the troubles or sufferings of others* - orang yang mencari keuntungan atau laba dari kesulitan atau penderitaan orang lain. Dengan kata lain, mengail di air keruh. Mengapa dan bagaimana?

Tidakkah Revolusi Oktober 1917 dilakukan pada saat Tsar Nicolas II Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, 1914-1919 M. Tidakkah Komunis Perancis melancarkan revolusinya di tengah Perancis menghadapi kesulitan dalam Perang Dunia II, berupaya menumbangkan pemerintahan Vichy buatan Jerman. Tidakkah RRC berhasil dibangun, sejak pemerintahan Chiang Kai Shek mengalami kesulitan dalam Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M?

Bertolak dari pengalaman sejarah ini, PKI akan memanfaatkan kekeruhan situasi Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan akan dimanfaatkan seperti saat Indonesia menghadapi Agresi Belanda Pertama, 21 Juli 1947, kemudian digunakan untuk menikam Republik Indonesia dari belakang, dengan melancarkan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Terbukti saat berlangsungnya Dwi Komando Rakyat - Dwikora, dengan dibentuknya Komando Mandala Siaga, pada 16 Mei 1964, di bawah Komando Men/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani, dimanfaatkan mengubah Jakarta sebagai "ibu kota komunis". Diiasi dengan gambar Karl Marx, Lenin, Stalin serta bendera Palu Arit, pada ulang tahun ke-45, hari jadi PKI 23 Mei 1920-1965 sehingga lenyaplah kesan di Bandung atau Jakarta, pernah ada Konferensi Islam Afrika Asia 8-15 Maret 1965 yang dipimpin oleh K.H. Idham Chalid dan K.H. Achmad Syaichu. Demikian pula seluruh kota besar di Pulau Jawa, dipenuhi poster, spandoek, nasaKOM, dituliskan KOM lebih besar daripada nasa.

Apa yang diperoleh dengan kedekatan PKI dengan Men/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani, dapat dilihat nantinya ketika terjadi penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya. Kedekatan PKI merupakan tahapan the military preparation - persiapan militer dalam menjalankan tactics of communist insurrection - taktik pemberontakan komunis. Persiapan yang diwujudkan show of force dalam Ulang Tahun Ke-45 PKI, guna menumbuhkan self confidence to revolutionaries - semakin percaya diri bagi seluruh pelaku revolusi.

Dari 23 Mei menuju September 1965, PKI punya sisa waktu tinggal 4 bulan menuju hari Kudeta 30 September 1965. Apakah mungkin kudeta tanpa ikut serta militer? Untuk keperluan ini, menurut Manai Sophiaan sudah disiapkan sebelumnya Syam Komaruzaman dari SOBSI dikirimkan oleh Aidit ke RRC untuk mempelajari soal-soal pemanfaatan tenaga militer dalam revolusi atau kudeta.

Sekembalinya dari RRC diangkat menjadi pimpinan Komite Militer. Mengapa dan untuk apa? Menurut Lenin bahwa the uprising should be prepared both politically and military - pemberontakan perlu dipersiapkan dengan kedua-duanya, politik dan militer. Mengapa persiapannya, PKI mendekati pimpinan AURI dalam persiapan kudetanya?

Stalin mengingatkan bahwa the victory of revolution never comes by itself - kemenangan revolusi tidaklah datang dengan sendirinya. It must be prepared for and won - Melainkan harus dipersiapkannya dan harus mencoba untuk memperolehnya. Diingatkan perang tidak dapat dihindari. Lalu, bagaimana caranya agar memperoleh dukungan dari kalangan militer?

Tentara revolusi - the revolutionary army menurut Lenin, terdiri dari organisasi buruh dan tani. Itulah sebabnya Syam Komaruzaman dari SOBSI, pergi ke RRC untuk mempelajari bagaimana membina the revolutionary army dari organisasi buruh dan tani.

Dengan cara infiltrasi administrasi, ekonomi dan ke dalam struktur militer, dengan target menjadikan the government army - tentara resmi pemerintah, berfungsi sebagai the key to revolution - kunci pendukung revolusi. Dari sini, revolutionary army is the key to revolutionary success - tentara revolusi menjadi kunci kesuksesan revolusi. Kesuksesan ini hanya diperoleh karena melalui perlawanan, pengaruhnya parts of the government army are meshed into the revolutionary organization - menjadikan bagian-bagian tentara resmi pemerintah, terbawa ke dalam gerakan organisasi revolusi. Dampak lanjutnya a revolutionary army emerges - muncullah tentara revolusiner.

Di sisi lain, diupayakan pula infiltrasi dengan tujuan, *the government army must be disintegrated* - tentara resmi harus dijadikan berantakan disiplinnya karena revolusi harus dilaksanakan oleh organisasi kesenjataan - *the revolutionaries must build a military organization* yang sejalan dengan gerakan buruh dan tani. Ditanamkan keyakinan bahwa *there is no salvation for them, except through alliance with the revolutionary proletariat* - tidak ada penyelamat bagi organisasi-organisasi non komunis kecuali bergabung dengan gerakan revolusiner proletar, akan memperoleh kemenangan.

Bertolak dari doktrin pemberontakan komunis itu, dan didukung dengan adanya pembelian senjata dan pesawat serta obat-obatan dari Rusia maka proses infiltrasi PKI ke sebagian pimpinan AURI, Omar Dhani, menemukan jalan yang mudah. PKI mendapatkan prioritas penggunaan lapangan Halim dijadikan tempat latihan militer "sukarelawan PKI, pemuda, buruh, tani, Gerwani" dan dekatnya di kebun karet terdapat sumur mati di Lubang Buaya, sebagai tempat yang dipersiapkan untuk penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat.

PKI mempercepat proses kudetanya, tidak hanya karena Presiden Soekarno mulai menurun kesehatannya, Juli-Agustus 1965. Dan adanya isu Dewan Jenderal dari Dokumen Gilchrist, 15 Mei 1965, di kalangan Angkatan Darat. Namun, PKI juga memperhitungkan bahaya solidaritas Muslim setelah Konferensi Islam Afrika Asia, 8-15 Maret 1965. Mengapa?

Aksi Sepihak PKI yang dicoba di Jawa Timur selalu dipatahkan oleh Banser dan Ansor dari Nahdlatul Ulama. Masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, yakin Banser dan Ansor walaupun hanya bersenjatakan tongkat rotan, tetapi diyakinkan akan menjadi kebal dari peluru senjata PKI. Bersikap sangat berani berhadapan dengan massa PKI.

Apa jadinya jika K.H. Dr. Idham Chalid dan K.H. Achmad Sjaichu berhasil membangkitkan solidaritas Muslim Afrika Asia, pasti tidak akan ada upaya PKI yang menemui kesuksesan. Perang Dingin akan beralih dari Blok Barat dengan Blok Timur menjadi antara Kaum Muslim dengan Kaum Komunis. Hal ini tidak hanya akan dihadapi oleh PKI saja, tetapi Rusia, RRC, dan negara sosialis lainnya akan berhadapan dengan negara-negara Islam.

Apalagi situasi dalam negeri, ABRI telah membina Badan Kerja sama Ulama Militer, Badan Kerja sama Pemuda Militer, Badan Kerja sama Wanita Militer dan lain-lainnya. Sedangkan dalam badan kerja sama ini, Banser dan Ansor sejalan dengan ABRI yang anti komunis.



### LAMBANG PERSJARIATAN MOEHAMMADIYAH

Situasi perubahan ini menjadikan PKI berupaya menutupi kelemahannya dengan unjuk kekuatan - show of force dan berupaya menciptakan organizational vitality dengan cara mengadakan seleksi yang sangat hati-hati dalam menerima keanggotaan - careful selection of members, disiplin penuh - full discipline, ketataan yang mutlak - absolute obidience.

Dalam menghadapi kekuatan militer non komunis, menurut Selznick misi utama dari the communist armed forces is to defeat the armed forces of the non communist powers - tujuan kekuatan kesenjataan komunis adalah melumpuhkan kekuatan kesenjataan non komunis. Dengan cara melemahkan sistem organisasinya dan menjadikan disorganisasi kekuatan kesenjataan anti komunis dan to destroy their inner cohesion - dan menghancurkan lubuk terdalam keterpautan organisasinya.

Hal ini, telah dikerjakan oleh PKI sejak melihat perkembangan upaya mengakhiri sengketa Indonesia-Malaysia dengan melalui perundingan atau pertemuan. Upaya ini, dinilai merugikan kepentingan RRC. Seperti pembentukan konfederasi negara-negara Melayu: Malaysia, Philipina, Indonesia - Maphilindo yang dirintis sejak 7 Juni 1963 dan diprakarsai oleh Perdana Menteri Tengku Abdurrahman, Presiden Soekarno, Presiden Macapagal. Menurut Manai Sophiaan, Menteri Luar Negeri Chen Yi menuduh Maphilindo sebagai proyek Nekolim. Walaupun Amerika Serikat dan Inggris juga menentangnya.

Apalagi Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal, merumuskan Doktrin Soekarno - Macapagal bahwa masalah Asia diselesaikan oleh Asia. Doktrin ini berdampak mematikan peran Inggris dan Amerika Serikat di Asia Tenggara, dalam menegakkan Malaysia. Oleh karena itu, Inggris menyegerakan pembentukan Federasi Malaysia diresmikan pada 16 September 1963. Tentu pembentukan Federasi Malaysia tidak dapat lepas dari peran Amerika Serikat di dalamnya.

Oleh karena itu, Republik Rakyat China - RRC memancing Indonesia mengubah konfrontasi menjadi perang karena Amerika Serikat menfaatkan kondisi konfrontasi untuk menjual produksi senjatanya. Sebenarnya, kemampuan perang Amerika Serikat lemah, terbukti ketika menghadapi Korea Utara dan Vietnam sebagai negara-negara komunis yang kecil, harus menarik mundur tentaranya. Apalagi jika menghadapi Indonesia yang mendapatkan bantuan dari RRC berubah menjadi negara komunis yang besar maka Amerika Serikat dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan luar biasa.

Indonesia sebagai negara *New Emerging Forces* - Nefos yang sedang berkobar semangatnya menentang *The Old Established Forces* - Oldefos dan Neokolonialisme Imperialisme - Nekolim. Di bawah kondisi ini, dapat diperhitungkan hasilnya, apabila Indonesia jatuh secara mutlak di bawah pengaruh RRC.

Apalagi menurut L. Stoddard dalam *Pasang Naik Kulit Berwarna* bahwa China berencana akan memindahkan penduduknya sebanyak 50.000.000 dari Gurun Gobi ke Kalimantan. Dapat diperhitungkan gerakan Nefos dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia, kerja sama pertahanan Indonesia -RRC, bila kurang diwaspadai akan mengubah Indonesia sebagai wilayah baru pemindahan penduduk China. Mengapa?

Tidakkah dalam pandangan komunis, organisasi politiknya, paramiliternya, dan militernya disiapkan untuk melakukan konflik, kekerasan dan menyusup dalam sel-sel kemasyarakatan - social fission? Migrasi penduduk China ke Kalimantan Barat yang berpenduduk China sebagai upaya penyusupan. Diubahnya Kalimantan Barat sebagai Small China. Dari Kalimantan Barat akan langsung menyerbu ke Jakarta.

Tujuan aksi-aksi komunis adalah to eliminate the life force of the enemy - mematahkan kekuatan kehidupan lawan-lawannya dan sebaliknya bila komunis merasa lemah mereka melakukan sikap defensif.

Bertolak dari tujuan dan kepentingan komunis itu, PKI hanya mampu melawan lawan-lawannya dengan cara mendapat dukungan dari pihak militer karena menurut teori Lenin, dalam perang modern, organisasi pemaksa hanyalah organisasi kesenjataan atau militer. Agar organisasi militer berpihak kepada kepentingan PKI maka organisasi militer harus dilemahkan. Dalam saat yang sama, organisasi militer tersebut dimanfaatkan untuk diubah menjadi organisasi militer revolusioner. SOBSI diubah dari barisan buruh menjadi militer.

Di samping itu, PKI aktif melancarkan propaganda, agitasi, infiltrasi, spionase, desensi, dan pemberontakan melawan yang diarahkan meniadakan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Propagandanya menggunakan organisasi non komunis untuk mengobarkan gerakan antimiliterisme. Oleh PKI dipropagandakan anti militerisme sebagai gerakan anti ABRI. Padahal, makna militerisme sebagai upaya memperkuat kedudukan suatu golongan dengan cara seluruh aparatnya dimiliternkan kepangkatannya dan kewenangannya.

Kalau demikian makna militerisme, tindakan politik Presiden Soekarno dapat dikatakan militerisme karena dalam mengukuhkan kedudukannya, menterimenterinya diberi kepangkatan militer. Oleh karena itu, apabila PKI antimiliterisme maka kudeta PKI selain merobohkan kekuatan TNI AD, sekaligus berupaya menumbangkan pemerintahan militerisme Presiden Soekarno.

Propaganda PKI menampakkan "central anti militerist slogan". Namun, PKI sendiri menuntut agar dipersenjatai tani-BTI, dan buruh SOBSI, disiapkan untuk melawan imperialis, dan melawan Tujuh Setan Desa yang terdiri dari (1) tuan tanah jahat (2) lintah darat (3) tengkulak jahat (4) tukang ijlon (5) penguasa jahat (6) kapitalis birokrat dan (7) bandit di desa. Situasi nasional menjadi panas dalam menghadapi aksi sepihak PKI.

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Haji-haji pimpinan Pesantren di desa yang memiliki tanah lebih dari 5 ha, harus dibagikan sawahnya kepada BTI. Menurut Aidit, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Bagi Hasil, dan ketentuan Menteri Pertanian dan Agraria, tahun 1963, tanah-tanah milik tuan tanah harus dinasionalisasikan dan seorang petani tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 ha. Untuk pelaksanaan ini tidak mungkin terjadi secara sukarela, melainkan dengan cara Aksi Sepihak BTI. Demikian pembelaan Aidit terhadap Aksi Sepihak BTI.

Di samping itu, untuk mempercepat perluasan pengaruh propagandanya, PKI menggunakan media transportasi. Terutama menguasai kereta api dan buruh kereta api - SBKA. Menyusul urutan sopir bus, taksi, buruh pelabuhan, seluruh media transfortasi lainnya, dijadikan alat "penyebar berita" ajakan agar berpihak dan mendukung rencana revolusi komunis. Isi beritanya meniupkan perpecahan dengan sasaran organisasi lawan komunis. Apa tujuannya?

Menurut teori komunis, tidak mungkin memihak kepada revolusi PKI apabila tidak terjadi perpecahan dari dalam atau *inner conflict* dari organisasi lawan komunis, paramiliter dan militernya. Seperti dalam rumus ajarannya, *conflict among enemies of communism was thus an essential precondition of revolutionary war* - konflik di antara lawan-lawan komunis, sebagai prakondisi yang memungkinkan pecahnya perang revolusi.

Upaya memecah belah Indonesia juga dikerjakan oleh Amerika Serikat. Menurut George Mc Turnan Kahin, dalam makalahnya, *Impact of US Policy on Indonesia Politics*, dalam seminar di Monash University, menuturkan Presiden Eisenhouwer lebih menyukai Indonesia pecah belah ketimbang jatuh ke tangan komunis. Untuk pelaksanaan program itu, ditugaskanlah Duta Besar Hugh S. Cumming Jr. Alasannya Presiden Soekarno dinilai lebih dekat dengan Beijing setelah mengunjungi RRC tahun 1956 yang akan meniru pembangunan ekonominya.

Upaya Amerika Serikat menurunkan peran kepemimpinan Presiden Soekarno, menurut Manai Sophiaan memuncak setelah kedatangan Marshall Green dan Lisaistrinya, 13 Juli 1965 di Jakarta, menggantikan Howard Jones sebagai Duta Besar. Sebenarnya Marshall Green tidak disukai oleh Presiden Soekarno karena bagaimanapun juga sebagai Duta Besar baru akan tetap melanjutkan program kerja Duta Besar Amerika Serikat sebelumnya.

Untuk pelaksanaan memecah belah Indonesia, CIA menjadikan umat Islam mayoritas bangsa Indonesia sebagai sasaran utamanya karena diperhitungkan oleh CIA, umat Islam sebagai pendukung kuat Presiden Soekarno. Namun juga, berkaitan erat dengan tujuan menghancurkan PKI pendukung Presiden Soekarno.

Pada saat itu, PKI tidak segan-segan propagandanya dalam upayanya meraih massa Muslim Indonesia agar keluar dari induk organisasi Islamnya, mendirikan organisasi dengan nama Islam di bawah PKI. Dicontohkan oleh Lenin, 7 Desember 1917, mengadakan pendekatan kepada kaum buruh Muslim Rusia dan Dunia Timur agar kerja sama membantu kaum komunis melawan segenap penindasan dan dominasi asing Barat.

Demikian pula D.N. Aidit PKI mencoba mengambil hati kaum buruh Muslim dalam melawan imperialis Amerika Serikat. Didirikanlah organisasi Ikhwanul Muslimin. Nama organisasi yang Islami ini untuk mengelabui mayoritas umat Islam Indonesia agar berpihak kepada PKI. Kebiasaan dalam organisasi PKI, menyebut pimpinannya dengan Kawan. Misalnya D.N. Aidit disebut sebagai Kawan Ketua. Dalam bahasa Arab, kawan adalah Ikhwan. Sengaja namanya dibuat mirip dengan nama organisasi yang dibangun oleh Hasan Al-Banna di Mesir. Dalam masa jor-joran ini, PNI juga membuat Jamiyatul Muslimin atau Jamus.

Nama-nama ini dibuat oleh PKI dan PNI, memberikan pengakuan bahwa realitas kekuatan massa rakyat bangsa Indonesia, mayoritasnya adalah umat Islam. Hanya dengan memanipulasi nama Islami, PKI dan PNI menyadari akan mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia yang terdiri dari umat Islam. Walaupun kedua parpol tersebut tetap berideologi Marxism dan Marhaenisme.

Permainan politik Presiden Soekarno yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai mercusuar Asia Afrika, menghadapi lawan tidak hanya dari Blok Barat Kapitalis, tetapi justru dari pihak Blok Timur Komunis juga berusaha menumbangkannya. Presiden Soekarno ingin Membangun Dunia Baru – To Build A New World, 30 September 1960, dengan meninggalkan PBB, 7 Januari 1965, dengan membangun Conference New Emerging Forces – Conefo.

Demokrasi Ekonomi yang dibangunnya dengan membatasi gerak wilayah ekonomi China RRC di Indonesia dengan PP 10. Memberikan izin usaha kalangan China hanya sebatas di ibu kota Provinsi. Tentu jiwa PP 10/1959 ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi RRC yang berusaha mengkomuniskan dunia melalui dominasi ekonominya.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT TERTULIS P.J.M. PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR  
REVOLUSI PADA KONFERENSI BESAR KE VIII PELADJAR  
ISLAM INDONESIA 28 DJULI/3 AGUSTUS 1965 DI  
JOGJAKARTA.

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini saja restui Konferensi Besar Ke-VIII peladjar  
Islam Indonesia !

Thema : BERDIKARI MENGAMANKAN PANDJI PANDJI REVOLUSI, jang  
kau gariskan, adalah sangat tepat, dijustru kaum Nekolim dan  
antheck-anthecknya sangat takut kepada prinsip-prinsip Revolusi  
Indonesia.

Madju terus anak-anaku Peladjar Islam Indonesia, dan perhebat  
usaha-usahamu dalam menggali Apinja Islam, untuk memerangkan  
Revolusi !

Selamat berkonferensi !

Madju terus Pantang Mundur !

JOGJAKARTA, 26 Djuli 1965.  
PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/  
PANGIMA TERTINGGI ANGKATAN  
BERSENDJATA,

SUKARNO

Dokumentasi  
AHMAD MANSUR SURYANEGARA

**AMANAT TERTULIS P.J.M. PRESIDEN/  
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI  
PADA KONFERENSI BESAR VIII  
PELAJAR ISLAM INDONESIA - PII**

di Jogjakarta, 26 Juli - 3 Agustus 1965

Terbaca sebagai upaya Presiden Sukarno menciptakan imbangan politik terhadap PII yang mulai tersudutkan, setelah PII mengalami pengganyangan PKI, BTI, di Kanigoro Kediri, 13 Januari 1965. Presiden Sukarno memandang sangat perlu memberikan dukungan terhadap Konferensi Besar PII yang bertemakan Berdikari Mengamankan Panji Panji Revolusi. Sebelumnya, di Markas Ganefo, 18 Mei 1965, Presiden Sukarno memperingatkan bahwa Revolusi Indonesia oleh Barat dinilai lebih berbahaya daripada Rusia yang telah berubah menciptakan peaceful coexistence. Ancaman Barat semakin terasa setelah rencana Konferensi Asia Afrika II di Alzajair, Juni 1965, dukungan RRC dapat digagalkan.

Tambahan lagi kondisi jor-joran semakin memanas antara Islam dan komunis di dalam negeri. Tidak mengarah lagi ke Nekolim. Selain itu, di Jakarta, 13 Juli 1965, Marshall Green menggantikan Howard Jones sebagai Duta Besar AS yang tidak disukai oleh Presiden Sukarno. Di bawah kondisi yang demikian ini, Presiden Sukarno merasa perlu dekat lagi dengan Islam: PII, HMI, Muhammadiyah, dan NU. Namun, terlambat PKI dengan dukungan RRC semakin keras berupaya merobohkan Presiden Sukarno.

PKI ingin menjadikan D.N. Aidit Diktator Proletar Indonesia. Namun, terbentur dengan Presiden Soekarno diangkat oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup. Berarti Presiden Soekarno menduduki kursi kepresidenan hingga akhir hayat. Pengangkatan MPRS ini bertentangan dengan kepentingan D.N. Aidit PKI karena D.N. Aidit PKI dalam upaya mencapai tujuannya tidak mungkin menempuh cara Parlementer. Tidak mungkin pula dengan menunggu Presiden Soekarno wafat. Selain karena terlalu lama, juga akan berhadapan dengan keputusan MPRS berikutnya. Penantian itu, bertolak belakang dengan ajaran komunis. Oleh karena itu, dipilihnya pesan Lenin, *No class, no regime falls unless it is pushed - Tiada kelas, tiada rezim rontok, kecuali didobrak.*

Dapat dipastikan setelah PKI kuat maka Presiden Soekarno akan ditumbangkannya. Untuk tujuan ini, diajarkan pula *except war, infiltrations is the most effective method of fighting a dictatorship* - selain perang, infiltrasi merupakan metode perlawan kediktatoran yang sangat efektif. Dengan kata lain, untuk menumbangkan Presiden Soekarno, PKI pasti menggunakan taktik kuda Troya.

Upaya PKI ini, menjadikan pimpinan PKI terjerumus bekerja untuk asing, dan juga menjadikan pimpinan PKI sebagai pemimpin yang *keblinger*. Melahirkan Aidit, Nyoto, Nyono, Sudisman, Sakirman, Soepardjo, Untung, Umar Dhani, dan kawan-kawan lainnya menjadi bonekanya RRC.

## Kegagalan Tuntutan CGMI Pembubaran HMI

Persiapan kudeta PKI dimatangkan oleh tuntutan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia - CGMI dalam penutupan kongresnya di Istora Senayan, 28 September 1965 yang dihadiri oleh Ketua CCPKI Aidit, Presiden Soekarno, Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena, Menteri Penerangan Achmadi, menuntut agar Himpunan Mahasiswa Islam - HMI dibubarkan.

Menurut Manai Sopihaan, tuntutan CGMI ini dijawab terlebih dahulu oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena:

Pemerintah tidak mempunyai niat untuk membubarkan HMI. HMI adalah organisasi nasionalis, patriotik, dan loyal kepada Pemerintah. Pemerintah banyak mendapat sokongan dari HMI dalam perjuangan melawan Nekolim.

Penulis yakin, bahwa tidak mungkin Wampa II Dr. Leimena menyampaikan keputusan pemerintah itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi, Perdana Menteri Soekarno yang sama-sama hadir dalam acara penutupan Kongres CGMI tersebut. Dr. Leimena bersikap tenang tidak terpengaruh oleh gemuruhnya teriakan CGMI dalam Istora Senayan, tetap disampaikan keputusan pemerintah seperti di atas.

Keputusan pemerintah, penolakan tuntutan CGMI tentang pembubaran HMI, apakah bukan sebagai pelaksanaan balance of power antar kekuatan organisasi kemahasiswaan dan sebagai tindak lanjut dari Konferensi Islam Afrika Asia. Sayang belum sampai tersosialisasikan, telah terjadi Kudeta G-30-S/PKI sehingga masyarakat belum memahami pembelaan Presiden Soekarno terhadap HMI.

Pilihan Dr. Leimena dari Partai Kristen Indonesia - Parkindo, menyampaikan penjelasan keputusan pemerintah tentang HMI benar-benar sangat strategis karena apabila disampaikan oleh Menteri yang beragama Islam, pasti hal itu dicurigai bukan keputusan Presiden Soekarno dengan seluruh menterinya.

Ketika Presiden Soekarno mendapatkan giliran, menawarkan kepada peserta kongres CGMI, apakah setuju jika Ketua CCPKI dan Ketua MPRS Aidit terlebih dahulu memberikan sambutannya. Tentu disetujuinya tawaran tersebut, maka bicaralah Aidit:

Kalau Pemerintah tidak akan membubarkan HMI maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri saja dan kalau kalian tidak mampu melukukan itu, lebih baik kalian jangan pakai celana, tapi tukar saja dengan sarung.

Kemudian D.N. Aidit meneruskan pidatonya, menyerang pemimpin-pemimpin palsu yang merampok uang rakyat dan memelihara istri empat sampai lima.<sup>21</sup> Siapa yang disindir oleh D.N. Aidit setelah mendengar pernyataan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Presiden Soekarno tidak menyetujui pembubaran HMI.

---

21 Erka, 1978. *Eung Karno! Ferginya Seorang Kekasih Suamiku & Kebanggaanku*. Aneka Ilmu. Semarang, menuturkan tetang wanita-wanita yang pernah berhubungan dan mengaku menjadi istri Bung Karno: (1) Lok Utari Tjokroaminoto (2) Inggit Garmasih (3) Fatmawati (4) Hartini (5) Baby Huwae atau Lukita Purnamasari (6) Kartini Manoppo (7) Haryati (8) Naoko Meimoto atau Sari Dewi.



JENDERAL TNI H. M. SOEHARTO

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## JENDERAL TNI H. M. SOEHARTO

Allah Yang Mahakuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Jenderal TNI H. A. Soeharto untuk menyelamatkan bangsa, negara, agama dari kebiadaban PKI dan ormas bawahannya dalam Kudeta G30S/PKI.

Surat Perintah 11 Maret 1966, Supersemar, dari Presiden Soekarno disampaikan melalui ketiga Jenderal M. Jusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat, di Istana Bogor, untuk Jenderal Soeharto sebagai Panglima Pemulihhan Keamanan.

Menurut Prof. DR. H. Priyatna Abdurraisyid SH. PhD. C.IISL. D.IAA.Fell.BIS.IAA, 2001, dalam buku memoir, Dari Cilampeni ke New York, Mengikuti Hati Nurani, Supersemar tersebut pernah ditawarkan oleh Jenderal TNI Soeharto, di Wisma Siliwangi Ciumbuleuit, Bandung kepada Jenderal A.H. Nasution, dan Jenderal Ibrahim Adjie, untuk mengambil alih Pimpinan Pemulihhan Keamanan tetapi ditolak oleh keduanya.

Menurut Jenderal Soeharto, 1989, dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, menuturkan tentang kesulitan Presiden Soekarno dalam pemenuhan tuntutan rakyat tentang pembubaran PKI, dalam menghadapi protes luar negeri nantinya. Karena kesulitan inilah melahirkan Supersemar dan melimpahkan kewenangan pembubaran PKI dan ormas bawahannya kepada Jenderal Soeharto.

Langkah lanjutnya, Jenderal Soeharto, dalam mengeliminasi pengaruh ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, Sosialisme menghidupkan ajaran agama dan Aliran Kepercayaan. Akan tetapi, aliran Kepercayaan dijadikan sumber Kudeta Sawito dengan ilham Gunung Srändil untuk menggantikan Presiden Soeharto. Akibatnya, Presiden Soeharto kurang menaruh kepercayaan terhadap Aliran Kepercayaan lagi. Pembangunan agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lebih dipriortaskan.

Dalam penertiban ormas dan parpol, disederhanakan menjadi mirip Nasakom terdiri dari satu Golkar, dan dua parpol PPP dan PDIP. Panggilan Paduka Yang Mulia Presiden diganti cukup dengan Bapak Presiden.

Pembangunan Masjid diutamakan, diselesaikanlah pembangunan Masjid Istiqlal – Masjid Kemerdekaan, sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Kebijakannya menjadikan pertumbuhan masjid dan musholla sangat pesat: di Kampus, Kompleks perumahan, perkantoran, pasar, dan di SPBU dari Sabang hingga Merauke. Kecuali kehidupan parpol. Sesuai dengan mimpi Presiden Soekarno, parpol dikecilkan.

Satu-satunya Kepala Negara yang membangun Masjid di Bosnia, hanyalah Presiden H.A. Soeharto. Padahal Barat berkepentingan menghancurkan Islam di Bosnia setelah Rusia mengalami Perestroika-Reformasi. Presiden Soeharto juga membangun Masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea. Pembangunan Agama Katolik di Dili Timur Timur, dengan pembangunan Patung Jesus seperti di Brasilia, mengejutkan dunia Barat Protestan.

Kedekatan Presiden Soeharto dengan Islam, berdampak harus lengser melalui Reformasi atau Perestroika yang menular di Indonesia. Bernasib sama dengan Presiden Soekarno setelah mendapat gelar The Champion of Freedom and Islam, tumbanglah kekuasaannya, sesudah G30S/PKI.

Benarkah kedua hal ini terjadi karena adanya intervensi CIA atau KGB?

Tidakkah Presiden Soekarno memiliki istri yang banyak? Sebenarnya pidato Aidit tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada CGMI tentang Presiden Soekarno yang tidak mau membubarkan HMI. Walaupun tidak terus terang, dapat dibaca dari bahasa yang tersirat. Maksudnya, pemimpin yang tidak berpihak kepada tujuan PKI maka pemimpin itu palsu. Padahal, tuntutan CGMI dan PKI bertujuan membubarkan HMI. Sebaliknya, pemerintah tidak menyetujuinya, bahkan menilai HMI sebagai organisasi patriotik, nasionalistis, dan anti nekolim.

Tentu jawaban pemerintah itu, diterima sebagai penghinaan tidak hanya kepada CGMI tetapi justru kepada Aidit dan PKI. Oleh karena itu, disindirlah adanya pemimpin palsu, makan uang rakyat, dan banyakistrinya. Siapa pemimpin itu? Dialah pemimpin yang tidak mau membubarkan HMI. Pemimpin yang tidak berpihak kepada tujuan PKI.

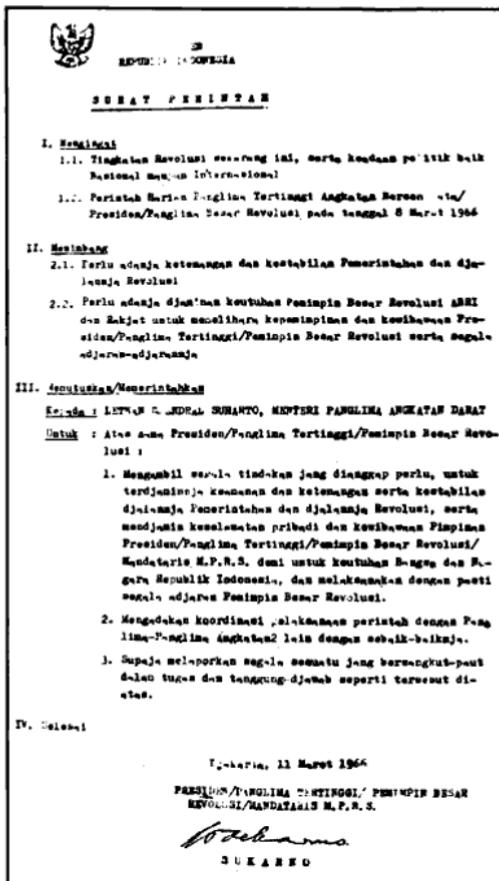
Mengapa D.N. Aidit berani menyindir Presiden Soekarno dengan bahasa yang merendahkan? Jawabannya karena malam itu, 28 September 1965, tinggal dua hari lagi, PKI merasa kudetanya di malam hari yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung pasti berhasil menggulingkan Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan akan digantikan dengan Dewan Revolusi, sekaligus melumpuhkan Dewan Jenderal.

## **Ulang Tahun KAA II dan Rencana Kudeta PKI**

Rencana Kudeta PKI sebenarnya tidak hanya terlihat setelah adanya Kongres CGMI itu, 28 September 1965. Namun, sejak adanya kegagalan Ulang Tahun Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika di Aljazair, Juni 1965, akibat adanya Kudeta Kolonel Boumediene terhadap Presiden Ben Bella dan gedung tempat penyelenggaraan Ulang Tahun KAA II di Aljazair dibom.

Pada saat itu, Presiden Soekarno tetap melanjutkan pergi ke Kairo. Di sini, ia bertemu dengan Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab dan Perdana Menteri Chu En Lay, Menteri Luar Negeri Chen Yi dari RRC, Menteri Luar Negeri, dan Zulfikar Ali Bhutto dari Pakistan. Pertemuan ini dinamakan KTT Kecil, sepakat untuk menunda Konferensi Asia Afrika II.

Pada kesempatan ini, diadakan pula *briefing* dengan Duta Indonesia untuk Eropa dan Amerika Serikat, membicarakan tentang rencana akan diselenggarakannya Conference of New Emerging Forces - Conefo. Dalam pertemuan ini, Aidit ikut di dalamnya.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

## SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Dari  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/  
MANDATARIS M.P.R.S.  
Kepada  
LETNAJAL SOEHARTO  
MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Setelah selesai Aidit pergi ke Paris. Di sini, ia bertemu dengan A. Karim D.P., Ketua Umum PWI. Ditanya oleh Karim D.P. tentang Kudeta Kolonel Boumediene. Jawaban Aidit, bahwa Boumediene adalah benar dan progresif. Dijelaskan lebih lanjut, jika kudeta didukung sedikitnya 30% rakyat, kudeta tersebut bisa bermutasi menjadi revolusi. Pandangan ini menurut Manai Sophiaan sebagai analisis Aidit dalam upayanya melaksanakan Kudeta Gerakan 30 September nantinya.

Untuk kepentingan ini, D.N. Aidit dan Njoto meneruskan ke Kremlin Moskow. Ternyata, rencana kudeta dengan kekuatan 30% ditolak oleh Kremlin karena menurut Marxisme, revolusi harus bersumber dari kemauan rakyat. Bukan hanya dipaksakan dari atas dengan rekayasa kudeta. Penolakan Rusia ini tidak dipedulikan dan Aidit jalan terus dengan rencana kudetanya karena merasa cukup dengan dukungan RRC saja.

Adapun Politbiro PKI terdiri dari D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Njono, Munir, Ruslan Wijayasastra, dan Rewang. Mereka juga merasa sudah kuat dalam menghadapi Dewan Jenderal karena sudah memiliki pendukung Kelompok Perwira Muda Yang Maju serta RRC berpihak kepada D.N. Aidit bukan Rusia.

Dalam *briefing* 28 September 1965 di Jakarta, dihadiri pula oleh CDB Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Diputuskan PKI akan melakukan kudeta, dengan bantuan Laksamana Udara Umar Dhani dengan cara penculikan dan pembinaaan para Jenderal Angkatan Darat yang dikategorikan dari Dewan Jenderal.

## Pahlawan Revolusi

Rencana ini dilaksanakan pada 30 September 1965, Kamis Kliwon malam Jumat Legi, 4 Jumadil Akhir 1385 H, sekitar pukul 3 dini hari. Dapat diartikan pula 1 Oktober 1965 karena telah lewat pukul 12 malam. Terjadi bencana penculikan dan pembunuhan:

1. Letnan Djenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Koti.
2. Major Djenderal R. Soeprapto, Deputi II Men/Pangad
3. Major Djenderal Harjono Mas Tirtodarmo, Deputi III Men/Pangad
4. Major Djenderal Suwondo Parman, Asisten I Men/Pangad
5. Brigadir Djenderal Donald I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad
6. Brigadir Djenderal Soetojo Siswomihardjo, Inspektor Kehakiman AD
7. Letnan Satu Andreas Tendean, Adjutan Menko Hankam Kasab
8. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun

Di Jawa Tengah

9. Kolonel Katamso Dharmokusumo, Komandan Korem 072 Yogyakarta
10. Letnan Kolonel Sugijono Mangunwijoto, Kastaf Korem 072 Yogyakarta

Para Ulama dan rakyat pada umumnya tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Jangankan para Ulama dan pimpinan partai politik Islam lainnya, para Pahlawan Revolusi sekalipun sedang memangku kedudukan yang strategis, tidak juga mengetahui rencana Kudeta PKI. Terbukti, setelah pagi harinya, 1 Oktober 1965, Jumat Legi, 5 Jumadil Akhir 1385 H, mendengar siaran RRI, pukul 07.20 dan diulang pada 08.15, para Ulama dan masyarakat mulai mendengar adanya Gerakan 30 September PKI. Pada siang harinya, pukul 13.00 disiarkan tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisionerkan Kabinet Dwikora.

Pada pukul 14.00, 1 Oktober 1965 diumumkan 45 anggota Dewan Revolusi, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, dengan wakil-wakilnya terdiri dari Brigadir Djenderal Supardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas. Diiumumkan pula, penurunan pangkat jenderal menjadi kolonel. Sebaliknya, kepada yang memihak kepada Dewan Revolusi dinaikkan pangkatnya dua kali kenaikan.

Omar Dhani pada hari dan tanggal yang sama di atas, 1 Oktober 1965, mengeluarkan perintah harian, untuk Slagorde AURI, mendukung Gerakan 30 September/PKI di atas. Omar Dhani yakin adanya Dewan Djenderal Angkatan Darat berdasarkan informasi dari Brigadir Djenderal Supardjo.

Sepintas PKI seperti menang dan benar. Namun, setelah Major Djenderal Soeharto dari Komando Strategis Angkatan Darat - Kostrad, mengambil alih pimpinan keamanan. Segera diadakan operasi militer, dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, mengambil alih Studio RRI dan Kantor Pusat Telekomikasi. Kemudian, disiarkan pidato Major Djenderal Soeharto, penjelasan situasi yang sebenarnya terjadi dan keselamatan Presiden Soekarno. Para Ulama dan rakyat baru memahami adanya Kudeta Gerakan 30 September/PKI yang dibantu oleh pimpinan Angkatan Udara.

Pada 4 Oktober 1965, Senin Wage, 9 Jumadil Akhir 1385 H, berdasarkan keterangan Polri Soekitman, yang berhasil lolos dari penculikan, ditemukanlah tempat pemakaman jenderal-jenderal yang diculik dan dibunuh oleh PKI, dimasukkan dalam sumur sedalam 12 m, di Lubang Buaya dari Bandara Halim Perdanakusumah. Untuk menguasai Lubang Buaya, terjadi perlawanan kecil dari Pemuda Rakyat dan Gerwani sebagai kekuatan massa yang dipersenjatai, di bawah pimpinan Major Udara Sujono. Pengangkatan jenazah dari Sumur Lubang Buaya dilaksanakan oleh Kesatuan Inti Para Amphibi dari KKO AL.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun dari kesatuan TNI yang memihak kepada PKI dan bertugas menculik dan melakukan pembunuhan delapan jenderal adalah Kesatuan Pasopati di bawah Letnan Satu Dul Arief dan Letnan Dua Siman, terdiri dari satu kompi masing-masing Resimen Tjakrabirawa, Batalyon Para 454, Batalyon Para 530, dan dua peleton masing-masing dari Brigade Infanteri 1, Kesatuan Para Angkatan Udara, serta Kesatuan Kavaleri. Korban delapan jenderal ini diserahkan kepada Kesatuan Pringgodani di Lubang Buaya yang berada di wilayah Halim Perdanakusumah.

Penguasaan wilayah Halim Perdanakusumah dan Lubang Buaya oleh pasukan RPKAD. Kemudian dilaporkan oleh Major C.I. Santoso, Danyon I RPKAD kepada Pangkostrad Major Djenderal Soeharto yang memimpin langsung pengambilan jenazah para jenderal dan perwira pertama korban keganasan G-30-S/PKI. Adapun penggalian kembali dilakukan oleh RPKAD dan KKO AL atau Korps Marinir TNI AL. Untuk dipindahkan ke Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada 5 Oktober 1965.

Prosesi pemakaman diikuti oleh segenap rakyat, dari Markas Besar Angkatan Darat - MBAD di jalan Merdeka Utara hingga Makam Pahlawan Kalibata, baik yang muda ataupun orang tua, yang tergugah hatinya merasa kehilangan putra terbaiknya, disertai tangis lirih yang dalam dan doa tulus dari para Ulama: Selamat Jalan Pahlawan Revolusi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menempatkan disisi-Nya dengan penuh kemuliaan. Para Ulama dan Santri bersama segenap generasi muda Islam bertekad akan meneruskan perjuanganmu mengamankan dan membebaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ajaran komunisme.

Sayangnya, peristiwa yang menjadikan rakyat terhimpit rasa duka yang dalam, Presiden, Pemimpin Besar Revolusi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat, tidak hadir dalam pemakaman para Pahlawan Revolusi korban kebiadaban Dewan Revolusi, Gerakan 30 September PKI.



Sumber: Kilas Balik

**ORMAS ISLAM GP ANSHOR,  
PEMUDA MUHAMMADIYAH, PEMUDA AL-WASLIYAH,  
PEMUDA PERSIS KAMI DAN KAPPI**

Walaupun dihadang oleh tentara bersenjata lengkap, tidak merasa gentar, demonstrasi tetap menuntut pembubaran PKI dan organisasi bawahananya.

## Jawaban Partai NU terhadap Dewan Revolusi

Pada saat Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI, menurut Choirul Anam, PB NU Ketua III K.H. A. A. Sjaichu mengirim teks kepada Redaksi Surat Kabar Duta Masyarakat pada hari yang sama, pukul 22.00, 1 Oktober 1965, Jumat Legi, 5 Jumadil Akhir 1385, berisikan pernyataan:

1. mengutuk tindakan kudeta yang dipimpin oleh Letkol Untung;
2. agar segenap umat Islam umumnya serta warga NU khususnya tetap membantu ABRI;
3. segenap warga Nahdliyin, siap siaga terhadap gerakan kontra revolusi dengan nama Gerakan 30 September/PKI.

Pernyataan yang sama diikuti oleh GP Ansor. Setelah RRI dikuasai kembali, NU dan GP Ansor menyatakan keberpihakannya kepada ABRI.

Pada 2 Oktober 1965, Sabtu Pahing, 6 Jumadil Akhir 1385 H, pimpinan muda NU, H. M. Subhan Z.E. membentuk Komando Aksi Pengganjangan Kontra Revolusi 30 September - KAP Gestapu. Dengan Sekretaris Jenderal Harry Tjan SH dari Partai Katolik dan Sekretaris Ketua Pergerakan Massa, Lukman Harun dari Persyarikatan Muhammadiyah, serta Syafruddin Harahap dari HMI. Demikian pula dari generasi muda Muhammadiyah membentuk Komando Kesiapsigaan Angkatan Muda Muhammadiyah - KOKAM.

Kemudian, menyusul HMI, 4 Oktober 1965, Senin Wage, 8 Jumadil Akhir 1385 H, di Taman Suropati Jakarta, mengadakan Rapat Umum, mengutuk gerakan kontra revolusi G30S/PKI. Mendesak dibersihkannya Kabinet Dwikora, Lembaga Negara, Front Nasional, LKBN Antara, Front Pemuda, PPMI, dari oknum G30S/PKI. Kepeloporan HMI ini sebagai salah satu jawaban terhadap keputusan Kongres CGMI, 28 September 1965 dengan tuntutannya pembubaran HMI.

## Jawaban KAMI dan KAPPI terhadap G-30-S PKI

Oleh karena itu, menurut Drs. H.R. Soemarno Dipodisastro dalam *Kilas Balik Perjuangan Menegakkan Orde Baru* menuturkan bahwa dalam pengganyangan PKI dan organisasi bawahannya, HMI menjadi ujung tombaknya. Tindak lanjutnya, HMI bersama PII, Pemuda Muhammadiyah, dan Pemuda Pancasila, membakar Gedung CCPKI, Jalan Kramat Raya, Jakarta, 8 Oktober 1965, Jumat Pon, 12 Jumadil Akhir 1385.



Sumber: Klas Balik

## DEMO KAPPI KAMI PENGGEMBOSAN BAN MOBIL

Gambar menampakkan seorang pelajar putri dengan sukarela melakukan Penggembosan Ban Mobil di jalan protokol, dalam rangka menggagalkan Pengangkatan Kabinet Seratus Menteri di Istana.

Betapa cepat dan meluasnya dalam waktu relatif singkat

Kesadaran anti PKI dimiliki oleh kalangan pelajar.

Tidak hanya sekedar sadar, tetapi disertai rela melakukan aksi.

Menurut Drs. H. R. Soemarno Dipodisastro tadi dan menurut Soegiarso Soerojo dalam *Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai* menuturkan bahwa atas restu Menteri PTIP Mayjen Syarif Thayeb, terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI Pusat, 25 Oktober 1965 dengan Ketua Zamroni -PMII, Ketua Bidang Massa Cosmas Batubara - PMKRI, Sekretaris Jenderal Mari Muhammad - HMI. Bendahara Teuku Hamzah - SEMMI. Disusul dengan KAMI Jakarta, Ketua Firdaus Wadjdi - HMI, Team Ketua Fahmi Idris dan Sumarno Dipodisastro - HMI, serta Liem Bian Koen PMKRI.

Setelah diketahui bahwa dalang utama Kudeta G-30-S adalah PKI, tidaklah mungkin PII berpangku tangan. Di bawah pimpinan Mohammad Husni Thamrin, bangkitkah PII memelopori menggerakkan para pemuda pelajar, bergerak dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI pada 23 Desember 1965, Kamis Wage, 1 Ramadhan 1385.

Berdasarkan Drs. Erwin M. Hasan, M.Psc., 2002, dalam *Cerakan Pemuda Pelajar Berjuang KAPPI*, menjelaskan pendiri KAPPI Pusat adalah Ketua Umum, M. Husnie Thamrin - PII. Ketua: Sjahril Dardja - G.S.N.I.R. Sihombing - Baperpeki. Darlis Zakaria - IPE Indonesia. Sekretaris Jenderal, Abdul Kahar Dangka - IPPI Pantjasila. Sekretaris: Usmanudin Siregar - I.P. Al-Wasljah. Zulkifli TM - I.P. Al-Irsjad. Bendahara: M. Djawaeni - I.P. Matla'ul Anwar.

Kebangkitan KAPPI sangat menyulitkan pihak Istana, melawan pemuda pelajar atau anak-anak pelajar yang datang membanjiri dari kota-kota di Jawa Barat ke Jakarta dalam jumlah luar biasa. Kekerasan senjata, tidak mungkin dapat memadamkan kemauan para pemuda pelajar dengan hati nurani yang jernih tanpa pamrih materi ataupun lainnya. Berjuang menegaknya kebenaran dan keadilan: kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi. Artinya Pancasila tidak dibenarkan bila diubah menjadi Manipol Usdek dan Nasakom, serta tidak direduksi menjadi Ekasila atau Gotong Rojong.

Adapun dari pimpinan PII Jakarta pengambil inisiatif pembentukan KAPPI Pusat menurut Djayadi Hanan dalam *Gerakan Pelajar Islam Indonesia*, antara lain adalah: Mohammad Husni Tamrin, Syarifuddin Siregar Pahu, Husein Umar, Wahid Kadungga, Sri Syamsudin Prawoto dan Ilyas. Untuk KAPPI jaya adalah Anhari Achadi, Oo Cholis Rohendi, Gomsoni Yasin, M. Nadjib, Maryati Nasution, Titi Nurhayati, Ruminah ER.

Kepeloporan PII dalam kebangkitan KAPPI, suatu pilihan dan jawaban yang tepat. Dua peristiwa Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, menjadikan gugurnya Komandan Brigade PII Madiun, Soerjosoegito, dan adanya Peristiwa

Kanigoro, Mental Training PII jadi korban sasaran Aksi Sepihak PKI, 13 Januari 1965, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1384. Dengan adanya kedua peristiwa ini, dapat dipastikan PII mengambil inisiatif melakukan perlawanan aktif terhadap PKI sesudah Kudeta G 30 S/PKI.

Apalagi sudah sejak 22-27 Rabiul Akhir 1385, Jumat-Rabu, 20-25 Agustus 1965, PB PII di bawah pimpinan Ahmad Djauwaeni memutuskan rezim Demokrasi Terpimpin dikuasai oleh PKI. Oleh karena itu, PII harus bekerja sama dengan perwira Angkatan Darat yang anti komunis dalam menyiapkan perlawanan terhadap segenap aksi PKI. Bertolak dari dasar keputusan tersebut, dengan adanya Kudeta G30S/PKI, menjadikan PII dengan cepat mengambil inisiatif memelopori Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI.

Dengan terbentuknya KAPPI, menjadikan KAMI semakin berani menggerakkan demonstrasi pelajar dan mahasiswa. Fahmi Idris dan Eki Sjahruddin - HMI, memimpin demonstrasi ke Sekretariat Negara untuk berdialog dengan Menteri Chaerul Saleh, 10 Januari 1966. Sudah tiga bulan, 30 September 1965-10 Januari 1966, tuntutan pembubaran PKI tidak dijawab segera oleh Presiden Soekarno. Dalam dialog ini, Chaerul Saleh tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan tuntutan demonstran KAPPI dan KAMI.

Bahkan, Presiden Soekarno dalam menjawab tuntutan demonstran dengan menyempurnakan kabinetnya menjadi Kabinet 100 Menteri. Tanpa mengadakan retooling menteri-menteri yang terlibat dalam Gestapu. Akibatnya, KAPPI dan KAMI menyebutnya Kabinet Gestapu. Reaksi dari kalangan pemuda pelajar KAPPI dan mahasiswa KAMI melancarkan demonstrasi penggembosan ban mobil di jalan raya, untuk menggagalkan pelantikan Kabinet Gestapu.<sup>22</sup> Diikuti dengan demo ke Istana Negara, 23 Februari 1966. Di sini, disambut dengan tembakan. Gugurlah Arief Rachman Hakim.

Kampus Universitas Indonesia - UI ditutup. KAMI dilarang, Firdaus Wadjdi mengubah KAMI menjadi Resimen Arief Rachman Hakim. Kemudian, diubah lagi menjadi Lasjkar Arief Rachman Hakim dengan Komandan Fahmi Idris dan Kastaf Soemarno Diposastro.

---

22 Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, terjadi demonstrasi dengan melakukan penggembosan ban setiap mobil yang sedang lewat di jalan raya. Pada umumnya, demonstrasi melakukan pembakaran ban bekas di jalan atau di halaman suatu kantor, kampus, atau tempat lain yang dijadikan obyek demo. Pelaku demo penggembosan ban adalah pemuda pelajar masih duduk di bangku SMP dan SMA. Betapa cepat proses penularan gerakan anti komunis di kalangan pemuda pelajar.



Sumber: kongres

### Demonstrasi HMI Anti Korupsi



**M. HUSNI THAMRIN**

Ketua Umum KAPPI Pusat

**A. MANSUR SURYANEGARA**

Sekretaris Umum DPHD KAPPI Jabar

Penutupan kampus dan kegiatan kuliah, menjadikan lahirnya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia - KASI. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga meluas di kota-kota universitas. Universitas Padjadjaran berubah menjadi Universitas Padjadjaran Berjuang. Dewan Mahasiswa UNPAD di bawah pimpinan Zen Amar membangkitkan KAMI Bandung bersama mahasiswa Institut Teknologi Bandung - ITB. Diikuti pula oleh organisasi mahasiswa ekstra.

## Demo KAPPI dan KAMI Jabar

Demonstrasi khusus di Jawa Barat, demonstrasi KAPPI dipimpin oleh Mursalin Dahlan melakukan penyobekan gambar Presiden Soekarno di Bandung, Serang, di Pesantren Citangkil dan di Mancak Cilegon Banten. Menurut Gubernur Mashudi dalam *Memandu Sepanjang Masa*, demonstrasi KAMI yang dipimpin oleh Sugeng Suryadi, selain menuntut Presiden Soekarno di Mahmilubkan, juga melakukan tindakan menyobek-nyobek dan menginjak-injak gambar Presiden Soekarno yang diambil dari Gedung Pakuan Bandung.

Tidaklah heran apabila di kalangan pemuda pelajar dibentuk KAPPI. Kalangan guru pun membangun Kesatuan Aksi Guru Indonesia - KAGI. Kalangan wanita bangkit, mendirikan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia - KAWI. Di kalangan buruh yang anti komunis membentuk Kesatuan Aksi Perserikatan Buruh Indonesia - KAPBI dan para nelayan membangun pula Kesatuan Aksi Pekerja Nelayan Indonesia - KAPNI.

Dalam penggerahan massa pemuda pelajar dan santri dari Pesantren, SMP Tsanawiyah, SMP, SMA, SGA-Negeri, PGAA-Negeri dan swasta dari Bandung atau kota-kota di seluruh Jawa Barat, yang membanjiri Jakarta, dikerahkan oleh KAPPI DPHD Jabar karena Jakarta secara geografis, di dalam lingkaran dekat dengan Jawa Barat atau Bandung. Oleh karena itu, memungkinkan pemuda pelajar Bandung atau seluruh Jawa Barat dengan mudah membanjiri Jakarta secara cepat.

Hal itu terjadi, setelah Endang Saifudin Anshary dari PII, mendapat mandat dari Ketua Pusat KAPPI Husni Thamrin, berhasil membentuk DPHD KAPPI Jabar di Jalan Kemir 7 Bandung. Dari sini, diikuti dengan terbentuknya Cabang KAPPI di seluruh sekolah dan kota-kota hingga kecamatan di Jawa Barat. Bangkitlah massa pemuda pelajar membanjiri Jakarta, melancarkan demo perlawanan terhadap PKI dan organisasi bawahnya. Keikhlasan jiwa dan keberanian para pemuda pelajar berdemo, baik di Bandung, Bogor, dan Djakarta, sangat menakjubkan. Terbaca tanpa memerhitungkan risiko yang dapat merenggut nyawanya.



Sumber: Doc. Priadi

## ITTO RIVANO

Ketua Presidium KAPPI Bandung

Guna mengkualitaskan gerakan Demonstrasi KAPPI di Jakarta dan di Jabar

Itto Rivano dan Artie Djohan, bersama Udin Koswara, Suganda Priatna,

Maman, Toto, Komar Nurdin,

membangkitkan Pasukan Chusus - Passus dan Lasjkar Amperawati

terdiri dari pelajar SMP, SKP, SMA, PGAA, SGA swasta dan negeri.

Poster atau Spandoek bertuliskan

Mahmilubkan Soekarno, Soekarno Pelindung Gestapo PKI,

Tjabut Gelar Ulil Amri, Mahmilubkan Bandrio Hadji Peking

sebagai akibat Presiden Soekarno terlambat mengeluarkan surat perintah pembubaran PKI

terdahului Gubernur Jawa Barat Mashudi dan Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie

yang telah membubarkan PKI dan organisasi bawahannya Jawa Barat.



Sumber: Doc. Pribadi

### Pemberian Satia Penegak Kodam VI Siliwangi (1969)

Pangdam H. R. Dharsono menyematkan lanting Satia Penegak Kodam VI Siliwangi kepada pimpinan angkatan 66. Kedua dari kanan: Uwes Corni, Ketua umum DPHD KAPPI Jabar juga pencetus ide Provinsi Banten.



Sumber: Dept.Penerangan RI

## DRUM BAND FATAYAT NU JATIM

Kebangkitan Fatayat NU menuntut pembubaran PKI  
dalam Harlah ke-40 Nahdlatul Ulama



Sumber: Dept.Penerangan RI

## DRUM BAND MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

Genderang Kematian Untuk PKI  
Didentangkan di hadapan Presiden Soekarno  
Agar segera membubarkannya  
Bersama seluruh organisasi bawahannya

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Semangat yang menyala dari pemuda pelajar menjadikan orang-orang yang bersimpati kepada komunis berang. Mereka dengan senjata mencoba mengubah jalannya sejarah. Mereka menembaki demo pemuda pelajar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan di kota-kota lainnya. Tidak sedikit pemuda pelajar yang jadi korban, gugur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Darah pemuda pelajar yang masih muda dari KAPPI, KOKAM dan Ansor bersama Banser, dengan ikhlas membasahi bumi tempat juangnya demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka bertekad membersihkan Indonesia yang merdeka karena berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, harus terbebas dari ajaran ideologi komunisme, sekulerisme, atheisme - anti Tuhan dan anti agama.

Suatu peristiwa sejarah yang sangat menakjubkan dan tanpa tanding. Suatu kekuasaan politik Orde Lama yang sangat kuat dan didukung PKI dan organisasi bawahannya serta oknum militer dan polisi, ditunjang pula oleh kekuatan komunis RRC, dapat ditumbangkan oleh kekuatan mayoritas massa pemuda pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dan mahasiswa.

Betapa cepatnya pengembangan penularan kesadaran anti komunis merasuk masuk pada setiap dada pemuda pelajar dari sekolah swasta dan negeri, serta pesantren. Dalam waktu relatif singkat, dari kecamatan hingga ibu kota. Kemudian, berkembang dari Jawa Barat menyebar ke seluruh Nusantara Indonesia. Mungkinkah hal ini terjadi bila tanpa dukungan Ulama?

Pengerahan massa KAPPI dari seluruh desa dan kota-kota di Jawa Barat, para pemuda pelajar yang membanjiri Jakarta digerakkan dan diorganisasikan oleh DPHD KAPPI Jabar, dipimpin oleh: Ketua Umum, Uwes Corni dari PII dan Jurnalistik Unpad. Ketua Presidium terdiri dari: Mursalin Dahlan dari IPM dan Teknik Kimia ITB. Mukti Ritonga, dari Pelajar Al-Waslijah dan Jurnalistik Unpad, Rusmana dari SEPMI dan IKIP Bandung. Ibnu Kutub dari IPNU dan IKIP Bandung.

Sekretaris Umum, A. Mansur Suryanegara dari IPM, Fak.Sastraa Jurusan Sejarah Unpad. Sekretaris I, Hasan Sjukur dari PII dan Publisistik Jurusan Jurnalistik Unpad. Bendahara, Gahara Nauli Rambe, Peladjar Al-Waslijah dan Publisistik Jurusan Jurnalistik Unpad. Humas, Mahyudin Rambe dari Peladjar Al-Waslijah dan Publisistik Jurusan Jurnalistik Unpad. Keputrian, Tuti Sugiarti dari PII dan SKPN Bandung.

Markas DPHD KAPPI Jabar di ujung timur Jalan Suniaraja Bandung,<sup>23</sup> dan Markas KAPPI Bandung di Jalan Stasiun Bandung.

Untuk meningkatkan kualitas gerakan penggerahan massa, DPHD KAPPI Jawa Barat membentuk Pasukan Chusus – Passus dan Lasjkar Amperawati, dilaksanakan oleh Ketua Presidium KAPPI Bandung Itto Rivano - PII dari Fakultas Hukum Unpad dan Sekretaris Umum M. Romli - SEPMLI dari IKIP Bandung.

Dibantu oleh Udin Koswara, Apen, Suganda Priatna, Suharto, Komar Nurdin - PII dari Fakultas Hukum, Sospol Unpad, Barna Somantri - Sepml dari IKIP Bandung. Sedangkan Ketua Passus Bandung adalah Artie Johan.

Adapun Passus dan Lasjkar Amperawati KAPPI direkrut dari siswa SMP Muslimin, SMP, SMEA, SMA Muhammadiyah, SKPN, SMPN, SMAN, PGAAN, SGAN Bandung.<sup>24</sup> Dengan seragam loreng, warna dasar merah dan loreng berwarna hitam. Pada goresan loreng hitam terdapat tulisan Passus KAPPI atau Amperawati KAPPI. Sukar untuk dipahami di masa kini apabila pelajar putri dengan sukarela bersedia berjuang membebaskan negara dan bangsa dari ideologi komunis. Dengan tidak memerlukan imbalan materi apapun.

Tuntutan dari Passus dan Amperawati pada saat demonstrasi dapat dibaca pada poster yang dibawanya, antara lain: Soekarno Pelindung Gestapo PKI, Tjabut Gelar Waliul Amri dari Sukarno, Sukarno Ketjap Agung, Pak Osa Maliki tindaklah Teror di Djokja. Mahmilubkan Sukarno.

Poster atau spandoek yang begitu bunyinya karena kerasnya tuntutan para pemuda pelajar agar Presiden Soekarno segera membubarkan PKI dan organisasi bawahannya, belum juga dijawab oleh Presiden Soekarno. Dengan kata lain, bunyi poster dan spandoek, atau coretan di jalanan itu sebagai akibat Presiden Soekarno mempertahankan PKI, serta menilai PKI dan organisasi bawahannya dengan melalui pengaruh Presiden Soekarno masih dapat dikendalikan seperti golongan nasional, agama dan ABRI yang berjuang untuk mempertahankan NKRI. Padahal, PKI realitasnya agen negara asing RRT atau Rusia. Presiden Soekarno tidak mau beranjak dari konsep Nasakom walaupun sudah tidak realistik lagi. Dampaknya, nama baik dan seluruh gelar Presiden Soekarno ternodai karena bekerja sama dengan PKI.

- 
- 23 Haryoto Kunto,1984. *Wajah Bandeng Tempoe Doeloe*. PT. Granesia, hlm 232, menuturkan bekas Markas KAPPI gedung antik bergaya seni bangunan *Indische Empire Stijl* tahun 1881, dihancurkan oleh Wali Kota Bandung.
- 24 Diluar dugaan pimpinan DPHD KAPPI Jabar tiba-tiba muncul kesatuan aksi tandingan *Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia – KAIFI* hanya ada di Sukabumi dan Bandung yang terdiri dari pelajar Sekolah Kristen dipimpin oleh Thomas Sitepu. Tidak pernah ada di luar Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi hanya ada di Sukabumi dan Bandung. Demikian penjelasan Itto Rivano.

Setelah Djenderal Soeharto menyatakan pembubaran PKI dan segenap organisasi bawahannya, berdasar Surat Perintah 11 Maret 1966, dampaknya di Bandung, lima bulan kemudian, 19 Agustus 1966 terjadi serbuan dengan nama PNI Ali Soerachman - A Soe dan Barisan Anak Soekarno, didukung pula oleh sebagian oknum militer, ke Markas KAPPI di Jalan Stasiun Bandung. Sekarang menjadi SMP Pasundan. Mereka juga melakukan penyerangan ke Markas KAMI di Jalan Lembong, dan Universitas Katolik Parahyangan di Jalan Merdeka Bandung.

Penyerbuan ke Markas KAPPI, dapat digagalkan oleh Mursalin Dahlan Ketua DPHD KAPPI Jabar yang menantang dengan suara keras di pintu Markas, langkah lebih dahulu mayatku, kalau berani menduduki Markas KAPPI. Demikian penjelasan Itto Rivano SH kepada penulis. Kalau direnungkan sekarang, sukar dimengerti mengapa tantangan ini membuat kelompok penyerbu, sekalipun didukung oleh oknum militernya, ketakutan dan kembali menarik mundur.<sup>25</sup>

Perlu diperhatikan, walaupun namanya KAPPI atau pemuda pelajar, namun pimpinannya terdiri dari mahasiswa ataupun yang telah selesai studinya atau sarjana muda. Strategi kepemimpinan ini dipandang sangat perlu, demi menjaga infiltrasi PKI dan agar mampu mencerna info gerakan yang waktu itu sedang berkembang. Terutama untuk memudahkan membentuk kesatuan sikap antara KAPPI dan KAMI serta ABRI dalam menjalankan strategi gerakan atau aksi.

Perlu dicatat pula, pengaruh ajaran Islam ke dalam sekolah dan universitas, institut, melahirkan organisasi ikatan pelajar: Peladjar Islam Indonesia - PII, Ikatan Peladjar Muhammadiyah - IPM, Ikatan Peladjar Nahdlatul Ulama - IPNU, Serikat Peladjar Muslimin Indonesia - SEPPI dan himpunan atau ikatan mahasiswa: Himpunan Mahasiswa Islam - HMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia - SEMMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia - PMII, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - IMM yang berhaluan Islam.

Organisasi ini semuanya menjadi ciri perluasan dan peningkatan jaringan kejuungan organisasi yang semula dengan nama Santri. Dengan kata lain, pembentukan organisasi pelajar atau mahasiswa, hakikatnya sebagai perkembangan lanjut gerakan Santri dari masa penjajahan dan masa kebangkitan kesadaran nasional. Adapun bentuk dan wujud gerakannya disesuaikan dengan kepentingan tantangan - challenge dan ciri zaman - Zeitgeist.

---

25 Dalam penyerbuan Barisan Anak Sukarno 19 Agustus 1967 ke Universitas Katolik Parahyangan, di Jalan Merdeka Bandung, telah gugur seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Yulius Usman dari HMI. Oleh Dewan Guru Besar, Yulius Usman diangkat sebagai Drs. Ekonomi Anumerta.



Sumber: Dept. Penerangan RI

## POSTER HARLAH KE-40 NAHDLATUL ULAMA

31 Januari 1926 - 1966 di Jakarta

MEMBUBARKAN PKI ANTI TUHAN – IBADAT KEPADA ALLAH SWT

Menyambut kehadiran Presiden Soekarno dalam Harlah ke-40 NU.

## UP Grading dan Musyawarah KAPPI

DPHD KAPPI Jabar tidak hanya mengadakan penggerahan massa untuk demonstrasi di Jakarta. Namun, di bawah pimpinan Mursalin Dahlani juga mengadakan Up Grading atau Musyawarah KAPPI Jawa Barat. Dengan mengambil lokasi berpindah-pindah di sekitar Jakarta, antara lain: Cirebon, Bogor, Banten, Purwakarta, dan Tasikmalaya. Tujuannya selain dengan pertimbangan geostrategi memilih kota-kota di sekitar Jakarta, juga sebagai upaya konsolidasi dan sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat agar konsisten tetap menentang ajaran komunis.

Bertolak dari kepentingan ini, pembicara dalam Up Grading KAPPI diundang beberapa pimpinan nasional yang memahami kondisi zaman dan mayoritas rakyat Indonesia bersikap antikomunis. Antara lain: Bung Tomo pelaku sejarah dalam Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Bergabung dalam gerakan Amanat Penderitaan Rakjat - Ampera dari pemuda pelajar dan mahasiswa. Bung Hatta Proklamator 17 Agustus 1945 dikenal dengan pencetus pemikiran Demokrasi Kita. Tidak lupa



## JEND. TNI (PURN.) UMAR WIRAHADIKUSUMAH

Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924

Perjalanan Karier

Pangkostrad (1965-1967)

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1969-1973)

Wakil Presiden Indonesia ke-4 (1983-1988)

*“... Saya kira binatang pun tidak ada yang sebiadab dan sekejam PKI ...”*

Prof. Dr. Buya Hamka, Ulama pejuang dan pimpinan Masjumi, Muhammadiyah yang pernah dipenjarakan pada masa Orde Lama karena menentang PKI.

## TRITURA KAPPI dan KAMI

Sebelum lahirnya Supersemar 1966, pada 12 Januari 1966, Rabu Wage, 19 Ramadhan 1385, sesudah melakukan demo ke Kantor Sekneg berdialog dengan Menteri Chaerul Saleh maka KAMI dan KAPPI mencetuskan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat - Tritura, isinya adalah :

1. Pembubaran PKI;
2. Pembersihan Kabinet dari Unsur G-30-S/PKI;
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

## Harlah Ke- 40 Nahdlatul Ulama

Namun, Tritura ini tidak dijawab oleh Presiden Soekarno. Bahkan, Presiden Soekarno memanfaatkan momen Hari Lahir Ke-40 Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926-1966 dengan mengajak agar segenap warga Nahdliyin merangkul Presiden Soekarno dan sebaliknya Presiden Soekarno merangkul Nahdlatul Ulama:

Memang saja tidak tedeng aling2, saja tjinta kepada N.U. Bukankah saja sudah mengutjopkan di Sola, He N.U. saja tjinta kepadamu, tjintailah kepadaku. Hai N.U. saja rangkul kepadamu, rangkullah aku ini.<sup>26</sup>

Pidato Presiden Soekarno benar-benar tidak memahami tuntutan warga Nahdliyin agar Presiden Soekarno membubarkan PKI. Seperti yang terpampang pada poster raksasa yang menyatakan “Membubarkan PKI Jang Anti Tuhan = Ibadat Kepada Allah SWT.”

Artinya, para Ulama dan pimpinan Partai Nahdlatul Ulama tetap menuntut pembubaran PKI. Sayangnya, tuntutan yang demikian jelas, tidak diperhatikan oleh Presiden Soekarno. Padahal, Presiden Soekarno menamakan dirinya sebagai Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Sikap Presiden Soekarno yang tidak mau mendengar tuntutan Nahdlatul Ulama - NO, dijadikan kata sindiran di tengah masyarakat, Soekarno tanpa NO jadi Soekarno.

26 Kementerian Penerangan, Publikasi Visual, 1966, *Harlah N.U.* Tjukilan Amanat P.J.M. Presiden Sukarno pada Rapat Akbar Peringatan 40 tahun Harlah (Hari Lahir) Nahdlatul Ulama pada 30 Januari 1966 di Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan Djakarta, hlm 9.



Sumber: Dept. Penerangan RI

## DEFILE BARISAN SERBA GUNA - BANSER ANSOR DAN DRUM BAND G.P. ANSOR

Terompet kematian PKI dan organisasi bawahannya digemakan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di tengah Samodra Keluarga Nahdliyin di hadapan Presiden Soekarno. Sekaligus Genderang Syukur ditabuh, mensyukuri Nikmat Allah para Ulama dan Santri Selamat dari Terulangnya Kebiadaban Kudeta PKI di Madiun dan G305/PKI di Jakarta.

Sebenarnya, GP Ansor dan Banser menghadiri Harlah Ke-40 Nahdlatul Ulama, di Jakarta dengan nawaitu siap menunggu komando selanjutnya dari Presiden Soekarno, dan Dr. K.H. Idham Chalid dalam menumpas PKI dan segenap organisasi bawahannya, seperti yang telah dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali terhadap PKI atau Gestok 1965.

Sangat disesalkan tidak ada komando atau perintah lanjutnya. Baik dari Presiden Soekarno ataupun dari Ketua Umum NU, Dr. K.H. Idham Chalid. Akibatnya, Harlah Ke-40 Nahdlatul Ulama di Senayan Jakarta, hanya mengadakan show of force dari kekuatan keluarga besar Nahdlatul Ulama termasuk GP Ansor dan Banser, disertai drum band Muslimat.

Walaupun demikian, 31 Januari 1966, Senin Pon, 8 Syawwal 1385, mengubah Jakarta yang pernah jadi lautan bendera dan poster merah Palu Arit pada saat Ultah ke-45 PKI, 23 Mei 1965, menjadi Samodra Hijau Nahdlatul Ulama dan dipenuhi poster yang menggambarkan desakan warga Nahdliyin membebaskan NKRI dari PKI.

Tuntutan Partai Nahdlatul Ulama tetap konsisten ingin membubarkan PKI dan organisasi bawahannya, walaupun dirangkul oleh Presiden Soekarno, menjadikan kepastian langkah KAMI dan KAPPI bersama ABRI, berjuang membebaskan bangsa dan negara NKRI dari bencana PKI. Apalagi, Kudeta PKI bukan untuk Indonesia. Melainkan untuk RRC dan Uni Soviet Rusia serta Kominform.

Ledakan demonstrasi KAMI-KAPPI yang datang dari kota-kota di Jawa Barat, membanjiri Jakarta, tidak dapat dilumpuhkan atau dihancurkan dengan kekuatan senjata Tjakrabirawa Barisan Kawal Presiden Soekarno. Seratus Menteri juga tidak mampu berbuat apapun untuk membendungnya.

Presiden Soekarno tidak mampu lagi melindungi Omar Dhani dan keluarganya walaupun disimpan di Istana dan tidak dapat lagi mempertahankan pendapatnya bila PKI dibubarkan akan terjadi ancaman dari luar negeri Rusia dan RRC. Demo KAPPI di kota-kota besar telah mengambil alih sekolah China Komunis atau milik Baperki. Dekan Fakultas Sastra pun telah membekukan kuliah untuk Jurusan Sastra Rusia dan China. Seluruh Perguruan Tinggi dan sekolah menghentikan aktivitas belajar mengajar sebelum PKI dibubarkan.

Gubernur Jawa Barat Mashudi dan Pangdam Kodam VI Siliwangi Ibrahim Adjie telah memelopori pembubaran PKI Jawa Barat dan organisasi bawahannya. Menurut Soeharto dalam Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya , Otobigrafi mendesk

kepada Presiden Soekarno untuk menghindarkan ancaman dari luar negeri agar mengalihkan kewenangan pembubaran PKI kepada Letnan Djendral Soeharto. Dari sinilah lahirnya Supersemar.

## Supersemar Pembubaran PKI

Puncak keberhasilan perjuangan KAMI dan KAPPI dalam mendukung perjuangan ABRI yang dipimpin oleh Major Djenderal Basuki Rahmat, Brigadir Djenderal M. Yusuf, dan Brigadir Djenderal Amir Mahmud menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 - Supersemar, bertepatan pada Jumat Pahing, 18 Dzulqaidah 1385. Kelanjutannya bersumber pada Supersemar, Letnan Djenderal Soeharto, atas nama Presiden Soekarno pada 12 Maret 1966, Sabtu Pon, 19 Dzulqaidah 1385, menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI dan ajaran ideologi komunis.<sup>27</sup>

Pembubaran dan pelarangan aktivitas PKI dan ajaran komunisme disambut oleh rakyat dengan rasa syukur tiada hingga. Di mana-mana terjadi demonstrasi segenap kesatuan aksi luar biasa besarnya. Komunisme dan Marxisme benar-benar merupakan ajaran musuh rakyat Indonesia.

Sekali lagi, untuk pertama kalinya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, kekuatan PKI sebagai partai politik dan organisasi bawahannya, sekalipun didukung oleh kekuatan RRC dan Rusia, tumbang oleh kekuatan pemuda pelajar KAPPI yang diorganisasikan oleh PII, IPM, IPNU, SEPPI, Ansor dan mahasiswa KAMI yang digerakkan oleh kekuatan utamanya dari HMI bersama IMM, PMII, SEMMI dan segenap kekuatan rakyat, pelajar, mahasiswa Indonesia yang anti komunis.

Langkah lanjut perjuangan dari realisasi Supersemar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI menyampaikan Nota Politik KAMI, pada 2 Mei 1966, dibacakan oleh Ketua Presidium KAMI Cosmas Batubara, di depan Ketua Sidang DPRGR H. Achmad Sjaichu, menyatakan bahwa proses pembentukannya DPRGR, MPRS, dan DPA tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan DPR.

27 Soeharto, 1989. *Soeharto, Fikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Catatan*. PT Citra Lamtoro Gung Persada. Jakarta, hlm. 171-178.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

DEMONTRASI NU  
TUNTUT BUBARKAN PKI DAN ORGANISASI  
BAWAHANNYA MASSA KAPPI KAMI MENUNTUT  
MAHMILUBKAN SUBANDRIO

## Pendadanan Kembali dan Pembaruan DPRGR

Pengaruh dari Nota Politik KAMI ini, pimpinan DPRGR demisioner. Kemudian pada 17 Mei 1966, Selasa Wage, 25 Muhamarram 1386, DPRGR memilih pimpinannya:

Ketua	:	H. A. Sjaichu	Golongan Islam
Wakil Ketua	:	Mohammad Isnaeni	Golongan Nasionalis
Wakil Ketua	:	Drs. Ben Mang Reng Say	Golongan Katolik
Wakil Ketua	:	Laksamana Muda L. Mursalin	
		Daeng Mamanggung	Golongan Karya
Wakil Ketua	:	Brigjen Dr. Sjarif Thayeb	Golongan Karya

Dari penamaan golongan tadi, terbaca adanya istilah nasionalis, diartikan sebagai golongan yang tidak mewakili agama atau aliran kebatinan. Padahal, istilah nasional awalnya dicetuskan dan disosialisasikan oleh H.O.S. Said Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis dari Centraal Sjarikat Islam. Pada awal maknanya, pada 1916 M, gerakan kepeloporan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa dalam perjuangannya membebaskan bangsa dan negara serta agama dari penindasan imperialisme Barat. Berikutnya berubah maknanya seperti di atas.

Di atas terdapat adanya empat golongan maka makna istilah nasional di tahun 1386 H/1966 M berubah menjadi nama golongan bukan dari gerakan Islam. Berarti pada saat perubahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, terjadi pula proses deislamisasi makna nasional.

Selain itu, saat situasi nasional sangat genting, para Ulama dijadikan umbrella - payung pelindung dan diangkat dalam kedudukan dan peran politik yang menentukan. Seperti diangkatnya K.H. Achmad Sjaichu dari NU sebagai Ketua DPRGR di atas. Juga KAP Gestapu dipimpin Subhan Z.E. dari NU. Sebaliknya, bila situasi sudah aman, digeser dan dikondisikan agar Ulama kembali kepada Khittah 1926 memimpin jami'ahnya sendiri.

Kebijakan Presiden Soeharto selanjutnya, dalam melakukan "redressed and renewed – mendandani dan memperbarui" DPR dari 247 wakil, ditambah dengan 75 dari ABRI dan 14 KAMI, 2 Hindu Bali, 8 Irian Barat, 2 Veteran, 2 Sipil. KAPPI tidak menuntut untuk ikut serta memiliki perwakilan dalam kelembagaan negara. Walaupun pimpinan KAPPI ada yang diangkat sebagai Staf Pengajar di Perguruan

Tinggi atau telah menyelesaikan studi di universitas atau institutnya.

Militer 75 wakil, terdiri dari:

AD 19, AL 14, AU 14, Polisi 14

Parpol menjadi 247 wakil, terdiri dari:

NU 75, PSII 20, Parmusi 18, Perti 9

Parkindo 17, Katolik 15,

PNI 78, IPKI 11, Murba 4

Dari gambaran nama partai atau golongan dan jumlah perwakilannya tadi, Partai Sosialis Indonesia - PSI dari Soetan Sjahrir ditiadakan. Parmusi sebagai partai politik baru yang dibangun oleh pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, hampir bersamaan jumlah perwakilannya dengan Parkindo dan Katolik.

Apakah penentuan jumlah perwakilan Partai Kristen Indonesia - Parkindo dan Partai Katolik di atas, didasarkan pula adanya peningkatan jumlah konversi pengikut baru agama Kristen yang bertambah 400.000 orang, beberapa bulan setelah Kudeta 30 September 1965 PKI, seperti yang dikemukakan oleh Justus M. van der Kroef, 1971, dalam *Indonesia Since Sukarno*.

Apakah karena adanya dukungan kalangan militer non-Islam maka jumlah perwakilan partai Kristen dan Katolik tersebut, hampir menyamai jumlah perwakilan parpol Islam? Barangkali juga sebagai akibat Orde Baru setelah menghancurkan PKI, politiknya mulai cenderung ke Barat maka jumlah perwakilan dari kedua partai politik non-Islam disamakan dengan partai politik Islam.

Kemudian, timbul pertanyaan apa alasan kedua partai politik Kristen dan Katolik, kelanjutannya ditiadakan? Apakah karena keduanya sudah disiapkan wadah baru Golongan Karja - Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia – PDI? Sedangkan partai politik Islam NU, PSII, Perti, Parmusi juga ditiadakan, tetapi disalurkan dalam Partai Persatuan Pembangunan – PPP? Lalu, masuk kemana Partai Katolik dan Parkindo, ke Golkar atau PDI?

## D.N. Aidit, Pemimpin PKI Keblinger

Kembali ke masalah RRC pembantu G30S/PKI maka Pemerintah RI mulai 1 Oktober 1967 memutuskan Hubungan Diplomatik RI dengan RRC. Seperti yang dituturkan oleh Manai Sophiaan dari Karim D.P. bahwa Aidit dan Njoto, setelah menghadiri KTT Kecil di Kairo, Juni 1965, pergi ke Paris. Tanpa diketahui oleh Presiden Soekarno, dilanjutkan ke Kremlin untuk menyampaikan niat kudeta di Indonesia seperti yang dikerjakan oleh Kolonel Boumediene yang berhasil menggulingkan Presiden Ben Bella yang sedang tidur.

Walaupun kudeta tersebut dipimpin oleh kolonel, dan hanya didukung oleh 30% rakyat, menurut Aidit dapat diubah menjadi revolusi. Penolakan rencana kudeta oleh Kremlin tetap dikerjakan oleh Aidit karena merasa telah didukung oleh RRC dan dilaksanakan oleh kelompok perwira muda yang maju.

Dapatlah dipahami bila Aidit membenarkan Kudeta Kolonel Boumediene terhadap Presiden Ben Bella dalam menjawab pertanyaan Karim D.P. tadi karena Aidit sendiri merencanakan Kudeta PKI, pelaksanannya adalah Letnan Kolonel Untung dan akan dilaksanakan sama malam hari seperti di Aljazair.

Namun, D.N. Aidit lupa bahwa Presiden Soekarno tidak sama kualitasnya dengan Presiden Ben Bella. Beberapa kali diberitakan CIA mencoba melakukan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dan selalu gagal. Apalagi, Politbiro PKI dan D.N. Aidit merencanakan akan menggantikan Presiden Soekarno walaupun sedang turun kesehatannya dan diobati oleh Sin She RRC, dapat dipostikan hasilnya gagal.

D.N. Aidit salah perhitungannya, Angkatan Darat masih memiliki banyak Prajurit yang dibesarkan dengan pengalaman militer dan politik dalam kancab revolusi melawan imperialis. Beda dengan realitas pimpinan militer dan sikap rakyat Aljazair.

Aidit lupa dalam masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M ketika PKI melakukan Kudeta di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI melakukan teror terhadap rakyat. Rakyat sangat cinta kepada Presiden Soekarno dan Panglima Besar Soedirman, dan saat itu Aidit dan kawan-kawannya tidak dikenal rakyat. Kecuali Amir dan Moeso, kedua pimpinan PKI yang dicap oleh Presiden Soekarno sebagai Teroris.

Aidit lupa bahwa pidato dan penyaataan Presiden Soekarno bagi rakyat awam mempunyai nilai hukum yang tinggi. Walaupun telah lama tetapi sukar dilupakan, kata Presiden Soekarno, PKI Teroris.

Oleh karena itu, pidato Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Nawaksara<sup>28</sup>

28 Soegiarso Soerojo, 1988. *Siapa Menakur Angin Akan Menuai Eadai*. CV Sri Murni. Jakarta, hlm.

menyatakan bahwa Gerakan 30 September ditimbulkan oleh tiga faktor:

1. Keblingeran pemimpin-pemimpin PKI;
2. Kelihaian Nekolim;
3. Memang ada oknum-oknum yang tidak benar.<sup>29</sup>

Kekeblingeran pimpinan PKI dapat diukur dari ucapan kemarahan besar Presiden Soekarno dalam Sidang Kabinet di Istana Bogor, 6 Oktober 1965, memaki-maki Njoto PKI,

"Njoto, kamu tolol mengobarkan peristiwa terkutuk itu. Peristiwa ini menghancurkan nama komunis. Itu satu tindakan kekanak-kanakan"

Demikian penjelasan Djenderal Soeharto yang hadir dalam sidang tersebut.

Pidato Presiden Soekarno, Nawaksara, di depan MPRS, dituntut untuk memperlengkungjawabkan sebab terjadinya peristiwa G30S/PKI dan epilognya. MPRS mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden Seumur Hidup karena tidak memiliki dasar hukum.

Jika kedua pernyataan dan penilaian Presiden Soekarno terhadap Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, PKI adalah Teroris dan pertanyaan Presiden Soekarno terhadap Kudeta G30S/PKI, pemimpin PKI adalah pemimpin yang keblinger, keduanya dapat dijadikan fakta sejarah bahwa kehadiran PKI di tengah bangsa dan negara Indonesia, menjadi sumber terorisme, keblingeran, ketololan, dan tindakan kekanak-kanakan.

Lalu, setelah penumpasan PKI secara fisik selesai, parpol dan organisasinya dibubarkan. Kemudian, kemana saja anggota dan pimpinan PKI melakukan infiltrasi? Sulit kiranya untuk menemukan informasinya karena istilahnya saja infiltrasi, tentu tidak terbuka sifatnya. Barangkali hanya dapat dideteksi bila timbul lagi pemimpin yang keblinger.

Melalui Supersemar pula, dibubarkan lembaga-lembaga yang didirikan secara ekstra konsitusional: Front Nasional, Komando Operasi Tertinggi - KOTI, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi - Kotrar, Komando Logistik Nasional - Kolognas,

---

562 penolakan Pimpinan MPRS RI No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkap Pidato Nawaksara.

29 *Ifid.*, hlm.415. Periksa, Justus M. van der Kroef. 1971. *Indonesia Since Soekarno*. Asia Pacific Press. Singapore, h. 33 menyatakan bahwa *Presiden Soekarno mengutuk Kudeta Gestapo*. Presiden Soekarno juga menyatakan sangat terkejut – *complete surprise to me*. Dinyatakan selanjutnya Kudeta Gestapo terjadi akibat adanya tiga sebab: (1) *Elundering FKI leaders* (2) *The Cunning of the nekolim* (3) *And the activities of persons who were "crazy"*.



DRS. K.H. MUCHTAR ADAM

Pendiri Pesantren Al-Qur'an Babussalam

Ciburial Bandung, Solok, Selayar, Wakaitobi, Nias, dan Aceh.

Pernah ditugaskan sebagai pembina rohis Tapol PKI di Pulau Buru.

Kepada penulis menuturkan keheranannya, mengapa Tapol PKI banyak yang masih buta huruf.

Dlsamping itu diakui ada intelektualnya, yaitu Pramudya Ananta Toer dari Lekra.

Keheranannya dijawabnya, hal itu terjadi sebagai akibat Tapol PKI dikirim dari daerah yang dipimpin oleh Walikota, Bupati, Kodim, Polisi yang menaruh simpati pada PKI dan organisasi bawahannya. Oleh karena itu, dikirimkanlah PKI yang buta huruf. Lalu ke mana larinya atau menyusunnya anggota dan pimpinan PKI yang tidak buta huruf?

dan yang lainnya.

Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1966 diberi nama "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah - Jasmerah". Isinya tetap mempertahankan konsep Nasakom. Pidato ini dinilai oleh rakyat, Presiden Soekarno sendiri justru telah meninggalkan sejarah yang sebenarnya. Tidak lagi mampu untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Terjadilah demo di mana-mana. Di Jakarta berdampak gugurnya wartawan mahasiswa Zainal Zakse.

## GP Ansor dan RPKAD

GP Ansor dengan Bansernya, tanpa menunggu komando Panglima Kodam VIII Brawijaya, melakukan gerakan saku bersih PKI dan segenap organisasi bawahnya. Menurut Choirul Anam, di bawah pimpinan Hizbulah Huda, GP Ansor melakukan penumpasan secara fisik terhadap PKI karena tidak mau terulang kembali Ulama dijadikan sasaran pembunuhan PKI pada saat Kudeta PKI di Madiun, 1948 M. Diakibatkan juga adanya rencana PKI akan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Ulama. Selanjutnya, Choirul Anam menuturkan operasi fisik GP Ansor dan Banser ini menghadapi kekuatan PKI yang sudah memiliki senjata. Akibatnya di seluruh Jawa Timur, GP Ansor dan Banser banyak gugur sebagai syuhada, berjumlah sekitar 132 orang pemuda.

Pada saat itu, terdengar berita D.N. Aidit melarikan diri ke Surabaya, kemudian pindah ke Blitar. Dari sini, bersembunyi lagi ke Semarang dan Solo Jawa Tengah. Dampaknya, setelah D.N. Aidit tertangkap, muncullah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, gerakan mbah Soero dengan pasukan baju dan celana hitamnya bertali pinggang benang putih. Mereka ini pendukung gerakan PKI, PNI Ali Soerachman atau PNI ASoe. Disebut juga sebagai gerakan Aku Pendukung Soekarno atau Apes. Dalam bahasa Jawa, ASoe adalah anjing dan Apes artinya celaka. Singkatan ini mewarnai pemberitaan media anti-Soekarno.

Operasi militer RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi, bersama GP Ansor dan Banser berhasil menghancurkan mbah Soero di sekitar Blora. Demikian penuturan Choirul Anam, tentang rakyat bertindak sendiri menghancurkan PKI.

Di tengah bangsa sedang Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimanfaatkan oleh PKI untuk melaksanakan Kudeta PKI 30 September 1965. Mengapa di tengah konfrontasi digunakan untuk kudeta? Menurut teori komunis, perang

## PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

sebagai pembuka jalan kemenangan bagi revolusi komunis. Komunisme juga mengajarkan dengan melaksanakan *vultural strategy* - mengail di air keruh akan mensukseskan apa yang sedang diprogramkan, yakni kudeta.

Ketika PKI melaksanakan teori *vultural strategy*, muncullah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI dengan mayoritasnya dari HMI, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI dengan mayoritasnya dari Pelajar Islam Indonesia - PII, dan didukung pula oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah - IPM, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - IPNU, serta KAP Gestapu dari Ansor dan Banser, menyulitkan gerakan Kudeta G30S/PKI selanjutnya.

Sebenarnya, ABRI dalam upayanya menghancurkan PKI menemui hambatan karena situasi peralihan iklim politik masih didominasi oleh pengertian anti komunis tetapi pro Soekarno. Dari kalangan ABRI sendiri masih belum jelas, dari kesatuan dan batalyon mana memihak kemana serta kepada siapa?

Setelah adanya kegagalan Kudeta G30S/PKI, Presiden Soekarno memerintahkan agar menghancurkan Gerakan Satu Oktober atau Gestok sampai ke akar-akarnya. Maksudnya, Gerakan 30 September terjadi pada pukul 03.00 pagi, berarti sudah lewat jam 00.00 tengah malam, masuk 1 Oktober 1965. Oleh karena itu, gerakannya bukan G-30-S melainkan Gestok.

Pidato Presiden ini di Jawa Timur wilayah Ansor dan Banser, diterjemahkan menjadi perintah pembasmiang anggota dan pimpinan PKI dan organisasi bawahannya. Diikuti Pemuda Marhaen yang anti PKI di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Tidak mau terulangnya Kudeta PKI di Madiun yang menjadikan kalangan Marhaen juga jadi korban bersama para Ulama dan Santri.

Setelah D.N. Aidit mengetahui Kudeta G30S/PKI gagal total, ia segera meninggalkan Jakarta dan lari ke Surabaya. Kemudian, pindah ke Blitar pada 6 Oktober 1965. Selanjutnya, lari ke Jawa Tengah, sembunyi di rumah janda tua mbok Hardjosomarto di Desa Sambeng Gede, belakang stasiun KA Balapan Surakarta. Rumah itu dikontrakkan kepada A. Kasim, pensiunan pegawai Bea Cukai.

Pada 22 November 1965, pukul 21.00 D.N. Aidit tidak dapat lagi melarikan diri dari operasi RPKAD yang dipimpin oleh Kapten Hartono dan Letnan Ning Prijatna. Tamatlah riwayat D.N. Aidit Sekretaris CC PKI. Berkat Rahmat Allah Yang

# Kita Ungkap Lagi Tulisan „TIME“ tgl. 16-7-1967

## Meletusnya G-30-S/PKI

Membuka Kesempatan Misi2 Kristen Indonesia

DJAKARTA (MH).— MENGULAS tentang kemaduan Misi<sup>2</sup> Kristen di Indonesia dalam rangka pengabaran Indjil keseluruhan pendjuru dunia majalah Time (Amerika) dalam penerbitannya tgl. 16 Djuji 1967 menulis sebagai berikut :

Selama pemerintahan kediktatoran Sukarno yang ditukup lansir tak mengejarkan itu, Misni Kristen di Indonesia terantam oleh pengaruh kemalin dan gerombolan terror Islam dan mengalami tekanan yang dilakukan sejauh prioritas oleh pemerintah yang kedua itu. Sekarang ini, dikalangan bangsa yang sebagian besar beragama Islam di Indonesia yang Kristen mendapat kurang dagi ke depannya tidak diperlakukan adil dan merupakan suatu adegan kebangkitan aduan gereja yang berhasil eksplor jang oleh madziah Kehidupan Presbyterian di



DN AIDIT rjung telah mati, dan sejak itu selaku anggota Misi di Indonesia berhasil menginjeksi rohani dengan ideologi NASAKOMINA, menuduh Lubang Buaya...

A.S. dinamakan „salah satu gerakan terbesar masuk agama Kristen dalam zaman modern“. Di Jawa Tengah waktu 20 bulan sejak revolusi anti komunis gereja Katolik dan Protestan telah memperoleh tambahan pengikut kurang 250.000 orang.

Di Djawa Tengah dan Jawa Timur saja, 65.000 orang telah dibaptiskan. Diderahan Tanah Karo Sumatera Utara, 15.000 orang telah masuk gereja Kristen. Tiap-nipulih djiemaat baru dengan anggotar 5.000 orang telah didirikan disusut daerah Kalimantan Barat. Di Djakarta, 50 perkumpulan pengajaran India telah tumbuh & permintaan akan Kitab

Indjil sedemikian besarnya sehingga sangat dirasakan kekurangan persediaan. Dewan Gereja Nasional A.S. telah memberikan bantuan sebesar \$ 320.000 untuk menikung orang Kristen Indonesia dalam usaha mendidik anggota mereka yang baru itu.

Banyak diantara orang yang masuk gereja itu adalah pengikut Komunisme (termasuk Tjitra RRT-Kec), dan yang terbanyak dianaklebiah oleh dididik dimana sebelum kedatangan Sukarno memang sangat banyak orang Komunisasi (Djateng). Berkatalah seorang anggota Misni Gereja Bapatis di Djakarta: „Tatkala Komunisme gagal dalam memenuhi dianingnya untuk memastikan adanya rakyat loi dengan suatu kejaksanaan, merupakan baptis dan menjadi orang Kristen. Sebahagian pemimpin gereja yang nampankna kurang bersemangat, merubah tujug balwia kebanjiran orang yang masuk gereja itu hukarlah karena iman mereka sendiri yang dibatasi oleh rasa

(Berantauh kehalaman IV)

Sumber: Hasan MH

### Madjalah Time, 16 Juli 1967

Memprovokasi Islam sebagai teroris, menuduh Islam menyerang kaum Kristen dan Katolik, yang telah mendapatkan anggota baru sejumlah 250.000 mantan PKI. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah sejumlah 65.000 orang yang telah dibaptis. Di Sumatera Utara sejumlah 16.000 orang. Amerika

Serikat memberikan bantuan ke Gereja Protestan Indonesia sejumlah US\$ 300.000 untuk pembinaan jemaat baru mantan PKI.

Mahakuasa, tepat 27 Rajab 1365, Senin Pon, 22 November 1965. Bebaslah bangsa dan negara NKRI dari keganasan D.N. Aidit PKI, pemimpin Marxisme.<sup>30</sup>

Walaupun demikian, tidaklah berarti kader PKI sudah tertangkap seluruhnya. Sampai dengan tiga tahun kemudian, menurut Panglima Kodam V/Djaja, Djenderal Amir Machmud, baru 75% tokoh Gestapu PKI tingkat C berhasil ditangkap. Menurut Djaksa Agung Muda, Kolonel Purwosunu SH, sekitar 200.000 kader PKI sukar dipatahkan keyakinannya, September 1968. Sebelumnya Operasi Trisula di Blitar Selatan, berhasil menangkap dan menembak mati Oloan Hutapea yang diangkat sebagai pengganti D.N. Aidit, Agustus 1968.

Operasi terhadap PGRS/PARAKU di Kalbar, dilaksanakan oleh Pangdam XII Tandjungpura, Brigjen Soemadi yang pernah berhasil menangkap Moeso pimpinan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Moeso tertangkap di Ponorogo Madiun. Dengan kerja sama dengan masyarakat Suku Daya, pasukan PGRS/ PARAKU yang bersembunyi di hutan rimba yang masih lebat, dapat dihancurkan.

Pimpinan PKI Golongan A, bersama oknum militer yang terlibat langsung kudeta, diadili di Mahkamah Luar Biasa - Mahmilub.<sup>31</sup> Menurut Djaksa Agung Madjen Sugiharto, 1966, seluruh tahanan sipil PKI berjumlah 120.000 tidak termasuk militer. Secara bertahap dibebaskan kembali, 1974, tinggal 30.000 termasuk 10.000 di P. Buru. Menyusul Golongan B, 1979, seluruhnya dibebaskan. Di antaranya adalah Pramudyah Ananta Toer dari Lekra.

Namun, untuk gembong Gestapu PKI, Sjam, Supardjo, Wirjomartono, Njono, dan Soedisman, ditolak permohonan grasiya oleh Presiden Soeharto.<sup>32</sup> Mereka tetap dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya dilaksanakan pada waktu fajar menyingsing, Oktober 1968. Sedangkan Menteri Achmadi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, dan Achadi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Mei 1968.

Perlu dicatat, menurut keterangan Drs. H. Muchtar Adam dari Pesantren Al-Qur'an Babusalam Bandung,<sup>33</sup> ditugaskan sebagai pendidik Agama Islam untuk

30 Soegiarso Soerojo, 1988. *Op.Cit.*, hlm. 235.

31 Menurut Mohammad Hatta, karena Presiden Soekarno tidak pernah di Mahmilubkan maka tidak dapat dinyatakan terlibat dalam G30S/PKI.

32 Beda dengan S.M. Kartosoewirjo menolak untuk minta grasi kepada Presiden Soekarno ketika Hakim Mahmilub menanyakannya.

33 Drs. K.H. Muchtar Adam pada masa Reformasi, mengembangkan pembangunan Pesantren Al-

Topol PKI di Pulau Buru, menyatakan merasa heran mayoritas tapol PKI di Pulau Buru masih buta huruf.

Pertanyaannya, benarkah mereka pimpinan PKI atau pimpinan organisasi bawahannya. Di mana pimpinan PKI sebenarnya dan dalam organisasi apa serta kemana pimpinan PKI yang tidak buta huruf menyusunnya, infiltrasi, atau melarikan diri, apabila di Pulau Buru kebanyakan tapol PKI buta huruf?

Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Drs. K.H. Muchtar Adam, tapol PKI yang buta huruf ini dikirim ke Pulau Buru, berasal dari daerah yang dipimpin oleh Camat, Kodim, Bupati, Walikota, Gubernurnya simpatisan PKI. Misalnya Wali Kota Bandung, Djukardi adalah tokoh PKI.

## Pembubaran PKI Jawa Barat

Jawa Barat satu-satu provinsi terdepan dan terdekat dengan ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, Jawa Barat menjadi barometer segenap gerakan yang muncul di seluruh tanah air Indonesia. Pada saat terjadinya, G-30-S/PKI, pengaruh demonstrasi KAMI KAPPI di Jawa Barat, memengaruhi gerakan demo di luar Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat, PKI dan organisasi bawahnya paling awal dibubarkan. Siapa yang membubarkannya?

Temyata, atas inisiatif Gubernur Jawa Barat Mashudi yang berlatar belakang sebagai Pesindo<sup>34</sup>, bersama Pangdam Siliwangi Ibrahim Adjie, mendesak agar PKI dan segenap organisasi bawahannya membubarkan diri. Setelah PKI membubarkan diri, Gubernur dan Panglima menghadap Presiden Soekarno. Saat itu, ditanya oleh Presiden Soekarno, siapa yang berhak membubarkan PKI? Gubernur menjawab Presiden Soekarno. Lalu, mengapa Gubernur dan Pangdam membubarkan PKI Jabar di luar perintah Presiden?

Jawabannya, apabila tidak segera dibubarkan maka akan terjadi proses penumpasan PKI di Jawa Barat yang lebih hebat daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di Jawa Barat, masih banyak Darul Islam musuh utama PKI. Kebijakan Gubernur Mashudi dan Panglima Kodam VI Siliwangi Ibrahim Adjie, menjadikan PKI Jawa Barat selamat. Tidak terjadi pembunuhan PKI yang parah sebagaimana di Jawa

Qur'an di Aceh, Solok Sumatra Barat, Pulau Nias, Pulau Selayar, Kepulauan Wakatobi, dan juga merencanakan di pulau-pulau kecil di dekat perbatasan Filipina Selatan. Periksa lebih lanjut, Muchtar Adam, 2007. *Meretas Jalan Menuju Ma'rifotullah*. Penerbit Makrifat. Bandung.

34 Mashudi, 1998. *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*. Yayasan Universitas Siliwangi. Bandung. h. 72 menjelaskan bahwa dirinya sebagai anggota Pemuda Sosialis Indonesia - Pesindo yang didirikan Wikana. Dijelaskan pula bahwa Mashudi sebagai peserta dari Pesindo Bandung ketika Munas Pesindo di Yogyakarta, 10 November 1945.

Timur, Jawa Tengah dan P. Bali.

Pembubaran PKI Jawa Barat dengan cara ini, menimbulkan ketegangan hubungan antara Djenderal Soeharto, Kastaf Djenderal Ton Dharsono sebagai Djenderal Angkatan Darat yang antikomunis, terhadap Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie yang dinilai terlalu dekat dengan Presiden Soekarno yang saat itu tidak mau membubarkan PKI.

Dengan pendekatan pribadi dan sebagai Gubernur, Mashudi kepada Djenderal Soeharto dan Djenderal Ton Dharsono menjelaskan bahwa Pangdam Siliwangi Major Djenderal Ibrahim Adjie, sebagai jenderal yang antikomunis, tetapi pro Soekarnois.<sup>35</sup> Kedekatannya dengan Presiden Soekarno hanya bersifat hubungan pribadi, tidak ada kaitannya dengan upaya penyelamatan PKI. Demikian penjelasan Mashudi dalam *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*.

Perlu dicatat: Kodam III Siliwangi memperoleh Sam Karya Nugraha dari Presiden Soekarno karena jasa-jasanya menumpas Kudeta PKI di Madiun, 18 September 1948, Republik Maluku Selatan 1950, Permesta 1958-1961, dan TII/NII 1949-1962.

Presiden Soekarno terbuka hatinya tidak hanya akan membekukan PKI bersama seluruh organisasi bawahannya. Melainkan justru organisasi politik PKI dan ormas-ormasnya dilarang dan dibubarkan. Hanya caranya mendelegasikan kewenangannya kepada Djenderal Soeharto pada 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Supersemar, dengan atas nama Presiden Soekarno melarang ajaran komunisme dan mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi bawahnya.

## Kegagalan Teori Nasakom dan Marhaenisme

Presiden Soekarno menyaksikan sendiri dampak Pancasila yang diperasnya sendiri menjadi Ekasila atau Gotong Rojong dan pengaruh dikemukakannya bahwa Marhaenisme berubah menjadi Marxisme diterapkan di Indonesia, mendatangkan bencana nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengutamaan Manipol Usdek dan Nasakom menjadikan Pancasila oleh PKI dinilai hanya “alat pemersatu” semata. Bila sudah bersatu, kembali ke ajaran

35 Harold Crouch, 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta, h.258 Major Djenderal Ibrahim Adjie yang menampakkan sikapnya pro Soekarno, pada Juli 1967 diangkat sebagai Duta Besar di London. Jenderal Muslim lainnya yang pro Soekarno, diangkat sebagai Duta Besar di Republik Arab Persatuan, adalah Letnan Djenderal Mokoginta.

Marxisme dan Leninisme.

Di akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno menyaksikan ajaran Marxisme, Leninisme yang diterapkan oleh PKI di Indonesia, melahirkan pemimpin PKI keblinger dan mencemarkan nama baik Presiden Soekarno. Konsep Ir. Soekarno tentang Nasakom tahun 1926 M, sebagai sekadar ide semata adalah mungkin. Namun, pada 1965 M, dalam praktik kehidupan partai politik dan negara, Nasakom tidak dibenarkan oleh sejarah.

Kenyataannya, sejak Hadji Misbach, sebelum Ir. Soekarno terjun dalam dunia politik, upaya menyatukan ajaran Islam dengan komunis atau sebaliknya, gagal total. Berhadapan dengan H.O.S. Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, H. Agoes Salim menolak ajaran komunisme dan National Congres Centraal Sjarikat Islam di Madiun merumuskan perlunya Disiplin Partai. Melarang pimpinan Partai Sjarikat Islam, 1923 M, menjadi pimpinan atau anggota Perserikatan Kommunist di India - PKI atau sebaliknya.

Dengan kata lain, segenap upaya melawan imperialis Barat tidak mungkin Partai Sjarikat Islam Indonesia bekerja sama dengan PKI yang menghalalkan segala cara karena dalam perjalanan sejarahnya, PKI Sibar pimpinan Sardjono bekerja sama dengan van Mook, menentang Proklamasi 17-8-1945.

Terjadi beberapa pimpinan P.S.I.I yang bersedia duduk dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin, akibat mereka melupakan garis sejarah P.S.I.I dengan keputusan Dispilin Partai yang diputuskan dalam Natico di Madiun, 1923 M. Dampak kelupaannya pimpinan P.S.I.I pendukung Kabinet Amir diingatkan kembali bencana sikap politik Amir Moeso yang sebenarnya dengan gerakan Kudeta PKI di Madiun, 1948 M.

Nasakom dalam kenyataan sejarahnya, mendatangkan bencana nasional yang mengoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Akibat komunisme dengan ajarannya, pengertian persatuan dan kesatuan adalah hanya antar organisasi bawahannya saja: SOBSI, BTI, SBMI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Lekra.

Marxisme mengajarkan, tidak ada penguasa dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada komunis, kecuali direbut dengan senjata. Partai Komunis sebagai partai yang berupaya dengan kekerasan untuk menduduki kekuasaan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin PKI dapat bekerja sama dengan golongan Nasional dan Agama kalau Komunis mau menguasai keduanya dengan kekerasan. Satu hal yang cukup unik, mengapa pimpinan Kudeta PKI, umumnya berlatar belakang

budaya Sumatra Barat? Padahal Sumatra Barat dikenal sebagai gerbang pembaharuan Islam di Indonesia pada abad ke-13 H/19 M.

## Latar Belakang Budaya Pimpinan Kudeta Komunis

Kontradiksi peristiwa yang perlu diperhatikan, ajaran komunis pertama di kalangan Pribumi disemaikan di Semarang Jawa Tengah di kalangan buruh kereta api pimpinan Samaoen dan Darsono. Namun, mengapa pucuk pimpinan utama kudeta komunis yang terkenal berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat:

Pertama, Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, lahir di Suliki Sumatra Barat, 1897 M, memimpin Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta. Datuk Tan Malaka dari komunis nasionalis, kemudian dikenal menjadi Partai Murba. Dibantu pula oleh Mohammad Yamin, lahir 23 Agustus 1903, di Sawahlunto, Sumatra Barat. Sebelum kudeta di Yogyakarta dilaksanakan karena keduanya sedang berada di P. Jawa, diawali dengan pertemuannya di Madiun, Jawa Timur.

Kedua, Amir Sjarifuddin gelar Soetan Goenoeng Soaloon, lahir di Medan, 27 Mei 1907 sebagai pimpinan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Kudeta ini terjadi dipimpin bersama Moeso yang baru datang dari Rusia, bergabung dengan Amir Sjarifoeddin gelar Soetan Goenoeng Saoloon.

Ketiga, D.N.Audit lahir di Maninjau, semula namanya Dja'far Naim. Kemudian pindah ke Bangka bersama ayah tirinya, Husein Aidit. Namanya berubah, Dja'far Naim menjadi Dwipa Nusantara, kemudian menjadi D.N. Audit.

Pada saat terjadi Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, D.N. Audit belum menduduki pimpinan utama. Oleh karena itu, D.N. Audit dapat lolos dan selamat. Pada 30 September 1965 sebagai pimpinan utama Kudeta G30S/PKI di Jakarta.

Sebenarnya, masamuda D.N. Audit sebelum aktif dalam PKI, pernah tinggal selama 4 tahun dengan pamannya K.H. Isa Anshary dari Partai Islam Indonesia Masjumi di Bandung. Namun, pertemuannya dengan K.H. Isa Anshary tidak menjadikan D.N. Audit memahami Islam sebagai ajaran yang benar. Dia tetap memilih PKI.

Setelah D.N. Audit menjadi pimpinan CCPKI, tidaklah heran bila K.H. Isa Anshary sebagai pamannya diangkat sebagai Ketua Front Anti Komunis - FAK oleh pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Bila ditinjau dari garis keluarga, menjadi Paman kontra Keponakan dan sebaliknya. Demikianlah penjelasan Drs. H. Ridwan Saidi kepada penulis di Soto Muchlis Ma'ruf TIM Jakarta.

Dengan memerhatikan realitas sejarah itu, pimpinan Kudeta Komunis, baik komunis nasional ataupun internasional, selalu berlatar belakang budaya Sumatra

Barat. Gerakan antikomunis pun dipimpin oleh Ulama yang berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat. Namun, umumnya orang awam menyangka bahwa PKI berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian pula penulis Barat, dalam tulisannya mengidentikkan pimpinan komunis dengan orang Jawa.

Memang benar, pendiri pertama PKI di Semarang adalah Samaoen dan Darsono. Kudeta dilaksanakan di Cirebon, 12 Februari 1946. Jogjakarta, 3 Juli 1946. Madiun, 19 September 1948. Jakarta, 30 September 1965. Keseluruhan kudeta terjadi di Pulau Jawa. Namun, pimpinan utama setiap Kudeta PKI berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat, yakni Tan Malaka, Amir, D.N. Aidit, ketiga-tiganya pimpinan kudeta di Jogjakarta, Madiun, dan Jakarta. Penulis belum mengetahui secara pasti latar belakang budaya Mohammad Joesoef pimpinan Kudeta PKI di Cirebon. Apa juga dari Sumatra Barat atau dari mana?

Kesalahan memahami sejarah sering dijadikan bahan membangkitkan gerakan separatis dari luar Jawa yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta, menyebarkan informasi yang bersifat provokatif berbau etnis dan ideologis: orang Jawa identik dengan komunis atau pengikut Majapahitisme. Padahal, penulis utama Tata Negara Majapahit adalah Mohammad Yamin dari Sumatra Barat.

Ulama yang terkenal dari pimpinan ormas atau partai politik Islam yang antikomunis dan anti imperialisme serta anti kapitalisme berasal dari suku Jawa sangat banyak antara lain:

1. H.O.S. Tjokroaminoto P.S.I.I dari Ponorogo, Jawa Timur.
2. Dr. Soekiman Wirjosandjojo Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi
3. Soerjopranoto dari P.S.I.I. dari kerabat Paku Alam, dikenal sebagai Jago Pemogokan.
4. Raden Sjamsoerizal pendiri Jong Islamieten Bond dan Walikota Jakarta, keponakan Soerjopranoto.
5. Choedrotoes Sjech K.H. Hasjim Asj'ari, Rois Akbar Nadlatoel Oelama dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jatim.
6. K.H. Mas Mansoer Persyarikatan Moehammadijah dari Surabaya, Jatim.
7. K.H. Wahab Chasboellah, Nahdlatoel Oelama dari Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jatim.
8. Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ketua Pusat Persyarikatan Moehammadijah dari Jogjakarta.
9. K.H. Kahar Moezakkir, Persyarikatan Moehammadijah, Ketua Sekolah Tinggi Islam, dari Jogjakarta, dan yang lainnya.

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tidaklah berarti dengan ketiga tokoh komunis di atas, Sumatra Barat tidak melahirkan Ulama. Justru sebaliknya, penggerak dakwah, pimpinan ormas, partai politik, dan antikomunis yang terkenal adalah dari Sumatra Barat antara lain:

1. Hadji Agoes Salim dari P.S.I.I dan P.S.I.I. Penjedar. Menteri Luar Negeri.
2. Dr. Mohammad Natsir, dari Persatoean Islam, Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi, Dewan Dakwah Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Buya Hamka, pimpinan Muhammadiyah, Masjumi, dan Ketua Lembaga Sejarah Islam Indonesia.
4. K.H. Isa Anshari, dari Masjumi, Front Anti Komunis, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Yayasan Istiqomah Bandung.
5. K.H. Rusjad Nurdin, dari Persatoean Islam, Masjumi, Front Anti Komunis, Yayasan Dana Al-Falah, Dewan Dakwan Islam Indonesia, Yayasan Istiqomah, Partai Bulan Bintang.
6. Taufiq Ismail, budayawan dan putra dari Abdul Ghafar Ismail.

Kekeliruan pemahaman sejarah tadi sebagai akibat ditiadakannya peran Ulama dan Santri dalam penulisan Sejarah Indonesia. Menurut istilah K.H. Achmad Sidik dari Nahdlatul Ulama, peran Ulama dalam perkembangan Sejarah Indonesia, diemperkan. Artinya dituliskan di "halaman luar". Hanya di saat situasi negara sangat genting atau kacau, Ulama dikedepankan. Jika damai sudah tiba, Ulama mulai dilupakan. Bahkan, dijadikan target secara sistemik dan pasti untuk disingkirkan perannya dalam pembangunan selanjutnya. Hal ini terjadi, sebagai akibat lembaga sejarah negara dikuasai oleh orang-orang komunis.

Dengan adanya Supersemar, PKI dan organisasi bawahannya, memang secara fisik telah dibubarkan. Namun, mungkinkah ideologi dan ismenya bubar? Partai Murba sebagai partai komunis nasional tetap ada. Untuk menyelesaikan Konfrontasi Indonesia-Malaysia, ditugaskan kepada Adam Malik dari Partai Murba, komunis nasional Tan Malakais. Bukan Mohammad Natsir atau Mohammad Roem dari Partai Islam Indonesia Masjumi. Apakah hal ini sebagai salah satu bukti adanya Masjumi Phobia dan sekaligus juga sebagai bukti ajaran komunis masih ada di Indonesia? Bagaimana halnya dengan Marhenisme, apakah masih tetap diinterpretasikan sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia oleh pimpinan PNI sekarang?

Bagaimana peran dan kedudukan Ulama dan Santri pasca Orde Lama? Dengan

dibubarkannya, ditangkap, dibuang pimpinan PKI serta dilarangnya PKI, tidaklah berarti Ulama dan Santri merasa aman tiada lawan. Karena tiada seorang Rasul dan Nabi pun bebas dari halangan dan rintangan serta musuh. Sementara, Ulama sebagai ahli waris ajaran Kerasulan. Tentu, tidak mungkin bebas dari tantangan, dan halang rintangan serta lawan.

Deislamisasi politik dan depolitisasi Islam, serta deparpolisasi Ulama, terulang kembali setelah PKI ditiadakan. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, berumur pendek hanya sampai 1973. Upaya rehabilitasi Partai Islam Indonesia Masjumi dan pendirian partai baru Partai Demokrasi Islam Indonesia pimpinan Mohammad Hatta tidak mendapatkan perkenan pula dari pemerintah Orde Baru. Kemudian, dibangunkan oleh pemerintah Orde Baru, untuk umat Islam satu wadah baru Partai Persatuan Pembangunan, 1973 M. Apakah kebijakan ini sama dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru Balatentara Dai Nippon dengan Persiapan Persatoean Oemat Islam, 1943 M.

Suasana transisi pemerintahan sipil Orde Lama ke pemerintahan militer Orde Baru, menjadikan Ulama dan Santri beradaptasi terhadap sistem baru dalam pembangunan politik. Melalui Fabian Strategy - Perlahan tetapi pasti, terbaca kebijakan politik pemerintahan Orde Baru bertujuan menyempurnakan apa yang dimimpikan oleh Presiden Soekarno, 1956 M seperti yang dilihat di RRC, pembubaran seluruh partai politik yang didirikan pada masa Liberal dan Orde Lama. Demikian pendapat Arti Sanit, 1997 dalam Partai Pemilu, dan Demokrasi.

Delapan tahun kemudian, pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan berdirinya dua partai baru: Partai Persatuan Pembangunan - PPP, 5 Januari 1973 dan Partai Demokrasi Indonesia - PDI, 10 Januari 1973.<sup>36</sup> Didahului dengan pembentuk Golongan Karya - Golkar. Pemerintah Orde Baru dengan Repelitanya lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, dan bertumpu pada Demokrasi Pancasila yang tidak mengenal adanya oposisi ala demokrasi Barat. Melainkan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Sampailah pada akhir kesimpulan tentang mengapa Presiden Soekarno tidak dimahmilubkan. Menurut keyakinan Presiden Soeharto, 1989, dalam Soeharto Pikiran Ucapan Dan Tindakan Saya, Otobiografi , menyatakan memang benar Bung Karno mempunyai kesalahan, seperti juga manusia lain. Tetapi ia berkepastian, beliau bukanlah PKI.

---

36 Apakah pembentukan PPP dan PDI, 1973 M, pemerintah militer Orde Baru meniru kebijakan politiknya pemerintahan Balatentara Dai Nippon, setelah melarang seluruh ormas dan orpol, kemudian membangunkan dua wadah organisasi pengganti? Untuk umat Islam, Masjoemi, dan yang untuk yang netral agama, Putera, 1943M. Benarkah, sejarah sering berulang?

## Monumen Nasional, Masjid, dan Proklamasi

Jasa besar para Ulama dan Santri dalam gerakan nasional, gerakan perlawanan terhadap imperialis Barat-Timur, dan dalam mempertahankan dan mengisi Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369 maka pemerintah Republik Indonesia membangun monumen berupa:

Pertama, Masjid Syuhada di ibu kota perjuangan Republik Indonesia, Yogyakarta. Pertanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, tidak akan tegak merdeka dan berdaulat apabila tanpa pengorbanan besar harta dan jiwa para Ulama dan Santri serta umat Islam sebagai pemakmur masjid yang gugur sebagai *Syuhada*.

Kedua, Monumen Nasional - Monas, dengan Patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda dan menghadap ke arah Istana Merdeka. Perlambang bahwa Ulama yang berjubah dan bersorban sebagai pengawal terdepan perjuangan nasional melawan imperialis Barat dan Timur yang menjadikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dan mampu membangun.

Selain itu, kuda sebagai perlambang aplikasi dari ajaran Rasulullah saw, ajari generasi mudamu mengendarai kuda. Dalam menghadapi lawan-lawan Islam, kuda sebagai lambang mobilitas dan kewajiban menguasai media transportasi. Sementara itu, kearifan mengendalikan kuda sebagai lambang kebijakan *khaliyah fil ardhi* – pimpinan negara, pemegang kendali kedaulatan berbangsa dan bermegara.

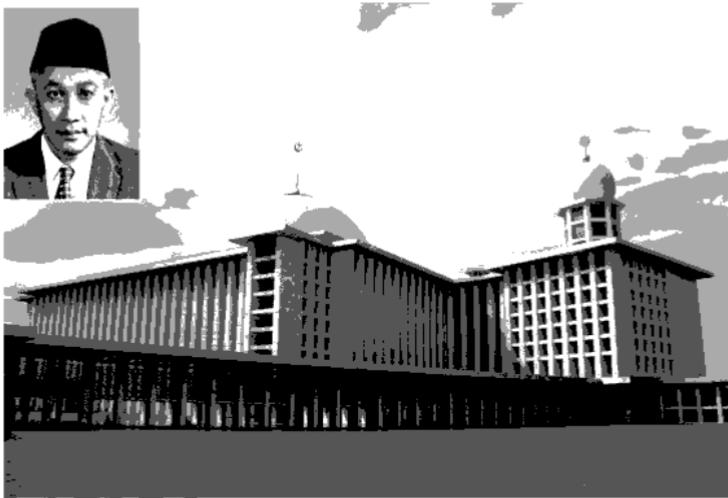
Ketiga, Masjid Raya Istiqlal - Masjid Kemerdekaan yang dibangun atas tanah bekas benteng VOC. Mengapa dipilih di atas tanah tersebut? Padahal sangat dekat dengan Gereja Katolik Katedral. Presiden Soekarno menjelaskan sebelum ada gereja Katedral, dan sebelum ada benteng VOC, tepat di atas lahan benteng tersebut ada Masjid Al-Fatah - Masjid Kemenangan yang dibangun oleh Soenan Goenoeng Djati atau Sjarif Hidajatoellah bersama menantunya Fatahillah atau Faletahan. Keduanya juga sebagai pembangun kota Jayakarta atau Jakarta. Masjid Al-Fatah dirobohkan oleh VOC dan lahannya dijadikan benteng yang menghadap pula ke arah lawan agamanya, Gereja Katolik Katedral.



Sumber: Monas

## PATUNG PANGERAN DIPONEGORO DI DEPAN MONUMEN NASIONAL

Patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda dan ditempatkan di depan Monumen Nasional sebagai lambang Pengawal Terdepan Perjuangan Nasional Indonesia membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan adalah Ulama.



Sumber: www.wikimedia.org dan www.yayasanulfidzillah.blogspot.com

## MASJID ISTIQLAL - MASJID KEMERDEKAAN

Masjid yang dibangun oleh Presiden Soekarno di atas lahan bekas Benteng VOC

Nama Masjid Istiqlal diusulkan oleh Menteri Agama RI K.H. Mohammad Iljas

Pembangunannya diselesaikan oleh Presiden Soeharto

Masjid Istiqlal sebagai monumen perjuangan bangsa dan negara sebagai fakta sejarah yang

berbicara bahwa Proklamasi dan penegak NKRI

diperjuangkan oleh para Ulama dan Santri serta umat Islam sebagai pemakmur masjid.

Arsitek masjid adalah Silaban berdampak filosofi arsitektur kegerejaan mewarnai bangunan. Masjid Istiqlal terbaca adanya Salib dengan jumlah 3, 6, 12, 24, 36, lambang jumlah murid Jesus di dalam mimbar diapit oleh dua salib, juga ventilasi depan bagian kanan dan kiri atas masing-masing enam buah salib.



Sumber: Doc. Pribadi

Jumpa penulis dengan Taufiq Ismail, penyair, sastrawan, dan budayawan antikomunisme, dalam acara pameran buku di Jalan Braga, Bandung.

Letak Masjid Istiqlal yang berhadapan dengan Gereja Katedral diprotes oleh I.J. Kasimo dari pimpinan Partai Katolik. Mengingatkan Presiden Soekarno tentang larangan mendirikan tempat ibadah yang berbeda saling berdekatan. Dijawab oleh Presiden Soekarno, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, membangun kembali Masjid Al-Fatah Soenan Goenoeng Djati, di atas lahan benteng VOC pertahanan imperialis Belanda. Kebetulan dekat dengan Gereja Katedral.

Adapun pelaksanaan pembangunan Masjid Istiqlal, terwujud pada masa Presiden Soeharto karena Presiden Soekarno lebih mendahuluikan pembangunan Monumen Nasional. Dengan alasan, kalau ia meninggal, ia yakin Masjid Istiqlal tetap dapat dibangun. Akan tetapi kalau ia meninggal, apabila Monumen Nasional belum berdiri, akan gagal seterusnya.

Penjelasan Presiden Soekarno itu dapat dipahami karena menjelang dibangunnya Monumen Nasional terjadi demo yang menolaknya. Demonstran terbaca hanya berpikiran praktis dan pragmatis, menuntut agar lebih mengutamakan masalah pangan, bukan monumen sejarah.

*Keempat, Masjid Baiturrahim di depan Istana Merdeka sebagai lambang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tidak mungkin ada Presiden terlahir tanpa disertai darah yang tumpah dari rahim ibunya. Tidak mungkin, Indonesia Merdeka tanpa adanya Maha Rahim Allah.*

*Kelima, Patung Proklamator Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dibangun pada masa Presiden Soeharto. Mengingatkan segenap generasi bangsa bahwa hanya dengan dua kalimat Proklamasi, berbahasa Indonesia, dibacakan pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, jam 10.00 pagi, oleh Soekarno dan ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, menjadikan bangsa dan negara Indonesia merdeka.*

Dijelaskan oleh Bung Kamo kepada Cindy Adams dalam *An Autobiography As Told To Cindy Adams*, mengapa memilih tanggal 17, meyakini angka 17 sebagai jumlah angka dan tanggal keramat. Seperti shalatnya setiap hari 17 rakaat, dan Al-Qur'an diturunkan pada 17 Ramadhan.

## API SEJARAH 2

**Wal tandhur nafsum ma qadamat li ghod - Perhatikanlah sejarahmu, apa yang telah diperjuangkan oleh Ulama dan Santri pendahulumu, untuk hari esokmu.**  
**(QS 59:18).**



# GERBANG KESEMBILAN

LANGKAH JUANG JIHAD  
ULAMA DAN SANTRI  
DI ERA ORDE BARU DAN  
REFORMASI





## **PRESIDEN H. MUHAMMAD SOEHARTO**

**Bapak Pembangunan**

**Pemersatu Bangsa dan Pemersatu TNI**

**Satu-satunya Presiden yang membangun Masjid Muslim Pancasila sebanyak 999 Masjid,  
Masjid Istiqlal, Masjid Pangeran Diponegoro, Masjid At-Tin, Masjid di perbatasan Papua dan Papua Nugini  
dan Masjid Soeharto di Bosnia**

**Satu-satunya Presiden di dunia yang menjabat Presiden selama 32 tahun**

## Deparpolisasi Ulama

Ulama dan Santri memasuki pertengahan kedua 1384 H/1965 M, dilimpahi anugerah Allah Yang Maha Agung menyaksikan runtuh dan tenggelam serta berakhirnya PKI dengan segenap organisasi bawahnya, akibat kesalahan pilihan tingkah laku politiknya Kudeta 30 September 1965, Kamis Kliwon, 4 Jumadil Akhir 1385. Disusul dalam relatif singkat tertangkaplah D.N. Aidit dari persembunyiannya di Surakarta, 22 November 1965, Senin Pon, 27 Rajab 1365. Bertepatan dengan hari Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw, umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbebas dari kebiadaban PKI.

Kemudian terbukalah hati Presiden Soekarno secara resmi, melalui Surat 11 Maret 1966 atau Supersemar, bertepatan dengan Jumat Pahing, 18 Dzulqaidah 1385, mendelegasikan kewenangannya kepada Major Djenderal Soeharto untuk membubarkan PKI dengan segenap organisasi di bawahnya.

Kesaksian Ulama dan Santri pada 1384 H/1965 M tadi, hakikatnya merupakan pengulangan rahmat Allah menyaksikan kembali kegagalan dan keruntuhan parpol anti agama: Pertama, Kudeta PKI di Cirebon pimpinan Mohammad Joesoep, 1 Februari 1946. Kedua, Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta pimpinan Tan Malaka. Ketiga, Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, pimpinan Amir Sjarifoeddin dan Moeso. Ketiga usaha komunis nasional atau internasional dengan kudetanya, menemui kegagalan.

Kegagalan semua Kudeta PKI merupakan pertanda bahwa di negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, yang terjadi karena berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan negara Indonesia sebagai negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak memberikan hak hidup bagi ideologi Marxisme yang mengajarkan anti agama dan tidak percaya

kepada Allah Yang Mahakuasa.

Demikian pula konsep Nasakom 1926 M, tidak mungkin dijadikan wawasan dan ideologi bangsa dan negara Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunis yang mendasarkan *conflict theory* - teori konfliknya dalam mencapai tujuannya, tidak mungkin bersedia bersatu dengan golongan nasional dan agama.

Siapapun dan organisasi apapun serta pemimpin kaliber bagaimanapun besarnya, yang mencoba menghidupkan kembali Nasakom, sejarah telah memperingatkan, kapan pun akan menemui mimpi buruk dan akan menambah jumlah kegagalan. Sejarah juga membuktikan, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Timor Timur, Balkan, Jerman. Bahkan, di Uni Soviet dan RRC sedang terjadi proses dekomunisasi.

Ulama dan Santri bersyukur pimpinan parpol Islam, generasi muda Islam, mahasiswa dan pemuda pelajar Islam serta Santri, memelopori terbentuknya kesatuan aksi, GAP Gestapu, KAMI, KAPPI, KOKAM, bekerjasama dengan ABRI, berjuang membubarkan PKI. Suatu anugerah Ilahi yang tiada hingga, generasi muda Islam memiliki kesadaran yang tinggi, tidak dapat membenarkan adanya partai politik anti dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicintainya. Demikian pula Aisyiyah, Muslimat NU, Wanita Islam, bangkit membersihkan Republik Indonesia dari ajaran komunisme dengan Gerwaninya. Seniman Islam dari HSBI, tidak membiarkan seni dan budaya bangsa Indonesia terlumuri noda Lekra.

Suatu rahmat Allah Yang Mahakuasa walaupun hanya sedetik waktunya, menjadikan runtuhnya kebatilan dan bangkitnya pemerintahan baru yang tidak memberi tempat kembali partai politik atau organisasi apapun yang tidak membenarkan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Para Ulama dan Santri bersujud syukur dan berharap, bersama pemerintah Orde Baru agar mampu membangun bangsa dan negara yang ridhai Allah serta berhasil mengentaskan kemiskinan umat sebagai mayoritas bangsa.

Di masa Orde Lama, kemiskinan atau krisis ekonomi, merupakan lahan subur hidupnya ajaran parpol komunis, gerakan buruh tani serta wanitanya. Komunis berupaya melakukan pemurtadan, mereka menilai pemurtadan sebagai jalan keluar dari rasa ketertindasan rakyat dari pimpinan agamawan. Mereka mengonseptkan kebahagian hidup akan termiliki oleh rakyat bila tidak ada lagi pemerintahan - *abolition of government*, dan tidak ada lagi anutan agama - *abolition of religion*, serta hilangnya stratifikasi sosial - *social stratification*. Hidup akan terbentuk masyarakat sama rata sama rasa - *classless society*. Diajarkan ideologi komunisme

hanya bisa terwujud dengan menumbangkan pemerintahan, melalui konflik, teror dan meningkatkan kriminalitas. Kemudian, membalikkan seluruh tatanan kehidupan dan ketatanegaraan yang ada, didahului dengan abolisi atau penghapusan ideologi dan konstitusi nonkomunis.

Usaha ini semua diawali pula dengan gerakan pembodohan generasi muda, tindak imoralitas. Penguasaan lembaga pendidikan dan press, media cetak dan elektronik, untuk membentuk opini publik agar berpihak kepada ajaran komunisme. Demikianlah sisa-sisa program ajaran komunis yang ditinggalkan pada masa Orde Lama. Lalu, apa yang diprogramkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjawab tantangan itu?

Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, bertekad mengentaskan kemiskinan dan krisis ekonomi. Menghidupkan wawasan politik yang tidak lagi mempertentangkan ideologi, hanya berideologi tunggal Pancasila. Menyederhanakan jumlah partai politik. Meredam perkembangan rasa kecurigaan terhadap pemerintah, dengan memahamkan masyarakat terhadap program pembangunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun - Repelita yang ditentukan oleh MPR dengan Garis Besar Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Langkah yang dipilih oleh pemerintah Orde Baru, mengadakan penataran P4 - Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila agar dapat dipahami dan dihayati. Dengan cara ini ditargetkan tumbuhnya sense of belonging - rasa saling memiliki dan sense of responsibility - rasa saling bertanggung jawab, kesadaran bela negara melalui profesi masing-masing.

Selain itu, Orde Baru menyadari masyarakat Indonesia terdiri dari rumah tangga yang terbentuk akibat ikatan pernikahan. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk UU Perkawinan. Di bidang pernikahan, Orde Lama tidak memiliki UU Perkawinan yang dapat dijadikan pedoman pernikahan. Padahal, pemimpin teladan rakyat. Bagaimana jadinya bila pimpinan negara, ABRI dan pegawai negeri, melakukan kawin cerai seenaknya maka diundangkanlah UU Perkawinan, 1973 M, yang didasarkan pada ajaran agama.

Diharapkan dengan adanya UU Perkawinan, 1973 M, akan tercegah praktik bebas pernikahan poliandri - satu isteri banyak suami. Poligini - satu suami dengan banyak isteri, atau group married - perkawinan kelompok, dan kawin mut'ah, serta segenap penyimpangan sistem perkawinan. Dengan UU Perkawinan, 1973 M, adanya keteraturan pula sistem perceraian berdasarkan agama.

Bersamaan dengan diundangkannya UU Perkawinan, juga diberlakukannya

dwi sistem partai politik: Partai Persatuan Pembangunan - PPP, 5 Januari 1973 dan Partai Demokrasi Indonesia - PDI, 10 Januari 1973. Didahului dengan pembentukan Golongan Karya - Golkar. Kebijakan pemerintah Orde Baru ini, dirasakan oleh Ulama sebagai kebijakan deparpolisasi Ulama.

Pembentukan ketiganya Golkar, PPP dan PDI dalam masa peralihan merupakan model pengganti dari Nasakom. Para Ulama yang tidak terpilih dalam kepemimpinan Golkar, PPP, PDI, dibenarkan bila bersedia aktif di luar jalur parpol, dalam Majelis Ulama Indonesia - MUI atau Dewan Dakwah Islamiah Indonesia - DDII, Dewan Keluarga Masjid - DKM, Dewan Masjid Indonesia - DMI, Rumah Zakat, Rumah Yatim Piatu dan lain-lainnya.

Untuk melaksanakan deparpolisasi Ulama kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melancarkan *Fabian Strategy* - strategi yang dilaksanakan dengan perlahan dalam menciptakan perubahan, namun pasti - *slowly but true*. Dalam bahasa Jawa, *alon-alon asal kelakon*. Di samping itu, juga disiapkan *Blitzkrieg Strategy* - siap menindak secara militer dan cepat tepat, terhadap gerakan lawan yang muncul di permukaan secara fisik militer.

Selain itu, dilaksanakan *Violence Strategy* - Strategi kekerasan ini diarahkan penumpasan *bromocorah* atau preman. Seperti dalam dokumen Kudeta PKI di Madiun, diketemukan oleh Partai Murba, pada masa prakudeta, PKI mengadakan aksi meningkatkan kriminalitas, perampokan atau bromocorah, penculikan dan pembunuhan. Dengan cara ini, ditingkatkan secara politik akan berlanjut menggantung pemerintahan atau kudeta.

Pemerintah Orde Baru melihat menjamurnya tindak kriminalitas. Sepintas seperti hanya kriminalitas murni. Kenyataannya ada upaya sabotase terhadap pembangunan maka dijawab dengan melancarkan operasi Penembakan Misterius - Petrus. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut - *fear strategy* kepada pelaku kriminal.

Selain itu, fungsi dan target pelaksanaan *Violence Strategy* dalam kepentingan politik sebagai pemukul lawan agar menjadi powerless group - kelompok yang tanpa daya. Pengaruhnya akan menumbuhkan karakter dan kesadaran kelompok garis keras lawan, menjadi a *minimal sense of political efficacy* - meminimalisasikan rasa kemujaraban terhadap organisasi politiknya yang pernah dibanggakan. Artinya para pendukungnya tidak lagi menilai organisasi kebanggaannya, tetapi berjaya. Menjadi loyo tidak dapat dijadikan payung pelindungnya lagi.



Sumber: Doc. Pribadi

## AL-QURANIL KARIM MUSHAF SUNDAWI

Di bawah Gubernur Jawa Barat, Nuriana diterbitkan Al-Quranul Karim Mushaf Sundawi  
Isi Al-Qur'an tetap sama dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah saw  
Disebut Mushaf Sundawi dalam penulisannya tetapi menggunakan huruf Arab  
bedanya terletak pada bingkai setiap lembarnya berornamen seni Sundawi.



Sumber: Doc. Pribadi

Surah al-Kahfi dari Al Quranul Karim Mushaf Sundawi. Setiap huruf Allah  
dicetak dengan warna merah.

*Fabian Strategy* dalam bahasa Jawa, *alon-alon asal kelakon - pelan-pelan namun terasasi*. Pelaksanaannya terlihat dari kebijakan pemerintah Orde Baru, semula dalam mengondisikan sikap Ulama dan Santri agar tetap mendukung kebijakannya, partai politik Islamnya, tetapi diizinkan aktif. Setelah terlihat seluruh kekuatannya di permukaan, baru dilaksanakan penghentian aktivitasnya.

Antara lain dengan cara mengizinkan untuk sementara waktu, didirikan Partai Muslimin Indonesia - Parmusi atau PMI pada 20 Februari 1968. Sekaligus Parmusi dijadikan sebagai pengimbang hasil Muktamar Partai Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan terlebih dahulu Juli 1967 di Bandung. Muktamar ini berhasil melahirkan kepimpinan baru, Ketua Umum tetap Dr. K.H. Idham Chalid, dan Ketua Is/d IV terdiri dari H.M. Subhan Z.E, H.A. Sjaichu, H. Djamaluddin Malik dan Imron Rosjadi S.H. Dengan bergabungnya H. Djamaluddin Malik sebagai wirausahawan, terbayang akan semakin kuatnya Partai Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, Partai Nahdlatul Ulama dihadapkan kepada kebijakan mengakhiri eksistensinya sebagai partai politik. Dikembalikan ke *Khittah* 1926 M, menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama dan menerima asas tunggal Pancasila. Ideologi yang dirumuskan oleh K.H. Wahid Hasjim, sehari setelah Proklamasi, 18 Agustus 1945. Massa Nahdliyin diubah menjadi pendukung utama Partai Persatuan Pembangunan.

Betapa kuatnya Nahdlatul Ulama dengan massa pendukung yang tidak hanya kelompok Ulama, melainkan juga generasi muda yang mempunyai semangat tempur yang tinggi dalam menghadapi PKI dan organisasi di bawahnya. Namun, pimpinan Nahdlatul Ulama di tengah masa transisi kepemimpinan sipil ke militer, lebih memilih langkah menerima realitas, beradaptasi. Dengan pengertian menerima perintah membubarkan diri sebagai kekuatan partai politik dan menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu jamiah pendukung Partai Persatuan Pembangunan - PPP.

Dari test case ini, apabila Partai Nahdlatul Ulama yang kuat dapat diubah menjadi jamiah, apakah mungkin Partai Muslimin Indonesia, Perti, PSII atau partai politik Islam lainnya, mampu mempertahankan eksistensinya. Demikian pula nasib PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Murba?

Partai Muslimin Indonesia pada awalnya diizinkan untuk didirikan dengan syarat Ketua Umumnya adalah Djarnawi Hadikusumo dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dibantu dengan Agus Sudono dari Gasbindo dan J. Naro, S.H. dari Al-Wasljah sebagai Ketua. Bukan ketua dan pengurusnya dari mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Bagaimana jika tidak, itu hasil Muktamar Parmusi.

Pemerintah militer Orde Baru tidak dapat bekerjasama lagi dengan mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Sekalipun pimpinan dan anggota partai ini anti komunis, tetapi memberikan sumbangan besar dalam menggerakkan massa kesatuan aksi menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Walaupun Mohammad Natsir membantu upaya penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan juga membantu memungkinkan investor Jepang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian penjelasan Dr. Anwar Harjono, S.H. yang diangkat oleh Lukman Hakim, 1993 dalam Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.

Walaupun demikian, Brigdjen Ali Moertopo menilai beberapa pimpinannya sebagai kelompok fundamentalis Islam, tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah militer Orde Baru. Sebenarnya istilah fundamentalis ini sebagai istilah pinjaman, untuk nama kelompok garis keras Protestan, bukan untuk Islam.

Namun, akibat Brigdjen Ali Moertopo mendasarkan pemikirannya dari hasil penelitian CSIS yang pimpinannya dari Katolik maka digunakan istilah tersebut untuk menamai kelompok garis keras Islam Masjumi, kaum fundamentalis karena dinilai mempunyai kemiripan karakter kerasnya sama dengan kelompok garis keras Protestan. Akibat penilaian ini, dapat diprediksikan nasib Parmusi selanjutnya.

Dipraktikkannya Fabian Strategy, terhadap umat Islam terlihat sembilan bulan kemudian, Parmusi atau PMI, mengadakan Muktamar Parmusi, 2-7 November 1968. Diizinkan pula menggunakan tempat Pendopo Kabupaten Malang.

Muktamar Parmusi yang mengambil November sebagai hari kelahiran Partai Islam Indonesia Masjoevi, 7 November 1945. Panitia Muktamar menjadikan kota Malang dihiasi banyak spandoek antara lain bertuliskan, Selamat Datang Duta Bulan Bintang dan Keluarga Bulan Bintang Kompak. Kompak menghadapi siapa. Tentu, menghadapi sikap pemerintah militer Orde Baru.

Kota Malang saat itu, berubah menjadi Samodra Bulan Bintang dengan berbagai warna. Bulan Bintang Merah, Bulan Bintang Hijau, Bulan Bintang Biru. Biasanya hanya Bulan Bintang Hitam Putih, atau Hijau. Muktamar Partai Muslimin Indonesia - Parmusi atau PMI, mendapat dukungan pemuda dari KOKAM dengan baret kuning dan jaket cokelat, sebagai Badan Keamanan Muktamar. Diberitakan bersikap cakap dan cekatan, namun tetap ramah dan penuh simpatik. Demikian pemberitaan Harian Operasi pimpinan Bachtiar Djamily.



### MASJID YAYASAN AMAL MUSLIM PANCASILA

Presiden Seharto dalam rangka membendung pengaruh ajaran Marxisme dan Leninisme membangun masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila.

Seluruh Nusantara Indonesia dibangun sejumlah 999 Masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila. Selain itu Presiden Suharto membangun Masjid Istiqlal atau Masjid Kemerdekaan di atas lahan bekas Benteng VOC di Jakarta, dan Masjid Suharto di Bosnia.



### MASJID ISTIKLAL DŽAMIJA

Masjid yang dibangun oleh Presiden Seharto di Bosnia.

Selanjutnya diberitakan, kehadiran Prawoto Mangkusasmito didahului dengan voor rijders Polisi diikuti dengan barisan mobil dan motor, mendapatkan sambutan ribuan rakyat yang sangat meriah di sepanjang jalan antara Surabaya-Malang. Kemudian, muktamar dibuka dengan didahului dengan penggantungan pita oleh Prawoto Mangkusasmito. Suasana muktamar menjadi arena syukuran Hari Ulang Tahun Ke 23, 7 November 1945-1968, Partai Politik Islam Masjumi.

Muktamar Parmusi dua hari kemudian, dihadiri Brigjen Ali Moertopo Kepala Operasi Chusus atau Opsus, Badan Rahasia di bawah langsung Djenderal Soeharto. Menyatakan bahwa Presiden Djenderal Soeharto, 31 Oktober 1968, mungkin membolehkan Dr. Anwar Harjono dan H. Hasan Basri dalam pimpinan PMI.

Muktamar Parmusi di Malang, dihadiri oleh 202 cabang dari seluruh Indonesia. Dalam Muktamar disampaikan calon ketua terdiri dari dua alternatif. Pertama, Trio Natsir-Prawoto-Roem. Kedua, Trio Anwar Harjono-Hasan Basri-Sarif Usman.<sup>1</sup> Tepat pada 5 November 1968, Selasa Pahing, 13 Sya'ban 1388, jam 11:29 secara aklamasi memilih Mr. Mohamad Roem sebagai Ketua Umum. Ketua I s/d IV adalah Dr. Anwar Harjono S.H., H. Hasan Basri, H. Djarnawi Hadikusumo dan Ir. Umar Tosin. Sekretaris Umum Drs. Hasbullah. Dibantu oleh Sekretaris I dan II, Drs. Lukman Harun dan Mohamad Sulaiman.

Selain itu terdapat 17 anggota Dewan Pimpinan Pusat, antara lain Nj. Aisjah Amini S.H., Nj. Chadidjah Razak, Djamaludin Datuk Mangkuto S.H., Gusti Muis, AR. Baswedan, Ir. Mohammad Sanusi, Nj. Rohana Zainal Abidin Achmad, Nj. Latuba, Ir. Alala, Andi Matasila, S. Siregar Pahu, Nj. Sunario Mangkusasmito, Maizir Amadin dan K.H. Misbah. Demikian yang diberitakan oleh Pikiran Rakjat, 17 Sya'ban 1388, Sabtu Manis, 9 November 1968.

Bagaimana dampak dari keputusan Muktamar Parmusi atau PMI itu. Mimbar Demokrasi menuliskan pernyataan Djendral TNI Soeharto Presiden RI, 28 Oktober 1968, a.l.

Tokoh2 Masjumi djangan sampai duduk dalam pimpinan PMI. Selagi saja berkuasa, saja tidak segan2 membekukan PMI.

Selain itu, Pikiran Rakjat, pimpinan Sakti Alamsjah, 22 November 1968, Djumat Wage, 1 Ramadhan 1388, mengangkat penegasan kembali Presiden Soeharto bahwa "amnesti terhadap perseorangan pimpinan Masjumi yang terlibat PRRI, tidak berarti pemerintah membenarkan upaya merehabilitasi partai politik Masjumi."

---

1 Lukman Hakim, 1993. *Ferjalanan Mencari Keadilan & Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono SH.* Media Da'wah. Jakarta, hlm. 230.



Sumber: Doc. Priyadi

## MASJID PONDOK PESANTREN AL-FALAH CICALENGKA BANDUNG

Strategi pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dalam membendung pengaruh ajaran komunis, mengondisikan semaraknya pembangunan masjid dan pesantren dengan modernisasikan sarana dan kurikulum pendidikannya serta alat transportasi pendukung aktivitas Ulama dalam pengembangan dakwahnya.

Selanjutnya *Mimbar Demokrasi*, No. 60 Tahun II, Minggu Ke III November 1968, pimpinan Adi Sasono dari Jalan Braga 40 A Bandung, dengan adanya keputusan Muktamar Parmusi atau PMI seperti tadi, memberitakan pada 5 November 1968, jam 15:00, datang surat dari Asisten I Urusan *Intelligence* Kasdam VIII Brawijaya yang ditujukan kepada Mohamad Roem. Kemudian 7 November 1968, disusul dengan Radiogram Sekneg, Major Djenderal Ratu Alamsjah Prawiranegara, a.l.

Bapak Presiden, Pemerintah pada saat ini memandang belum waktunya adanya perubahan susunan pimpinan PMI sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 70 Thn 1968 Tanggal 20 Februari 1968.

Apabila ada perubahan pimpinan jang bertentangan dengan keputusan Presiden No 70 Thn 1968, berarti suatu pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan oleh Pemerintah.

Ditolaknya keputusan Muktamar Parmusi atau PMI di Malang yang menetapkan Mohamad Roem, mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi, sebagai Ketua Umum, oleh pemerintah militer Orde Baru melalui Radiogram di atas,menimbulkan berbagai reaksi antara lain:

Dr. Mohammad Hatta yang mempunyai nasib sama dengan Parmusi, partainya Partai Demokrasi Islam Indonesia - PDII ditolak oleh Pd Presiden Djenderal Soeharto, Juli 1967. Dalam ceramahnya di Dewan Keluarga Masjid Istiqamah Jalan Taman Citarum Bandung, 21 Sja'ban 1388, Kamis Manis, 13 November 1968, dalam menjawab pertanyaan wartawan Antara, Dr. Mohammad Hatta antara lain menyatakan ingin membentuk kader partai. Selain itu, walaupun sebagai pendiri PDII juga meragukan bahwa umat Islam benar-benar 90% dari populasi bangsa Indonesia. Di samping itu juga, menyatakan bila Indonesia sebagai negara demokrasi, Presiden Soeharto tidak benar campur tangan terhadap hasil Muktamar Parmusi.

Tentu, pandangan ini berbeda dengan penafsiran demokrasi oleh Musyawarah Komando - Musko, Kopkamtib, Pangdam, serta Pelaksana Chusus - Laksus: tindakan pemerintah menolak hasil keputusan Muktamar Parmusi justru sebagai upaya menegakkan demokrasi jang sehat dalam pelaksanaan, ditindai dari keamanan dan ketertiban. Tanpa keduanja demokrasi jang sehat hanya djadi angan-angan.

Setelah penertiban parpol dengan hanya diizinkan dua sistem partai, PPP dan PDI, Januari 1973, setahun kemudian meledaklah demo mahasiswa bersama rakyat yang disebut oleh pemerintah sebagai Peristiwa Malari, Malapetaka Januari, 15 Januari 1974. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kedatangan P.M. Tanaka dari Jepang.

Menurut Jenderal Yoga Sugomo, demo Malari ini dikendalikan oleh kelompok Rahmadi yang bertujuan mengadakan perubahan politik dengan penyegaran kabinet. Untuk sementara mempertahankan Soeharto sebagai presiden.

Ternyata, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihian Keamanan dan Ketertiban - Pangkopkamtib, Jenderal Soemitro, bahwa yang disebut kelompok Rahmadi adalah orang dekatnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Terdiri dari Letjen Suadi, bekas Dubes Etiopia, Laksamana Muda Mardanus, mantan Menteri Perindustrian dan Maritim, dan Puguh. Dalam Dokumen yang diketemukan oleh Pangkoptamtib Soemitro, menokohkan Jenderal Soemitro sebagai rival Presiden Soeharto.

Demikianlah penjelasan dari Jenderal Soemitro kepada Dr. Anwar Harjono S.H. Namun, pihak kelompok Rahmadi menyebarkan pemberitaan di luar, demo Malari didalangi oleh Masjumi dan PSI. Walaupun sudah 14 tahun Masjumi dibubarkan, 1960-1974 M, namun tetap dijadikan isu dalam demo.



## PONDOK PESANTREN ISLAM INTERNASIONAL TERPADU ASY-SYIFAA WAL MAHMOUDIYAH

KP. SIMPANG KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG  
JAWA BARAT - INDONESIA



Sumber: Doc. Ponpes Asy-Syifaa wal Mahmuudiyah

Mencetak Santri untuk menjadi al-'Ulama  
al-'Aminun dan al-'Amilun al-'Ulama dengan landasan  
aqidah Ahli al-Sunnah Wa al-jama'ah.

## Madjelis Ulama Indonesia

Langkah selanjutnya, untuk mewadahi aktivitas Ulama mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan mantan Tahanan Politik di RTM Madiun dan Malang, serta pimpinan terpilih Muktamar Partai Muslimin Indonesia, diizinkan aktif dalam Madjelis Ulama Indonesia - MUI. Suatu Majlis Oelama Indonesia yang pernah ada, 29 Januari 1928, Sabtu Kliwon, 5 Sya'ban 1346, yang diusulkan oleh Hadji Agoes Salim dalam National Congres Partai Sjarikat Islam Indonesia di Djogjakarta. Pada saat itu, antarUlama Wahabi dengan Ahli Soennah Wal Djamaah, teragendakan program pemerintah kolonial Belanda, menjadi saling aktif melancarkan debat masalah khilafiah, serta melupakan realisasi tuntutan politiknya, Pemerintahan Sendiri dan Indonesia Berparlemen.

Ternyata, sejarah berulang lagi. Di bawah pemerintah Orde Baru, untuk membelokkan perhatian masyarakat Islam terhadap masalah politik, dijadwalkan kembali meledaknya benturan masalah khilafiah. Menanggapi kondisi itu, Ketua Organisasi Islam Afrika Asia - OIAA, Ketua II PBNU, Ketua DPRS, K.H. Achmad Sjaichu, di hadapan kaum Muslim Madjlis Taklim Kwitang Djakarta, 29 Sya'ban 1388, Rabu, 20 November 1968, mengajukan appeal agar umat Islam bersatu padu, menghilangkan dan meninggalkan perselisihan masalah khilafiah.

Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan, dibangun kembali Madjelis Ulama Indonesia, dipelopori oleh Dr. K.H. E.Z. Muttaqien di Bandung. Kemudian, menyusul didirikan Madjelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, dengan Ketua Prof. Dr. Buya Hamka. Demikian pula, Mohammad Natsir mengaktifkan diri memimpin Dewan Dakwah Islam Indonesia, yang didirikan sekitar 1387 H/1967.

## Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia

Dengan pertimbangan realitas kebijakan pemerintah militer Orde Baru di bidang partai politik tadi dan realitas pertumbuhan masjid sangat pesat, didukung dengan semakin ramainya para pemuda memakmurkan masjid maka atas inisiatif Hamid Sajuti, Ahmad Mansur Suryanegara, Mustafid Amna, dan Samsudin Manaf di ruang Dekanat Fakultas Psikologi UNISBA, Jalan Tamansari No 1 Bandung, diprogramkan pembentukan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia - BKPMI.

Untuk pertama kalinya BKPMI direalisasikan di Masjid Istiqomah Jalan Taman Citarum Bandung. Dipimpin oleh Toto Tasmara sebagai Ketua, Bambang Pranggono sebagai Sekretaris, dan Muchlis Ma'ruf sebagai Bendahara. Diresmikan oleh Ketua

MUI, Dr. K.H. E.Z. Muttaqien (27 Ramadhan 1397 H, Senin Kliwon, 12 September 1977). Setelah berkembang di seluruh Indonesia, disarankan oleh Presiden Soeharto untuk disempurnakan menjadi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia - BKPRMI.

Di samping itu, di Bandung didirikan pula Yayasan Dana Al-Falah oleh K.H. Rusjad Nurdin dan Dahlan Lukman dengan pelindung Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito. Dengan tujuan menghimpun dana umat untuk membangun ekonomi umat. Selain itu, diadakan pula latihan kerja untuk generasi muda, dilatih dalam bidang pertanian, peternakan, dan wirausaha, di Ciampea Bogor didirikan Pesantren Daarul Falah.

Sejenis dengan usaha ini, didirikan pula Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia - BKPKPI disertai dengan gerakan Koperasi Pondok Pesantren - Kopontren sebagai upaya membangkitkan kembali kesadaran berwirausaha sebagaimana saat awal Islam masuk ke Nusantara Indonesia. Di samping itu juga, digalakkan kembali Koperasi Unit Desa - KUD.

Dampak dari pertumbuhan dan perkembangan masjid yang menjamur di seluruh Nusantara Indonesia, dibentuklah Dewan Keluarga Masjid - DKM di bawah pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Menyusul dibentuk pula Dewan Masjid Indonesia - DMI di bawah pimpinan Golongan Karya.

Selain itu, dibangun pula Masjid Yayasan Amal Muslimin Pancasila yang memiliki kekhasan bentuk arsiteknya, disesuaikan dengan lahannya. Dengan bentuk arsitektur Indonesia yang Islami, tidak terlihat kusen dan pintu, serta mimbar dari bentuk atau ornamen salib. Dana pembangunan masjid dikumpulkan antara lain dari pemotongan gaji Pegawai Negeri. Didirikan di kota-kota kabupaten hingga ibu kota Provinsi.

Dengan membanjirnya jamaah dan aktivitas masjid-masjid di Indonesia, menjadikan di sekitar masjid tumbuh pertokoan atau pasar. Oleh karena itu, Presiden Soeharto merasa perlu untuk mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi umat, di Istana Bogor meresmikan berdirinya Bank Muamalat. Demikian pula dengan adanya aksegerasi sistem pendidikan Perguruan Tinggi, menjadikan semakin banyaknya jumlah Sarjana Muslim. Demi meningkatkan partisipasi para cendekiawan Muslim dalam pembangunan maka Presiden Soeharto bersedia membuka pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia - ICMI di Malang.

Pengaruh iklim pembangunan di masa Orde Baru menjadikan pembangunan sarana pendidikan Islam sangat cepat dari pendidikan Taman Kanak-Kanak, Madrasah, Pesantren hingga Perguruan Tinggi Islam. Diikuti pula pesatnya pembangunan Klinik

dan Rumah Sakit Islam. Penerbit buku Islam menjamur di mana-mana. Tidak kalah pula meningkatnya jumlah KBIH dengan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia sebagai negara yang paling banyak jumlah Haji dan Umrahnya.

Semangat membangun masjid dan mushala dengan dana umat, meledak luar biasa, dapat dilihat partisipasi dari masyarakat mulai RT, RW, Terminal, kompleks perumahan, perkantoran pemerintah dan swasta, rumah makan, kampus universitas, bandara, di pom bensin - SPBU. Disertai dengan aktivitas mengadakan dakwah secara rutin. Kenyataan ini sebagai bukti keberhasilan strategi pemerintah Orde Baru dalam usahanya memisahkan rakyat dari pengaruh ajaran komunis.

Di Bandung, SPBU Al-Ma'soem memelopori pembangunan masjid atau mushala dan tidak buka pada waktu Shalat Jumat. Haji Ma'soem sebagai wirausahawan Muslim tidak hanya bertumpu pada aktivitas pengembangan bisnis perniagaannya semata. Namun juga, aktif mendirikan dan mendanai sekolah dari Tomoh Kanak-Kanak hingga AMIK Al-Ma'soem, dan Pesantren. Tidak lupa mengadakan Peringatan Hari Besar Islam dengan dakwah terbuka. Semua kegiatan ini sampai sekarang semakin meningkat, diteruskan oleh putranya Nanang Iskandar Ma'soem, S.E. M.Si.

Presiden Soeharto selain menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal, juga membangun masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea. Setelah membebaskan Timor Timur dari komunisme Fretelin, 1976 M, selain membangun Gereja Katolik serta Patung Jesus yang sama besarnya di Brasilia, juga membangun masjid di perkampungan Islam. Demikian pula di Bosnia, satu-satunya Kepala Negara yang membangun masjid hanyalah Presiden Soeharto dengan nama Masjid Soeharto dan di Jakarta dengan nama Masjid At-Tin.

Pilkada atau Pilpres

Genetasi Penemu Pertama yang menjadi Al Ma'soem tidak hanya sebagai Lembaran Niaga dan Lembaga Pendidikan semata tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan

## H. NANANG ISKANDAR MA'SOEM, SE., M.Si



### HADJI MA'SOEM

Bukti sejarah adanya sosok wirasawahan pada abad ke-20 M yang berjuang dengan dana prihati menggerakkan dakwah Islam dan Pesantren, melanjutkan perjuangan dan dakwah para wirasawahan Muslim dari abad ke-7 M dan Wali Sanga abad ke-13 M.

Berpartisipasi aktif mendirikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Akademi Manajemen, Informatika dan Komputer - AMIK di wilayah Bandung Timur.

Kampus pendidikan AlMa'soem dilengkapi dengan Koleksi Rencang untuk melaksanakan salah satu perintah Rasulullah saw, ajari anakmu berenang. Poldop SFBU yang memiliki mushala dan masjid serta tutup pada waktu shalat jumat.



Satu hal yang sangat menakjubkan dunia Islam, Hajjah Juriah M. Al-Rasjid, satunya wanita di dunia yang mampu membangun Masjid Kubah Mas di Depok Jawa Barat, dengan berat emas di kubah dan di puncak menara, serta di kepala tiang seluruhnya mencapai 2,5 ton. Walaupun demikian kemajuan umat Islam, diberitakan Indonesia sebagai negara yang terpuruk.

Perhatian dan pendekatan Presiden Soeharto kepada masyarakat Islam, cendekiawan Muslim, pemuda dan remaja Islam, serta petani desa, besar kemungkinannya setelah terlepas dari pengaruh Sekpri Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, dan sesudah Daud Jusuf, Benny Moerdani, serta Soedomo. Ketiganya tidak berperan aktif dalam jabatan kementeriannya.

### **Ulama Menghadapi Kopkamtib**

Sekali lagi, sejarah mengajarkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kecuali kesamaan kepentingan yang abadi. Setelah kondisi PKI teratas, bergantilah sasarnya. Di bawah penguasa militer Orde Baru, Komando Operasi Penertiban Keamanan dan Ketertiban - Kopkamtib, Jenderal Benny Murdani dan Admiral Soedomo<sup>2</sup> keduanya non-Islam, dan Ali Moertopo sebagai Ketua Badan Intelijen - Bakin, terjadilah pembalikkan situasi.

Dakwah Ulama dan BKPMI serta aktivitas mantan pimpinan KAMI dan KAPPI dihadapkan tuduhan anti Pancasila dan tindakan pelanggaran hukum subsersif. Sementara masjid sebagai pusat ibadah umat Islam, dan kampus tidak luput dicurigai tempat gerakan anti pemerintah. Pada umumnya, masyarakat gelisah dan ketakutan, terasa hidup kehilangan kekebasan dan menjadi tercekam.

Pemerintah Orde Baru dalam mengoperasikan ideologi Pancasila dan UUD 1945, terjadi penafsiran yang menyimpang. Menurut Mashudi dalam Mamandu Sepanjang Masa, setelah Kolonel Ali Moertopo dan Kolonel Soedjono Hoemardani sebagai Sekpri, terjadilah ketegangan hubungan antarpimpinan Orde Baru. Jenderal Nasution dengan tindakan koreksinya dinilai sebagai penghambat. Presiden Soeharto menjawab bahwa dalam menjalankan roda eksekutif memerlukan pendamping. Namun, karena adanya tuntutan demo mahasiswa maka kedua Sekri tersebut ditiadakan.

---

2 Admiral Soedomo pada akhirnya kembali memperoleh hidayah, kembali masuk Islam.



Sumber: Doc. Wiyanto Sumardi

## HJ. DIAN JURIAH M. AL-RASJID



Foto: Wiyanto Sumardi

Sumber: Doc. Wiyanto Sumardi

## MASJID KUBAH EMAS

Di tengah derasnya berita Statistik Barat, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang perekonomiannya sedang terpuruk. Umat Islam menjawab, menjadikan Indonesia jumlah Calon Haji terbesar di seluruh dunia. Walaupun ONH naik, namun jumlah Calon Haji *waiting list* semakin membengkak. Pertanda semangat dan kesadaran beragamnya, serta jiwa berkorban dalam harta sangat tinggi.

Sebagai salah satu buktinya, Hj. Dian Juriah M. Al-Rasjid dengan amal nyata, membangun Masjid Kubah Emas dan kaptif kepala tiang, puncak menara, berlapisan emas. Diberitakan berat emas seluruhnya adalah dua setengah ton.

Satu-satunya wanita di dunia dengan dana pribadi membangun masjid indah berkubah emas, melampaui berat Kubah Emas Masjidil Aqsha. Sungguh menakjubkan!

## Petisi 50

Akibat lanjutnya timbulah gerakan koreksi terhadap Orde Baru yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya oposisi ala Barat. Hanya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dampaknya muncullah koreksi Petisi 50 di dalamnya terdapat pimpinan Angkatan Laut, Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.<sup>3</sup> Terdapat pula mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Menteri Perindustrian Ir. H. M. Sanusi.

Koreksi Petisi 50 ini dinilai oleh Presiden Soeharto sebagai kelompok orang menurut pepatah Jawa, rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa - merasa bisa tetapi sebenarnya tidak memiliki perasaan. Maksudnya merasa mengerti, bagaimana mengaplikasikan Pancasila dan UUD 1945. Namun, dari sistem koreksinya, menggambarkan ketidakbisaannya. Demikian penjelasan Presiden Soeharto, 1989, dalam Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Dalam menghadapi Petisi 50, Kepala Bakin Yoga Soegomo, Pangkopkamtib Soedomo, dan Jaksa Agung Ali Said, mereka menghadap ke Menhankam/Panglima ABRI, Jenderal Jusuf, menyampaikan rencana penangkapan para pelaku Petisi 50. Ternyata, Jenderal Jusuf tidak membenarkan rencana dari ketiga penguasa tersebut, dan mengingatkan mereka bahwa tidak mungkin dapat memenjarakan pelaku Petisi 50 selamanya. Penolakan Jenderal Jusuf itu menjadikan rencana penangkapan para pelaku Petisi 50 gagal dilaksanakan. Walaupun dijamin dari segi keamanan oleh Soedomo, intelijen oleh Yoga Soegomo, dan segi hukum oleh Ali Said. Demikian penjelasan Dr. Anwar Harjono, S.H.

Di sisi lain, represi dan provokasi, menimbulkan gerakan perlawanan secara fisik. Antara lain, Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984. Dari peristiwa ini ditangani secara militer, sebagai pelaksanaan Blitzkrieg Strategy, akibatnya banyak korban yang berjatuhan, antara lain Amir Bikri gugur. Juga dilakukan penangkapan tanpa disertai pengacara dengan dihadapkan ke pengadilan. Tindakan selanjutnya, untuk meredakan api dalam sekam, Pangkopkamtib mendekati Majelis Ulama Indonesia agar ikut serta mendinginkan situasi yang memanas setelahnya.

3 Gubernur Kepala daerah DKI Jakarta, Ali Sadikin, ditegur oleh K.H. Rusjad Nurdin dan Dahlan Loekman, dari Yayasan Dana Al-Falah, dalam usahanya menjadikan Jakarta hidup 24 Jam dan pembangunan kota Jakarta, mengapa menjadikan *Hua Hue* dan *Totalisator*, sebagai sumber dana pendapatan daerah atau *income*, padahal Jakarta sebagai ibukota RI dan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Sedangkan Uni Soviet dan RRC sebagai negara komunis, tidak ada yang menjadikan judi sebagai sumber *income* pembangunan tata kotanya. Kedua Ulama tersebut memohon agar judi *Hua Hue*, *Totalisator* yang merusak moral rakyat, dihentikan.

Peristiwa Tanjung Priok mengundang perhatian Petisi 50. Kemudian, membentuk Panitia Kecil diketuai oleh H.R. Dharsono, dan anggotanya Sjafruddin Prawiranegara, Slamet Bratanata, Anwar Harjono, dan A.M. Fatwa. Dikeluarkanlah Lembaran Putih koreksi kesalahan pemerintah yang menyimpang dari UUD 1945 dan asas tunggal Pancasila.

Namun, hasilnya ketiga penandatangan Lembaran Putih, yakni Ir. H. M. Sanusi dijatuhi hukuman 19 tahun dengan tuduhan mendalangi peledakan bom BCA, jembatan Metro dan Glodok. A.M. Fatwa dihukum 18 tahun. H.R. Dharsono mantan Pangdam VII Siliwangi dijatuhi hukuman 7 tahun.

Memasuki 1984 M, mantan pimpinan Masjumi dijadikan sasaran tuduhan dari segenap peristiwa yang dinilai pemerintah Orde Baru tidak benar. Kelompok Petisi 50 dituduh oleh Kepala Bakin Yoga Soegomo, melakukan Kudeta Konstitusional. Dituduh akan mengubah ideologi Pancasila.

Padahal jauh-jauh sebelumnya, menurut Dr. Anwar Harjono, S.H. dalam *Membentuk Idjma (Konsensus) Nasional untuk Melaksanakan Pembangunan Indonesia dengan Djawa jang segar*, menyatakan:

Sepanjang menjangkut Pantjasila sebagai filsafat dasar negara, sedjak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tidak satu partai Islam pun jang ragu-ragu menjatakan penerimanya. Penerimaan itu tidak dilakukan sebagai taktik. Umat Islam menerima Pantjasila adalah karena pertimbangan-pertimbangan asasi jakni karena asas Islam dapat menerima Pantjasila.

Penjelasan ini pun, tidak dibenarkan oleh peinguasa militer Orde Baru. Sekalipun Dr. Anwar Harjono, S.H. menambahkan penjelasannya:

Piagam Djakarta, 22 Djoeni 1945, kerap kali diidentikan dengan ide Negara Islam. Padahal sepanjang sejarah, belum pernah ada satu partai Islam pun yang mencantumkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam.

Namun, praktik dari Strategi Kopkamtib Jenderal Benny Mardani dan Admiral Soedomo, menjadikan para Ulama, Santri Usrah, mantan aktivis KAPPI, KAMI, Dosen, Hakim, Menteri dan Jenderal yang dikebiri aktivitasnya atau ditangkap dengan berbagai tuduhan. Seperti penjelasan Jenderal Prn. TNI AD Dr. A.H. Nasution kepada penulis, sekitar 100 Perwira Tinggi dicekal oleh Ali Moertopo, dilarang masuk Kampus Universitas manapun, walaupun sebagai alumni. Misalnya Dr. A.H. Nasution sebagai alumni Unpad, dilarang memberikan Taushiyah Maulid Nabi 1400 H di Masjid Al-Jihad Universitas Padjadjaran.

## Penangkapan Aktivis Islam

Menurut The Berne Convention, 1987 dalam Tapol, the Indonesia Human Rights Campaign, antara lain disebutkan nama-nama tokoh Islam yang ditangkap adalah:

Ir. H. M. Sanusi	Dr. Mursalin Dahlan
Andi Mohammad Fatwa	Ir. Syairul Alim M.Sc
Ir Ageng Sutisna	Drs. Nur Iman
Drs. Abdul Halim	Iwan Marwan Ashuri
Herliadi	Sujatmono
Barry	Mohammad Achwan
Abdul Qadir Djaelani	M. Djajadi
Mawardi Noor	

K.H. Abu Bakar Ba'asir dari Pesantren Ngruki Surakarta, dituduh sebagai penggerak Usrah. Di samping itu, ditangkap dan dipenjarakan pula, Jenderal Ton Dharsono mantan Pangdam Kodam VI Siliwangi dan Sekjen Asean.

Dampak tindakan ketiga jenderal tadi, menumbuhkan di hati rakyat rasa ketakutan dan ketertindasan, membangkitkan benih-benih sikap kurang simpati terhadap kepemimpinan TNI. Apalagi hasil Pembangunan Lima Tahun - Pelita, gagalnya sistem pemerataan, kelanjutannya tidak lagi dirasakan oleh rakyat kecil. Menurut Sutomo, 2008, dalam Bung Tomo Menggugat, Pelita berbalik semakin memperkaya golongan Cina jadi konglomerat.

Mereka ini walaupun semakin kaya dan makmur kehidupannya, selalu berteriak merasa didiskrimasikan. Presiden Soeharto tidak menghendaki adanya jurang ekonomi yang dalam antara rakyat dengan konglomerat, akan mengundang pengulangan sejarah terjadinya Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung.

Seperi yang dituturkan oleh Gubernur Jawa Barat, Mashudi, saat itu tiba-tiba terjadi gerakan demo yang didasari ethnic prejudice - prasangka etnis, yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi Pribumi dan Non-Pribumi. Dampaknya melahirkan "revolusi jalan raya" dan main hakim sendiri. Gerakan demo pengrusakan, diawali dengan merusak kendaraan mahasiswa di kampus ITB. Kemudian, bergerak ke jalan raya tempat usaha, toko, milik etnis Cina. Gerakan demo ini murni, bukan garong atau perampok, tidak terlihat adanya pengambilan barang-barang dari toko yang dirusak.

Munas Alim Ulama NU Situbondo Memutuskan

# Islam Adalah Akidah Pancasila Sebagai Azas

Jakarta, TERBIT

RAGI NU. Pancasila sebagai dasar dan fabifah negara republik Indonesia bukanlah agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara RI memuat pasal

29 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa sila yang lain mencerminkan kebutuhan menurut pengertian keimanan dalam Islam. Sedangkan Islam bukanlah akidah atau syariat. Syariat yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Demikian juga dari lima pasal deklarasi yang dibiasikan Mosiyar wahab Nasional para Alim Ulama NU yang berakhir kemeriahan di Pendak Paseantren Salafiah Syaifiyah Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam Keputusan umumnya, Munas menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Kelima pasal deklarasi dimaksudkan untuk memperjelas kejelasan itu.

Jawaban Munas Alim Ulama NU di Situbondo terhadap Pancasila sebagai asas Islam sebagai akidah dan syariah meliputi aspek hubungan dengan Allah dan hubungan manusia.

Dalam deklarasi keempat, Munas mengakui penerimauan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan diri ayat-ayat iman Islam Indonesia untuk mewujudkan Syariat agama-naya Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap datar, NU berkecualian masing-masing pengertian yang ovarat tentang Pancasila dan mengamalkannya yang mutu dan konsekuensi oleh semua pihak.

Dalam rumusan yang dibiasakan Komisi II Khittah yang kemudian disebut Sungai Picu Manas yang dituliskan Revisi Esanu II KJRI pada akhirnya menyatakan: "NU yang berhaluan pada akidah Islam ala Abi Hafsah Wahab Jam'i dikenakan semata-mencerminkan Pancasila, namun bukan dalam makna yang teliti, undang-undang UUD 1945 tidaklah wajib. Misalnya maraq dengan nusa tunggung prasasti dan arawak ala padu Allah".

Karena itu jauh lebih (organisasi NU berkecualian) memadukan Pancasila sebagai asas organisasi, demikian bantu rumasan itu.

Selanjutnya, Ketua Komisi II Khittah H.A. Chardini Widiyati (Kaiti Asaat) membacakan kerujukan komisi yang terdiri atas empat anggota. Pertama, hakikat NU dan keadaan Islam di Indonesia, maka Khittah dan berharap rekomendasi.

Mengenai musalah konsekuensi pemulihara Khittah yang disampaikan oleh sebagian besar NU dan Pimpinan, kebutuhan NU dan politik serta program yang dikembangkan pembahasan materi di dasarkan pada makalah yang disajikan oleh Mustarof Penolohah PH Syarif H.Achmad Siddiq.

Konsep makademik  
Konsep Makademik Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) NU hasil keputusan Musyawarah Tingkat Direktorat mendeklarasikan dalam Menterai XXVII NU tahun 1984, berbentuk sebagai berikut:

Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, dan karena itu ajarnya memordir keagamaan pemeliharaan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Bahwa para Ulama Ahlu Sunnah wal-Jama'ah Indonesia terpanggil untuk mengingat kembali ketauhian agama, dalam suatu wadah yang disebut Nahdlatul Ulama dengan tujuan mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menuju paham ahli sunnah wal-jama'ah.

Bahwa kemaslahatan warga NU adalah bagian mutlak dari kemaslahatan bangsa dan negara, maka dalam perjuangan mencapai kemaslahatan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, organisasi NU bersaaskan

Sumber: *Hariyan Terbit*

Gubernur Jawa Barat Mashudi, bersyukur demo yang berangkat dari kampus ITB dan kampus lainnya, dapat diarahkan bergerak ke halaman Gubernuran Pakuan Jalan Otto Iskandardinata. Gerakan ini diisukan dipimpin oleh kelompok mantan pimpinan PSI.<sup>4</sup>



Sumber: Doc. Pribadi

### Pertemuan Penulis dengan Jenderal A.H. Nasution

Penulis menyampaikan berita gagalnya rencana pemberian taushiyah Jenderal A.H. Nasution, dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1400 H di Universitas Padjadjaran Bandung karena tidak diizinkan oleh Laksus. Jenderal A.H. Nasution memahaminya dan memperlihatkan kepada Penulis tentang sejumlah tokoh pimpinan Orde Baru yang dicekal oleh Jenderal Ali Moertopo tidak diizinkan masuk kampus walaupun sebagai alumni. Tampak kertas putih di kursi berisikan nama-nama tokoh yang dicekal dan peringatan kepada redaksi media massa agar tidak memuat pemberitaan pandangan atau konsep pemikiran dari tokoh yang dicekal.

Demi menghindari agar tidak terjadi lagi, digalakkan gerakan Pembauran Bangsa, agar golongan etnis Non-Pribumi membaur dalam aktivitas ekonomi, sosial budaya, olah raga, dan memahami sejarah Pribumi. Gerakan Pembauran Bangsa ini pun menemui kesulitan. Diisukan terjadi pemaksaan etnis Cina, untuk masuk ke agama Islam. Timbulah usaha yang merencanakan agar terjadi Huru Hara Anti Cina seperti

4 Periksa lebih lanjut. Dr. The Siauw Giap. 1986. *Cina Muslim di Indonesia*. Yayasan Ukuwah Islamiyah. Jakarta.

yang pernah terjadi di Surakarta, 1912 M. Targetnya agar Non-Pribumi menjauh dari Pribumi Islam. Dengan kata lain, bertujuan menggagalkan upaya Pembauran Bangsa.

Di sisi lain, timbul pula huru hara gerakan anti korupsi di Pertamina. Hal ini dipicu oleh adanya pengembangan dakwah Islam di Pertamina tampak sangat pesat. Namun, tujuan sebenarnya untuk menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekaligus dampaknya menghambat pengembangan dakwah Islam di Pertamina.

Padahal aktivitas dakwah Islam di Pertamina, bertujuan melumpuhkan pengaruh ajaran komunisme yang pernah dikembangkan oleh Serikat Buruh Minyak. Kedudukan Dr. Ibnu Sutowo yang dekat dengan Islam dijadikan sasaran utama untuk digoyahkan dengan tuduhan korupsi dan salah urus.

Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM. Presiden Soeharto dalam menjawab demo dan berbagai tuntutan yang diangkat oleh beberapa surat kabar, baru dilaksanakan setelah situasi mereda, air mendidih sudah mulai mendingin, mengantikannya Dr. Ibnu Sutowo dengan Piet Harjono sebagai Dirut baru.

Tidak luput dari sasaran dakwah Islam di Telkom. Diciptakan berbagai isu agar diadakan penggeseran kedudukan terhadap beberapa pimpinan yang sangat simpati pada pengembangan dakwah Islam dan pemberian fasilitas untuk naik haji pegawai Telkom.

## **Ali Moertopo Dalang Keonaran**

Apakah targetnya akan menghambat dakwah Islam, dan menjauhkan Presiden Soeharto dengan realitas kekuatan umat Islam di seluruh eselon kerja dan jawatan serta instansi. Apakah untuk menciptakan kesan pemerintah Orde Baru menindas umat Islam. Berikutnya massa Islam dan remaja Islam - miris yang sedang ketakutan, ditargetkan akan dijadikan alat pendongkel Presiden Soeharto. Sebenarnya, siapa *author intellectualist* - dalang peristiwa kerusuhan. Apakah benar tujuannya akan menggulingkan Presiden Soeharto dan Sang Dalang ingin menjadi Presidennya?

Kholid O. Santosa, 2007, dalam *Jejak-Jejak Sang Pejuang Pemberontak, Pemikiran, Gerakan & Ekspresi Politik S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureueh*, menuturkan bangkitnya kembali gerakan NII, tidak luput dari rekayasa dari Ali Moertopo. Dengan memanfaatkan tenaga mantan NII, Ali Moertopo akan menggulingkan Presiden Soeharto. Apabila berhasil maka akan dibantu pembentukan NII dan Ali Murtopo sebagai Presidennya.

Ali Moertopo sebagai pimpinan Operasi Khusus - Opsus, dalam melaksanakan rekayasanya, dibantu oleh: Kolonel Ngairan dan Kolonel Gijanto pencari dana di dalam dan di luar negeri. Di bidang operasi dibantu oleh Kolonel Sumardan.

Demikianlah tingkah laku politik Ali Moertopo sebagai orang dekat Presiden Soeharto, akan merebut kursi kepresidenan Soeharto. Namun, segenap peristiwa hasil rekayasanya, selalu menuduh mantan pimpinan Masyumi dan G.P.I.I sebagai dalang gerakan anti Pancasila dan mencoba menggulingkan Presiden Soeharto.

Ali Moertopo dengan rekayasanya, berupaya menjadikan mahasiswa dan umat Islam tidak simpati kepada Presiden Soeharto. Sebaliknya, agar Presiden Soeharto menjauh dari umat Islam dan tidak dekat dengan mantan pimpinan Masjumi sekalipun bersikap koperatif dan akomodatif. Dengan cara itu, Ali Moertopo akan tampil sebagai juru selamatnya. Dia berusaha menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden. Alhamdulillah, para Ulama dan umat Islam umumnya, justru sebaliknya bersikap antipati terhadap Ali Moertopo.

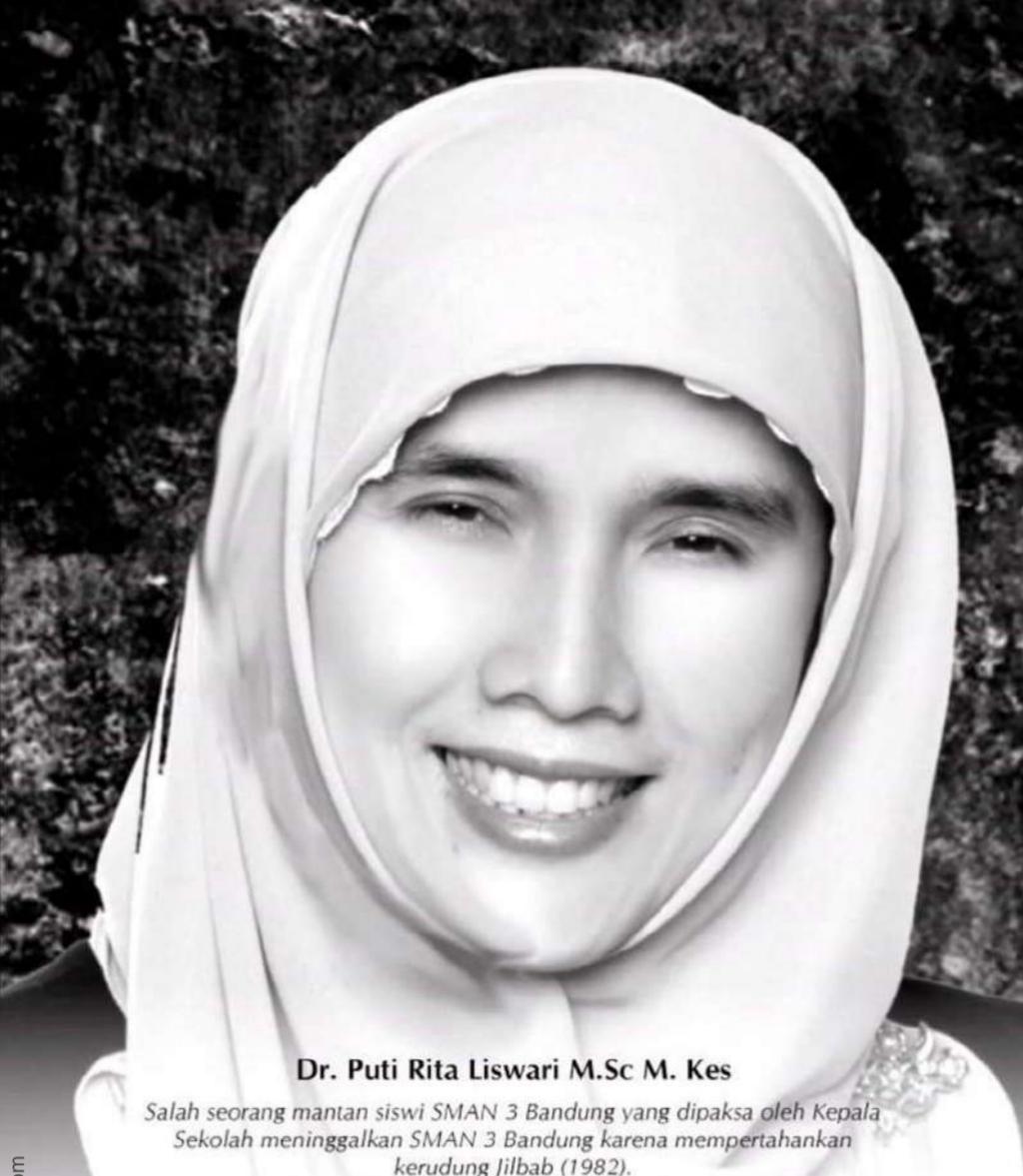
## **Problem Kerudung Jilbab Siswa SMA**

Upaya memadam cahaya ajaran Islam yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan didukung oleh Benny Moerdani, dijawab oleh Masjid Salman yang dipimpin oleh Prof. Sadeli, Dr. Ir. Immaduddin, Enang Saifuddin Anshary M.A., Prof. Dr. Syarif. Prof. Dr. Miftah Farid, dengan membangkitkan gerakan dakwah di kalangan remaja dan pemuda. Terutama dakwah ke mahasiswa, dengan mengadakan semacam kursus. Untuk menanganinya diserahkan kepada Karisma - Keluarga Remaja Islam Salman.

Selain mengadakan pembelajaran baca Al-Qur'an untuk remaja, juga mengadakan Latihan Mujahid Dakwah - LMD. Kemudian, diadakan pula Studi Islam Intensif - SII. Dalam hal ini ditangani oleh Dr. Ir. Yan Orgianus. Dengan bergabungnya Anne Rufaidah dari Seni Rupa ITB ke Karisma, lahirlah rancangan busana Muslimah. Dengan menjadikan putri-putri atau akhwat Karisma sebagai pemakai hasil rancangan busana Muslimah, mulailah kaum Ibu dan remaja putri Masjid Salman dan mahasiswi ITB mengenakan busana Muslimah berkerudung jilbab.

Akibat Karisma juga mengadakan Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMA Negeri atau Swasta, mulailah kerudung jilbab masuk ke SMA Negeri di kota Bandung. Kemudian, cepat menjalar ke seluruh SMA di Jawa Barat. Pengaruhnya bagi SMA Swasta tidak bermasalah busana seragam SMA dengan berkerudung jilbab.

Pengembangan selanjutnya digerakkan Mbak Rina dari Teknik Informatika ITB, meluas hingga melahirkan "Samodra Jilbab" di kalangan para siswi dan mahasiswi di Bandung.



### **Dr. Puti Rita Liswari M.Sc M. Kes**

*Salah seorang mantan siswi SMAN 3 Bandung yang dipaksa oleh Kepala Sekolah meninggalkan SMAN 3 Bandung karena mempertahankan kerudung Jilbab (1982).*

*Ternyata kerudung Jilbab tidak menghambat kemajuan studi di Amerika Serikat, Belanda, China, dan karir kerja selanjutnya.*

*Founder and Master Trainer Training "Integrated Health Centre"  
Pengembang dan Praktisi Interactive Medicine  
sebuah konsep pengobatan yang menggabungkan 3 konsep pengobatan:  
Barat, Komplementer, dan Tradisional.*

Tidaklah demikian halnya dengan SMA Negeri 3 Bandung. Kepala Sekolahnya, menilai siswa yang berkerudung jilbab, melanggar janji taat terhadap tata aturan disiplin sekolah dan seragam sekolah. Termasuk masalah kesediaan mengenakan busana olah raga. Pelanggaran ini diperingatkan dengan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di dalam kelas, masih diizinkan berada di luar kelas. Namun, karena para siswa yang berkerudung jilbab tetap tidak bersedia membukanya, dikenakan hukuman dikeluarkan dari SMA Negeri 3. Tindakan yang sama dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri di Jakarta

Adapun siswi-siswi SMAN yang tetap mempertahankan berkerudung jilbab dan terkena hukuman dikeluarkan karena mempertahankan busana penutup aurat secara Islami adalah:

SMA Negeri 68 Jakarta: Ratu

SMA Negeri 3 Bandung:

Erlin Marlina	Ellin Hendari	Yanti Rufaidah
Atty Martina	L. Rahayuningtyas	Diah Agustina
Suhartini	Puti R. Liswari	Jaziar Radianti
Nina Surtiretna	Umi Kulsum	Wati
Emma	Kiki Nurruzakiah	

SMA Negeri 5 Bandung: Nina Manarosma

Seluruh yang jadi korban tindakan Kepala Sekolah yang tidak membenarkan siswi di sekolahnya mengenakan kerudung jilbab, pada 1982, se-Jawa Barat berjumlah sekitar 300 siswi. Mengapa Kepala Sekolah harus menindaknya? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daud Yusuf dalam menegakkan disiplin sekolah sama pola strateginya dengan Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Apabila di sekolah atau di kampus Perguruan Tinggi berkembang kehidupan Islamnya, Kepala Sekolah atau Rektor harus bertanggung jawab. Pembusanaan jilbab harus dikenakan wajib foto untuk ijazahnya atau keterangan yang diperlukan adanya foto, harus tampak telinga pada foto setengah badannya.

Selain itu di aktivitas di Masjid Salman ITB, pada masa Orde Lama tidak mendapatkan tekanan seperti masa Orde Baru yang dilancarkan oleh sebagian pimpinan militer Ali Moertopo, Benny Moerdani, dan Soedomo. Tekanan terhadap aktivitas dakwah Islam di Masjid Salman, menjadikan Prof. Dr. Miftah Farid berlangganan mendekam di Laksus untuk diinterogasi.

## Kerudung Jilbab Keluarga Cendana

Di tengah para siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya karena mengenakan kerudung jilbab, di tengah keluarga Presiden Soeharto, putrinya, Mbak Tutut atau Siti Hardiyanti Rukmana, selalu tampil berjilbab. Tidakkah hal ini memberikan gambaran bahwa antara Ali Moertopo dan Benny Moerdani serta Daud Yusuf mempunyai kebijakan Islam yang berbeda, Benny Moerdani terlihat menekan Islam, setelah pembebasan Timor Timur dari penjajahan Portugis (1976 M). Pada awalnya di wilayah ini hanya berlaku pengembangan agama Katolik. Namun, setelah dibebaskan dari penjajahan Portugis dan menjadi salah satu Provinsi NKRI, masuk dan berkembanglah agama Islam. Sebagai akibat banyak pasukan TNI Darat, Laut dan Udara serta Kepolisian yang beragama Islam, berdirilah Masjid yang menyebar di seluruh wilayah Timor Timur. Demikian pula di sektor pertanian, banyaknya transmigrasi petani, di kalangan petani berkembang agama Islam. Apalagi dengan semakin meningkatkan hubungan Timor Timur dengan wilayah Nusantara Indonesia lainnya, menjadi pasarnya wiraniagawan Islam.

Kebijakan Presiden Soeharto yang sangat dekat dengan pimpinan agama Islam dalam membendung ajaran komunisme, banyak mendirikan masjid. Dibangunnya Masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea, dan juga di Bosnia, sangat meresahkan jenderal penganut Katolik, Benny Moerdani. Walapun Presiden Soeharto juga membangun Patung Jesus di Dili yang memiliki kesamaan dengan di Brasilia.

Sukar untuk dipahami tindakan Presiden Soeharto tidak melakukan *reshuffle cabinet*, terhadap menterinya yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Pada satu pihak, membiarkan Benny Moerdani beraksi dengan aksi penindasannya terhadap umat Islam. Di lain pihak, Presiden Soeharto memberikan angin perkembangan Islam.



Sumber: www.temppu.co



## ELIDAWATI

Direksi

Produksi dan Pemasaran PT Shafira

Sumber: Doc. Shafira

### Bangkitnya Shafira

Kerudung jilbab Mbak Tutut, memungkinkan meluasnya pemakaian kerudung jilbab di masyarakat. Dengan kata lain, tidak terhalang lagi kerudung jilbab dikenakan oleh para siswi atau akhwat. Namun, menjadi busana Islami yang dikenakan oleh para Ibu sebagai peserta Pengajian Ibu-Ibu atau Majelis Ta'lim yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB, Masjid Al-Jihad Unpad, Masjid Al-Furqon IKIP, Masjid Al-Asy'ari Unisba, Masjid Libasut Taqwa ITT, Masjid Istiqomah, Masjid Al-Azhar, Masjid Baiturrahman Patrakomala, Masjid Mujahidin Muhammadiyah, Masjid Pajagalan Persis, Darut Tauhid di Bandung. Dari sini, berkembang ke Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



## ANNE RUFaidaH

Pelopor Pembangkit Gerakan Pembusanaan Islami Wanita.

Penentang Pengaruh Nympho Maniac Fashion - Mode Pembusanaan Indah dan Cantik

jika lebih berani keterbukaannya. *Nympho* – Telanjang, *Maniac* – Gila.



**FENNY MUSTAFA BERSAMA BINTANG KCB**  
**(Ketika Cinta Bertasbih)**

Sumber: Doc. Shafira

Dampak ramainya Pengajian Ibu-Ibu atau Majelis Ta'lim, menjadikan tuntutan busana Muslimah dan kerudung jilbab meningkat. Di Bandung, muncullah dari aktivis Karisma Masjid Salman ITB, Toko Sandang Busana Muslimah dengan nama Shafira. Dipelopori oleh perancang busana, investor, dan manager serta peragawati:

Anne Rufaidah      Fenny Mustafa      Elidawati

Gilarsi W. Setijono      Memed Mursjid

Seorang peragawati yang terjun dalam upaya meragakan busana Muslimah adalah Ratih Sanggarwati. Tentu, masih banyak lagi nama-nama perancang busana Muslimah dan peragawati yang bermunculan di kota-kota besar lainnya. Namun, bagaimana pun, Bandung sebagai kota barometer perubahan kehidupan Islam (1982 M) yang berkembang ke seantero Nusantara.

Suatu pertanyaan yang sangat menggoda penulis yang ikut aktif dalam Studi Islam Intensif dengan Sejarah Islam Indonesia, mengapa pada saat penekanan sebagian pimpinan militer ketiga pelaku tadi, justru yang berani memberi jawaban adalah Masjid Salman ITB, Masjid Al-Jihad Unpad, Masjid Al-Furqon IKIP, Masjid Libasut Taqwa ITT. Apakah hal ini karena aktivis dari masjid tadi, terdiri dari HMI, IMM, SEMMI. Demikian pula para da'i'nya dari Dewan Dakwah Islam Indonesia - DDII yang dipimpin oleh mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masyumi. Jawabannya masih diperlukan penelitian yang panjang.

Namun, saat itu yang memberikan format dakwah yang dapat diterima ajarannya oleh kalangan mahasiswa antara lain adalah:

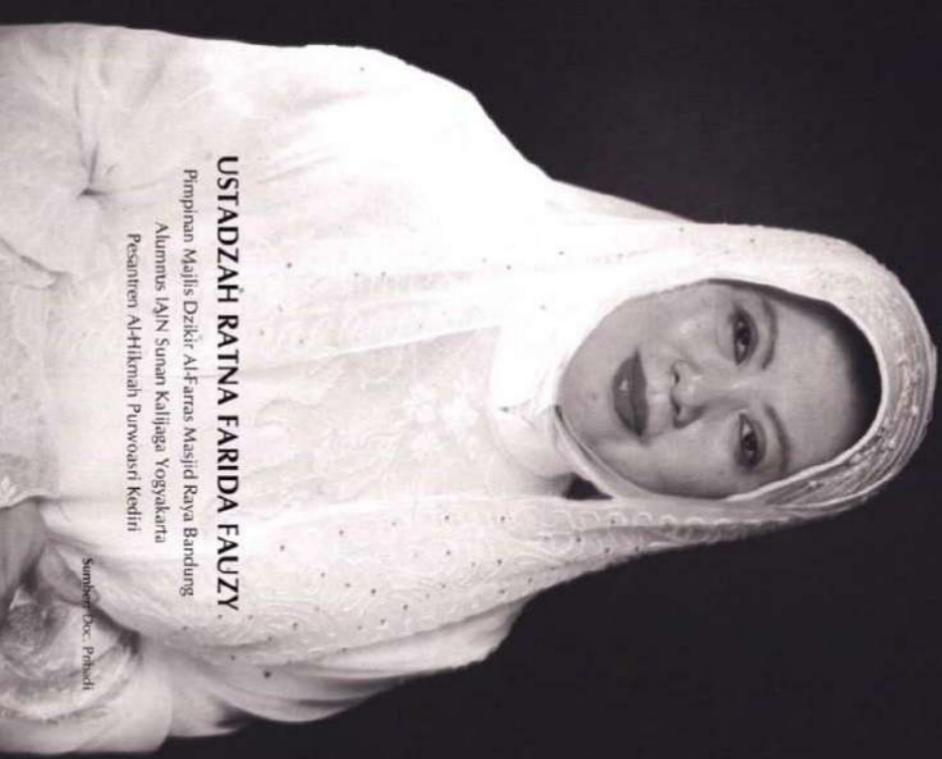
Prof. Dr. Buya Hamka, Yunan Helmi Nasution Jakarta

Prof. Muhsin S.H., Prof. Rasyid Nurdin Bandung

Ismail Ghifari, Prof. Kahar Muzakkir Jateng

Bey Arifin Surabaya

Ternyata, suatu tantangan yang diterima oleh umat Islam, pasti ada jawabannya. Semakin besar dan tindakan lawan semakin meluaslah ajaran Islam yang dicoba dibendung oleh para menteri sekalipun. Baik dari kalangan sipil atau pun militer.



## USTADZAH RATNA FARIDA FAUZY.

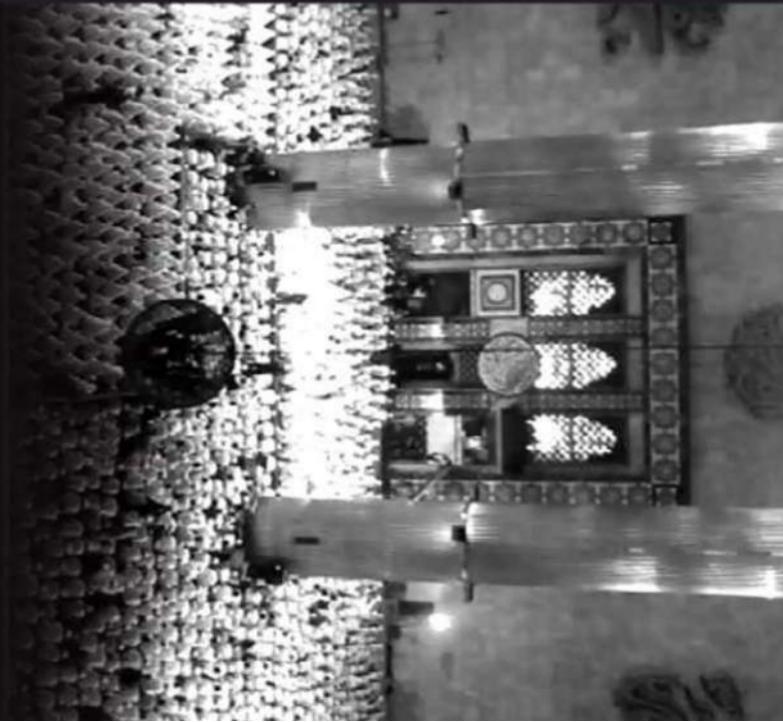
Pimpinan Majlis Dzikir Al-Farras Masjid Raya Bandung

Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pesantren Al-Hikmah Purwoari Kediri

Sumber: Doc. Pribadi

Peserta Majelis Dzikir Al-Farras  
Setiap hari Selasa di Masjid Raya Bandung  
hadir sekitar 5.000 jamaah



Sumber: www.akademihd.net

www.bacean-indo.blogspot.com

## Batik Busana Nasional

Di tengah hiruk pikuk kegiatan para lawan Islam yang mencoba memadamkan cahaya Islam, baik dalam bidang orpol atau budaya, muncullah jawaban yang tidak diperhitungkan sebelumnya, munculnya gerakan pembusanaan batik sebagai busana resmi atau busana nasional.

Diawali oleh Haji Samanhoedi sebagai pelopor terdepan dalam mempertahankan batik sebagai sandang pribumi, dengan melancarkan sistem pemasarannya. Dibentukllah Syarikat Dagang Islam - SDI pada 16 Oktober 1905 di Surakarta. Berikutnya, batik kurang mendapat perhatian kalangan atas, hanya terlihat di kalangan masyarakat bawah, dikenakan oleh kaum ibu atau pedangang pria di pasar.

Kemudian muncul gagasan dari Iwan Tirta dengan menjadikan Gubernur DKI Ali Sadikin dan Presiden Soeharto mengenakan busana batik, menjadikan batik diputuskan sebagai busana resmi dalam pertemuan formal pemerintahan atau swasta.

Sejarah mencatat perubahan busana suatu bangsa akan terabadikan masyarakat jika mendapatkan dukungan para elit politik. Mode atau *fashion* berkembang sebagian karena perencanaannya tidak menyentuh ajaran agama dan lebih bertumpu pada perubahan ornamental luar.

Busana Muslimah yang menjamur ke seluruh pelosok nusantara dan semaraknya aktivitas dakwah Islam, menjadikan Islam Indonesia diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Walaupun cenderung budaya Barat mulai diterima oleh mayoritas bangsa Indonesia. Namun, busana Islami baik pria ataupun wanita masih dominan memberikan bentuk ciri pribadi Islam dari penyandangnya. Perkembangan Islam yang semarak itu akibat kebijakan politik dari Presidennya.

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno diangkat menjadi *The Champion of Freedom and Islam* - Pendekar Kemerdekaan dan Islam oleh Konferensi Islam Afrika Asia di Bandung. Demikian pula perkembangan Islam walaupun ditekan keras oleh Benny Moerdani, bahkan menjadikan Soedomo, mantan Pangkopkamtip melakukan konversi agama masuk Islam. Sedangkan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto dan keluarganya lebih mendekatkan pada kekuatan Islam dalam menjawab bahaya komunisme.

Dengan memerhatikan situasi Indonesia yang semakin berkembang ajaran Islam, tentu menjadikan Amerika Serikat merasa perlu menciptakan keseimbangan politik dengan mendekati para pengusa Indonesia untuk melakukan intervensi meminimalisasikan kemajuan Islam Indonesia.

Walaupun Indonesia dapat memperlihatkan ke dunia luar, tanpa adanya Pakta Pertahanan Militer seperti Barat, berhasil menumbangkan PKI dan segenap upaya kudetanya. Demikian pula Indonesia berhasil mematahkan gerakan komunis Fretelin di Timor Timur dan membebaskan dari penjajahan Portugis, 1976 M. Sedangkan Amerika Serikat, meskipun memiliki pangkalan militer di Filipina, tetapi gerakan komunis Huk Balabab tidak berhasil dipatahkan.

Prestasi pemerintah Orde Baru ini, tidak dihargai oleh Amerika Serikat. Nasib Presiden Soeharto mirip dengan Saddam Hussein di Irak, setelah membantu Amerika Serikat menumbangkan Reza Pahlevi dengan proyek Nuclear Weaponnya, dan Imam Khomeini Iran dengan gerakan Syi'ah-nya yang mengancam Israel, diciptakan gerakan memakzulkan Saddam Husein. Demikian pula nasib Zia ul Haq Pakistan, setelah berhasil menumbangkan Ali Bhutto dengan Chasma Nuclear Weapon Project dengan bantuan dana dari Muamar Khadafi dari Libya, dirontokkan dengan diboykot pesawat terbang yang ditumpangi Zia ul Haq bersama Duta Amerika Serikat untuk Pakistan. Secara historis sukar ditemukan faktanya, namun dari tinjauan politik dapat diperkirakan kebenarannya.

Lalu, apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Soeharto setelah PKI hancur, disusul dengan keberhasilannya dalam penguasaan dirgantara dengan membangun IPTN di Bandung dan penguasaan maritim di Surabaya dengan membangun PT PAL, dan penguasaan komunikasi dengan Tiga Satelitnya, serta rencana Pusat Listrik Tenaga Nuklir - PLTN di Rembang, pabrik senjata PINDAD di Bandung, memakzulkan Presiden Soeharto dari singgasana kepresidenannya. Mengapa?

Sebenarnya, sejak masa Orde Lama, ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhouwer, 1953-1961 M, tidak menghendaki Indonesia kuat. Apalagi Indonesia setelah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, 1955 M, berdampak pakta pertahanan Amerika Serikat, *South East Asia Treaty Organization - Seato*, bubar. Filipina, Thailand, dan Pakistan, tidak mau menjadi pendukung Seato lagi. Program Amerika Serikat memecah belah Indonesia sejak masa Presiden Soekarno yang dituduh PKI, berlanjut hingga masa Presiden Soeharto yang berhasil melumpuhkan PKI.

# Presiden pada Peringatan Maulid Nabi di Istana Pancasila Bukan untuk Kurangi Peranan Agama

JAKARTA, Minggu

Usaha memastikan Pancasila sebagai ideologi nasional sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran agama dalam kehidupan bangsa, bahkan justru untuk lebih memberinya landasan yang kuat dan kukuh. Presiden Soeharto mengatakan dalam pidatonya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara Jumat malam.

Pancasila sebagai ideologi nasional mestilah benar-benar menjadi ajar kehidupan bangsa, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam hidup bernegara, tegas Presiden.

Menurut Presiden, dia perlu menggunakan masalah Pancasila sebagai alasan untuk menuntaskan perang. Namun ada yang anggap bahwa usaha untuk memastikan Pancasila sebagai ideologi nasional adalah usaha untuk menggesekan kodimik agama.

"Saya ingin menerangkan bahwa anggapan ini sama sekali tidak benar. Hai itu tidak pernah terungkap dalam pikiran kita," kata Presiden.

#### Tidak Berhasil

Menurut Presiden sungguh tidak berhasil apabila masih ada di sisi kita yang menganggap Pancasila sebagai alasan untuk berhadap-hadapan.

Perintisan seperti itu, katanya lagi, sama sekalinya dengan anggapan bahwa agama adalah sumber perang. Terhadap Presiden, dia ini hanya dijawab bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Kita harus memerlukan usaha-usaha pengalaman dan penghayatan Pancasila di samping lembut menyuarakan ketuhanan beragama.

Dalam peristiwa ini, kata Presiden, kita beragama, masing-masing umat beragama hendaknya menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Berbagai agama hidup dan berkembang dalam masyarakat kita, oleh karena itu Pancasila juga berfungsi sebagai landasan bersama bagi seluruh bangsa. Dalam usaha mewujudkan dan mengembangkan kerukunan hidup beragama dan dalam usaha membangun kehidupan bersama, kata Presiden.

Presiden Soeharto mengatakan bahwa pasti, legislatif berbagi kekuasaan sosial keagamaan dalam pembangunan masyarakat kita berdasarkan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan bangsa. Namun adalah suatu keterharuan bagi kita bersama untuk mengakui bahwa bagai bentuk kepuasan itu dalam hal politik dan ekonomi yang sama, yakni mewujudkan masyarakat makmur, yang memiliki religius yakni masyarakat adil dan makmur yang ber nilai-nilai keklaungan dan diperanggati oleh nilai-nilai Ketuhanan.

"Pada akhirnya kita memerlukan perlu lebih memastikan Pancasila sebagai ajar politik dan ajaran keryayarakat bangsa kita," kata Presiden.

**"Rahmatan Ilai-Alam"**  
Kepala Negara mengakas, dia sengaja mengemukakan

makaiah Pancasila dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebuah bagian penting, penting dalam jalinan kita dengan negara kita sangat besar dan mencantumkan. Untuk ini kita dapat belajar banyak dari junjungan dan pantau kita itu. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh bagaimana membangun masyarakat bersama di mana anggota masyarakatnya bukan hanya peneluk agama.

Beliau selalu memberi... seladan bagaimana menghormati hak-hak umat beragama lain untuk menjalankan agama mereka. Beliau mengajarkan kita untuk saling toleran-memperdulikan dan memperdulikan kebenaran agama manapun-masing. Beliau bukan besar merupakan rahmatan ilahi alleh," ucap Presiden.

Karena itu, ucapan Kepala Negara lagi, umat Islam Indonesia dapat harus berusaha membangun citra-citra sebagi pembawa kebaikan dan kebenaran. Hal ini dapat dilakukan setara hingga dengan meningkatkan rasa tanggungjawab yang sebesar-besarnya dalam berausaha-mengembangkan Masyarakat Pancasila.

#### Hampir lupa

Menyeri Agama, H. Munawir Syidadi dalam pidatonya mengatakan, umat Islam sekarang ini, khususnya yang tidak di-kota-kota besar, sudah hampir lupa atau tidak memerhatikan lagi kepada poin-poin agama Muhammad pada masa pertumbuhannya di Madinah.

Rahmat Tuhan yang berupa rizki yang berlebih justru sering membuat kita kapada pola hidup yang tidak sehat dan tidak wajar dan kita menjadi relapsan-sibuk untuk sekali-kali saja... namun (memerlukan) dan munajah.

Bahkan ketika kita berada di tempat-tempat yang kita khawat (miskiat) di terang sepjauh dari keramaian kota itu adalah budaya bukan Islam.

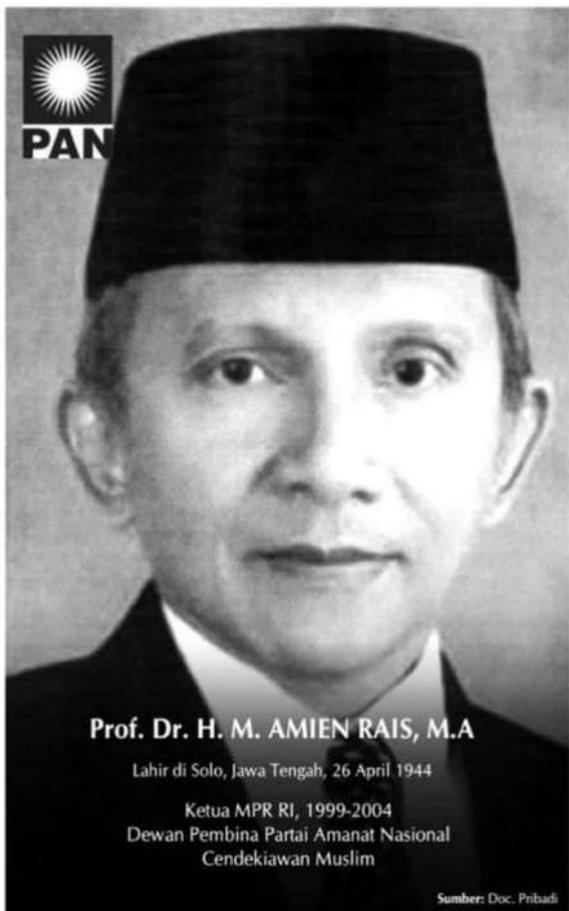
Dalam acara peringatan Maulid Nabi di Istana Negara itu, turut hadir Menteri Agama, Prof. Dr. H. Farid Baroroh dan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hadir dalam acara tersebut selain Presiden dan Nyonya Tien Soeharto juga para Menteri Kabinet Pembangunan IV, pimpinan Lemhannas Tinggi dan Lemhannas Tinggi Negara, serta Duta Besar dan beberapa salibah, khususnya negara-negara yang masih povera Kongres Olimpiade Moskow 1980 dan yang tetap berlangsung di Jakarta serta masyarakat ibukota. (TV/HJ)

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGERA

Merdeka Senin, 19 Desember 1983

Sumber: Merdeka, 19 Desember 1983



**Prof. Dr. H. M. AMIEN RAIS, M.A**

Lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 April 1944

Ketua MPR RI, 1999-2004  
Dewan Pembina Partai Amanat Nasional  
Cendekiawan Muslim

Sumber: Doc. Pribadi

Apalagi setelah berhasil melumpuhkan komunis di Timor Timur, 1976 M, Presiden Soeharto memperlihatkan sikapnya mendekatkan diri pada massa Islam dan remaja Islam - miris. Tidak hanya di Indonesia, Presiden Soeharto juga memperlihatkan simpati dengan perkembangan Islam di Bosnia, 1996 M. Tidak ada seorang pun Kepala Negara yang berusaha membangun Masjid di Bosnia, kecuali Presiden Soeharto. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kepentingan Barat, menghendaki hancurnya Islam di wilayah Balkan, dan di Chechnya Rusia, setelah adanya Perestroika di Rusia.

TRIO PEMBANGKIT GERAKAN DAKWAH



BEY ARIFIN



GHOFAR ISMAIL



RUSYAD NURDIN

Sumber: Mizan, Doc. Pribadi, Mailquinn

Apalagi Presiden Soeharto bersama keluarganya dan beberapa orang staf menterinya, menampakkan sikap kecenderungan Islaminya, masuk ke dalam Ka'bah dan memperlihatkan pula memotong rambut - *tahalul*, Wakil Presiden Tri Soetrisno di Jabal Marwah disiarkan melalui TV. Hal ini dinilai Barat, Presiden Soeharto terlalu tampak kedekatan Islamnya.

Tambahan lagi, ledakan jumlah calon haji, hingga diadakan *waiting list* - daftar tunggu, pertanda ekonomi umat Islam di garis bawah pun sangat maju. Berarti pemerataan pembangunan, dirasakan benar-benar oleh rakyat. Hal ini pertanda pengembangan ajaran Islam sebagai agama di masa Presiden Soeharto, maju pesat.

Namun sebaliknya, Islam sebagai "kekuatan partai politik", dibonzaikan. Dapat dibaca berkembangnya slogan, *ekonomi yes, parpol Islam no*. Dapat dirasakan adanya upaya deislamisasi politik, dan depolitisasi Islam, serta deparpolisasi Ulama.<sup>5</sup>

## Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia - DDII

Sebenarnya perkembangan Islam Indonesia menjadi sangat pesat, dampak dari aktivitas mantan pimpinan Masyumi alih profesi dari partai politik, menjadi lebih aktif dalam organisasi dakwah di berbagai sektor. Dr. Anwar Harjono S.H. menuturkan sekitar 1386 H /1967, tidak menyebutkan kapan tanggal berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia - DDII.

Adapun para pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia - DDII adalah:

Mohammad Natsir	Dr. H. M Rasjidi
H. M. Daud Dt. Panglimo Kajo	K.H. Taufiqurrahman
H. Hasan Basri	Prawoto Mangkusasmito
Nawawi Duski	Abdu Hamid
Abdul Malik Ahmad	Buchari Tamam

<sup>5</sup> Upaya menghambat kemajuan PPP agar tetap menenangkan Golkar, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Amir Mahmud mendesak K.H. Bisri agar PPP tidak menggunakan lambang Ka'bah dalam Pemilu. Dengan alasan bila gambar Ka'bah dicoblos dalam Pemilu, berarti tidak menghormati Ka'bah. Dijawab oleh K.H. Bisri, bagaimana bila pegawai Pos yang memukuli prangko bergambar Presiden Soeharto, apakah hal itu berarti tidak menghormati Presiden Soeharto? Ditegaskan bahwa lambang Ka'bah adalah hasil ijihad K.H. Bisri bersama Ulama lainnya.



Sumber: Doc Pribadi

## LAMBANG KA'BAH DDII DIAPIT SALIB

### Arsitektur Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

di tengah tampak depan terdapat Ka'bah yang diapit kanan kiri oleh Salib

Kanan Kiri depan,  $2 + 2 = 4$  buah

Kanan Kiri samping  $6 + 6 = 12$  buah

Kanan Kiri belakang  $1 + 1 = 2$  buah

Perlukah filosofi arsitektur Gedung DDII bersalah seperti filosofi bangunan modern Barat?

Program meningkatkan kualitas dakwah Islamiyah dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, membangkitkan kalangan cendekiawan Muslim berpartisiasi aktif mendakwahkan Islam. Kalangan medis, pakar ekonomi, budayawan, sejarawan, arsitek, pakar busana, dosen dari berbagai cabang ilmu, terpanggil untuk ikut serta mendakwahkan ajaran Islam sejalan dengan ilmunya, di wilayah kerjanya. Tidak lupa di kalangan militer dan polisi, serta di setiap departemen, mendirikan seksi dakwah,

membangkitkan semangat Islam dalam warganya. Demikian pula di masyarakat, timbul kesadaran kaum ibu membangun Majelis Taklim, di samping adanya Dharma Wanita di setiap instansi, aktif pula mengadakan dakwah rutin.

Di Bandung, meneruskan aktivitas DDII, atas inisiatif Kang Joseph didirikan Corp Muballigh Bandung - CMB, dengan media cetaknya *Majalah Tadkirah*. Adapun media cetak yang diterbitkan oleh DDII adalah *Majalah Media Dakwah*, *Suara Masjid*, *Serial Khutban Jumat*, untuk anak-anak Sahabat, dan setiap Jumat diterbitkan *Buletin Da'wah*. Di Masjid Salman ITB, menerbitkan *KAU Salman*, dan Masjid Al Jihad Unpad, menerbitkan *Majalah Al-Jihad*. Masjid Istiqamah dengan bulletin *Suara Istiqamah*. Tentu di seluruh masjid di Nusantara Indonesia, saling menerbitkan buletin.

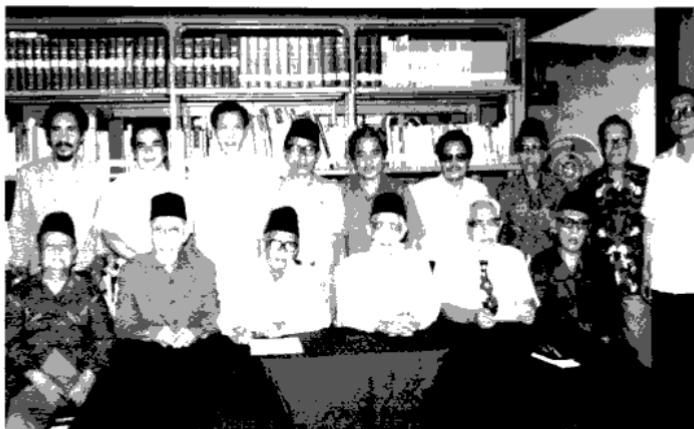
Tentu Indonesia dengan kebangkitan masyarakat Islam ini, tidak akan dibiarkan oleh Amerika Serikat. Maksudnya, Amerika Serikat tidak ingin Indonesia menjadi negara yang masyarakat Islamnya semakin maju dan kuat di Asia Tenggara.

Indonesia digoyahkan dengan bantuan George Soros hingga terjadi inflasi drastis, Rp.20.000,00 sama dengan US\$ 1. Indonesia dikondisikan agar bergantung pada IMF. PM Malaysia, Mahathir Muhammad, mengingatkan Presiden Soeharto, jangan mencari solusi melalui IMF bila ekonomi Indonesia tidak ingin sehancurnya.

Benarkah di Indonesia masyarakat Islam semakin kuat? Kalau benar umat Islam kuat, mengapa Dr. Anwar Harjono SH, mencari keadilan dan persatuan? Kebanyakan umat Islam, merasakan betapa beratnya represi yang diberlakukan oleh Kopkamtip dan Bakin. Umat Islam sudah lama merindukan adanya kebebasan dan pembaharuan.

Apolagi adanya tandingan DDII didirikan LDII di bawah pimpinan Hasan Lubis - Hasan Luar Biasa, dari Kediri yang ajarannya mengkafirkkan umat Islam yang tidak bergabung dalam Darul Hodis, Islam Murni, Lemkari, nama terakhirnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia - LDII. Dengan bernaung pada Golkar, LDII dapat meneruskan keberadaannya hingga sekarang.

Di samping itu, dihidupkan pula Aliran Kebatinan sebagai balance of religion. Dengan nama baru Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran Kepercayaan menurut Presiden Soeharto, memang bukan agama. Sebaiknya para pengikutnya, menjadi pengikut salah satu agama yang diakui: Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan Protestan.



Sumber: Majalah Mufama'

**MOHAMMAD NATSIR  
BERSAMA PIMPINAN DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA**

Tidaklah heran, di bawah kondisi ketertekunan, setelah 32 tahun lamanya masa pembangunan Indonesia, memudahkan gerakan Perestroika - Reformasi Rusia, 1987 oleh Amerika Serikat ditularkan ke Indonesia 1997 M. Apa dan bagaimana Perestroika atau Reformasi di Rusia? Di bawah ini, penulis sedikit mengutip problem yang nantinya mengundang timbulnya gerakan Perestroika di Rusia.

### **Teori Konflik dan Dekomunisasi**

Ternyata, tidak hanya terjadi di Indonesia, ideologi komunisme menemui kebangkrutan setelah melancarkan gerakan terorisme dalam aksi Kudeta 30 September. Namun juga, di Rusia sendiri, komunisme mengalami nasib yang sama. Baik di bidang politik atau dalam bidang sosio ekonominya. Teori Konflik diterapkan pula antar pimpinan komunis sendiri. Trotski ditumbangkan oleh Lenin. Dilanjutkan oleh Stalin yang ditumbangkan oleh Krushchev. Kemudian, terjadi konflik antarnegara komunis Rusia, Vietnam kontra RRC, Korut. Tidaklah heran bila pasca Mao Ze Dong, pengaruh Perestroika di Rusia menjadikan RRC terjadi proses dekomunisasi walaupun baru di bidang ekonomi dan pertanian. Ada apa dengan ajaran komunisme?

Seperti yang diungkap oleh Vaclav Havel dari Cekosloakia, sistem komunis terkait erat dengan terorisme yang dijalankan secara sistemik dan dibarengi dengan kekejaman. Sistem ini dijalankan dengan tersembunyi. Tidak tampak dari luar

segenap kekejaman yang sedang berlangsung. Tidak mungkin turis mengetahuinya. Apalagi tamu negara. Setiap aktivitas warga, terjerat sistem birokrasi sangat ketat. Dampaknya, mematikan semangat kemanusiaan, hancurlah martabat asasi manusia. Hidup menjadi hina secara permanen.

Di Uni Soviet dengan sistemik upaya mencabut akar ajaran agama. Tempat peribadahan Gereja dan Masjid direndahkan. Setiap orang diyakinkan untuk mencapai tujuan dan sukses, menurut Marxisme hanya dengan cara kekerasan, kekejaman, kecurangan, dan konflik.

Teori konflik ini tidak dapat diterapkan dalam hubungan niaga dan politik luar negeri. Apakah mungkin di zaman keterbukaan, untuk dagang sukses harus dengan kekerasan? Demikian pula dalam hubungan diplomatik tidak mungkin keberhasilannya diperoleh dengan jalan konflik.

Dampak tidak adanya penganti ajaran kasih sayang dari ajaran agama, menjadikan manusia komunis sebagai manusia brutal. Demikian penuturan Daniel Granin dalam Literatur naia Gazeta, 1988 M.

Ditambahkan, rakyat dipaksa harus memuji vonis yang kejam yang dilaksanakan di depan umum. Menolong tetangga, keluarga yang teraniaya, dilarang. Komunisme Soviet Rusia melahirkan tanah tandus spiritual dan kultural.

Di bawah kondisi ini, Gorbachev mengisyaratkan kegagalan sistem atheisme dan mengajak perlunya memberikan penghormatan kepada ajaran agama yang sejati. Diingatkan pula bahwa sistem politik hasil Revolusi Oktober 1917, telah mengalami deformasi yang serius.

Setiap sukses kepemimpinan dalam ajaran komunisme, tidak dapat menghindarkan dari diberlakukannya sistem konflik. Terjadilah pertarungan kejam yang mendatangkan korban bagi pimpinan yang terkalahkan bersama pendukungnya. Konflik untuk memperoleh kekuasaan sebagai karakter politik yang mendatangkan maut dalam sistem komunis karena menjadikan ideologi sebagai hukum rimba.

Gorbachev menghadapi kenyataan ini, menginginkan adanya *perestroika* - reformasi komprehensif dari atas. Dilihatnya praktik kepemimpinan Partai Komunis setelah memegang kekuasaan bertindak korup dan menindas. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, selain perlu *perestroika* yang mencakup restrukturisasi, juga sangat diperlukan *glasnost*. Maksudnya tidak hanya dikembangkannya liberalisasi, melainkan juga *demokratisasi*.<sup>6</sup>

6 Zbigniew Brzezinski, 1990. *Kegagalan Besar, Muncul dan Runtuhnya Komunisme Dalam Akad Kedua Puluh*. Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm. 52.

Realitas perubahan sejarah adanya reformasi ajaran komunis oleh Gorbachev, di pusat kelahiran negara komunis yang pertama di dunia, yakni Rusia, ternyata ajaran komunis hanya bertahan selama 70 tahun, Revolusi Oktober 1917-1987. Ajaran komunis tidak lagi menjadi satu-satunya ideologi yang mampu menyeberangkan kaum Proletar bebas dari penindasan. Marxisme dengan cita-citanya membuat classless society - masyarakat tanpa kelas, sama rata sama rasa, tidak sesuai dengan realitas kemasyarakatan yang selalu adanya stratifikasi sosialnya.

Perlu diperhatikan, Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Cina tentang Reformasi Struktur Ekonomi, 20 Oktober 1984, intinya adalah deideologi sistem ekonomi Cina. Demikian pula di bidang pertanian terjadi deideologi pertanian. Dengan kata lain, sedang terjadi dekomunisasi sistem pertaniannya. Ditiadakannya sistem pertanian kolektif menurut ajaran komunis.

Keputusan Comite Central Partai Komunis Cina tadi, mengingatkan adanya upaya penghapusan komunisme atau dekomunisasi dilakukan oleh RRC, walaupun baru di bidang niaga dan pertanian. Adanya upaya deideologi sistem ekonomi Cina. Tidakkah hal ini berarti bahwa ideologi komunis tidak dikehendaki lagi di Rusia dan di Cina? Sepintas terlihat terlambat bila dibandingkan dengan Indonesia telah terjadi pada 1966 M. Sedangkan upaya dekomunisasi di Rusia dan Cina, baru terjadi pada 1987-1988.

Mengapa Perestroika atau Reformasi ditularkan ke Indonesia? Padahal, pemerintahan Orde Baru berhasil mematahkan dominasi PKI di Indonesia, 1966 M. Dan berhasil pula meruntuhkan komunis Fretilin di Timor Timur, 1976 M. Walaupun Indonesia tidak menjadi anggota Pakta Pertahanan Militer Barat, namun eksistensi organisasi komunis dapat dipatahkan dengan memanfaatkan potensi mayoritas umat Islam dan membesarkan gerakan dakwah Islam.

Untuk menumbangkan pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang mulai dekat dengan masyarakat Islam dan remaja Islam - miris, tidaklah mungkin bila diserang dari luar. Teori W.F. Wertheim berulang kembali, realitas Islam Indonesia hanya dapat dipatahkan dengan menggunakan kekuatan Islam lagi. Pemerintahan Orde Baru dapat dilengserkan hanya dengan menggunakan Student Power yang mayoritasnya mahasiswa Islam. Sebelumnya dibentuk pola wawasannya melalui berbagai media informasi.

Dilengkapi dengan ditampilkan Prof. Dr. Amien Rais di TV bukan sebagai Dosen UGM, melainkan lebih banyak ditampakkan sebagai Ketua Pusat Persyarikatan Muhammadiyah maka bangkitlah demo mahasiswa yang sangat berani, menduduki MPR. Kemudian, lengserlah Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharam 1419. Hal ini sebagai

bukti sejarah bahwa perubahan tatanan politik di Indonesia, tidak mungkin terjadi bila tanpa peran serta Ulama atau pimpinan organisasi Islam.

Selain itu, Anthony Smith dalam *Geopolitics of Information*, menjelaskan pula bahwa Barat dengan melalui informasi teknologinya, internet, tv, dan media lainnya, diciptakanlah *news imperialism* - berita penjajah. Beritanya selalu melancarkan *scapegoating* - pengkambing hitaman bangsa dan negara-negara Asia Afrika dengan berita negatif: korupsi, bencana, penyakit dan evaluasi negatif yang menjelekkan pemimpin-pemimpinnya. Dengan pemberitaan ini, akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kalangan intelektual dan rakyat terhadap pemimpinnya.

Indonesia diberitakan oleh media Barat, sebagai negara yang terpuruk ekonominya, pemimpinnya korup dan sedang berkembang berbagai penyakit menular serta sarang teroris. Untuk yang terakhir ini, Barat sangat yakin karena sejak Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA akan menyerang Bandung, menjelang Bandung Lautan Api, menilai bahwa TNI dan Lasjkar Hizboellah, Sabillillah pejuang kemerdekaan dicap sebagai teroris.

Apalagi setelah Indonesia memperlihatkan kemajuan Islam, dari jumlah Haji dan Umrah yang terbesar di seluruh dunia, hal ini merupakan ancaman baru bagi Barat setelah komunis tumbang. Tambahan lagi dengan adanya berita ekonomi dikuasai oleh konglomerat Cina. Dua realitas fakta sejarah ini: Pertama, membesarnya masyarakat Islam. Kedua, kuatnya konglomerat Cina menguasai ekonomi Indonesia maka keduanya mendekati pemberian teori benturan peradaban, sesudah komunis rontok, musuh Barat adalah Islam dan Kong Fu Tsu atau Cina.<sup>7</sup>

Pada awalnya, Barat hanya melihat adanya perkembangan tiga kekuatan di Asia Tenggara: Indianisasi, Kristenisasi, dan Sinonisasi. Sedangkan Islam tidak diperhitungkan akan memengaruhi perubahan sosial politik di Asia Tenggara. Namun, realitasnya setelah komunis tumbang, di Malaysia dan Indonesia, semakin menampakkan meluasnya pengaruh Islam. Demikian pula, Cina makin meluas penguasaan pasar dan ekonominya. Walaupun sebelumnya, PP 10/1959 Non-Pribumi terutama WNA Cina dilarang berusaha dan tinggal di desa-desa, hanya diizinkan di ibukota provinsi atau DKI Jakarta.

<sup>7</sup> Siswono Yudo Husodo, 1985. *Warga Baru, Kasus Cina Di Indonesia*. Lembaga Penerbitan Padamu Negeri. Jakarta, hlm. 57 menjelaskan Kong Fu Tsu atau Khong Fu Cu, a.l. mengajarkan tentang asas *Famili-isme* seluruh dunia. Berbakti kepada keluarga merupakan cermin kesetiaan kepada negara Cina. Sedang Cina diyakini sebagai Negara Pusat, pusat peradaban. Di luar negara Cina, diyakini lebih rendah peradabannya. Kecuali mengenai Kong Fu Tsu. Di Cina, terdapat tiga ajaran: Tao mengajarkan manusia sebagai individu hubungannya dengan alam raya. Kong Fu Tsu mengajarkan tentang status individu, masyarakat, dan negara. Buddha mengajarkan manusia dengan masa depan Nirwana atau *Kik Lok Kok*.

Dengan adanya pengaruh Islam dan Cina yang semakin meluas, setelah komunis runtuh, dan adanya rencana Presiden Eisenhower, 1953-1961 M, yang akan memecah belah NKRI sebagai negara federasi, apakah rencana tersebut masih tetap akan dilanjutkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu penulis ingin sedikit membicarakan pengaruh news imperialism terhadap pecahnya pergolakan di negara-negara Asia Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Dampak dari news imperialism yang dilancarkan melalui TV dan media cetak, serta mengalirnya ideologi politik Barat, menurut Anthony Smith dalam *Geopolitic of Information*, dan Ted Robert Gurr dalam *Why Men Rebel*, pecahlah perang saudara, protes sosial, pemberontakan, demonstrasi rakyat selalu menggoncang beberapa pemerintahan negara-negara Timur Tengah dan Asia Afrika.

Kemudian, di tengah kekeruhan suasana politik, Timur Tengah dijadikan ladang yang subur pasar penjualan senjata hasil Industri Militer Amerika Serikat. Sekaligus Amerika Serikat melancarkan intervensi militernya. Dengan cara itu, Amerika Serikat menggeser pengaruh mantan negara-negara penjajah dari Eropa: Inggris, Perancis, Italia, atas wilayah bekas jajahannya yang digoncangnya.

Timur Tengah selain dijadikan tempat melaksanakan uji coba temuan baru senjatanya, juga dijadikan arena latihan tentara-tentara negara-negara Barat. Pemindahan arena latihan ini, akibat negara-negara Barat aman. Tentaranya yang sudah terlatih, tidak mempunyai lawan dan lahan di dalam negerinya. Untuk mengaplikasikan hasil latihannya, diciptakanlah perang saudara di wilayah Bulan Bintang.

Diharapkan perang akan berdampak lanjut terjadinya devide and rule. Dengan target, berkembangnya gerakan anti Arab dan timbulnya keinginan memisahkan diri Iran, Irak, Afghanistan, dan Pakistan serta wilayah Islam di Afrika Utara dari Saudi Arabia sebagai pusat Islam. Tentunya, Islam Asia Tenggara dan Indonesia diharapkan ingin pula pisah dari Saudi Arabia.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru sistem kebijakan komunikasi, hanya satu arah dan dikuasai oleh pemerintah. Akibatnya, tidak dapat melawan pemberitaan negatif tentang Indonesia dari news imperialism. Dampaknya, pemerintah Orde Baru tidak mampu bertahan menghadapi perubahan sikap politik kalangan intelektual dan rakyat yang dibentuk oleh arus berita penjajah - news imperialism dari Barat.

Apalagi setelah adanya penolakan pembelian pesawat F-16 Amerika Serikat, akibat pemerintah Orde Baru lebih cenderung merencanakan pembelian pesawat buatan Rusia. Walaupun saat itu, B.J. Habibie sebagai pakar pesawat terbang, melalui TVRI menjelaskan tentang kelemahan dan kekurangan pesawat Rusia, Sukhoi. Namun,

penjelasannya tidak dapat membatalkan pembelian pesawat produk Rusia. Dampak pembatalan pembelian pesawat F-16 mempercepat proses keruntuhan pemerintahan Orde Baru melalui gerakan Reformasi. Mengapa melalui Reformasi?

Keberhasilan gerakan Reformasi - *Perestroika* dan Demokrasi - *Demokratizatsiia* serta Liberalisasi - *Glasnout*, oleh Gorbachev di Rusia, ditularkan ke Indonesia. Padahal, kepada Presiden James Carter, 1977-1981 M, melihat Indonesia berhasil melumpuhkan komunis Fretelin di Timor Timur, 1976 M. Apakah terjadi kekeliruan pembangunan agama di Timor Timur, menjadikan Katolik semakin kuat. Ditandai dengan pembangunan Patung Jesus di Dili yang besarnya sama dengan di Brazilia. Apakah karena Australia dan Amerika Serikat mayoritas rakyatnya Protestan dan dikenal sikapnya *No Catholic*.<sup>8</sup> Sulit ditemukan faktanya, Indonesia hanya dituduh dengan masalah HAM. Walaupun korbannya hanya sepersekian dari bom atom AS di Hiroshima, 140.000 orang, dan Nagasaki, 80.000 orang pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Gerakan Reformasi berhasil menjadikan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharram 1419. Hanya bedanya dengan Rusia, Reformasi di Indonesia tidak berhasil mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Federasi seperti di Rusia. Walaupun saat itu, suara dari Yogyakarta terdengar keras menginginkan Federasi seperti yang pernah terjadi pada 1950 M, menjelang terbentuknya NKRI. Sejarah berulang kembali.

Para Ulama dan Santri serta politisi Islam, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pembukaan dan UUD 1945. Hanya membenarkan realisasi pemekaran provinsi dan kabupaten serta otonomi daerah. Amandemen UUD 1945, yang dilakukan oleh MPR, tidak sampai menyentuh Pembukaan UUD 1945. Apabila terjadi amandemen masalah Pembukaan UUD 1945, besar kemungkinan akan terjadi keguncangan politik yang lebih parah.

Reformasi itu berkelanjutan dengan aman dan damai karena ada dukungan dari 3 ulama, yaitu Abdullah Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon, Abdullah Salam dari Pesantren Kajen Jepara, dan Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan, Tuban.

Situasi Reformasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis di wilayah pinggiranland Nusantara Indonesia: Gerakan Aceh Merdeka - GAM, Republik Maluku Selatan - RMS, Poso, Organisasi Papua Merdeka - OPM, muncul kembali. Menghadapi kenyataan ini, Ulama dan Santri serta para politisi Islam, tidak pernah ada yang menjadi pendukungnya.

---

<sup>8</sup> OS Guinness, 1995. *The American Hour*. The Free Press. New York, hlm. 111 menuturkan Amerika Serikat sebagai negara *superliberal, superseculer*, dikomandokan oleh Jimmy Carter, 1977-1981, untuk masa pemerintahannya sebagai *The Year of Evangelical* - Tahun Kristenisasi.

## Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie

Di bawah Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muhamarram 1419, hingga 20 Oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420, Indonesia harus melepaskan Timor Timur. Pada sisi lain, Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie, dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya, menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu'amalah pada masa Presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie, tidak dapat diragukan pula kedekatannya dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia - ICMI yang pertama di Malang.

Keberhasilannya menciptakan pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta - NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta - Jeddah ditempuh selama delapan jam.

Tambahan lagi, di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak 1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk Barat, hanya mampu 750 meter jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari Barat.

Pribadi Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie dengan kemampuan teknologinya yang tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorang pun dari Presiden Amerika Serikat walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 M dan terjadi pergantian 86 Presiden. Demikian pula negara Barat lainnya, tidak mempunyai seorang pun Kepala Negara yang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru. Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.

Barangkali kenyataan Indonesia ini, ditambah dengan karakter pribadi Prof. Dr. B.J. Habibie yang selalu dekat dengan Ulama, menjadikan masa pemerintahan Prof. Dr. B.J. Habibie sangat pendek karena Barat setelah berhasil menumbangkan Uni Soviet Rusia, sedang beralih menggoncangkan negara Islam dan negara yang memiliki mayoritas umat Islamnya serta Kepala Negara dan Perdana Menteri Islam: Chechnyna, Bosnia, Pakistan, dan negara-negara lain yang umat Islamnya sebagai mayoritas populasinya.



## **PROF. DR. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Presiden Ke-3 Negara Kesatuan Republik Indonesia

21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharram 1419

20 Oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420

Walaupun masa jabatan kepresidenannya sangat pendek bila dibanding dengan Presiden Dr. Ir. H. Soekarno, 25 Tahun, Jenderal TNI H. A. Soeharto, 32 Tahun. Namun, Prof. Dr. B.J. Habibie, adalah satu-satu presiden di dunia yang memiliki kemampuan menciptakan pesawat terbang.

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, dan penguasa ruang angkasa jagat raya. Namun, tidak ada seorang pun, Presiden Amerika Serikat yang memiliki kemampuan sebagai perancang dan pencipta pesawat terbang.

## K.H. Abdurrahman Wahid

Apalagi di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, 23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420, hingga 22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadil Awaal 1422, terjadi guncangan situasi nasional di berbagai bidang, tak dapat dielakkan. Dampaknya, masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sangat pendek.

Perlu dicatat di sini, sebenarnya, kesediaan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden karena desakan Prof. Dr. Amin Rais, Ketua MPR dan Partai Amanat Nasional yang menyatakan, perlu adanya pergantian Presiden jangan hanya dari Persyarikatan Muhammadiyah saja. Sekarang waktunya, Presiden dari Nahdlatul Ulama.

Pada saat menjelang pemilihan oleh MPR, calon Presiden Prof. Dr. Yusril Mahendra dari Partai Bulan Bintang mengundurkan diri. Dengan tujuan agar suara Islam hanya untuk K.H. Abdurrahman Wahid. Latar belakang proses pengangkatan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 itu menjadikan alumnus Pesantren untuk pertama kalinya, terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI.

Dalam memanfaatkan masa kepresidenannya, K.H. Abdurrahman Wahid, banyak melakukan kunjungan di berbagai negara. Presiden Abdurrahman Wahid membangun hubungan diplomatik dan menumbuhkan kesan Indonesia tetap eksis pasca Reformasi. Berita-berita dari Barat merupakan *news imperialism* - penjajahan berita, bernuansa menegatifkan Indonesia. Digambarkan sebagai negara dan bangsa dengan mayoritas komunitas Islamnya sedang terpuruk. Untuk melawannya, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan rombongan muhibahnya memperlihatkan Indonesia tidak sebagaimana yang diberitakan oleh sumber berita Barat yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses Pembauran Bangsa atau hubungan etnis Cina - Non-Pribumi dengan etnis Indonesia - Pribumi lainnya, akan semakin akrab.

Secara tidak langsung dengan cara itu, Islam Indonesia mempunyai teman Kong Fu Tsu, dalam menghadapi ancaman teori benturan peradaban dari Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* yang memprediksi sesudah Komunisme runtuh, kebangkitan Islam dan agama-agama lainnya dari Timur termasuk Kong Fu Tsu sebagai lawan peradaban Barat.

Tidaklah benar bila ada anggapan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan digelari Bapak Pluralisme. Gus Dur dalam keimanan Islamnya tidak membentuk ajaran agama-agama non-Islam serta aliran kepercayaan atau kebatinan. Gus Dur menampakkan



## Dr. K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Presiden Ke-4 Negara Kesatuan Republik Indonesia

23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420  
22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadil Awwal 1422

Pada awal pertama berdirinya Nahdlatul Oelama, 1926 M, di Surabaya, Ketua Umum Tanfidijah disebut Presiden

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid

Pelopor pertama Presiden NKRI dari Nahdliyin dan Partai Kebangkitan Bangsa - PKB, Menghidupkan kembali istilah Tionghoa pengganti Cina yang universal dan menghidupkan kembali ajaran Kong Fu Tsu dalam menghadapi teori benturan budaya dari Amerika Serikat, bahwa sesudah komunis lemah, musuh Barat adalah Islam dan Kong Fu Tsu.

Walaupun sangat pendek waktu kepresidenannya, namun dimanfaatkan untuk menunjukkan ke dunia luar bahwa sesudah reformasi, NKRI masih tetap eksis, dengan mengadakan muhibah lawatan ke negara-negara ASEAN, Eropa, dan Amerika Serikat.

sikap toleransi yang sangat tinggi. Sepengetahuan penulis, saat ceramahnya di Yayasan Al-Ma'soem, Gus Dur menunjukkan sikap Islamnya yang sangat kuat dan istiqamah sebagaimana yang diajarkan oleh orangtuanya, K.H. Wahid Hasjim dan kakaknya Khudrotus Syeikh Rois Akbar, Hasjim Asj'ari.

Gus Dur kepada penulis secara pribadi menjelaskan amalan wirid dan doanya yang diajarkan oleh Mbah Hasjim Asj'ari. Gus Dur juga mengingatkan kepada penulis, adanya sebagian wartawan yang suka memelintir atau mendistorsikan apa yang diucapkan atau apa yang dipikirkannya.

Gus Dur tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian pemberian seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Gus Dur memberikan rasa hormatnya pada setiap ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh pengikutnya. Terlihat ketika Gus Dur menuturkan kepada penulis dalam waktu yang cukup lama, ketika di pembarangan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bicara tentang pesan-pesan nenek moyangnya dari Soeltan Adiwidjaja agar Gus Dur dalam memanfaatkan waktunya untuk lebih memerhatikan pembinaan pesantren daripada aktivitas politiknya.

### *Baru Kali Ini, Presiden Ulama*

BAGI KH Daudung Abdul Halim, MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, terpilihnya KH Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur sebagai Presiden RI keempat, merupakan anugerah dan pertolongan Allah SWT pada saat bangsa tengah dilanda krisis yang berkepanjangan.

"Kondisi fisiknya memang kurang memadai, namun bukan menjadi hambatan bagi Gus Dur untuk mengatasi gejolak yang sekarang masih melanda bangsa," kata Kiai Daudung yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung.

Menurut dia, keluasan serta ketajaman wawasan dan pemikirannya justru bisa menjadi pembuka jalan demi membentuk kondisi compang-camping negeri ini. "Baru kali ini, seorang presiden dibuat seorang ulama. Kita harapkan sosok keulamaan Gus Dur bisa menjadi jalan bagi kemaslahatan bangsa di masa mendatang," ucapnya.

Seorang ulama, kata Daudung, tentu akan bertindak sesuai ketentuan yang telah digariskan. "Saya sungguh mengucapkan syukur dengan terpujiinya beliau. Kita ingat kejayaan Islam selama pemerintahan *Khalifahrussiddin* juga karena yang memerintah lebih menonjolkan sisi keulamaan dibandingkan keumaraannya," tegas Kiai Daudung.

Menyungguh persoalan kesehatan Gus Dur yang banyak disebut bakal menjadi kendala signifikan bagi presiden yang juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PBN, ia yakin proses kesembuhannya akan segera datang. "Saya yakni kesehatan mata Gus Dur akan sembuh setelah menjalani operasi pertama di Amerika," jelasnya.

Bagi para kiai, tindakan kontroversial Gus Dur memang bisa diterima, namun bagi sementara pihak seringkali seringkali membingungkan. "Jadi jika Gus Dur terkesan *plin-plan* atau *mencela-mencle* seyogianya dilibat sebagai upaya dan strateginya untuk menjadi perekat semua komponen bangsa," jelasnya.

Terbukti, ia bisa diterima semua kelompok yang ada dalam bangsa ini. "Kita memang harus menyadari kondisi plural serta serba kema-jemukan yang ada di negara kita. Mulai sekarang, kita harus menata kembali persatuan dan kesatuan yang dulu seringkali hanya sebatas ucapan di mulut. (Erwin K./"PR")\*\*\*





Sumber: Time Magazine



Sumber: Pekiran Rakyat

### Antara Imam Khomeini dan Gus Dur

Perhatikanlah bagaimana kaum Syi'ah di Iran memperlakukan jenazah pemimpinnya dengan kaum Muslim Indonesia, khususnya warga Nahdliyin saat memperlakukan jenazah pemimpinnya.

Demikian pula penuturan Gus Dur kepada penulis ketika sama-sama dalam satu mobil, 19 Safar 1423, Kamis Pon, 2 Mei 2002, saat menjelang ziarah makam Pangeran Papak di Wanaraja Garut. Antara lain bicara tentang wirid yang diterima dari Khudrotus Syeikh Rois Akbar, K.H. Hasjim Asj'ari dan sudah diamalkan selama 40 tahun. Terutama sekali, Gus Dur menegaskan sikap toleransinya terhadap segenap agama non-Islam atau aliran kepercayaan.

Sikap Gus Dur menghormati keyakinan yang berbeda tidaklah berarti Gus Dur adalah pengikut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Sebagai Guru Bangsa, Gus Dur berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 butir dua. Sayangnya, gelar Bapak Pluralisme dikumandangkan pada saat Gus Dur dan Presiden Ke-4 RI pulang ke Rahmatullah.

Pada saat sebagai Presiden ke-4 RI, di bidang pendidikan melahirkan keputusan persamaan status dan penghargaannya terhadap segenap upaya pendidikan dan abiturien atau alumnya yang diselenggarakan oleh departemen manapun: Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, Departemen Kelautan, kecuali pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Misalnya, alumnus IAIN dapat diterima di departemen mana pun yang memerlukannya. Siswa Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta dizinkan mengikuti ujian ke fakultas atau departemen mana pun yang diplihnya sesuai dengan latar belakang pendidikkannya.

IAIN diubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurusan yang sama dengan fakultas dan jurusan yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dari Diknas. Dengan demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke departemen manapun, dan dapat meneruskan studi ke jenjang berikutnya dari Lembaga Pendidikan manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan - IKIP berubah menjadi Universitas Negeri dibedakan dengan nama kotanya. Kecuali Bandung IKIP berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia - UPI.

Selain itu, Kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial diitiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan, tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya, Wachid Hasjim.

## Presiden Megawati Soekarnopoetri

Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, Sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden, 23 Juli 1901 Rabu Kliwon, 19 Safar 1365 hingga 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425.

Presiden Megawati Soekarnopoetri, menerima tamu utusan Presiden Amerika Serikat, Menteri Negara Urusan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Tom Ridge, 10 Maret 2004, menyampaikan pesan kepada Presiden Megawati Soekarnopoetri,<sup>9</sup> agar Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan dipenjarakan dengan diadili ulang.

Pesantren Ngruki Surakarta sebenarnya kampusnya relatif kecil, tidak sehebat kantor CIA, dan organisasi tata kerjanya pun tidak secanggih CIA Amerika Serikat. Sementara K.H. Abu Bakar Ba'asyir sudah berusia lanjut, tetapi sangat diperhitungkan dan ditakuti keberadaannya oleh Amerika Serikat sebagai negara *superpower*.

Padahal K.H. Abu Bakar Ba'asyir meninggalkan Indonesia ke Malaysia karena tidak menyetujui asas tunggal Pancasila. Dibaca oleh K.H. Abu Bakar Ba'asyir, pembicaraan dan pelaksanaan Pancasila sebagai pelajaran PMP di sekolah, seminar, lokakarya, penataran, bertujuan mendiskreditkan Islam secara terselubung.

Menurut Z.A. Maulani, 2004, dalam *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*, menjelaskan bahwa Jama'ah Islamiyyah sebenarnya semula direstui oleh CIA. Namun, mengapa sejak 11 September, Jama'ah Islamiyyah oleh Presiden Bush, dinilai sebagai organisasi berbahaya? Kemudian, dikomandokan perang membasmikan terorisme dengan tujuan agar Amerika Serikat benar-benar menjadi super power tunggal.

Oleh karena itu, digoncangnya Timur Tengah agar terkuasai karena Timur Tengah disebutnya sebagai *the largest fuel station in the world* - stasiun bahan bakar terbesar di dunia.

Di Asia Tenggara, Amerika Serikat ingin menanamkan kekuasaannya. Bertujuan menghentikan perkembangan Islam dan Kong Fu Tsu atau RRC.

---

9 Z.A. Maulani, 2004. *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*. Daseta. Jakarta, hlm.52.



## MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Lahir Yogyakarta, 23 Januari 1947

Perjalanan karier:

Ketua Umum PDI versi

Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan  
pada 1999-sekarang

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8, (Oktober 1999-23 Juli 2001)

Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Sebaiknya Amerika Serikat belajar dari pengalaman sejarahnya, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris dan Kerajaan Protestan Belanda, mengapa keduanya mengakhiri penjajahan di Asia Tenggara. Demikian pula mengapa Testamen Politik Lenin yang akan mengkomunisasi Asia Tenggara, semuanya menemui kegagalan karena berhadapan dengan Islam. Pengalaman Amerika Serikat sendiri di Filipina tidak berhasil menguasai Filipina Selatan yang dikuasai Islam. Hal ini mengingatkan Pondok Pesantren di Asia Tenggara bila ditinjau fisiknya sangat sederhana. Namun, memiliki daya tahan yang luar biasa dari para Santrinya.

Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia, bagaimana pun sederhananya sistem pengorganisasianya, ketika umat Islam mulai sadar tertindas, akan lahir para Ulama dan Santri pejuang penegak kebenaran Islam. Anehnya, sekalipun Kampus Pesantren hanya seluas dan sesederhana Gua Hira Rasulullah saw saat menerima wahyu pertama, namun tidak pernah terdengar di Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya Pengangguran Alumni Pesantren.

Lebih sulit dipahami lagi, bila Wali atau Kiai sekalipun sudah wafat, di sekitar makam, tumbuh kehidupan ekonomi umat. Dengan kata lain, walaupun Wali dan Kiai sudah wafat, pengaruh ajaran Islamnya masih bisa menciptakan lapangan kerja bagi yang masih hidup. Tetap menghidupkan serta mendinamiskan kehidupan kota yang dibangunnya. Tidak hanya sebatas lingkar lingkungan wilayah yang dekat, namun juga yang jauh. Dengan dana pribadi, umat Islam terpanggil untuk memberikan penghormatan jasa Ulama sekalipun sudah tiada secara fisik.

## **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Teras Pacitan Karesidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati - Hasyim Muzadi, PDIP - NU gagar karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39.09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, Partai Demokrat dan Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.



## **Jend. TNI (Purn.) Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Lahir Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949

### **Perjalanan Karier:**

- Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
- Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (sejak 26 Oktober 1999)
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan  
(sejak 10 Agustus 2001 dan mengundurkan diri 11 Maret 2004)
- Presiden Republik Indonesia (2004-2009)
- Presiden Republik Indonesia (2009-2014)



## **PROF. DR. RYAAS RASYID**

Lahir 19 Desember 1949 di Gowa, Sulawesi Selatan

Alumnus dari:

University Hawaii, Amerika Serikat (1994)

Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

(26 Oktober 1999–23 Agustus 2000)

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

(23 Agustus 2000–7 Februari 2001)

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

(25 Januari 2010)

Ketua Umum

Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Alumni PPI (Pelajar Islam Indonesia)

(2005–2008)

Susilo Bambang Yudhoyono - SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425, untuk periode kepresidenan 2004 - 2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD. Susilo Bambang Yudhoyono terlahir 9 September 1949, Jumat Kliwon, 16 Dzulqaidah 1368 di Pacitan Keresidenan Madiun, Jawa Timur.

Pacitan memiliki pondok pesantren yang terkenal, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pondok Pesantren Termas. Juga sebagai daerah gerilya Panglima Besar Soedirman. Dengan latar belakang wilayah kelahirannya dan kedekatannya dengan Ulama, memungkinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyempatkan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, sebagai kelanjutan dari pondok pesantren yang dirintis oleh Kandjeng Kiai Hasan Besari. Dan dikenal pula sebagai moyangnya, H.O.S. Tjokroaminoto.

Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden, terlahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, Jumat Legi, 28 Rabiul Akhir 1361. Berlatar belakang aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia - PII, dan Himpunan Mahasiswa Islam - HMI. Menjadi anggota MPR dari Golkar sejak 1988 M. Sebagai wirausahawan yang berhasil ditekuninya selama 42 tahun. Panggilan bakti kepada nusa dan bangsa, menjadikan pimpinan perusahaannya diserahkan kepada putranya: Kalla Lines, Nusantara Air Charter, Kalla Sarana Utama, Bumi Sarana Beton.

Di samping jabatan eksekutif dipegang oleh kedua pimpinan di atas, sejak Reformasi, MPR dipimpin oleh Prof. Dr. H. M. Amin Rais, Persyarikatan Muhamadiyah dan Partai Amanat Nasional - PAN. Kemudian digantikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera - PKS.

Reformasi menghantarkan pimpinan umat Islam berhasil menduduki posisi strategis seperti di atas melalui partai politik yang dipilih oleh rakyat. Namun, dengan menjamurnya pertumbuhan partai politik, umat Islam dihadapkan kekembaran partai politiknya. Suara umat akan terbagi menjadi sekecil-kecilnya, dan memungkinkan akan menghadapi kekalahan yang menyedihkan.

Benarkah ucapan Prof. Dr. Snouck Hurgronje, biarkan umat Islam jika akan mengadakan ekspansi keorganisasianya, akhirnya akan menemui kelemahan. Namun, awasilah jika umat Islam telah melakukan intensifikasi pengelolaan keorganisasianya, dapat dipastikan akan menemukan kemenangan. Di bawah ini, penulis angkat sebagai contoh, sebagian dari partai politik yang dipimpin oleh pemuka Islam. Baik yang berasas Islam ataupun berasas Pancasila.



## Ir. H. JOKO WIDODO

Lahir Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 21 Juni 1961

Walikota Surakarta (2005-2012)

Gubernur Jakarta (2012-2014)

Presiden Republik Indonesia (2014-Sekarang)

Pengusaha mebel dan pertambangan

Sumber: profilpedia

## Joko Widodo Presiden ke-7 RI

JOKO WIDODO atau dikenal dengan JOKOWI, dapat memenangkan kampanye Kepresidenannya, karena menampilkan dirinya yang sangat merakyat. Di samping itu, sebelumnya telah menduduki lembaga pemerintahan sebagai Walikota di Surakarta dua periode ( 1905-2015). Kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dari etnis Cina. Pencalonan ini berhasil karena penduduk Jakarta yang mempunyai latar belakang dari Surakarta cukup besar. Dan lagi Ahok memungkinkan pula dari etnis Cina, pemilik pabrik yang memiliki buruh yang sangat besar, memungkinkan terpilihnya jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemenangan diperoleh di saat kedudukannya sebagai Walikota Surakarta belum berakhir. Oleh karena itu, kelanjutan jabatannya sebagai Walikota diserahkan kepada Wakilnya FX Hadi Rudyatno.

Keberhasilan Joko Widodo sebagai Walikota yang dipilih dua kali masa jabatannya, ditambah dengan kemenangan dalam pemilihan Gubernur DKI, menjadikan PDIP mencalonkan Jokowi sebagai Presiden dengan pasangan Jusuf Kalla. Dengan modal penampilan sederhana, rakyat pemilih dari kalangan grass root, mudah tertarik dengan gaya merakyatnya. Selain itu dengan menampilkan sikap religionitasnya, dengan Umroh memungkinkan mendapat simpati dari umat Islam.

Dukungan dari Partai Hanura, dari kalangan keluarga militer, pendukung Wiranto, menaruh simpati kepada Jokowi. Partai Nasdem, yang memiliki pengaruh besar dari masyarakat Luar Jawa, dan PKB partainya kaum Nahdiyyin, menambah jumlah pendukung dalam pelaksanaan Pemilu Presiden.

Karier Jokowi dengan loncatan jenjang ke atasnya, dalam relatif pendek, sangat mengagumkan. Latar belakang sekolah SD,SMP,SMA di Surakarta. Kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak pernah studi masalah kepemerintahan dan politik, secara studi formal. Okupasinya hanya sebagai penjual meubel termasuk menjual kursi. Dari menjual kursi Jokowi berhasil menduduki kursi Walikota,Gubernur dan puncaknya Kepresidenan.

Dari awal pemerintahan, 23 Oktober 1914, didesak oleh masyarakat agar dapat segera mungkin merealisasikan janji kampanyenya. Seperti orang baru menancapkan tanamannya, sudah dituntut untuk dapat dipetik buahnya. Dengan Kabinet Kerjanya, guna merealisasikan Janji Kampanye, Presiden Jokowi mengadakan lawatan ke Saudi Arabia. Kehadirannya disambut langsung oleh Raja Salman bin Abdul Azis. Di Uni Emirat Arab diterima oleh Putra Mahkota UAE Mohammad bin Zayed al Nahyan. Di Qatar diterima oleh Emir Qatar Sheik Tamim Hamad Al Thani. Kehadiran

Presiden di Timur Tengah tidak lain meningkatkan jalinan kerja ekonomi, menarik investor agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank Internasional yang berkantor di Timur Tengah: Bank Pembangunan Islam (IDB). Organisasi Kerjasama Islam (OKI).Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Di UEA dicapai kesepakatan menerima alusista produk Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi minta perlindungan 80.000 TKI yang bekerja di UEA. Pilihan lawatan ke Timur Tengah untuk lebih meyakinkan masyarakat Presiden Jokowi sangat memperhatikan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia, umat Islam.

Tidak mungkin tidak, mengadakan lawatan ke Amerika Serikat diterima oleh Presiden Obama. Di samping bertemu dengan para investor, Presiden Jokowi menyempatkan pula untuk Sholat Ashar di Masjid Diaspora Indonesia, Silver Spring Maryland. Lebih berkesan hadirnya ribuan WNI yang tinggal di AS, rame-rame menyambut Presiden Jokowi.

Perlu pula diperhatikan, Muktamar Persatuan Islam di Jakarta, Muktamar Ke 33 Nahdlatul Ulama di Jombang, dan Muktamar Ke 47 Perserikatan Muhammadiyah di Makasar, serta Kongres Syarikat Islam di Bandung kesemuanya dapat berjalan lancar. Ketua yang terpilih dalam Muktamar atau Kongres, tidak ada intervensi dari pihak pemerintah seperti zamannya Menteri Penerangan Ali Murtopo. Saat itu Ali Murtopo bisa menolak atau menerima pimpinan yang terpilih oleh Muktamar atau Kongres.

Presiden Jokowi dapat menghadiri pembukaan Muktamar atau Kongres tersebut. Sampai dengan API SEJARAH 1 dan 2, dicetak, 19 Jumadil Akhir 1437 H, atau 28 Maret 2015, Presiden Jokowi, tetap eksis tidak tergoyahkan oleh serbuan kritik yang dilancarkan oleh oposannya melalui media sosial. Sikap Presiden Jokowi justru menyatakan tidak marah karena adanya kritik.



Suatu prestasi yang sangat menakjubkan di awal waktu kerja Presiden Jokowi adalah mengadakan HUT Ke 60 Konferensi Asia Afrika – KAA di Jakarta dan di Bandung. Dengan merancang mengundang 109 negara. Terdiri atas 55 negara Asia dan 54 Afrika. Suatu prestasi kerja yang sangat menakjubkan karena 23 Oktober 2014, para Menteri dilantik di halaman Istana. Di bulan 24 April 2015 mengadakan perhelatan HUT Ke 60 KAA. Tentu hal ini melibatkan tidak hanya *Retno Lestari Priansari Marsudi* Menteri Luar Negeri dan *Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan* adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, tetapi juga Gubernur Jawa Barat *Dr. H. Ahmad Herawan, Lc.* Terutama *Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D* WaliKota Bandung yang berhasil mengubah kota Bandung menjadi berwajah baru. Di setiap simpang jalan dibangun Tugu Bambu yang artistik unik. Di samping itu dihidupkan Taman Bunga dan Air Mancur yang memperindah kota Bandung dan menyegarkan sekali. Hasil tatanan tata kota Bandung sangat membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sampai Api Sejarah 2 diterbitkan Jalan Asia Afrika terutama sentra Gedung Merdeka dan sekitarnya, dijadikan Generasi Muda untuk mengabadikan diri dengan kamera atau handphone milik pribadinya.

Upaya HUT ke 10 di Alzajair gagal. Tetapi kali ini HUT Ke 60 KAA berhasil sukses. Presiden Joko Widodo memperlihatkan kembali ke dunia bahwa Indonesia tetap bertekad merealisasikan Pembukaan UUD 1945, bersama seluruh bangsa bangsa yang pernah dijajah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Karena bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Melalui KAA 24 April 1955 dilahirkan *Dasa Sila Bandung* atau *Bandung Spirit*. Melalui KIAA 15 Maret 1965 umat Islam Afrika Asia mengangkat Presiden Soekarno sebagai *The Champion of Freedom and Islam* – Pendekar Kemerdekaan dan Islam. Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali peran NKRI melalui kemanusiaan berjuang meniadakan penjajahan yang selalu akan hidup kembali. Dan menghidupkan *jiwa kesadaran bersejarah* bagi Generasi Muda yang sedang dihinggapi rasa tidak memiliki pahlawan lagi - herolessness.



Presiden Jokowi Bersarung Membuka  
Muktamar Ke 33 Nu Di Jombang Jawa Timur





## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2015-2020

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. • Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. • Prof. Dr. H. Yuniar Ilyas, Lc., MAq. • Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
Dra. Hj. Noordjannah Djehantini, MM., M.Si. • Prof. Dr. H. Syaikh A. Mugihni • Dr. H.M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. • Dr. H. Anwar Abbas, M.M. M.Aq.  
dr. H. Apus Taufiqurrahman, Sp.S., M.Kes. • Drs. H. Hariyanto Y. Thohari, M.A. • Drs. H. M. Goodwill Zubir • Prof. Dr. Bahktar Effendy, MAP. • Dr. H. Agung Danarto, M.Aq. • Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

Berdiri dari kiri ke kanan

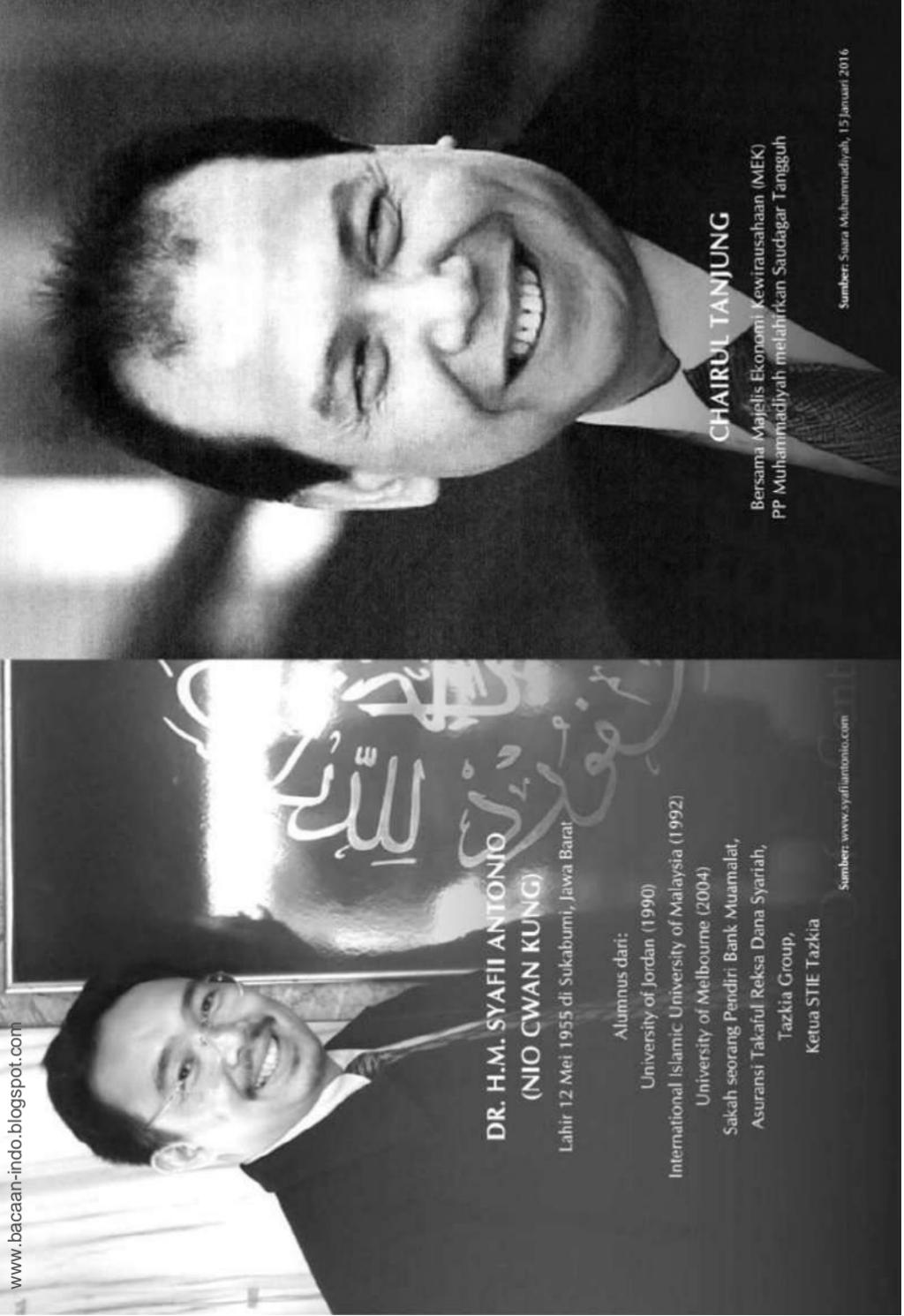


MUKTAMAR KE XV PERSATUAN ISLAM

Jakarta, 20-23 November 2015 M/8 - 11 Shafar 1437 H







**DR. H.M. SYAFII ANTONIO  
(NIO CWAN KUNG)**

Lahir 12 Mei 1955 di Sukabumi, Jawa Barat

Alumnus dari:

University of Jordan (1990)

International Islamic University of Malaysia (1992)

University of Melbourne (2004)

Sahak seorang Pendiri Bank Muamalat,  
Asuransi Takaful Reksa Dana Syariah,  
Tazkia Group,

Ketua STIE Tazkia

**CHAIRUL TANJUNG**

Bersama Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK)  
PP Muhammadiyah melahirkan Saudagar Tangguh

## Reformasi dan Timbulnya Sistem Multi Parpol

Reformasi disertai dengan amandemen UUD 1945, melahirkan perubahan sistem kepartaian. Diubahnya dari sistem Satu Golongan dan Dua Partai pada masa Orde Baru, menjadi Multi Partai Politik. Pada awalnya, Golkar bukan partai, pengaruh Akbar Tanjung dalam menyesuaikan tuntutan Reformasi, berubah menjadi Partai Golongan Karya - PGK. Demokrasi di Orde Reformasi, hasil amandemen UUD 1945 memungkinkan partai politik tumbuh berlibat ganda jumlahnya.

Rakyat sukar memahami mana partai politik Islam dan mana yang bukan partai politik Islam. Mana partai pimpinan orang Islam, mana partai pimpinan bukan orang Islam. Sejarah berulang Pemilu 1955 rakyat berhadapan dengan sejumlah partai politik.

Nama-nama partai politik Islam tidak lagi menggunakan bahasa Arab dan tidak pula dituliskan dengan huruf Arab. Ada pula yang masih mempertahankan dengan nama partai politik Islam yang lama, juga gambar lambangnya. Ada pula yang dikenal oleh masyarakat luas pemimpinnya sebagai mantan pemimpin organisasi Islam, walaupun partai politik yang dipimpinnya tidak berasas Islam. Menurut Vincent Wangge SH, 1999, dalam *Direktori Partai Politik Indonesia*, antara lain terdapat:

Partai Syarikat Islam Indonesia - PSII

Didirikan, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya'ban 1323. Solo. Deklarasi Ulung 29 Mei 1998.

Asas, Dinul Islam.<sup>10</sup>

Dewan Partai

Ketua : K.H. Mulyana S. Muslim, SH.

Sekretaris : Chalid Djamarini

Lajnah Tanfidiyah/Pimpinan Pusat

Ketua : H. Taufiq R. Tjokroaminoto

Sekretaris Jenderal : Ir. H. Amaruddin Djajosubito

Partai Syarikat Islam Indonesia - PSII

Didirikan, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya'ban 1323. Solo.

Asas Dinul Islam.

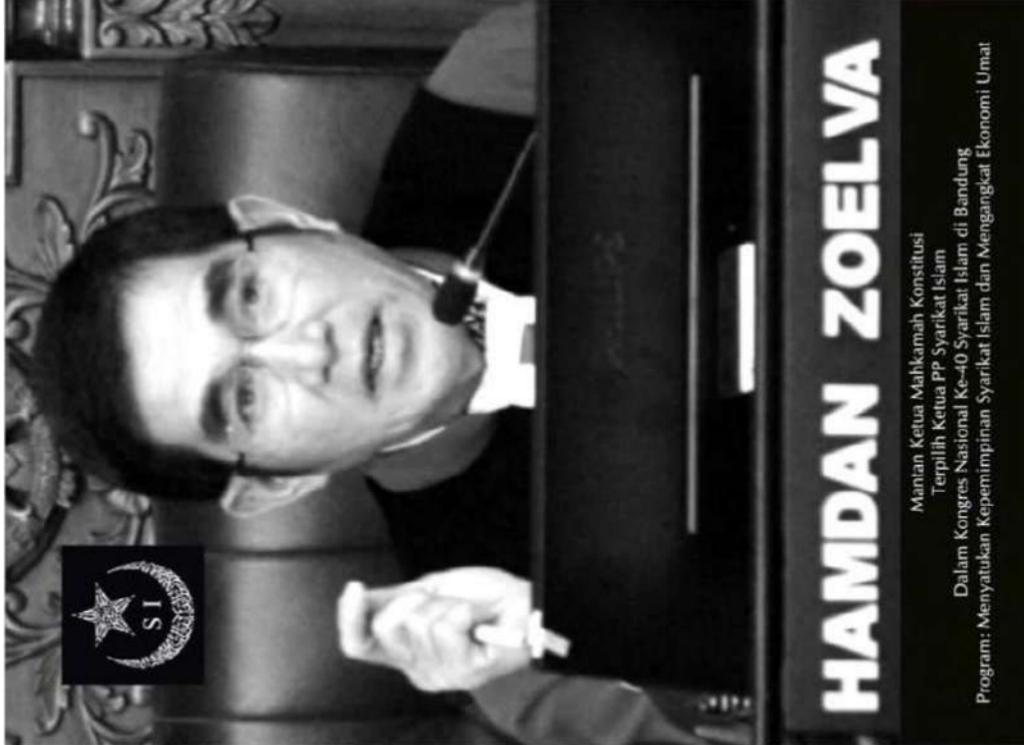
Dewan Partai

Presiden : Dr. H. Bastaman, SH

Sekretaris Jenderal : Muhammad Mufti, BA

---

<sup>10</sup> Hari dan Pasarannya, serta tanggal Komariyah dan tahun Hijrah, penulis tambahkan.



# HAMDAN ZOELVA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

Terpilih Ketua PP Syarikat Islam di Bandung

Dalam Kongres Nasional Ke-40 Syarikat Islam di Bandung

Sumber: [www.kontuhukum.com.id/wikipedia.org](http://kontuhukum.com.id/wikipedia.org)



## Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

Lahir Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama (2003–2006 dan 2006–2008)

Pelakuk dasar gagasan modernisasi peradilan di Indonesia

Tim Nasional Reformasi Mewujudkan Masyarakat Madani

Ketua Panitia Seleksi Perasihhat KPK (2009)

Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009–2010)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum

Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Pendiri Jimly School of Law and Government



## PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Lahir Belitung, 5 Februari 1956

### Perjalanan Karier

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (periode 2000-2001)

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (periode 2001-2004)

Menteri Sekretaris Negara Indonesia (periode 2004-2007)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (periode 1998-2005)



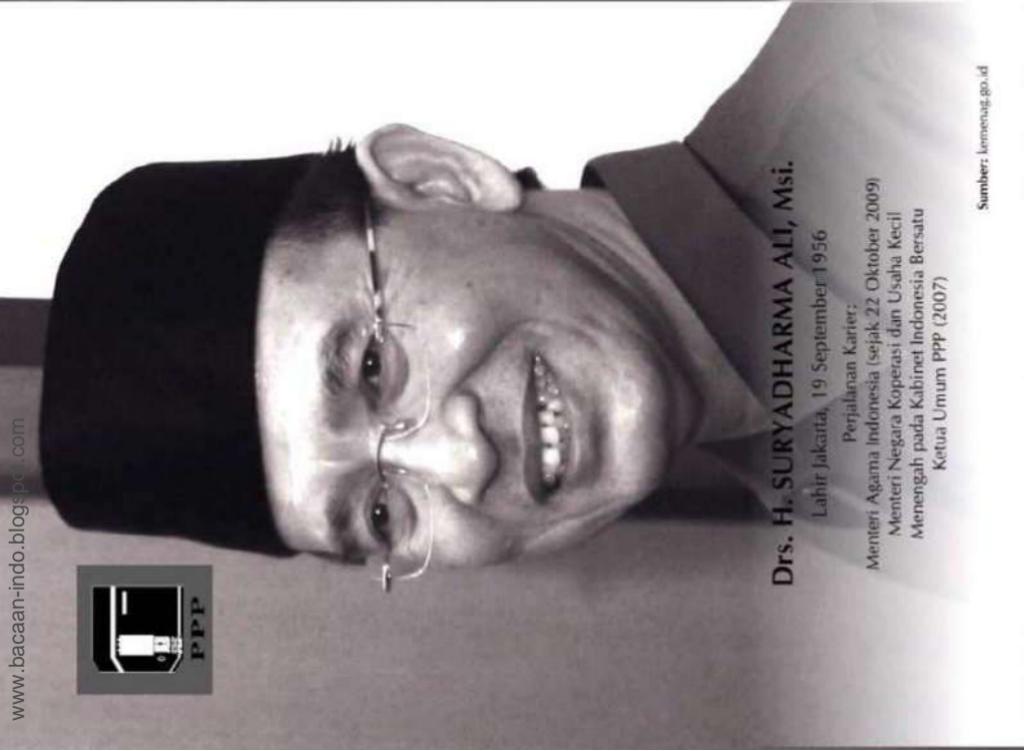


**Dr. H. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960  
Ketua MPR RI, 2004-2009

Dewan Pembina Partai Keadilan Sejahtera  
Cendekiawan Muslim

Sumber: lemmenag.go.id



**Drs. H. SURYADHARMA ALI, Msi.**

Lahir Jakarta, 19 September 1956  
Perjalanan Karier:

Menteri Agama Indonesia (sejak 22 Oktober 2009)  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu  
Ketua Umum PPP (2007)

Sumber: rnpbilka.co.id

## API SEJARAH 2

Partai Kebangkitan Bangsa - PKB

Deklarasi, 23 Juli 1998 , Kamis Wage, 28 Rabiul Awal 1419, Jakarta.

Asas, Pancasila.

Dewan Syuro

- |            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| Ketua      | : | K.H. Dr. Ma'ruf Amin  |
| Sekretaris | : | K.H. Drs. Dawam Anwar |

Dewan Tanfid

- |                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Ketua               | : | H. Matori Abdul Djalil     |
| Sekretaris Jenderal | : | Drs. A. Muhamimin Iskandar |

Partai Keadilan Sejahtera - PKS

Deklarasi, 9 Agustus 1998, Ahad Legi, 16 Rabiul Akhir 1419, Jakarta.

Asas, Islam.

Majelis Pertimbangan Partai

- |            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| Ketua      | : | Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA |
| Sekretaris | : | H. Luthfi Hasan Ishaq, MA       |

Dewan Syariah

- |            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| Ketua      | : | Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA. |
| Sekretaris | : | Imam Santoso, Lc.               |

Dewan Pimpinan Pusat

- |                     |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Presiden            | : | Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc. |
| Sekretaris Jenderal | : | H.M. Anis Matta, Lc.                 |

Partai Amanat Nasional - PAN

Deklarasi, 23 Agustus 1998, Ahad Kliwon, 30 Rabiul Akhir 1419. Jakarta.

Asas, Pancasila.

- |                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Ketua Umum          | : | Prof. Dr. Amien Rais   |
| Sekretaris Jenderal | : | Faisal Basri, SE., MA. |

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

Didirikan di Djogjakarta 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364.

Deklarasi Ulang, 28 Agustus 1998, Jumat Kliwon, 5 Jumadil Akhir 1419.

Asas, Islam.

- |               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| Majelis Syuro | : | Ketua K.H. Mawardi Noer, SH |
| Sekretaris    | : | Izam Hamka                  |

Pimpinan Harian:

- |                 |   |                              |
|-----------------|---|------------------------------|
| Ketua Umum      | : | Ir. Abdullah Hehamahua, MSc. |
| Sekretaris Umum | : | Drs. Sayuti Rahawarin        |



## AKBAR TANJIUNG

Lahir Sulboja, Sumatera Utara, 1<sup>st</sup> Agustus 1945

Pendiri Partai Colkar  
Penjalaman Kahier

Wakil Sekretaris FKPP DPR (1982-1983) Sekretaris FKPP-MPR (1987-1992)

Menteri Negara Permuada dan Olahraga (periode 1988-1993)

Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1996)

Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998)

Wakil Ketua FKPP MPR (1997-1998) - Wakil Ketua Sekretaris Negara (1998-1999)

Ketua DPR-RI (1999-2004)

Sumber: www.komunitasans.com, id.wikipedia.org

## PROF. DR. K.H. MIFTAH FARIDL

Pembina Masjid Salman ITB

Partai Ummat Islam, PUI

Deklarasi, 26 Juli 1998, Ahad Pahing, 2 Rabiul Akhir 1419. Jakarta.

Asas, Islam.

Majelis Pertimbangan Partai : K.H. Isya Syahrul, MA,  
: Ir. Syahrul Alim, MSc,  
: Ir. H. M. Sanusi

Dewan Pimpinan Pusat

Ketua Umum : Prof. Dr. Deliar Noer  
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Harun Al-Rasid S.,  
Ketua : Dr. Muchtar Effendi SE.,  
: Dr. Mursalin Dahlan,  
: Drs. Abdurrahman Gunadirdja,  
: Ir. Imam Rahardjo,  
: H. Juzahar Sirie,  
: Usman Sembiring, SH,  
: Drs. Ali Murthado.  
Sekretaris Jenderal : dr. Judiherry Justam, MM.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pimpinan pendiri partai politik tadi, mengalami proses seleksi. Ada yang mengundurkan diri. Misalnya Faisal Basri dari PAN, atau seperti Matori Abdul Jalil diberhentikan dari PKB. Untuk memahami siapa sebenarnya Matori Abdul Djalil, dapat dibaca Drs. Markonina Hartisekar dan Drs. Akrin Isjani Abadi, dalam mewaspada Kuda Troya Komunisme Di Era Reformasi Jilid 1-5. Pustaka Sarana Kajian. Jakarta.

Pergantian pimpinan partai politik, seperti masalah biasa. Semuanya mempunyai dasar tujuan untuk konsolidasi. Namun, bagi partai politik yang sudah mapan, justru sebaliknya. Pimpinan lama selalu dipertahankan. Disebutnya sebagai Iron Law of Oligarchy - Hukum Baja Kelompok.

Rakyat menghadapi kesulitan besar dalam memilih nama partai politik karena adanya partai kembar seperti di atas. Misalnya PSII dan Masyumi. Tidak beda dialami pula partai non-Islam. Memiliki kekembaran lambang dan hampir sama namanya pula.

Demikian pula di kalangan Perwira Tinggi TNI, saling mendirikan partai politik. Saling bersaing dengan dana yang besar dalam kampanye memperoleh dukungan suara rakyat dalam Pilkada, Pemilu atau Pemilihan Langsung. Rakyat pemilih yang cinta Indonesia, bingung kepada siapa menitipkan kedaulatannya.

## Problem Amandemen UUD 1945

MPR Reformasi tidak hanya mengamandemen kewenangan MPR, tetapi juga mengamandemen proses pemilihan dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih Presiden. MPR hanya melantik Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden menurut UU. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Dalam praktik Pilkada dan Pemilu untuk Kepala Daerah dan Presiden, lewat parpol dan mereka yang punya uang.

Selain itu, amandemen Pasal 33, dengan landasan Demokrasi Ekonomi, tetapi dalam praktik jadi ekonomi liberal dengan sistem kapitalistik. Pasar bebas - free trade untung-rugi jadi acuan. Kemudian terjadi ketidakpedulian terhadap rakyat kecil yang miskin dan masih banyak lagi amandemen yang akan membahayakan nasionalisme.

Situasi ini, amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR dituduh dibiayai asing, membangkitkan adanya Apel Kesetiaan NKRI, Pancasila, UUD 1945, di Tugu Prokla masi 11 Agustus 2005 dipimpin oleh Try Sutrisno, Saleh Basarah, M. Kharis Suhud, Sutardjo Surjogurtino, Ali Sadikin, Prof. Kusnadi, Sofian Effendi, dan Machmud Subarkah. Delapan tokoh ini melihat adanya kerancuan amandemen yang mengikis jiwa nasionalisme dan dibacanya ada upaya deideologi Pancasila. Ternyata, sebagian generasi muda sampai merasa malu menyebut Pancasila.

## Perubahan Gaya Kehidupan

Sikap partai politik Orde Reformasi, sepertinya kurang memerhatikan dampak menjamurnya Supermarket<sup>Hypermarket</sup>, Mall, Department Store, Factory Outlet mematikan Pasar Tradisional, Toko, dan Warung Rakyat. Umat Islam setiap hari terpaksa setor uang ke berbagai Supermarket, HypermarketMall dan Factory Outlet serta Gerbang Tol, seperti zaman kolonial setor berbagai pajak, termasuk pajak jalan.

Sekarang, melalui bahasa dan aktivitas niaga, umat Islam setor uang ke investor asing atau pemilik modal asing atau ke bank asing. Terlihat dalam usahanya memperkuat posisi imperialisme ekonomi modern yang mencengkeram market - pasar dan raw material - bahan mentah serta karyawan sebagai tenaga kerja kontrak. Penjajah gaya baru dengan membangkitkan gaya hidup mewah - hedonisme. Posisi bahasa Indonesia pun dalam language war - perang bahasa, tergusur dengan bahasa niaga asing atau bahasa Inggris.



Sumber: www.mujelisadzdikza.com

## USTADZ K.H. ARIFIN ILHAM

Pembangkit Kesadaran Berdzikir Bersama  
Nusantara Indonesia Berdzikir

Menggoncang jiwa umat agar dekat  
dengan hukum Al-Khalilq, Sang Maha  
Pencipta

dan pembangkit kesadaran umat,  
nikmatnya menjalankan Hukum Allah,  
menyadarkan terhadap keseimbangan nilai  
waktu hidup di dunia, dan makna rezeki  
Allah agar digunakan untuk membangun  
jalan pulang dengan jalan menciptakan  
kesejahteraan umat melalui Syari'ah Islam

USTADZ K.H. ARIFIN ILHAM, DRS. K.H.  
HUSNI THAMRIN, dan H. ZAINI AZHAR  
MAULANI merupakan keturunan Syeh  
Ahmad Al-Banjari.



Sumber: Doc. Pribadi

## DRS. K.H. HUSNI THAMRIN

Ketua Yayasan Pesantren Al-Ihya, Bogor



Sumber: Doc. Pribadi

## H. ZAINI AZHAR MAULANI

Pola tanam berganti dengan tanaman hias. Sawah mulai menghilang. Irigasi untuk sawah hancur, terhadang kompleks perumahan dan peruntukan perindustrian. Petani terbebani, Pajak Bumi dan Bangunan, lahan sawahnya dijual. Berubah menjadi buruh tani yang tidak memiliki sawah dan lahan pertanian. Sawahnya berubah menjadi lapangan golf atau sarana olahraga lainnya. Apa jadinya jika food as weapon - makanan sebagai senjata, sedangkan isi perut bangsa, beras, buah, sayuran bergantung dari luar negeri. Sembako pun dikuasai modal asing.

## Dzikir Bersama

Ulama pun merasa prihatin terhadap perubahan tatanan kehidupan nasional yang berdampak menimbulkan keresahan jiwa. Arifin Ilham mengajak umat memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah dengan dzikir bersama. Hanya dengan mengingat Allah akan menumbuhkan kedamaian batiniah. Secara politis, dzikir bersama sebagai bentuk gerakan keagamaan yang positif dalam menciptakan situasi damai dan tenteram.

Demikian pula Ida Farida secara rutin setiap Selasa dengan ribuan Jamaah Ibu di Masjid Raya Bandung, istighosah menanggiskan situasi bangsa dan negara yang terguncang berbagai musibah politik, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam, serta munculnya aliran agama yang tiada henti-hentinya. Karena dampak musibah dapat menggoayahkan kehidupan rumah tangga.

Modernisasi melahirkan defamilialization - defamilialisasi, dengan pengertian keluarga yang tidak lagi hidup di bawah satu atap. Ayah, ibu dan anak hidup berbeda kota. Terpisah dengan kepentingan kerja dan sekolah. Budaya kota - urban culture melahirkan rasa saling keterasingan. Walaupun nama pada dada baju seragam orang dijumpainya dapat dibaca, tetapi saling tidak kenal. Budaya kota menjadikan manusia kota terbelah fragmentasi. Budaya gotong royong di desa pun mulai melemah, akibat Ulama dan Santri dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit. Tidak hanya semakin terpecahnya kepemimpinan umat dalam keragaman wadah partai politik. Namun muncul juga berbagai aliran agama (Islam), tetapi ajarannya mengkafirkkan sesama Muslim jika tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Misalnya Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia - LDII, dan Syi'ah. MUI dan Departemen Agama tidak akan menilai sebagai aliran sesat jika tidak memakai nama yang sama dengan nama agama yang sah: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Berbagai aliran agama tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan membelah kerukunan umat beragama oleh mereka yang tidak menghendaki keutuhan NKRI.

Di lain pihak, timbul gerakan liberalisme yang mensejajarkan semua agama sama benarnya. Walaupun beda syariah dan keyakinannya karena semuanya dinilai berasal dari Tuhan.

Demikian pula penilaianya terhadap aliran pluralisme, sekulerisme, atheisme dipandang sama benarnya dan sama-sama memiliki hak hidup di alam demokrasi dengan agama lainnya. Kelompok JIL dalam upaya pembenaran pandangannya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, Kitab Islam Klasik, tetapi dibaca dengan tafsir yang disimpangkan.

Dewasa ini sedang berjangkit keguncangan politik di Timur Tengah yang melahirkan "Perang Bintang" dengan senjata dan amunisi dari produk industri senjata Barat. Timur Tengah dijadikan pasar penjualan senjata dan sekaligus dijadikan alat merontokkan antar negara Islam Timur Tengah. Perlu Indonesia mewaspada dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dampaknya berbahaya sekali bila yang dipecahkan kesatuan umat Islam dengan meningkatkan rasa perbedaan penafsiran dan keyakinan dengan diperangkap antar Penganut Syi'ah kontra Wahabi kontra Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Semoga Bandung Spirit hasil Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Afrika Asia dapat menghentikan silang sengketa yang terjadi di Timur Tengah sebagai ciptaan lawan-lawan Islam.

Bagaimana pun tingginya kedudukan lawan Islam, sama seperti buih di atas air. Bagaimana pun rendahnya air di bawah buih atau kedudukan Ulama dan Santri, tetapi yang menyuburkan tanah atau kehidupan rakyat adalah air atau Ulama. Betapapun besarnya buih saat menyepuh permata, dan betapapun kecilnya permata walau pun lebih kecil daripada buih, yang dibutuhkan dalam kehidupan manusianya adalah permata atau Ulama (QS 13: 17).



Di bawah masa Presiden Joko Widodo terjadi percobaan teroris menduduki Gedung Sariyah. Tetapi akibat kesiap siagaan aparat Kepolisian dan TNI, serta kesertaan dan keberanian Rakyat menghadapi teroris tanpa rasa takut sambil nonton operasi kepolisian, terjadilah kebalikan sikap teroris yang menjadi kebingungan. Dampaknya mudah digagalkan dan dilumpuhkan.



Sumber: Google

## Pamungkas

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membangkitkan semangat juang para Ulama dan Santri mempertahankan dan menyelamatkan bangsa dan NKRI dari bencana sekulerisme, atheisme, pluralisme dan liberalisme. Semoga Allah Maha Rahim Maha Rahim melimpahkan hikmah, ilmu, dan petunjuk-Nya kepada Ulama dan segenap umat Islam Indonesia agar tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Demi disumbangkan dalam membangun kehidupan bersama dengan seluruh bangsa dalam membangun kehidupan yang adil makmur dan sejahtera, yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa dalam NKRI.

Sekalipun tulisan Api Sejarah (jilid 2) ini penulis akhiri sampai di sini, tetapi perjalanan sejarah Ulama dan Santri tidak pernah berhenti. Berjalan terus di sepanjang jalan juang jihad di tengah perkembangan zaman yang dilaluinya. Bagaimana pun besarnya tantangan yang dihadapi oleh Ulama dan Santri, sejarah membuktikan Persyarikatan Muhammadiyah tetap eksis sampai hari ini mencapai usia satu abad, 8 Dzulhijjah 1330 - 1430, kemampuan bertahan hingga melewati jarak waktu satu abad namun tetap dan semakin berjaya karena langkah juang jihad Persyarikatan Muhammadiyah bertumpu kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Demikian pula Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan, Assalam, masih menampakkan daya juang tinggi dalam pembinaan umat bersyariah Islam untuk membela negara dan bangsa.

Alhamdulillah situasi kerukunan beragama khas Indonesia, Hari-hari Besar Agama dinasionalkan dan dihormati bersama sebagai hari libur nasional, misalnya Hari Nyepi Hindu Bali, Hari Natal, Hari Waisak, walaupun mayoritas adalah umat Islam dijadikan Hari Libur Nasional. Demikian pula kalender mengutamakan Masehi dapat dilihat dari penampilan kalender-kalender membaskan tanggal, bulan, tahun Masehi. Sebaliknya dengan penuh toleransi umat Islam menerima penampilan kalender yang mengecilkan tanggal, bulan Komariah, tahun Hijriyah dalam pencetakannya.

Sampai dengan memasuki Januari 2016, di bawah Presiden Joko Widodo kehidupan kerukunan beragama tetap aman. Umrah dan Haji dapat berlangsung dengan baik. Demikian pula acara da'wah secara nasional melalui media sosial televisi ataupun media cetak, buku, majalah, koran tidak pernah terjadi pembredelan. Pemerintah tidak menghalangi atau intervensi dalam proses penyelenggaraan Muktamar dan Kongres yang diadakan oleh Parpol atau Organisasi Sosial Islam.

Damailah Majidku dan Indonesiaku

SEKOLAH SEJARAH & PERADABAN ISLAM

Di Jakarta Pusat



**SEKOLAH SEJARAH & PERADABAN ISLAM**

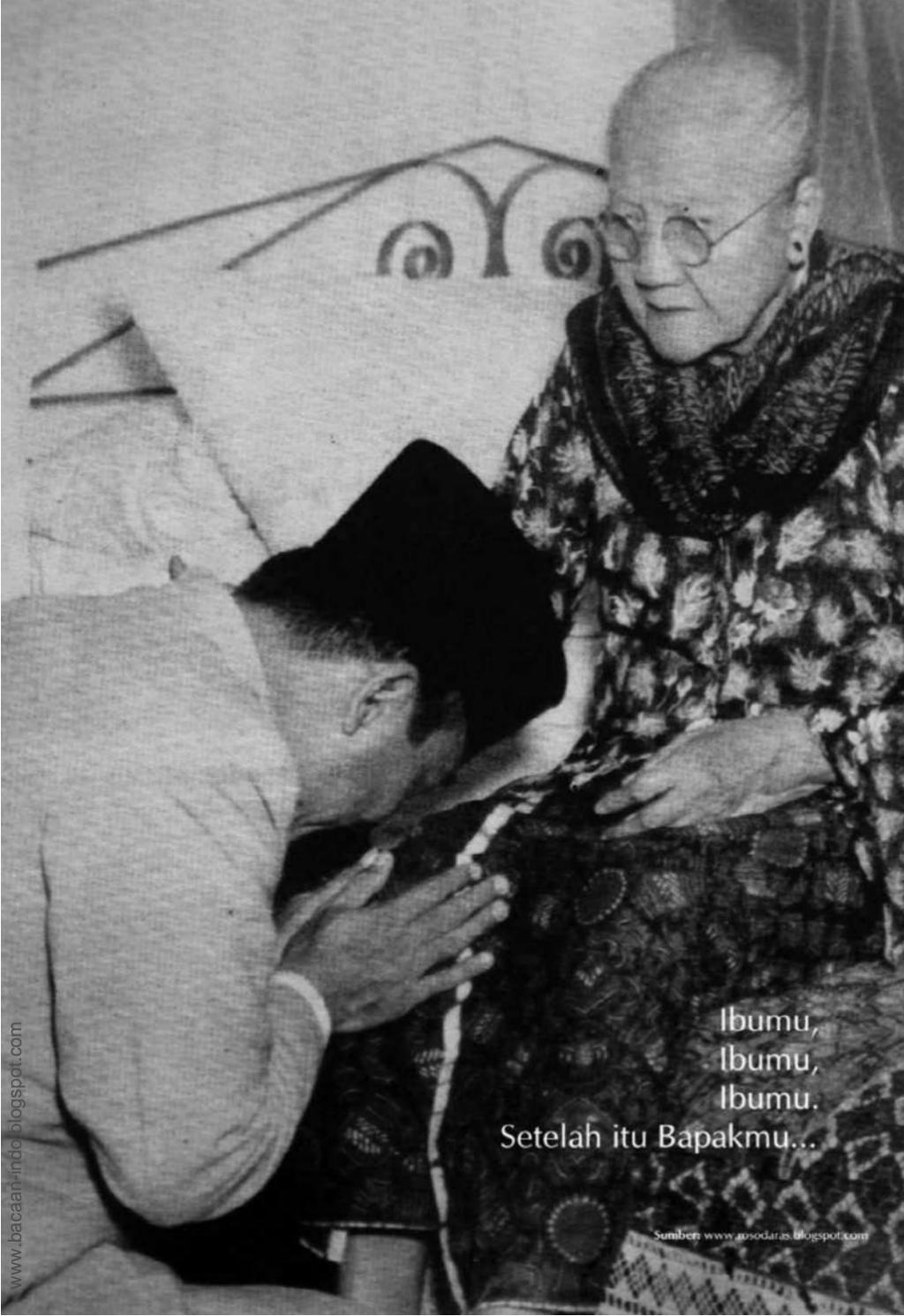
Dj. Jakarta Pusat

Damaialah Majidku dan Indonesiaku



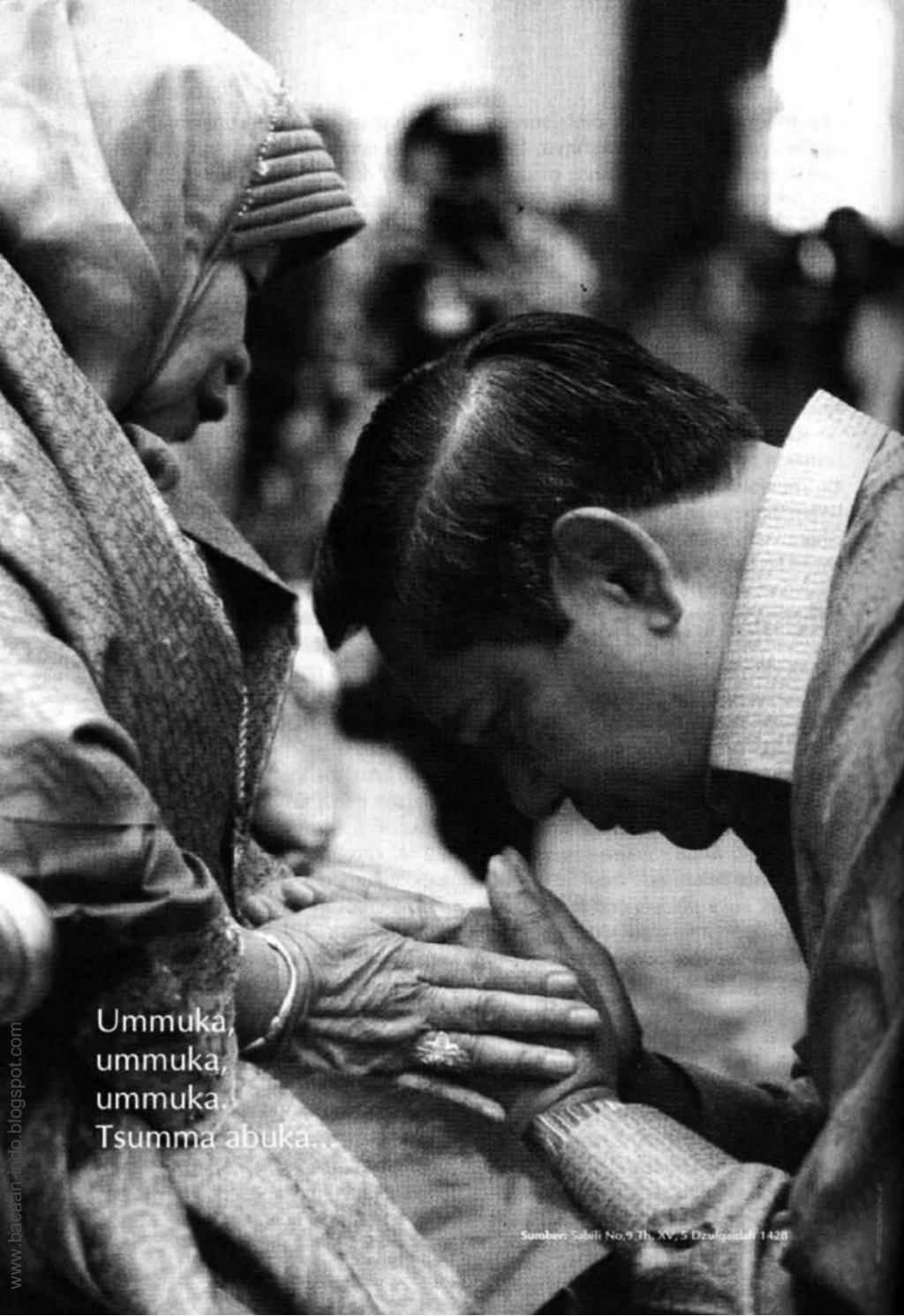


**"MEMOHON"** Karya ROSA  
Dipamerkan di Gedung Sate dalam rangka HUT ke 60 Asia Afrika



Ibumu,  
Ibumu,  
Ibumu.

Setelah itu Bapakmu...



Ummuka,  
ummuka,  
ummuka.  
Tsumma abuka..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Mohammad Fuad. 1417/1996. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Faadzil Qurani Karim*. Kairo: Darul Hadis.
- Abdullah, Taufik (ed). 1974. *Islam Di Indonesia Sepintas Lalu Tentang Beberapa Segi*. Jakarta: Tintamas.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Manusia dalam Kemerdekaan Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Faktaneka dan Indeks*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abu Khalil, Shauqi. 2003. *Atlas of The Qur'an Places, Nations, Landmarks*. Riyad: Darussalam.
- Adams, Cindy .1966. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*. Alih Bahasa: Major Abdul Bar Salim. Jakarta: Gunung Agung.
- Affandi, Bisri. 1999. *Syaikh Ahmad Syurkati 1874-1943: Pembaharu & Pemurni Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, Mufassir Mohammad. 1979. *The Koran*. London: The First Tafsir In English Emere.
- Ahmad, Z.A. 1956. *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Widjaja.
- Ahmed, Akbar S. 1992. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Buruswi, Ismail Haqqi. 1995. *Tafsir Ruhul Bayan*. Disunting oleh H.M.D. Dahlan. Bandung: Diponegoro.
- Alfian, Ibrahim. 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al-Faruqi, Ismail R. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*.
- Al-Faruqi. *Lois Lamya'*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Al-Haromain, Al-Imam A. Ma'ali. 1994. *Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Penerjemah: Drs.Hafizh Utsman. Jakarta: Gandewa.
- Al-Musawi, Syarafuddin. 1983. *Dialog Sunnah Syi'ah*. Bandung: Mizan.
- Ali, A.Yusuf. 1983. *The Holy Qur'an*. Maryland: Amana Corp.

- Ali, R. Mohammad. 1963. Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia. Jakarta: Bhataro.
- \_\_\_\_\_. 1963. Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sedjarah Asia Tenggara. Jakarta: Bhataro.
- Ali Nashif, Syekh Manshur. 1993. Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw. Penerjemah: Bahrun Abu Bakar Lc. Bandung: Sinar Baru.
- Anwar, Tamar. 1984. K.H. Noer Alie 71 Tahun Bekasi: Attaqwa-Ujung Harapan Bahagia.
- Amelz. 1952. H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anam, Choirul. 1985. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Solo: Jatayu.
- \_\_\_\_\_. 1990. Gerak Langkah Pemuda Ansor Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran. Surabaya: Penerbit Majalah Nahdlatul Ulama Aula.
- Ananta Toer, Pramoedya. 1985. Sang Pemula. Jakarta: Hasta Mitra.
- Anderson, Benedict R.O'G. 1972. Java In A Time Of Revolution Occupation and Resistance, 1944 -1946. Ithaca: Cornell University Press.
- Aqamuz, Erli (Siti Maesarah). 2007. Profil Abdul Qahhar Mudzakkar Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII. Tangerang: Yayasan Al- Abrar.
- Arnold, Sir Thomas W. (ed). 1965. The Legacy of Islam. London: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 1979. Sejarah Da'wah Islam. Penterjemah Drs.H.A.Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaja.
- Armstrong, Amatullah. 1996. Kunci Memasuki Dunia Tasawuf: Khasanah Istilah Sufi. Bandung: Mizan.
- Atjeh, Aboebakar. 1957. Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar. Jakarta: Panitia Buku Peringatan.
- \_\_\_\_\_. 1977. Aliran Sji'ah Di Nusantara. Jakarta: Islamic Research Institute.
- \_\_\_\_\_. 1988. Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik. Solo: Ramadhan.
- Aziz. 1955. Japan's Colonialism and Indonesia. (M.Nijhoff). The Hague.
- Azra, Azyumardi. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.
- Badri, Muhammad Nasihuddin. 2001. Meniti Tapak Sejarah 69 Tahun Pondok Pesantren Darunnahdlatin Nahdlatul Wathan Pancor. Lombok Timur: Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor.
- Baharuddin. 2007. Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Press.
- Bahsan, Oemar. 1955. Tjatatan ringkas tentang: PETA - Pembela Tanah Air dan Peristiwa Rengasdengklok. Bandung: Melati Bandung.
- Bain Chester A. 1962. The Far East. Littlefield, Adams & Co. New Jersey.

- Bajasut, S.U. 1972. *Alam Pikiran Djedjak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. Surabaya: Documenta.
- Ballack, Luger. 2007. *7 Tokoh Kunci Nazi Penentu Sejarah Jerman & Penyebab Perang Dunia II*. Jakarta: Visimedia.
- Balfas, M. 1957. *Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo Demokrat Sedjati*. Jakarta: Djambatan.
- Baloch, N.A. 1980. *The Advent of Islam In Indonesia*. Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research.
- Banks, Arthur S. (ed). 1981. *Political Handbook of The World: 1981*. New York: McGraw Hill Book Co.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nuh, R.H. Abdullah bin. 1978. *Sejarah Islam Di Jawa Barat Hingga Zaman Keemasan*. Bogor: Majlis Ta'lim Al-Ihya.
- Brackman, Arnold C. 1963. *Indonesian Communism A History*. New York: Frederick A.Praeger.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis*. Bandung: Mizan.
- Burckhardt, Titus. 1984. *Mengenal Ajaran Kaum Sufi*. Diterjemahkan oleh Azyumardi Azra, B. Effendi Jakarta: Pustaka Jaya.
- Burger dan Prajudi. 1960. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djilid Pertama. Tjetakan Kedua. Jakarta: P.N.Pradnya Paramita.  
\_\_\_\_\_. 1970. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djilid Kedua. Jakarta: P.N.Pradnya Paramita.
- Carrie, Rene Albrecht. 1961. *Europe 1500 – 1848*. New Jersey: Littlefield, Adams &Co.
- Carlyle, Thomas. 1968. *On Heroes Hero Worship and The Heroic In History*. London: Oxford University Press.
- Chaidar, Al. 1999. *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*. Jakarta: Darul Falah.
- Chalil, K.H. Moenawar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jilid, 1, 2, 3. Jakarta: Gema Insani.
- Clausewitz, Carl Von. 1976. *On War*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. New Jersey: Princeton University Press.
- Colijn, H. 1928. *Koloniale Vraagstukken van Heden En Morgen N.V.Dagblad En Drukkerij De Standaard*.
- Cotterell, Arthur. 1995. *China A History*. London: Pimlico.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik Di Indonesia*. Penerjemah: Sumartha. Jakarta: Sinar Harapan.
- De Graaf, H.J. dan Pigeaud Th.G.Th. 1985. *Kerajaan-Islam Pertama Di Jawa Kajian Sejarah Politik Abad Ke-15 dan Ke-16*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Dengel, Holk H. 1995. Darul Islam Dan KartosuwirjoLangkah Perwujudan Angan-Angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dhofier, Zamaksyari. 1984. Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
- Dienaputra, Reiza D. 2004. Cianjur Antara Priangan dan Buitenzorg Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangan hingga 1942. LPM UNPAD & Pemda Cianjur.
- Djaja, Tamar. 1966. Pustaka Indonesia. Djakarta: Bulan Bintang.
- Djooprajitno, Sudyono. 1962. P.K.I. – Sibar Contra Tan Malaka. Tjetakan Ke I. Jakarta: Jajasan Massa.
- Drewes, G.W.J. 1978. An Early Javanese Code Of Muslim Ethics. The Hague: Martinus Nijhoff.
- El Hafidy, M. Asad, 1977, Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- El Ibrahimy, M.Nur. 1986. Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya dalam pergolakan di Aceh. Jakarta: Gunung Agung.
- Esposito, John L. (ed). 1999. The Oxford History of Islam. New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Penerjemah: Eva YN, Femmy Syahrani, Jarot W. Poerwanto. Rofik S. Bandung: Mizan.
- Eugene Smith, Donald. 1971. Religion, Politics, and Social Change in the Third World. New York: The Free Press.
- Departemen Penerangan. 1951. Kepartaian di Indonesia, Pepora 8. Jakarta: Departemen Penerangan.
- \_\_\_\_\_. 1962. Makin Lama Makin Tjinta Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1962. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. 1980. Renville.
- A.W. Sijhoff. Alphen Aan Den Rijn Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. Illinois: The Free Press of Glencoe.
- Dirks, Jerald F. 2006. Ibrahim Sang Sahabat Tuhan. Penerjemah: Satria Wahana. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Gerth and Mills. 1958. From Max Weber Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.
- Ghazali, Abd. Rohim (ed). 2000. Dua yang Satu Muhammadiyah NU dalam Sorotan Cendekiawan. Bandung: Mizan.
- Giap, The Siauw. 1986. Cina Muslim Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Ukhudah Islamiyah
- Gibb, H.A.R. 1961. Islam Dalam Lintasan Sedjarah. Jakarta: Bhratara.
- Gonggong, Anhar. 1992. Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak. Jakarta: Grasindo.

- Hadisutjipto, S.Z. 1996. *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Hadjar Dewantara, Ki. 1952. *Taman Siswa 30 Tahun 1922-1952*. Yogyakarta: Tanpa Nama Penerbit.
- Haidar, M. Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hakiem, Lukman. 1993. *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan Biografi Dr. Anwar Harjono S.H*. Jakarta: Media Da'wah.
- Hall, D.G.E. 1976. *A History of South - East Asia*. Third Edition. London: The Macmillan Press Ltd.
- Hall, John Whitney. 1984. *Japan From Prehistory To Modern Times*. Tokyo: Charles E. Tuttle Co.
- Hamka, Buya. 1960. *Tasawuf Modern*. Tjetakan Kesepuluh. Jakarta: Djajabakti.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Yayasan Nurul Iman.
- Hartisekar, Markonia, dkk. 1999. *Mewaspada! Kuda Troya Komunisme Di Era Reformasi*, Jilid 1-5. Jakarta: Pustaka Sarana Kajian.
- Hartono, Chris, tt. *Ketionghoaan dan Kekristenan Latar belakang dan panggilan Cereja 2 yang berasal Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hasan, Erwin M. 2002. *Gerakan Pemuda Pelajar Berjuang Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI*. Jakarta: Gerakan Nasional Patriot Indonesia.
- Hassan, A. 1956. *Al Furqan Tafsir Qur'an*. Surabaya: Al-Ikhwan.
- \_\_\_\_\_. 1972. *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: Persatuan Islam.
- \_\_\_\_\_. 1981. *An Nubuwah Mengenal Muhammad Bukti-Bukti Kebenaran Nabi Muhammad saw*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasymy, A. 1993. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam Di Indonesia Kumpulan Prasaran Seminar di Aceh*. Bandung: Al-Maarif.
- Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- \_\_\_\_\_. 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Hegel, Georg W.F. 1991. *The Philosophy of History*. New York: Prometheus Books, Buffalo. Heilbroner
- Robert L. 1962. *The Making of Economic Society*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Herkusumo, A. P. 1984. *Chuo Sangi-In, Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Rosda Jayaputra.
- Hillenbrand, Carole. 2005. *Perang Salib Sudut Pandang Islam*. Penerjemah: Heryadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hitti Phillip K. 2008. *History of the Arabs*. Penerjemah: R.Cecep Lukman Yasin, Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hitler, Adolf. 1992. *Mein Kampf* Translated by Ralph Manheim. London: Pimlico.

- Hurip, Mutakat. 1990. Penjelasan Perihal Panji-Panji Pataka Vandel-Daidanki, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Majalah Peta.
- Hurley, Andrew. 1999. One Nation Under Israel. Scottsdale:Truth Press.
- Husain Haekal, Muhammad. 1972. Sedjarah Hidup Muhammad. Terjemahan: Ali Audah. Jakarta: Tintamas.
- Husaini, Adian. 2009. Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Ichimura S. & Koentjaraningrat. 1976. Indonesia Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia.
- Jam'ah, Ahmad Khalil dan Syaikh Muhammad. 1427 H/2007 M. Istri Istri Para Nabi. Jakarta: Darul Falah.
- Janowitz, Morris. 1971. The Military in the Political Development of New Nations, An Essay In Comparative Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.
- Jassin H.B. 1982. Bacaan Mulia. Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942.
- Kahin, McTurnan. 1970. Nationalism and Revolution Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. PRRI: Pergolakan Daerah Atau Pemberontakan. Jakarta: Panitia Peringatan dan Media Dakwah.
- Kartodirdjo, Sartono. 1978. Protest Movement in Rural Java A Study of Agrarian Unrest in The Ninetieth and Early Twentieth Centuries. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 1982. Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, Dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kasdi, Aminuddin. 2009. Kaum Merah Menjara. Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur. Surabaya: Penerbit YKCB dan CICS.
- Khaliil, Shauqi Abu. 2003. Atlas of The Quran Places, Nations, Landmarks. Riyad: Darussalam.
- Khoo, Gilbert. 1970. A History of South East Asia Since 1500. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kohn, Hans. 1961. Nasionalisme Arti dan Sedjarahnja. Tjetakan Kedua. Terjemahan Sumantri. Jakarta: Pembangunan.
- Kroef, Jusus M. van der. 1971. Indonesia Since Sukarno. Singapore: Asia Pasific Press.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan dan Ummat.
- Kuzman, dan Lebra, Joyce. 1986. Day of the Bomb. New York: Mc Graw Hill Book Co.

- \_\_\_\_\_. 1988. Tentara Gemblengan Jepang. Penerjemah Pamudji. Pustaka Sinar Harapan.
- Lehman, Jean Pierre. 1982. *The Roots of Modern Japan*. Hongkong: The Macmillan Press Ltd.
- Lenczowski, George. 1960. *The Middle East in World Affairs*. Cornell University Press.
- Leur, J.C. van. 1955. *Indonesian Trade and Society*. W.van Hoeve Ltd. The Hague.
- Lubis, Nabilah. 1996. Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makasari: Menyikap Intisari Segala Rahasia. Bandung: Mizan.
- Maddox, Robert James. 1992. *The United States and World War II*. San Francisco: Westview Press.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mahpudi dkk. 2011. *Pak Harto. The Untold Stories*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Majid, Dien & Darmiati. 1999. *Jakarta, Krawang, Bekasi dalam Gejolak Revolusi Perjuangan Moeffreni Moe'min*. Jakarta: Penerbit Keluarga Moeffreni Moe'min.
- Malik, Adam. 1970. *Riwajat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Tjetakan Kelima. Jakarta: Widjaja.
- Mangkusasmoro, Prawoto. 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi*. Jakarta: Hudaja.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Airlangga.
- Martha, Ahmaddani G, dkk. 1985. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Dikbud RI.
- Marx, K. 1955. *K.Marx and F.Engels On Religion*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
- Masnun, H. 2007. *Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Al-Madjid*. Tanpa Kota Penerbit: Pustaka Al-Miqdad.
- Ma'shum, Saifullah. 1998. *Kharisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan.
- Maulani, Z.A. 2002. *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Penerbit Daseta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Mengapa? Barat Menfitnah Islam*. Jakarta: Penerbit Daseta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*. Jakarta: Penerbit Daseta.
- Mestoko, Sumarsono, dkk, 1986. *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Millard, E. Willard. 1963. *Global Geography*. New York: Thomas Y. Corwell.
- Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS.
- Muhammad, Abdul Mun'im. 2007. *Khadijah The True Love Story of Muhammad*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Muhammad, Yusuf. 2003. *Muzakarah Jami'iyyah Dentuman Kritisme Ideologi*. Bandung:

- Media Cendekia.
- Musaddad, Anwar. 1999. Pemikiran dan Pengabdian Prof. K.H.Anwar Musaddad Memori Ulang Tahun Ke-90. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Press.
- Mustofa, Baihaqi. 2005. K.H.M. Rusyad Nurdin Ulama, Pejuang, Politikus, Pemimpin Demokrat, Pendidik, dan Pendakwah. Jakarta: Multipro.
- Muzakkar, Kahar. 2008. Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia Kritik atas Pemikiran Politik Pemerintahan Presiden Soekarno. Bandung: Segar Arsy.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kota Gede Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Napitupulu O.L.1972. Perang Batak Perang Sisingamangaradjaja. Djilid I. Jakarta: Yayasan Pahlawan Nasional Sisingamaradjaja.
- Nasution, Harun. 1990. Thoriqot Qoditiyyah Naqsabandiyah Sejarah, Asal Usul, dan Perkembangannya Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Tasikmalaya.
- Natsir, M. 1954. Capita Selecta 1. Bandung: W.Van Hoeve.  
\_\_\_\_\_. 1957. Capita Selecta 2. Jakarta: Pustaka Pendis.  
\_\_\_\_\_. 2008. Mosi Integral Natsir dari RIS ke NKRI. Panitia Peringatan dan Media Dakwah.  
\_\_\_\_\_. 2008. Politik Melalui Jalur Dakwah. Panitia Peringatan dan Media Dakwah.
- Noer, Deliar. 1991. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.  
\_\_\_\_\_. 2000. Partai Islam Di Pentas Nasional. Bandung: Mizan.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. Naskah Proklamasi Jang Otentik dan Rumusan Pantjasila Jang Otentik. Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.  
\_\_\_\_\_. 1971. The Peta Army In Indonesia 1943-1945. Jakarta: Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History.  
\_\_\_\_\_. 1979. Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Novak, Michael. 1973. The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: The Free Press.
- Nu'mani, Syibli. 1981. Umar Yang Agung Sejarah Dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II. Bandung: Pustaka ITB.
- Peng Koen, Auwjonq. 1962. Perang Pasifik 1941-1945. Jakarta: Kinta.
- Pinardi. 1964. Sekarmadji MaridjanKartosuwirjoKisah Lahir dan Dijatuhnya Seorang Petualang Politik. Jakarta: Aryaguna.
- Poespowardjo, Soerjanto. 1991. Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosial Budaya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poeze, Harry A. 2011. Madiun 1948 PKI Bergerak. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV.
- Potter, E.B. (ed) et. al. 1960. The Great Sea War. New Jersey: Prentice Hall.
- Pringgodigdo, A.K. Mr.1960. Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia. Tjetakan Keempat.

- Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Prodjokusumo, H.S. 1987. *Muhammadiyah, Pendidikan Pesantren dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit A.B.M.
- Purcell, Victor. 1952. *The Chinese In Southeast Asia*. London: Oxford University Press.
- Pye, Lucian W. 1967. *Southeast Asia's Political Systems*. New Jersey: Prentice - Hall, Inc.
- Ramadhan Al-Buthy, M. Said. 1999. *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*. Jakarta: Robbani Press.
- Rasjidi, H.M. tt. *Islam dan Kebatinan*. Ramadhan.
- Al-Buthy, M. Said. 1999. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia.
- Reid, Anthony. 1969. *The Contest For North Sumatra Atjeh, the Nederlands and Britain 1858-1898*. New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roem, Mohamad. 1969. *Karena Benar Dan Adil*. Jakarta: Hudaya.
- \_\_\_\_\_. 1970. *Pentjulikan, Proklamasi dan Penilaian Sedjarah*. Semarang: Hudaya dan Ramadhani.
- \_\_\_\_\_. 1972. *Bunga Rampai Dari Sedjarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan, Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. tt. *Setahun Sesudah Muktamar*. Jakarta: Kramat Empat Lima.
- Sagimun M.D. 1965. *Pahlawan Dipanegara Berjuang Bara Api Kemerdekaan Nan Tak Kundung Padam*. Jakarta: Gunung Agung.
- Saidi, Ridwan H. 1984. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. Jakarta: CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Islam dan Nasionalisme Indonesia Mengungkap dokumen sangat eksklusif 1920 s/d 1950-an tentang pemikiran pemimpin Islam mengenai masalah kebangsaan*. Jakarta: LSIP.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Fakta & Data Yahudi Di Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: Khalifa.
- Salam, Solihin. 1961. *Hadj Agus Salim. Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Djaja Mumi.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Bung Karno Putera Fajar*. Jakarta: Gunung Agung.
- Salamah, Ummu. 2001. *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat*. Garut: Yayasan Musaddadiyah.
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Santosa, Khalid O. 2006. Jejak-jejak Sang Pejuang Pemberontak Pemikiran, Gerakan & Ekspresi Politik S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureuh. Bandung: Segar Arsy.
- \_\_\_\_\_. 2007. Manusia di Panggung Sejarah Pemikiran dan Gerakan Tokoh-tokoh Islam. Bandung: Segar Arsy.
- Sato, Shigeru. 1994. War, Nationalism and Peasants Java under the Japanese Occupation 1942-1945. New York: M.E. Sharpe.
- Scherer, S. Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schimmel, Annemarie. 1992. Dan Muhammad Adalah Utusan Allah. Bandung: Mizan.
- Setyo, Bambang. 2011. Tela'ah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Aqidah Islam. Jakarta: Masyarakat Peduli Syariah.
- Siauw Giap, The. 1986. Cina Muslim Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Ukhluwah Islamiyah.
- Siddiq, Achmad. 1985. Islam, Pancasila dan Ukhluwah Islamiyah. Jakarta: PBN.
- Siddiqi, Mazheruddin. 1975. The Quranic Concept of History. Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. Wawasan Al-Quran. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1997. Tasir Al-Qur'an Al-Karim. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Simuh, 1988, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati, Universitas Indonesia Press. Djakarta
- Sinansari Ecip, S. (Ed) 1415 H/1994 M, NU Khittah dan Godaan Politik, Mizan, Bandung.
- Singodimedjo, Kasman, 1982, Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Bulan Bintang. Jakarta
- Slametmuljana, 1968, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Djilid I. Jakarta: P.N.Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1969. Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Djilid II. Jakarta: P.N.Balai Pustaka.
- Smith, Anthony. 1980. The Geopolitics of InformationNew York: Oxford University Press.
- Smith, W.C. 1964. Islam Dalam Sedjarah Modern. Diterjemahkan: Abu Salamah. Jakarta: Bhataro.
- Sosrodihardjo, Soedjito. 1972. Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa. Yogyakarta: Penerbit Karya.
- Soebardjo, Ahmad. 1977. Lahirnya Republik Indonesia. Jakarta: Kinta.
- Soeharto, R. Dr. 1982. Saksi Sejarah Mengikuti Perjuangan Dwitunggal. Jakarta: Gunung Agung.
- Soeharto, 1989. Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Jakarta: Lamtoro Gung Persada.

- Soegondo, R.M.G. tt. *Ilmu Bumi Militer Indonesia*. Djilid I. Jakarta: Pembimbing.
- Soerojo, Soegiarso. 1988. *Siapa Manabur Angin Akan Menuai Badai (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno)*. Jakarta: CV Sri Murni.
- Soetanto, Himawan. 1994. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun" Siliwangi Menumbas PKI/Moeso 1948*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Madiun dari Republik ke Republik Aspek Militer Pemberontakan PKI Madiun 1948*. Jakarta: Kata Hasta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Yogyakarta 19 Desember 1948*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soewargana, Oejeng. 1974. *Driemaal Gefaald De Mislukte Communistische Coup van 1965*. Jakarta: Yayasan Paritrama.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kawan Dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Diterjemahkan: Gazali Dunia, Gazalba, Amrin Thaib. Jakarta: Panitia Penerbit.
- \_\_\_\_\_. 1966. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Penerjemah: Dra. Kistijah, Nj. Rochmuljati. Jakarta: Panitia Penerbit.
- Sudiro, 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah.
- Subandi, Hidayat. 2009. *44 Tahun Tragedi G-30-S/PKI*. Jakarta: Maju Jaya.
- Suhelmi, Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Darul Falah.
- Sukarno, 1947. *Sarinah Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitya Penerbit.
- \_\_\_\_\_. 1951. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Penerbitan S.K. Seno.
- \_\_\_\_\_. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitya Penerbit.
- Sularman. 1428 H/2007 M. K.H. Ahmad Sanusi Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen. Bandung: MUI.
- Sumarsono, Tatang (ed). 1998. *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*. Bandung: Yayasan Universitas Siliwangi.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Mansur A. 1980. *Fragmenta Islamica*. Bandung: Suara Istiqamah.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pemberontakan Tentara Peta Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiri.

- \_\_\_\_\_. 1999. Amerika Serikat Menolak Presiden Wanita. Jakarta: Darul Falah.
- \_\_\_\_\_. 2002. Al Quran dan Kelautan Sejarah Maritim yang Terlupakan. Jakarta: Swarna Bhumi.
- Suswadi, 2003. Sumpah Pemuda Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Sutomo, Bung Tomo. 2008. Menembus Kabut GelapBung Tomo Mengugat. Pikiran Surat dan Artikel Politik 1955 -1980. Jakarta: Visimedia.
- Suwangsa, Aat dkk. 1995. Ir. R.H. Ukar Bratakusumah Dari Jaman Penjajahan Hingga Jaman Pembangunan. Bandung: Yayasan Kudjang.
- Tabah, Anton. 2009. Jenderal Besar Nasution Bicara Tentang G-30-S/PKI. Klaten: Penerbit CV Sahabat.
- Thoha, Ahmadie. 1986. Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Thohir, Ajid. 2002. Gerakan Politik Kaum Tarekat. Bandung: Pustaka Hidayah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjokroaminoto, H.O.S. 1963. Islam dan Sosialisme. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia.
- Toynbee, Arnold J. 1947. A Study Of History Abrigement of Volumes I-VI, Abrigement of Volumes VII – X, By D.C. Somervell. New York: Oxford University.
- \_\_\_\_\_. 1951. War and Civilization. London: Oxford Unibery Press.
- Vlekke, Bernard H.M. 1961. Nusantara A History of Indonesia. Bruxelles: A. Manteau.
- Wallerstein, Immanuel. 1991. Geopolitics and Geoculture Essays on the changing world-system. Cambridge University Press.
- Wange, Vincent. 1999. Direktori Partai Politik Indonesia. Jakarta: Permata Media Komunika.
- Weigert, Hans W. 1957. Principles of Political Geography. New York: Appleton Century-Crofts.Inc.
- Wildan, Dadan. 1995. Sejarah PerjuanganPersis 1923-1983. Bandung: Gema Syahida.
- \_\_\_\_\_. 2000. Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia. Bandung: Persis Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Wilis, Abdul Hamid. 2011. Aku Jadi Komandan Banser Barisan Ansor Serbaguna Surodakan, Sumbergin. Trenggalek.
- Williams, T. Harry. 1963. A History of The United States. New York: Alfred A. Knopf.
- Wiranatakoesoema, R.A.A. 1941. Riwayat Kandjeng Nabi Mohammad S.A.W. Bandung: Regent Bandoeng-Islam Studieclub.
- Wirjosukarto, A.H.1968. Rangkaian Mutu Manikam. Kumpulan Buah Pikiran Kjahi

- Hadji Mas Mansur 1896-1946. Surabaya: Penjebar Ilmu & Al-Ichsan.
- Yahya, Iip D. 2008. *Oto Iskandar Di Nata. The Untold Stories*. Bandung: FDWB Publishing.
- Yuanzhi, Kong. 2007. *Muslim Tionghoa Cheng Ho*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Yunus, H. Anas M. 2009. *Cerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya Sejarah M. Junus Djamiel*. Bandung: Bina Biladi Press.
- Yudo Husodo, Siswono. 1985. *Warga Baru Kasus Cina Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Yusufpati, Miftah. 2007. *HM Soeharto Membangun Citra Islam*. Jakarta: AsiaMark.
- Zahri, Mustafa. 1976. *Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Zakaria, Rafiq. 1989. *The Struggle Within Islam*. Australia: Penguin Books.
- Zara, M. Yuanda.. 2007. *Sakura di Tengah Prahara: Biografi Ratnasari Dewi Sukarno*. Yogyakarta: Ombak.
- Zbigniew, Brzezinski. 1990. *Kegagalan Besar Muncul Dan Runtuhnya Komunisme Dalam Abad Kedua Puluh*. Terjemahan: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zuhri, Saifuddin. 1965. *Agama Unsur Mutlak Dalam Nation Building*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penyebar Al-Islam.

# Indeks

## A

- A.A. Maramis 132, 133, 134, 174, 228, 268, 269  
Abdoel Kahar Moezakkir 13, 41  
Abdoel Moeis 51, 67, 259, 461, 472  
Adam Malik 151, 178, 188, 392, 406, 475  
Agoes Salim 54, 64, 67, 96, 126, 132, 133, 134, 183, 187, 196, 198, 259, 262, 268, 276, 277, 472, 475, 496  
A.H. Nasution 61, 92, 97, 228, 222, 296, 341, 354, 391, 357, 434, 503, 506  
Amir Sjarifoeddin 55, 115, 121, 176, 177, 178, 183, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 225, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 255, 258, 260, 261, 267, 299, 302, 303, 251, 323, 324, 328, 333, 364, 472, 473, 349, 484  
Andi Azis 309, 310, 311, 323, 327, 400  
Angkatan Perang Ratu Adil 309

## B

- Barisan Sabilillah 183, 185, 196, 202, 208, 212, 213, 214, 220, 221, 245, 254, 301, 200, 342, 351  
Boedi Oetomo 8, 9, 36, 42, 51, 53, 55, 126, 243, 245  
Boeng Tomo 192, 204, 206, 208, 209, 216

## C

- Centraal Sjarikat Islam 5, 6, 8, 49, 50, 51, 52, 58, 67, 187, 243, 259, 260, 461, 472, 367

## D

- Daoed Beoereoeh 188

Daroel Islam 185, 187, 188, 346

Dasa Sila Bandung 159, 166, 273, 353

Demokrasi Terpimpin 364, 365, 373, 374, 380, 388, 394, 395, 408, 415, 417, 444, 367

D.N. Aidit 115, 365, 382, 384, 385, 392, 394, 402, 403, 404, 407, 417, 418, 428, 431, 432, 435, 437, 462, 463, 466, 467, 469, 473, 474, 383, 419, 484

## F

Fatmawati 148, 149, 151, 152, 154, 194, 198, 207, 306, 305, 310, 432

## H

Hasjim Asj'ari 33, 52, 55, 144, 183, 208, 216, 239, 474, 540, 542

## J

Joko Widodo 546, 547, 548, 566

## K

Kabinet Parlementer 178, 180, 193, 195, 231, 324, 330

Kahar Moezakkar 188, 311, 314, 327, 350

Ki Hadjar Dewantara 42, 44, 47, 52, 174, 175, 243, 373

Konferensi Asia Afrika 159, 166, 273, 353, 354, 385, 415, 417, 435, 410, 412, 430, 332, 523

Konferensi Islam Afrika Asia 159, 352, 415, 417, 418, 421, 423, 432, 414, 420, 517

## L

Laksamana Maeda 151, 152, 154, 162, 169

Leimena 190, 228, 276, 278, 281, 313, 321, 334, 337, 357, 371, 417, 431, 432

## M

Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al Manafi xi, 495

Madjlis Islam A'la Indonesia 7, 9, 10, 11, 13, 14, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50, 53, 161, 240

Masjoemi 42, 47, 96, 101, 102, 106, 126, 143, 161, 172, 180, 182, 183, 185, 188, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 202, 206, 221, 228, 229, 230, 235, 236, 238, 239, 240, 247, 249, 250, 286, 301, 302, 181, 184, 200, 300, 323, 337, 352, 476, 491

- Mas Mansoer 9, 42, 44, 45, 47, 51, 54, 81, 126, 187, 474  
Moestopo 77, 306, 305  
Mohammad Hatta 14, 42, 47, 124, 128, 131, 132, 137, 146, 151, 152, 154, 155, 161, 163, 165, 166, 175, 188, 192, 193, 194, 195, 201, 225, 234, 236, 238, 240, 243, 246, 250, 252, 253, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 302, 304, 158, 164, 275, 222, 318, 323, 329, 344, 355, 364, 371, 373, 378, 380, 387, 469, 476, 320, 370, 316, 349, 367, 494, 573  
Mohammad Natsir 132, 170, 172, 183, 191, 196, 198, 199, 206, 253, 276, 277, 279, 286, 300, 308, 313, 315, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 379, 388, 395, 418, 475, 320, 355, 359, 316, 419, 393, 322, 317, 490, 496, 497, 502, 527  
Mohammad Roem 182, 286, 326, 393, 396, 475, 393  
Mohammad Yamin 128, 131, 132, 133, 134, 193, 233, 261, 333, 334, 342, 343, 392, 473, 474, 331

## N

- Negara Islam Indonesia 185, 187, 188, 274, 314, 315, 323, 328, 347, 350, 352, 345, 349, 571

## O

- Oelama Ahli Soennah Wal Djamaah 7  
Oelama Wahabi 7  
Oemar Said Tjokroaminoto 51, 67, 259, 391, 589  
Orde Baru 54, 56, 75, 76, 131, 298, 292, 441, 461, 462, 476, 393, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 498, 500, 502, 503, 506, 507, 510, 517, 518, 523, 532, 534, 535, 551  
Ordonasi Perkawinan 171, 285  
Otto Iskandardinata 45, 46, 111, 172, 178, 194, 171, 506

## P

- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 124, 137, 136, 152, 154, 163, 165, 172, 175, 177, 235, 240, 302, 158, 164, 181, 344, 352, 364, 387  
Partai Komunis Indonesia 191, 251  
Partai Nahdlatul Ulama 161, 188, 297, 337, 339, 360, 361, 373, 374, 401, 402, 456, 458, 476, 489

- Partai Sjarikat Islam Indonesia 7, 32, 35, 38, 40, 47, 53, 54, 97, 106, 109, 116, 126, 121, 175, 180, 183, 188, 198, 199, 238, 302, 285, 324, 339, 472, 496  
 Pembela Tanah Air 4, 24, 30, 41, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 127, 134, 99, 109, 142, 149, 151, 152, 154, 155, 178, 194, 198, 202, 164, 570, 574, 590  
 Pemerintah Darurat Republik Indonesia 234, 262, 265, 267, 269, 266, 398  
 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia 378, 379  
 Perang Asia Timur Raya 2, 4, 6, 7, 11, 12, 20, 32, 33, 37, 48, 57, 59, 64, 68, 84, 86, 88, 90, 96, 118, 120, 128, 131, 156, 193, 204, 227, 270, 421  
 Perang Gerilya 261, 265, 274, 295, 298, 215  
 Perang Sabil 176, 209, 210, 213, 214, 218, 221, 224, 196, 176, 209, 210, 213, 214, 218, 221, 224, 196, 346, 589  
 Peristiwa Rengasdengklok 116, 149, 151, 570  
 Piagam Djakarta 133, 134, 136, 152, 163, 165, 166, 169, 175, 176, 387, 388, 390, 410, 503  
 Prawiranegara 147, 178, 183, 198, 199, 228, 234, 262, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 281, 286, 266, 313, 321, 398, 493, 503

**R**

- R.A.A. Wiranata Koesoemah 8  
 Radjiman Wedijodiningrat 55, 126, 137, 145, 243  
 Republik Indonesia Serikat 185, 232, 262, 274, 279, 280, 282, 283, 308, 310, 314, 318, 323, 327, 329, 316

**S**

- Sajoeti Melik 150, 153, 162, 233  
 Samanhoedi 51, 54, 187, 517  
 Samaoen 52, 191, 259, 261, 365, 417, 473, 474  
 Sjarif Hidajatoelah 140  
 S.M. Kartosoewirjo 54, 180, 183, 185, 187, 188, 236, 238, 262, 274, 301, 189, 314, 315, 323, 327, 328, 329, 344, 350, 352, 469, 345, 571  
 Soekarno 14, 45, 46, 47, 53, 127, 128, 132, 133, 137, 136, 129, 130, 146, 148, 150, 154, 155, 156, 159, 162, 173, 190, 192, 193, 195, 201, 224, 225, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 245, 246, 250, 252, 253, 254, 257, 259, 261, 262, 264, 267, 269, 274, 275, 276, 281, 282, 283, 293, 304, 158, 181, 275, 222, 305, 310, 311, 314, 315, 318, 319, 323, 325, 327, 328, 334,

341, 344, 346, 347, 350, 352, 355, 362, 364, 365, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 421, 423, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 435, 438, 439, 444, 447, 452, 453, 456, 458, 459, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 476, 477, 481, 320, 383, 396, 397, 407, 420, 448, 454, 479, 316, 416, 450, 349, 457, 367, 393, 434, 331, 484, 517, 523, 537, 576, 579

Soenan Goenoeng Djati 133, 140, 477, 481

Soetan Sjahrir 14, 148, 149, 151, 152, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 213, 224, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 243, 299, 302, 303, 324, 341, 364, 395, 397, 462, 367

Soetomo 8, 9, 10, 36, 53, 55, 126, 191, 192, 243, 245, 357, 358, 365, 392

Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX 277, 281, 309, 321, 333, 336, 337, 392

Supersemar 456, 459, 464, 471, 475, 434, 484

Syafrudin Prawiranegara 267

## T

Tan Malaka 115, 147, 148, 151, 188, 191, 193, 194, 208, 230, 233, 234, 243, 245, 259, 267, 304, 300, 323, 333, 339, 342, 365, 380, 392, 406, 473, 474, 484, 542, 572

Tentara Siliwangi 187, 246, 249, 254, 258, 262, 274, 328, 349

## W

Wachid Hasjim 55, 101, 133, 137, 163, 168, 172, 174, 178, 199, 240, 286, 287, 293, 167, 321, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 344, 387, 542

Wahab Chasboellah 51, 55, 81, 408, 474

Wikana 147, 148, 150, 151, 152, 198, 300, 365, 392, 470

## Z

Zainal Moestofa 62, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 102, 106, 93, 99, 189, 211, 189

# PROFIL PENULIS

Nama : Ahmad Mansur Suryanegara (22 Dzulhijjah 1353)  
Istri : Nia Kurniawati  
Ayah : Hasan Moekmin  
Ibu : Siti Aminah  
Alamat : Jalan Saturnus Raya 27 Bandung 40286 Tlp. (022) 7562194

## Pengalaman Mengajar

SMP Muslimin 1, 2, 4, Bandung  
SMP Yayasan Pendidikan Islam Bandung  
SGA Darul Hikam Bandung  
Ketua Seksi Sejarah SMP Muslimin 1 - 11 Bandung  
Universitas Padjadjaran - UNPAD Bandung  
Universitas Pasundan - UNPAS Bandung  
Universitas Islam Bandung - UNISBA Bandung - Purwakarta  
Universitas Islam Nusantara - UNINUS Bandung  
Universitas Wydiatama - UTAMA Bandung  
Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, IKIP, Bandung - Tasikmalaya  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, IAIN - SGD, Bandung  
Akademi Pendidikan Agama Islam, Major Makmun - APAI, Bandung  
Akademi Managemen, Informasi, Komputer Al Ma'soem - AMIK, Bandung  
Akademi Sekretaris dan Managemen Taruna Bakti - ASMTB, Bandung

## Anggota Organisasi

Pelajar Islam Indonesia - PII  
Ikatan Pelajar Muhammadiyah - IPM  
Pemuda Muhammadiyah  
Pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jawa Barat  
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Jawa Barat  
Pendiri Himpunan Mahasiswa Sejarah, UNPAD  
Himpunan Mahasiswa Islam, Bandung

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran, UNPAD  
Ikatan Sarjana Sastra Indonesia, UNPAD  
Korp Pegawai Republik Indonesia, UNPAD  
Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Jawa Barat  
Pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jawa Barat

**Anggota Pembina Pesantren - Masjid**

Pesantren Daruut Tauhid Bandung  
Pesantren Modern Baiturrahman Bandung  
Pesantren Al-Qur'an Babussalam Bandung  
Pesantren Al-Qur'an Ash-Shoffah Bandung  
Pendiri Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia - BKPMI Bandung  
Pendiri Badan Komunikasi Masjid Margahayu Raya dan Sekitarnya - BAKOMAS  
Masjid Istiqomah Taman Citarum Bandung  
Masjid Al-Jihad, UNPAD, Bandung  
Masjid Ibnu Sina, UNPAD, Sumedang  
Masjid Al-Asy'ari, UNISBA, Bandung  
Masjid Libasut Taqwa, STTT, Bandung  
Masjid Al-Makmur, STIEB, Bandung  
Masjid Al-Ikhlas, Margahayu Raya, Bandung  
Masjid At-Taqwa, Margahayu Raya, Bandung  
Masjid Ash-Shoffah, Bandung  
Masjid Muhammadiyah dan Madrasah Nurul Bardan, Sumedang

**Pembina Yayasan**

Yayasan Dana Al-Falaah Bandung  
Yayasan Al-Ma'soem Bandung  
Yayasan Al-Ukhuwwah Bandung  
Yayasan Suryanegara Bandung

**Karya Tulis**

**Artikel**

Benarkah 20 Mei Sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Harian ABADI. Senen, 19 Mei 1969 M, 2 Rabiul Awwal 1389 H  
Ummat Islam dan Sumpah Pemuda. Harian ABADI. Senin, 27 Oktober 1969 M, 16 Sya'ban 1389 H  
Renungan Hari Pahlawan. I-III. Harian ABADI. Senin - Kamis, 10 - 13 Nopember 1969 M, 30 Sya'ban - 3 Ramadhan 1389 H

- "Small China" Di Kalimantan Barat.* I - III. Harian ABADI. Rabu – Djum'at, 22-24 April 1970 M, 16 - 18 Shafar 1390 H
- Aksi Kebangkitan Rakjat Suku Daja.* I - II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 8 – 9 Djuni 1970 M, 3 - 4 Rabiul Awwal 1390 H
- 22 Djuni Hari Fakku Raqabah.* I-VII. Surat Kabar Umum GALA. 2 - 23 Djuli 1970 M, No. 139 - 145, Tahun Ke II
- Ulama dan Penguasa.* I-II. Harian ABADI. Rabu - Kamis, 7 - 8 Oktober 1970 M, 7 - 8 Sja'ban 1390 H
- Korupsi dan Pemilu.* I-II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 12 - 13 Oktober 1970 M, 12 - 13 Sja'ban 1390 H
- Gerombolan Tjina Komunis Kalimantan Barat.* I-II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 19 - 20 Oktober 1970 M, 20 - 21 Sja'ban 1390 H
- Buruh Tani Islam Indonesia Abad Ke-19.* I-II. Harian ABADI. 21 - 22 Oktober 1970 M, 21 - 22 Sja'ban 1390 H
- Sumpah Pemuda, Umat Islam, dan Bahasa Indonesia.* Harian ABADI. Sabtu, 24 Oktober 1970 M, 24 Sja'ban 1390 H
- Tanggung Djawab Ummat Islam Terhadap Penulisan Sejarah,* Harian ABADI. Sabtu, 15 Agustus 1970 M, 13 Djumadil Achir 1390 H
- Aku Titipkan Muhammadiyah ini Kepadamu.* Harian ABADI. Djum'at, 20 Nopember 1970 M, 21 Ramadhan 1390
- Wali Sanga Dan Media Dakwahnya.* I-II. Surat Kabar Umum KALA. Minggu Ke-I, 1970, No.11 Th.I dan Minggu Ke-V, 1971, No.12 Th.II
- Geopolitik.* I - III. Harian ABADI. Senin - Rabu, 22 - 24 Februari 1971 M, 26 - 28 Dzulhijjah 1390 H
- Snouck Hurgronje dan Ulama.* Harian ABADI. Selasa, 22 Djuni 1971 M, 28 Rabiul Akhir 1391 H
- Fasisme Jepang dan Ummat Islam.* I-II. Harian ABADI. Jumat - Sabtu, 9 - 10 Juli 1971, 16 - 17 Rabiul Awwal 1391 H.
- HOS Tjokroaminoto dan Ratu Adil.* Harian ABADI. Selasa, 13 Nopember 1971 M, 17 Rabiul Awwal 1391 H.
- Pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang Kemauan, Kekuatan, Kemenangan, Kekuasaan, Kemerdekaan.* I - II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 13 - 14 Maret 1972 M
- Bolshevisme dan India Bagaimana Membendung Pengaruh Komunis.* Harian ABADI. Senen, 27 Maret 1972 M, 11 Shafar 1392 H.
- Peristiwa Banten 12 Nopember 1926 Benarkah Sebagai Pemberontakan Komunis Indonesia.* PANJI MASYARAKAT. No. 118. Tahun XIV. 1 Januari 1973 M, 26 Dzulhijjah 1392 H

- Perlwanan Pessantren Tehadap Ekspansi Politik Imperialis Belanda. PANJI MASYARAKAT. No. 127. Tahun XIV. 15 Mei 1973 M.
- Ummat Islam dan Kebangkitan Nasional. I - II. Harian ABADI. 21 - 22 Mei 1973 M, 19 - 20 Raibul Akhir 1393 H
- Fatahillah dan Dakwahnya. PANJI MASYARAKAT. No. 132 Th.XV. 1 Agustus 1973 M
- Undang Undang Perkawinan Dan Reaksi Ummat Islam, Tunduk Dibawah Ordonantie Perkawinan Hukumnya Haram, Ungkapan Sejarah Tahun 1937. PANJI MASYARAKAT. No 136. Tahun XV.1 Oktober 1973 M, 4 Ramadhan 1393 H
- Pemilu dan Perkawinan. PANJI MASYARAKAT. No. 141.Tahun XV, 15 Desember 1973 M, 20 Dzulhijjah 1393H.
- Pendudukan dan Politik Jepang Di Indonesia. Panji Masyarakat. No.145. Tahun XV. 15 Februari 1974 M, 22 Muhamarram 1394 H.
- Gerombolan Cina Komunis PGRS dan PARAKU. PANJI MASYARAKAT. No. 156 dan 157, Tahun XVI. 1 dan 15 Agustus 1974 M, 12 dan 26 Rajab 1394 H.
- Jawaban Ummat Islam Filipina Terhadap Tantangan Kristenisasi. PANJI MASYARAKAT. No.164. Tahun XVI. 1 Desember 1974 M, 17 Dzulhijjah 1394 H.
- Pengaruh Tehnologi Terhadap Perkembangan Agama. PANJI MASYARAKAT. No.172. Tahun XVII. 1 April 1975 M, 19 Rabiul Awwal 1395 H.
- Bencana Wabah Alkoholisme. PANJI MASYARAKAT. No. 173. Tahun XVII. 15 April 1975 M, 3 Rabiul Akhir 1395 H
- Mentuna Politikan Ummat Islam Indonesia. I – III. PANJI MASYARAKAT. No. 180, 181, dan 183. Tahun XVII. 1, 15, Agustus dan 15 September 1975 M, 23 Rajab, 7 Sya'ban dan 9 Ramadhan 1395 H.
- Maksud dan Kegunaan Studi serta Penelitian Sejarah Ekonomi Indonesia. I -II. PANJI MASYARAKAT. No. 189 dan 190. Tahun XVII. 15 Desember 1975 M dan 1 Januari 1976 M, 12 dan 28 Dzulhijjah 1395 H.
- Si Singamangaraja XII Gugur Sebagai Pahlawan Islam. PANJI MASYARAKAT. No.207. Tahun XVIII. 15 September 1976 M, 20 Ramadhan 1396 H
- Propaganda Senjata Utama Perang Urat Syaraf Dan Pembentuk Opini Publik. PANJI MASYARAKAT. No. 213. Tahun XVIII. 15 Desember 1976 M, 13 Dzulhijjah 1396 H.
- Gerakan Protes Pesantren Sukamanah, Perlwanan Petani Muslim Sukamanah Singaparna, Terhadap Balatentara Jepang. I-II. PANJI MASYARAKAT. No.221 dan 222. Tahun XVIII. 15 April - 3 Mei 1977 M, 26 Rabiul Akhir – 16 Jumadil Awwal 1397 H.

- Menghadapi Problem Politik Aliran Kepercayaan.* PANJI MASYARAKAT. No. 236. Tahun XIX. 1 Desember 1977 M, 19 Dzulhijjah 1397 H
- Proses Perubahan Tingkah Laku Dalam Operasi Revolusi.* PANJI MASYARAKAT. No. 244. Tahun XIX. 1 April 1978 M. 22 Rabiul Awwal 1398 H
- Peranan Ulama Dalam Pendidilan. I-II.* PANJI MASYARAKAT. No. 248 - 249. Tahun XIX, 1 - 15 Juni 1978 M, 24 Jumadil Akhir - 9 Rajab 1398 H
- Pengaruh Busana Terhadap Pemakainya.* PANJI MASYARAKAT. No. 250. Tahun XX. 1 Oktober 1978, 28 Syawwal 1398.
- Makna Media Suara Istiqamah.* SUARA ISTIQAMAH. No. 41/Th.XV/78. Jumat 13 Oktober 1978 M, 18 Hapit 1398 H
- Mengenang 10 Nopember 1945. Pahala dari Allah Bagi Para Pahlawan.* SUARA ISTIQAMAH . No. 45/ Th. XVI/ 78. Jumat. 10 Nopember 1978 M, 9 Dzulhijah 1398 H
- Bencana Hidup Mewah. Mabuk Kemenangan Awal Kehancuran.* SUARA ISTIQAMAH. No. 48/ Th.XV/78. Jumat. 17 Nopember 1978 M, 16 Rayagung 1398 H
- Mengamati Tingkah Laku Politik.* PANJI MASYARAKAT. No.260. Tahun XX. 1 Desember 1978, 30 Dzulhijjah 1398 H
- Mengikuti Agama Nabi Ibrahim.* SUARA ISTIQAMAH. No. 50 / Th. XV/ 78. Jumat. 8Desember 1978 M, 8 Muharram 1399 H
- Tugas Kerasulan Isa Dalam Al Quran.* SUARA ISTIQAMAH. No. 52 / Th. XV / 78. Jumat. 15 Desember 1978 M, 15 Muharram 1399 H
- Alkoholisme dan Kejahatan.* SUARA ISTIQAMAH. No.1 /Th. XV/ 79. Jumat. 5 Januari 1979 M, 6 Shafar 1399 H.
- Tugas Kerasulan Musa Menghadapi Firaun.* SUARA ISTIQAMAH. No. 3/Th. XV/79. Jumat 19 Januari 1979 M, 20 Shafar 1399 H.
- Orang Yahudi Menyalakan Api Peperangan.* SUARA ISTIQAMAH. No. 14/Th.XV/ 79. Jumat 6 April 1979 M, 9 Jumadil Awwal 1399 H.
- R.A. Kartini Seorang Muslimat Yang Melawan Adat.* SUARA ISTIQAMAH. No. 15 /Th XV / 79. Jumat. 20 April 1979 M, 23 Jumadil Awwal 1399 H.
- Peranan Ulama dalam Reformasi Pendidikan di Indonesia.* SUARA ISTIQAMAH. No. 18 / Th XV / 79. Jumat. 11 Mei 1979 m. 15 Jumadil Akhir 1399 H.
- Peranan Ulama dalam Perang Kemerdekaan.* PANJIMASYARAKAT. No. 277. Th XXI. 15 Agustus 1979 M, 22 Ramadhan 1399 H.
- Peranan Ulama dalam Gerakan Nasional.* SUARA ISTIQAMAH. No. 20 Th XV/ 79. Jumat. 18 Mei 1979 M, 21 Jumadil Akhir 1399 H.
- Perlawanannya Santri Jawa Tengah 1825-1830.* Bulletin KULLIYATUL MUJAHIDIN. NO.18. Juni 1979 M, Rajab 1399 H.

- Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. SUARA ISTIQAMAH. No. 33/Th XV/79. Jumat.17 Agustus 1979 M, 24 Ramadhan 1399 H
- Kerjasama Mempercepat Proses Kemenangan. SUARA ISTIQAMAH. No. 1 /Th XVI/ 80. Jumat. 4 Januari 1980 M, 16 Shafar 1400 H
- Ummat Islam Indonesia dalam Perspektif Sejarah. PANJI MASYARAKAT, No. 284.
- Peranan Lasykar Hizbulullah dalam Perang Sabil Ambarawa. PANJI MASYARAKAT, No. 304.
- Kembali Ke Al Quran. SUARA ISTIQAMAH. No. 4/Th XVI/ 80. Jumat. 25 Januari 1980 M, 7 Rabiul Awwal 1400 H
- Menjaga Kehidupan yang Jauh dari Kemiskinan. SUARA ISTIQAMAH. No. 7/ Th. XVI/80. Jumat. 15 Februari 1980 M, 28 Rabiul Awwal 1400 H
- Politik Seberang Lautan Amerika Serikat. MERDEKA, Jum'at, 21 Oktober 1983.
- Tanda-Tanda Keruntuhan Peradaban Barat. MERDEKA, Jum'at, 4 Nopember 1983
- Batas Pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. PANJI MASYARAKAT. Tahun XXXII. 21 - 30 September 1990 M, 2-11 Rabiul Awwal 1411H.
- Konsep Wisata Ziarah dalam Perkembangan Islam di Jawa Barat. I - II. MEDIA PEMBINAAN. No. 1 dan 2/XXI, 1994
- Proklamasi Terjadi pada Bulan Ramadhan. HIKMAH. Minggu IV. Pebruari 1994 M, Ramadhan 1414 H.
- Langkah Persis dalam Pengindonesiaan Islam. HIKMAH. Minggu I. 1 September 1995 M, 5 - 11 Rabiul Tsani 1416 H.
- Bila Umat Islam Terjebak Provokasi Etnis dan Religi. HIKMAH. Minggu Ke-3, Januari 1995 M, 16 - 22 Sya'ban 1415 H
- Bila Revolusi Telah Berlalu. HIKMAH. Minggu I. Agustus 1995 M, 7 - 13 Rabiul Awwal 1416
- Pembelokkan Sejarah Itu Disengaja. HIKMAH. Minggu IV. September 1995, 26 Rabiul Tsani – 3 Jumadil Awwal 1416 H.
- Periode Madinah Awal Menta Kehiuapan. HIKMAH. Minggu IV. Juli 1996 M.
- Kriminalitas Sebagai Media Kudeta. HIKMAH. 11 - 17 Ramadhan 1418 H
- Perang Agama Di Indonesia. HIKMAH. 8 - 14 Dzulqaidah 1418 H
- Oemar Said Tjokroaminoto, Pembangkit Gerakan Nasional. HIKMAH. Minggu IV. Mei 1997, 16 - 22 Muharram 1418 H.
- Sekulerisasi Tata Pikir dan Perilaku Umat. HIKMAH. Minggu IV. Agustus 1997, 18 - 24 Rabiul Akhir 1418 H.
- Peran Ulama dalam Kemiliteran Indonesia. HIKMAH. 1 Nopember 1997 M, 6 Rajab 1418 H
- Pemasaran "Produk" dengan Label Agama. HIKMAH, Minggu I, Desember 1997 M, 4 - 10 Sya'ban 1418 H

- Pusat Dakwah Islam Selamat Datang dan Masjid Raya Balai Kota Bandung. PIKIRAN RAKYAT*, Senin, 15 Desember 1997, Nomor 84 Tahun XXXII.
- Mengembalikan Budaya Lebaran Jadi Idul Fitri. HIKMAH*. Minggu IV. Januari 1998, 24 - 29 Ramadhan 1418 H.
- Menyambut Hari Lahir NU Ke-76, Gus Dur Berlari Kencang Bagaikan Kijang. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Selasa (Wage), 26 Oktober 1999, 15 Rajab 1420 H.
- Berkat Rahmat Allah. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Selasa (Manis) 11 Desember 2001 M, 25 Ramadhan 1422 H.
- Puasa & Kemerdekaan. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Senin (Manis), 11 November 2002 M, 6 Ramadhan 1423 H.
- Keluarga Muslim Perlu Pahami Sejarah. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Jumat (Pahing) 16 Januari 2004 M, 23 Dzulqaidah 1424 H.
- Problematika Penentuan Hari Jadi Cimahi. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Kamis (Pon), 26 Juni 2003, 25 Rabiu Akhir 1424 H.
- Tol Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Selasa (Pahing), 19 Agustus 2003, 20 Jumadil Akhir 1424 H.
- Peran Kiai "2005" Tetap Diperhitungkan. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Kamis (Manis), 15 Desember 2005, 13 Dzulqaidah 1426 H.
- Tangis Rahim di Lembah Bakkah. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Jumat (Wage), 23 Desember 2005, 21 Zulqaidah 1426 H.
- Kebangkitan Islam dalam Perspektif Historis. PIKIRAN RAKYAT*. Bandung. Senin (Pahing), 30 Januari 2006, 30 Zulhijjah 1426 H.

### **Buku**

- Islam Untuk Disiplin Ilmu Sejarah*. Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1986.
- Menemukan Sejarah. Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. Mizan. Bandung, Muhamar 1416 H/Juni 1995 M.
- Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Yayasan Wira Patria Mandiri. Jakarta. 1996.
- Amerika Serikat Menolak Presiden Wanita*. Darul Falah. Jakarta. Jumadil Tsani 1420 H/Okttober 1999 M.
- Al-Qur'an dan Kelautan. Sejarah Maritim yang Terlupakan*. Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta, 2000 M.
- Api Sejarah (jilid 1 dan 2): Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan NKRI*. Bandung: Salamadani, 2009 dan 2010 M.



AHMAD MANSUR SURYANEGARA  
&  
NURUL NURHAETY  
1968

PRASASTI

PERNIKAHAN PERJUANGAN  
NURUL NURHAETY  
AHMAD MANSUR SURYANEGARA

TERAWALI DENGAN KESEDERHANAAN DI MASJID AGUNG BANDUNG  
2 Dzulqaidah 1387 – Kamis 1 Februari 1968

DALAM MENGARUNGI PERJALANAN KERUMAH TANGGAAN  
DIPENUHKAN COBAAN DAN TANTANGAN DIHADAPI DENGAN KETABAHAN  
DAN KESABARAN TIADA HINGGA

DITERIMA DENGAN KEIKHALASAN DAN KETAKWAAN  
DALAM CURAHAN RAHMAT DAN KARUNIA ALLAH MAHA KASIH  
MAHA SAYANG

MENYEBERANGKAN KELIMA PUTRA PUTRI AMANAH-NYA  
DARI MASA KECIL HINGGA BERUMAH TANGGA

**Yulia Damayanti & Zulkifli Azir**  
**Ade Dian Maulidianti & Saeful Hidayat**  
**Mohammad Yudi Yustiawan** & **Milly Ariyanti & Wawan Purnawan**  
**Deece Dewiyanti & Agus Denni**  
**Anna Dianawati**

Mamih, Nenek mengarungi takdir perjuangan kebersamaan berlangsung selama  
**43 TAHUN HIJRAH**                           **41 TAHUN MASEHI**  
**2 Dzulqaidah 1387**                      **Kamis**                            **1 Februari 1968**  
**30 Muhamarram 1430**                    **Selasa**                            **27 Januari 2009**

Hadirlah Keluarga Besar Dinasti Suryanegara  
Aa Ince Muhammad Arya Hakim, Ade Ince Siti Gina Aulia, Aa Andika Januar,  
Aa Mohammad Irfan Hidayat, Ade Adina Sophie Andini, Aa Mohammad Fadhil  
Adnanhasan, Ade Hanna Naufal Fadhila, Aa Gusman Mohammad Abiyasa, Ade  
Bisma Mohammad El Rumi dan seorang yang masih dalam penantian kelahiran  
sekitar lima bulan lagi Divana Arumi Putri  
Selamat Jalan Mamih Tersayang dan Nenek Tercinta  
Semoga Allah Maha Kasih Maha Sayang  
Selalu Melimpahkan Magfirah, Rahmat, dan Karunia-Nya.

27 Rajab 1366 Kamis 19 Juni 1947  
30 Muhamarram 1430 Selasa 27 Januari 2009

Mahakarya Fenomenal dari Ahmad Mansur Suryanegara

# MENEMUKAN SEJARAH

WACANA PERGERAKAN ISLAM DI INDONESIA



# api sejarah 2

MAHKARYA PERJUANGAN ULAMA DAN SANTRI  
DALAM MENEGAKKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



**R**ASULULLAH SAW dengan mendasarkan Wahyu Allah mengadakan Koreksi dan Memberonkan Kembali kesalahan Sejarah Kenabian dan Kerasulan. Kekeliruan menerima petunjuk Sejarah Kenabian dan Kerasulan yang berdampak sangat fatal, tersesot dan jadi Johiliyah. Bertingkah laku jauh dari kebenaran. Oleh karenanya Rosulullah saw mengadakan rekonstruksi Sejarah Kenabian dan Kerasulan yang benar dihimpun dalam Al Quran. Dilengkati, Kitab Suci Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf para Nabi dan Rasul yang benar sejorohnya, hanya ada di Al Quran. Rekonstruksi dan reinterpretasi Sejarah Kenabian dan Kerasulan dalam Al Quran, menjadi bukti dan fakta agama Allah sejak Nabi Adam as hingga Rosulullah saw, hanya satu agama Allah yakni Islam. Agama Tauhid menolak dan menyangkal ajaran Trinitas.

Agama Islam yang dibawakan oleh 25 Nabi dan Rasul ajarnya yang dituliskan dalam Al Quran, tidak terlalu lama dalam perhitungan tahun sejarah, 674 M sampai ke nusantara Indonesia di abad 7 pula, dengan jalan dompi. Terbukti telah adanya koloni niagawan Arab Islam di Pantai Barat Sumatera. Melalui pengusoan posor, Islam membuat orang pasar punya Bahasa Melayu Posor dan punya Huruf Arab Melayu. Keduanya menjadikan lahirnya peradaban Islam dari Pesontren hingga timbulnya 63 kekuasaan politik Islam atau kesultanan di seluruh nusantara. Memiliki bahasa persatuan Bahasa Indonesia dan Bendera Rasulullah saw, *Al Ahmar wal Abiod* - Merah Putih sebagai identitas Islam di seluruh nusantara Indonesia.

Islam menyelamatkan Pribumi Muslim dari malapetaka penjajah Barat. Ketika Paus Alexander VI dengan Perjanjian Tordesillas (1494) memberikan kewenangan kepada Kerajaan Kotolik Portugis dan Kotolik Spanyol menjajah dunia bagian barat dan timur. Menjajah menurut Kotolikisme sebagai *Mission Sacre – Misi Suci* – sekalipun dengan cara genocide – pemusnahan bangsa yang dijajah. Dirampok kekayaannya – gold. Dipaksakan alih agama jadi Nasrani – gospel. Bangsa Indian musnah, Aborigen jadi terbelakang kehidupannya. Tetapi penjajah terhadap Islam di Indonesia tidak berhasil memusnahkan Pribumi Islam.

Walaupun Kerajaan Protestan Belanda menyalurkan berupaya dalam ratusan tahun, tidak mampu menghancurkan Pribumi Islam. Bahkan terbalik, Kerajaan Protestan Belanda yang tumbang tersingkirkan. Demikian pula Keikosoran Shinto Jepang, tidak mampu membina bangsa Umat Islam Indonesia walaupun dengan berbagai cara. Antara lain Romusha – Kerja Paksa, Justru sebaliknya Ulama dan Santri memanfaatkan situasi Perang Asia Timur Raya, untuk memiliki organisasi militer modern, Tentara Pembela Tanah Air – Tentara Peto sekitar 68 Batalyon. Dan keseluruhan Komandan Batalyonnya adalah Ulama. Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi 9 Ramadhan 1364, lahirlah dari rahim Tentara Peta, Tentara Nasional Indonesia – TNI sebagai Anak Kandung Rakyat (5 Oktober 1945). Tekad bangsa Indonesia, penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Korena bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikedaikan, terumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda, TNI melancarkan Gerilya. Pemerintah Kabinet Parlementer mengadakan Diplomasi. Di bawah Perdana Menteri Sultan Sjahri (Partai sosialis Indonesia) diadakan Perundingan Linggajoti (1946). Hasilnya gagal. Dilanjut dengan Renville Agreement (1948) dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin (PKI) hasilnya gagal. Disusul dengan KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta (PNI) hasil gagal.

Tetapi setelah adanya Kudeta Westerling dengan APRA, 23 Januari 1950, atas inisiatif Mohammad Natsir dan Partai Politik Islam Masyumi, dengan Mosi Integral, terbentuklah untuk pertama kalinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI (17 Agustus 1950) dengan Presiden Soekarno (PNI), Wakil Presiden Mohammad Hatta (PNI), dan Perdana Menteri Mohammad Natsir (Masyumi).

Berkat Rohmat Allah Maha Kuasa, Indonesia Merdeka. Dan terbentuknya NKRI sebagai Maha Karya Mohammad Natsir dari Partai Politik Islam Masyumi, partainya seluruh umat Islam Indonesia. Demikian pula Lambang Negara Garuda Pancasila, disahkan oleh Perdana Menteri Dr. Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Politik Islam Masyumi (1950). Hanya dengan API SEJARAH 1 dan 2 akan menemukan fakta Maha Karya Ulama dan Santri dalam menegakkan NKRI dan Juang Jihad para Presiden Republik Indonesia (Soekarno - Joko Widodo).



Surya Dinasti

Penerbit triA pratama

office : jl. saturnus raya no. 27 margahayu raya  
bandung, 40286

studio : komplek GBA 2 blok b1 no. 15 cipagalo,  
bojongsoang, bandung,

telp/fax : +62 22 7533328, 0812 2001 9797

email: aching.triapratama@yahoo.com

ISBN 978-602-71237-2-4 (jil.2)



9 786027 123724



Penerbit Tria Pratama



@PenerbitTriaPra